



PERATURAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2010-2015





**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2010-2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

17. Peraturan

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7).
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010-2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi;
6. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

11. Kabupaten/Kota

11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP RPJM Daerah

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015;
 - b. Bahan penyusunan dan evaluasi RPJM Daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan tugas dan kewenangan kabupaten/kota dalam mencapai sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang termuat dalam RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015;
 - c. Pedoman Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun RKPD.

Pasal 3

SKPD melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Renstra SKPD.

BAB III SISTEMATIKA RPJM DAERAH

Pasal 4

Sistematika RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan lampiran Perda ini, terdiri dari :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X	PENUTUP

Pasal 5

Lampiran sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah;
- (2) Evaluasi terhadap hasil RPJM Daerah mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup provinsi.
- (3) Evaluasi sebagaimana ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan pembangunan jangka menengah nasional;
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJM Daerah hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 8

RPJM Daerah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Perda.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan RPJM Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015.

Pasal 11

Pasal 11

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Januari 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Januari 2011

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
ASISTEN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN,**

ttd

S I U N

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Ub. KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**



AMIR HAMZAH, SH.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2011**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2010 – 2015**

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan daerah telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai penjabaran dari Pasal 154 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

RPJM Daerah Provinsi digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015; bahan penyusunan dan evaluasi RPJM Daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan tugas dan kewenangan kabupaten/kota dalam mencapai sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang termuat dalam RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, serta pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJM Daerah tersebut dijabarkan ke dalam RKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Perda tentang RPJM Daerah Tahun 2010-2015 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antarruang, antarwaktu, maupun antarfungsi pemerintah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Perda tentang RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 terdiri dari 6 bab dan 11 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, sistematika penulisan RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah, serta lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda tentang RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 40

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
C. Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-4
D. Sistematika Penyusunan RPJMD	I-6
E. Maksud dan Tujuan.....	I-7
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
A. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
1. Luas dan Batas Administrasi	II-1
2. Topografi	II-4
3. Geologi dan Tanah	II-4
4. Hidrologi	II-5
5. Klimatologi	II-6
6. Potensi Pengembangan Wilayah	II-7
7. Kawasan Rawan Bencana.....	II-11
8. Demografi.....	II-12
B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-13
1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-13
2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-24
C. Aspek Pelayanan Umum.....	II-36
1. Aspek Pelayanan Umum.....	II-36
2. Pelayanan Penunjang	II-41
D. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-45
1. Kemampuan Ekonomi Daerah	II-46
2. Iklim Berinvestasi	II-47
BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	
A. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III-1
2. Neraca Daerah.....	III-5
B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-7
1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-8
2. Analisis Pembiayaan	III-12
C. Kerangka Pendanaan.....	III-13

	1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah	III-13
	2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah	III-16
	3. Kebijakan Umum Anggaran	III-17
	4. Pembiayaan Daerah	III-24
BAB IV.	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	
	A. Permasalahan Pembangunan Kalimantan Tengah.....	IV-1
	1. Masalah penyediaan infrastruktur pembangunan.....	IV-1
	2. Masalah pengembangan ekonomi lokal	IV-3
	3. Masalah kualitas dan keterjangkauan pendidikan	IV-3
	4. Masalah bidang kesejahteraan sosial	IV-4
	5. Masalah pengembangan kapasitas birokrasi.....	IV-4
	6. Masalah pengelolaan sumber daya alam	IV-5
	B. Isu Strategis	IV-6
	1. Kebijakan Internasional.....	IV-7
	2. Kebijakan Nasional (RPJMN)	IV-8
	3. Kebijakan Regional	IV-10
BAB V.	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	
	A. Visi	V-1
	B. Misi.....	V-2
	C. Tujuan dan Sasaran	V-10
BAB VI.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
	A. Arah Kebijakan.....	VI-1
	B. Strategi	VI-4
BAB VII.	BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
	A. Kebijakan Umum	VII-1
	B. Program Pembangunan Daerah	VII-5
BAB VIII.	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	
	A. Program Prioritas Untuk Pencapaian Visi Misi	VIII-1
	B. Program Prioritas Untuk Pencapaian Visi Misi dan Layanan Urusan Pemerintahan Daerah.....	VIII-11
BAB IX.	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	
	A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	IX-2
	B. Aspek Pelayanan Umum.....	IX-5
	C. Aspek Daya Saing Daerah.....	IX-29
BAB X.	PENUTUP	
	A. Pedoman Transisi.....	X-1
	B. Kaidah Pelaksanaan.....	X-3

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota.....	II-3
Tabel 2.2.	Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan pada Masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008.....	II-3
Tabel 2.3	Luas Areal Menurut Kemiringan Lahan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah	II-4
Tabel 2.4	Data Sungai di Provinsi Kalimantan Tengah	II-6
Tabel 2.5	Curah Hujan Beberapa Stasiun di Kalimantan Tengah Tahun 2009 (mm).....	II-7
Tabel 2.6	Penggunaan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2001 dan Tahun 2005.....	II-8
Tabel 2.7	Luas Areal dan Komoditas Perkebunan Kalimantan Tengah Tahun 2008.....	II-9
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2010.....	II-13
Tabel 2.9	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000, Tahun 2008 dan 2009 Menurut Lapangan Usaha, Laju Pertumbuhan serta Sumber Pertumbuhan	II-15
Tabel 2.10	Identifikasi Sektor Unggulan berdasarkan Analisis LQ terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2008.....	II-17
Tabel 2.11	Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Menurut Sektor Tahun 2005-2009 (persen).....	II-18
Tabel 2.12	PDRB dan Pendapatan Regional Perkapita Kalimantan Tengah Tahun 2004-2009.....	II-18
Tabel 2.13	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2007-2009.....	II-20
Tabel 2.14	PDRB, Laju Dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Triwulan III-2010 terhadap Triwulan III-2009 (<i>Cum to Cum</i>)	II-20
Tabel 2.15	Rekapitulasi Sumber Daya (Resources) Batubara Provinsi Kalimantan Tengah (Ton) Per 20 Agustus 2009.....	II-23
Tabel 2.16	Produksi Batubara Kalimantan Tengah Mulai Tahun 2007-2009.....	II-24
Tabel 2.17	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun.....	II-25
Tabel 2.18	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Di Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2009.....	II-27

Tabel 2.19	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Tengah Menurut Daerah, 2000-2010	II-29
Tabel 2.20	Garis Kemiskinan, Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2008-2009	II-30
Tabel 2.21	Partisipasi Perempuan di Bidang Pendidikan.....	II-31
Tabel 2.22	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2009 Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-31
Tabel 2.23	Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2009 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-32
Tabel 2.24	Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2009 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-33
Tabel 2.25	Rasio KDRT tahun 2008 dan 2009 Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-34
Tabel 2.26	Rasio KDRT Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 menurut Kabupaten/Kota	II-34
Tabel 2.27	Kondisi Jalan di Kalimantan Tengah per Juli 2010	II-36
Tabel 2.28	Tipe Permukaan Jalan di Kalimantan Tengah per Juli 2010.....	II-37
Tabel 2.29	Bandara di Kalimantan Tengah	II-38
Tabel 2.30	<i>Traffic Movement Table</i> Bandara Tjilik Riwut Tahun 2005 - 2010 (Per 30 September 2010)	II-38
Tabel 2.31	Data Kelistrikan Provinsi Kalimantan Tengah serta Produksi Kwh sampai Juli 2010.....	II-39
Tabel 2.32	Banyaknya Pelanggan PDAM dan Banyaknya Air Minum yang Disalurkan di Kalimantan Tengah Tahun 2005-2009	II-40
Tabel 2.33	Perkembangan Kelembagaan Perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah.....	II-41
Tabel 2.34	Dana Pihak Ketiga Menurut Kab/Kota Kalimantan Tengah Triwulan II-2010 (Rp Juta).....	II-42
Tabel 2.35	Realisasi Investasi PMDN Kalimantan Tengah Triwulan III-2010.....	II-44
Tabel 2.36	Realisasi Investasi PMA Kalimantan Tengah Triwulan III-2010.....	II-45
Tabel 2.37	Ekspor dan Impor Kalimantan Tengah Menurut Komoditas Januari -September 2010 (US\$ Juta)	II-47
Tabel 2.38	Jumlah PMA dan PMDN di Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Agustus 2010.....	II-48
Tabel 2.39	Perkembangan PMA/PMDN di Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Agustus 2010.....	II-48
Tabel 2.40	Rencana dan Realisasi Investasi PMDN di Provinsi Kalimantan Tengah s/d akhir Agustus 2010	II-49

Tabel 2.41	Rencana dan Realisasi Investasi PMA sampai akhir Agustus 2010	II-49
Tabel 2.42	UMR Daerah Tahunan Tahun 2008-2010	II-50
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2010	III-3
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007-2009	III-5
Tabel 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2007-2009	III-6
Tabel 3.4	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Tahun 2007-2009	III-8
Tabel 3.5	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007-2009.....	III-9
Tabel 3.6	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007-2009.....	III-10
Tabel 3.7	Proporsi Belanja Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007-2009.....	III-11
Tabel 3.8	Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008-2009.....	III-13
Tabel 3.9	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007-2009.....	III-13
Tabel 3.10	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015.....	III-20
Tabel 3.11	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015.....	III-21
Tabel 3.12	Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2011-2015	III-23
Tabel 5.1	Keterkaitan, Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Provinsi Kalimantan Tengah.....	V-16
Tabel 7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah	VII-30
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk Mencapai Visi dan Misi.....	VIII-2
Tabel 8.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Untuk Mencapai Visi dan Misi dan Layanan SKPD untuk Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah.....	VIII-12
Tabel 9.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	IX-3
Tabel 9.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum.....	IX-6
Tabel 9.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah.....	IX-30

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2004-2009.....	II-14
Grafik 2.2	Struktur Ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2002-2009	II-16
Grafik 2.3	Inflasi Palangka Raya, Sampit dan Indonesia Tahun 2000-2009.....	II-17
Grafik 2.4	Pertumbuhan Investasi dan Ekonomi (yoy) Tahun 2005-2010.....	II-44
Grafik 2.5	Nilai Ekspor dan Impor Kalimantan Tengah Tahun 1996-2008 (US \$ Juta)	II-46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Keterkaitan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya.....	I-5
Gambar 2.1 Peta Pembagian Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	II-2
Gambar 6.1 Keterhubungan antara Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran.....	VI-12

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Untuk itu, diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang handal dan berorientasi kerakyatan. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi.

Secara teknis, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah yang diselaraskan dengan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan daerah aktual. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah menjadi rujukan agenda pembangunan lima tahunan serta bagaimana alokasi pendanaan (APBD) dilakukan.

A. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan daerah telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai penjabaran dari Pasal 154 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan daerah ini disusun secara berjenjang untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, dalam suatu sistematisa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja

perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menerjemahkan visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah terpilih ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran dirumuskan kedalam program dan kegiatan prioritas yang akan diselenggarakan dalam jangka waktu 5 tahun.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

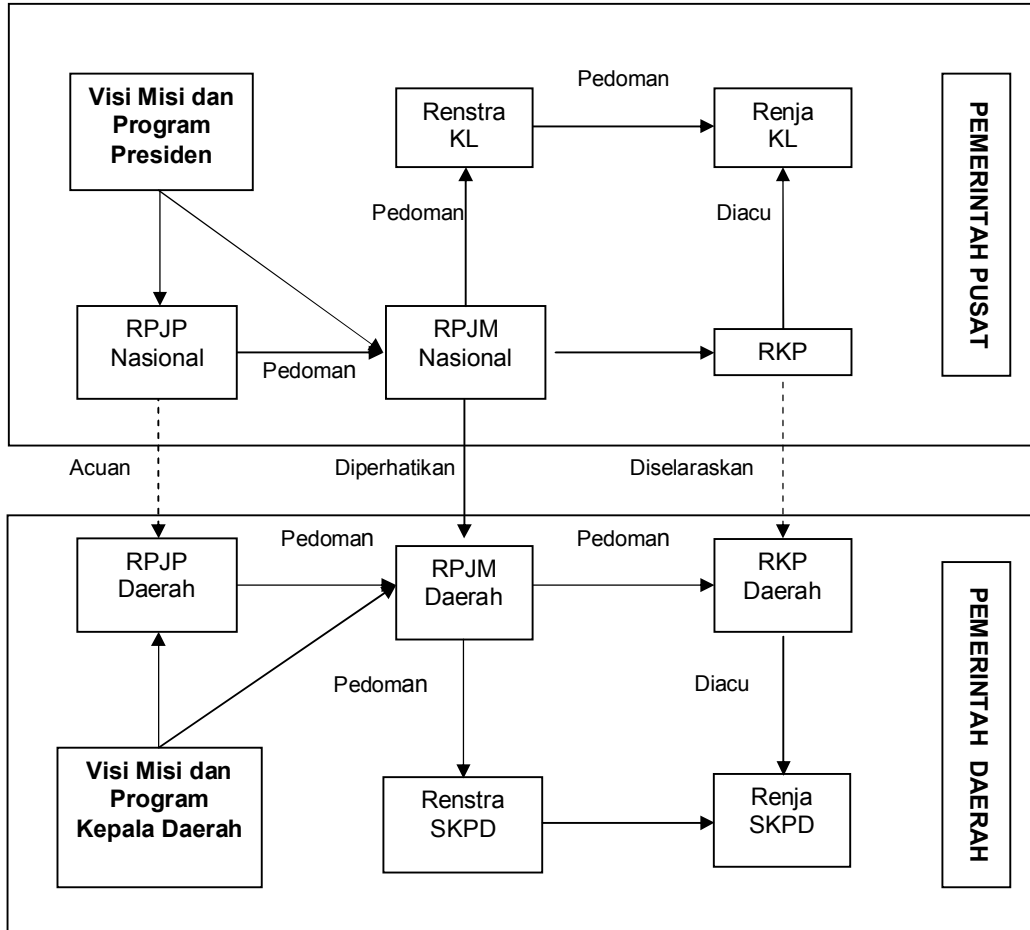
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

C. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya.

Gambar 1.1
Keterkaitan antara Dokumen RPJM Daerah
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih untuk periode 2010-2015 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhatikan RPJM Nasional. Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 - 2015 mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tata ruang.

D. Sistematika Penyusunan RPJMD

Sistematika RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang: latar, belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penyusunan RPJMD, dan maksud dan tujuan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, menguraikan tentang: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan, mencakup gambaran tentang: kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis, menguraikan tentang permasalahan pembangunan, dan isu strategis.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran, berisi tentang visi, misi, tujuan dan sasaran.

Bab VI Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan, menguraikan tentang arah kebijakan dan strategi yang tempuh dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, menguraikan tentang kebijakan umum dan program pembangunan daerah.

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas disertai Kebutuhan Pendanaan, berisi tentang program prioritas untuk pencapaian visi misi, serta program prioritas untuk pencapaian visi misi dan layanan urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan kebutuhan pendanaan.

Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah, menguraikan tentang indikator kinerja daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Bab X Penutup, menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

E. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun yang merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2010-2014. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2010-2015, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2. Tujuan

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2010-2015, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
- b. Merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan untuk periode Tahun Anggaran 2010-2015;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2010-2015.

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, merumuskan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2010-2015, serta perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2010-2015.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Aspek Geografi dan Demografi

1. Luas dan Batas Administrasi

Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ibukota Palangka Raya terletak antara 0°45' Lintang Utara, 3°30' Lintang Selatan dan 111° Bujur Timur. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas ketiga di Indonesia setelah Provinsi Papua dan Kalimantan Timur dengan luas wilayah mencapai ± 153.564 Km². Namun berdasarkan hasil penelitian terpadu yg telah melalui uji konsistensi Kementerian Kehutanan, total luas wilayah Kalimantan Tengah adalah 154.267,80 km² atau 15.426.780 Ha ,yang terdiri dari:

- Kawasan Hutan : 12.675.364 Ha atau 82,16%
- Kawasan Non Kehutanan : 2.751.416 Ha atau 17,84%

Batas Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat.

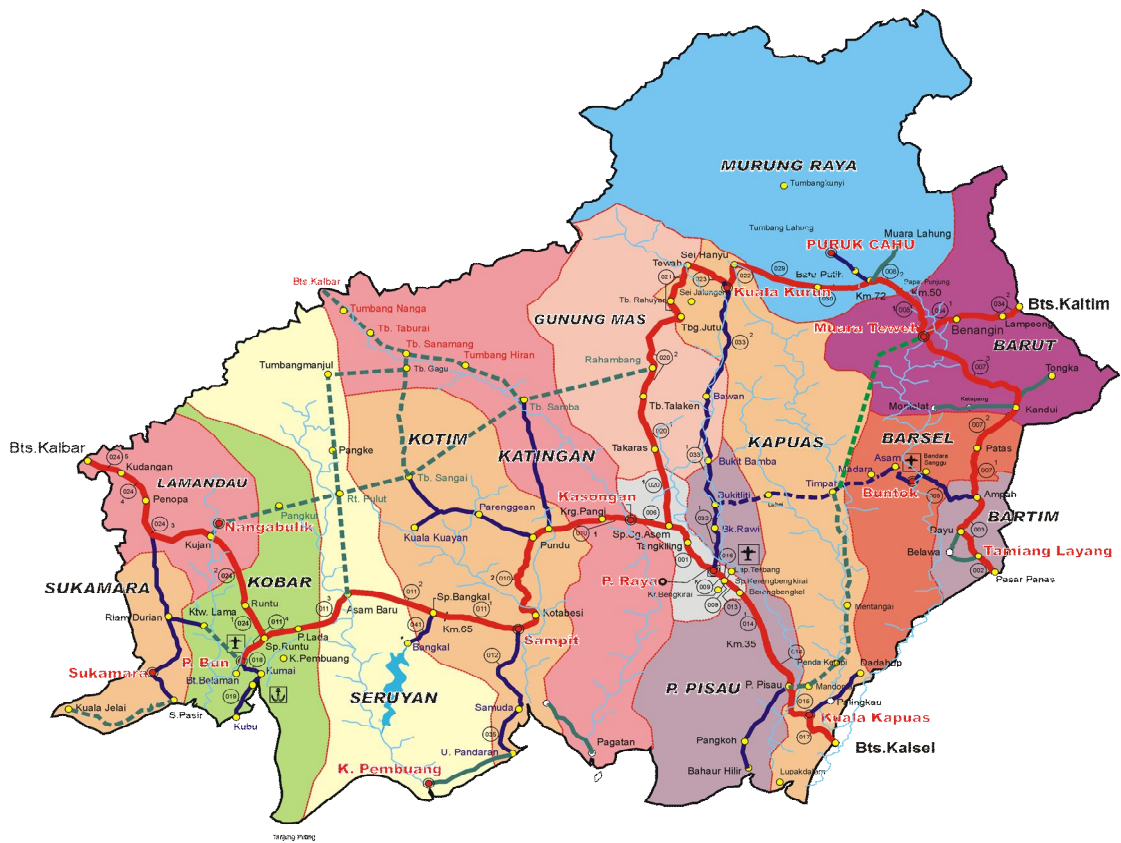
Pelaksanaan otonomi daerah sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang dan tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota beserta masyarakatnya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih luas, baik dalam bidang urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Sebagai implikasi dari otonomi tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah bertambah dari 5 kabupaten dan 1 kota menjadi 13 kabupaten dan 1 kota, yaitu:

- 1). Kota Palangka Raya dengan ibukota Palangka Raya.
- 2). Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ibukota Pangkalan Bun.
- 3). Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ibukota Sampit.
- 4). Kabupaten Kapuas dengan ibukota Kuala Kapuas.

- 5). Kabupaten Barito Selatan dengan ibukota Buntok.
- 6). Kabupaten Barito Utara dengan ibukota Muara Teweh.
- 7). Kabupaten Lamandau dengan ibukota Nanga Bulik
- 8). Kabupaten Sukamara dengan ibukota Sukamara.
- 9). Kabupaten Seruyan dengan ibukota Kuala Pembuang.
- 10). Kabupaten Katingan dengan ibukota Kasongan.
- 11). Kabupaten Gunung Mas dengan ibukota Kuala Kurun .
- 12). Kabupaten Pulang Pisau dengan ibukota Pulang Pisau.
- 13). Kabupaten Barito Timur dengan ibukota Tamiang Layang
- 14). Kabupaten Murung Raya dengan ibukota Puruk Cahu.

Peta wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada gambar 2.1. Sedangkan luas wilayah masing-masing kabupaten/kota ditampilkan pada tabel 2.1.

Gambar 2.1
Peta Pembagian Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah



Tabel 2.1
Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten / Kota	Ibukota/Kota	Luas Wilayah (Km ² .)	%
				Terhadap Luas Kalimantan Tengah
1.	Kotawaringin Barat	Pangkalan Bun	10.759	7,01
2.	Kotawaringin Timur	Sampit	16.496	10,74
3.	Kapuas	Kuala Kapuas	14.999	9,77
4.	Barito Selatan	Buntok	8.830	5,75
5.	Barito Utara	Muara Teweh	8.300	5,40
6.	Sukamara	Sukamara	3.827	2,49
7.	Lamandau	Nanga Bulik	6.414	4,18
8.	Seruyan	Kuala Pembuang	16.404	10,68
9.	Katingan	Kasongan	17.800	11,59
10.	Pulang Pisau	Pulang Pisau	8.997	5,86
11.	Gunung Mas	Kuala Kurun	10.804	7,04
12.	Barito Timur	Tamiang Layang	3.834	2,50
13.	Murung Raya	Puruk Cahu	23.700	15,43
14.	Palangka Raya	Palangka Raya	2.400	1,56
Kalimantan Tengah		Palangka Raya	153.564	100,00

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2010

Dari tabel 2.1. tersebut terlihat bahwa Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Katingan merupakan kabupaten terluas, masing-masing 23.700 Km². dan 17.800 Km². dimana luas kedua kabupaten tersebut mencapai 27 persen dari total luas wilayah Kalimantan Tengah, sedangkan Kota Palangka Raya mempunyai luas paling kecil, yakni 2.400 Km².

Adapun jumlah kecamatan, desa/kelurahan pada masing-masing kabupaten dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008

No.	Kabupaten/Kota	Jml Kecamatan (Buah)	Administrasi Pemerintahan (Buah)		
			Desa	Kelurahan	Jumlah
1.	Kotawaringin Barat	6	76	13	89
2.	Kotawaringin Timur	15	153	17	170
3.	Kapuas	12	153	14	167
4.	Barito Selatan	6	86	7	93
5.	Barito Utara	6	93	7	100
6.	Sukamara	5	29	3	32
7.	Lamandau	8	80	3	83
8.	Seruyan	14	97	3	100
9.	Katingan	13	154	7	161
10.	Pulang Pisau	8	93	2	95
11.	Gunung Mas	11	113	12	125
12.	Barito Timur	10	101	3	104
13.	Murung Raya	10	115	9	124
14.	Palangka Raya	5	0	30	30
Total		129	1.343	133	1.476

Sumber: Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

2. Topografi

Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah merupakan daerah dataran rendah dengan topografi yang praktis relatif datar mulai dari wilayah bagian selatan, tengah dan menerus dari barat hingga ke timur. Pada sektor tengah wilayah Kalimantan Tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi dari landai hingga kemiringan tertentu, dengan pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Sektor utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam, bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke timur. Titik tertinggi wilayah Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang dengan ketinggian mencapai 1660 Meter dpl.

Proporsi dari areal-areal yang bertopografi lebih berat banyak dijumpai di daerah-daerah yang berada di kawasan atas, sebaliknya areal-areal bertopografi lebih ringan terdapat di daerah-daerah yang berada di kawasan bawah. Tabel 2.3 berikut merinci keadaan topografi menurut kemiringan lahan di tiap-tiap kabupaten/kota.

Tabel 2.3
Luas Areal Menurut Kemiringan Lahan di Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kabupaten/Kota	Luas Menurut Kemiringan Lahan (Ha)				Jumlah	
		0-2%	2-15%	15-40%	>40%		
1.	Kotawaringin Barat	504.000	311.148	211.146	49.606	1.075.900	
2.	Kotawaringin Timur	549.861	637.717	408.074	53.948	1.649.600	
3.	Kapuas	675.713	541.654	256.225	26.308	1.499.900	
4.	Barsel	555.747	199.075	107.195	20.938	883.000	
5.	Barito Utara	58.057	228.914	493.677	49.352	830.000	
6.	Sukamara	168.361	132.843	78.422	3.074	382.700	
7.	Lamandau	16	26.806	386.455	228.123	641.400	
8.	Seruyan	660.440	377.128	442.477	160.355	1.640.400	
9.	Katingan	692.075	381.106	460.308	146.511	1.780.000	
10.	Pulang Pisau	850.324	49.376	0	0	899.700	
11.	Gunung Mas	38.692	395.651	465.419	180.638	1.080.400	
12.	Barito Timur	108.346	164.254	110.064	736	383.400	
13.	Murung Raya	15.894	91.433	1.190.015	1.072.658	2.370.000	
14.	Palangka Raya	177.036	62.526	4.609.915	0	240.000	
Kalimantan Tengah		(Ha)	5.054.562	3.599.631	4.609.915	2.092.292	15.356.400
		(%)	32,92	23,34	30,02	13,62	100,00

Sumber: Diolah dari Peta-peta Dasar Rupa Bumi Indonesia, Bakorsurtanal, 2005

3. Geologi dan Tanah

Dalam rangka pengembangan wilayah di Kalimantan Tengah, berbagai data dan informasi dasar terkait dengan potensi kesuburan tanah, bahan tambang, air tanah, daya dukung dan kerawanan fisik berbagai daerah di Kalimantan Tengah sangat dibutuhkan.

Berdasarkan formasi batuanannya, bumi Kalimantan Tengah berasal dari formasi-formasi geologis yang tergolong tua. Adapun penyebaran formasi batuanannya terdiri dari:

- Aluvium, endapan sungai dan laut, wilayah berawa dan bergambut.

- Batuan sedimen yang kaya akan mineral kuarsa.
- Batuan sedimen klastik, mineral kuarsa dengan sedikit material vulkanik.
- Batuan beku.
- Batuan vulkanik tua, menghasilkan jenis tanah yang kaya unsur hara.
- Batuan metamorf.

Terkait dengan potensi kesuburan tanah, wilayah-wilayah di Kalimantan Tengah tergolong memiliki potensi kesuburan rendah. Menurut tingkat kesuburannya, tanah di Kalimantan Tengah termasuk dalam kelas IV, V dan III dengan jenis tanah terdiri dari Organosol, Aluvial, Regosol, PMK, Podsol, Latosol, Litosol dan Laterit.

Sementara, terkait dengan sumber daya mineral, bumi Kalimantan Tengah mengandung:

- 1) Mineral Logam, berupa: emas primer, emas sekunder dan bijih besi. Ditinjau dari kelayakan ekonomisnya, mineral logam yang layak ditambang adalah emas. Selanjutnya, mengingat adanya peningkatan kebutuhan terhadap baja di pasar dunia kini maka nilai kelayakan ekonomis cadangan bijih besi bumi Kalimantan Tengah juga mengalami kenaikan.
- 2) Mineral Non Logam, berupa: pasir kuarsa, bentonit, kaolin, mika dan batu gamping. Mineral non logam yang memiliki prospek dan cukup luas penyebarannya adalah pasir kuarsa dan kaolin. Untuk mineral non logam jenis mika dapat ditemui khususnya di wilayah fisiografi perbukitan dan pegunungan. Sedangkan jenis batu gamping dapat dijumpai terutama di bagian timur, dekat perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3) Batu Permata, berupa intan dan kecubung. Batu permata jenis intan terdapat di aluvium pada aliran sungai Barito yang terletak di Puruk Cahu, sedangkan jenis kecubung dapat dijumpai di bagian utara Pangkalan Bun.
- 4) Mineral Energi, berupa minyak bumi dan batubara. Cadangan minyak bumi terdapat di sektor tengah yang berbatasan dengan Kalimantan Selatan. Sedangkan cadangan batubara terdapat di sektor timur laut, menerus ke selatan dan ke barat.

4. Hidrologi

Di wilayah Kalimantan Tengah mengalir beberapa sungai besar yang berhulu di sektor utara wilayah. Sejalan dengan kondisi fisiografi wilayah, sungai-sungai utama mempunyai kemiringan yang rendah hingga ke sektor tengah sehingga jangkauan pengaruh pasang air laut relatif jauh khususnya pada musim kemarau. Sebaliknya di musim hujan, air sungai sering meluap ke wilayah pedataran yang dilintasinya. Rawa gambut terdapat hingga ke sektor tengah. Pada bagian yang lebih hilir

terdapat rawa pasang surut. Wilayah lebih hulu dialiri anak-anak sungai berpola dendritik dengan kemiringan tinggi bahkan beriam.

Dengan demikian, kawasan hulu sangat berpotensi bagi pembangkit listrik tenaga air disamping sebagai sumber air mineral. Kawasan berawa di sektor tengah dan pesisir berfungsi sebagai retensi saat kelebihan air musim penghujan. Adapun perairan darat di Kalimantan Tengah, yakni: sungai, danau dan rawa dengan luas kurang lebih 141.965 Ha, potensial bagi perikanan darat. Sungai-sungai utama bisa dilayari hingga ke sektor tengah; sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4
Data Sungai di Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Sungai	Panjang		Rata-rata	
	Kilometer (Km)	Dapat dilayari (Km)	Kedalaman (Meter)	Lebar (Meter)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sungai Jelai	200	150	8	150
2. Sungai Arut	250	190	4	100
3. Sungai Lamandau	300	250	6	150
4. Sungai Kumai	175	100	6	250
5. Sungai Seruyan	350	300	5	250
6. Sungai Mentaya	400	270	6	350
7. Sungai Katingan	650	520	6	250
8. Sungai Sebangau	200	150	5	100
9. Sungai Kahayan	600	500	7	450
10. Sungai Kapuas	600	420	6	450
11. Sungai Barito	900	700	8	500

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2010

Sebagai akses pelayaran laut, Pantai laut di selatan Kalimantan Tengah merangkai 7 (tujuh) kabupaten mulai dari Sukamara di barat hingga Kapuas di timur dengan panjang garis pantai \pm 750 km. Selain itu, Kalimantan Tengah juga memiliki suatu kawasan andalan laut yang kaya akan potensi ikan, yakni perairan laut Kuala Pembuang. Perihal air tanah, Kalimantan Tengah memiliki potensi air tanah dangkal yang cukup besar, yakni pada wilayah fisiografi pedataran rendah.

5. Klimatologi

Iklm di Kalimantan Tengah termasuk dalam tipe A dengan iklim tropis yang lembab dan panas. Wilayah ini rata-rata mendapat penyinaran matahari lebih dari 50% sepanjang tahun dengan suhu udara berkisar 21,7°C – 33,2°C. Berdasarkan pengamatan tahun 2009 pada 5 stasiun, suhu maksimum rata-rata mencapai 32,08°C, sedangkan suhu minimum rata-rata 22,6°C. Suhu minimum terendah tercatat di Palangka Raya, sementara suhu maksimum tertinggi tercatat di Muara Teweh.

Oleh karena dekatnya wilayah Kalimantan Tengah ke khatulistiwa, perbedaan suhu antar tempat relatif kecil dan hanya dibedakan oleh perbedaan altitude. Suhu relatif siang hari berkisar antara 26°C – 30°C dan malam hari 15°C – 26°C. Keadaan suhu demikian menyebabkan tingginya intensitas penguapan. Oleh sebab itu, cenderung selalu terdapat awan aktif dan udara yang jenuh sehingga mengakibatkan seringnya turun hujan di Kalimantan Tengah. Curah hujan tahunan pada tahun 2008, di wilayah Kalimantan Tengah berkisar dari 2.323,3-3.037,2 mm, dimana nilai terendah berada di Pangkalan Bun dan tertinggi ada di Muara Teweh. Untuk jelasnya data curah hujan tahunan (mm) di Kalimantan Tengah tahun 2009 ditunjukkan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Curah Hujan Beberapa Stasiun di Kalimantan Tengah Tahun 2009 (mm)

Bulan	Stasiun				
	Pangkalan Bun	Sampit	Buntok	Muara Teweh	Palangka Raya
Januari	135,8	206,1	375,6	282,4	251,6
Pebruari	131,8	251,1	127,3	263,6	380,9
Maret	372,2	287,9	512,2	317,3	512,0
April	310,1	211,6	441,5	377,3	272,1
Mei	110	203,1	198,1	289,2	267,6
Juni	65,8	174,0	93,2	155,0	41,0
Agustus	94,5	35,6	136,6	50,9	11,8
September	15,6	50,2	9,1	13,1	30,9
Nopember	238,1	405,0	299	250,8	217,6
Desember	407,4	441,0	459,3	638,4	555,6
Rata-rata	194,0	215,2	232,3	253,1	230,9

Sumber : Koordinator Stasiun Meteorologi Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2009.

Dengan kondisi demikian maka aspek iklim untuk wilayah Kalimantan Tengah umumnya tidak menjadi kendala yang berarti bagi pengembangan usaha pertanian dalam arti luas, khususnya faktor suhu udara serta jumlah dan distribusi curah hujan tahunan.

6. Potensi Pengembangan Wilayah

a. Pola Penggunaan Lahan Areal Hutan

Kondisi-kondisi fisik wilayah, secara alamiah menentukan bahwa Kalimantan Tengah adalah bioregion hutan. Dengan penduduk yang masih jarang, pola penggunaan lahan di wilayah Kalimantan Tengah menampilkan dominasi kelompok penggunaan hutan. Hingga saat ini, dominasi hutan tampil hampir di semua kabupaten, termasuk juga di wilayah Kota Palangka Raya. Hanya di Kabupaten Barito Timur pola sedemikian tampil kurang dominan.

Untuk keadaan tahun 2001, penggunaan kelompok hutan mencakup 65 persen luas wilayah. Perkembangan pada tahun 2005, terlihat bahwa

kelompok penggunaan hutan masih 65 persen dari luas wilayah, namun pemukiman dan kelompok lahan pertanian bertambah cukup signifikan. Tabel 2.6 berikut menunjukkan rincian penggunaan lahan di Kalimantan Tengah tahun 2001 dan tahun 2005.

Tabel 2.6
Penggunaan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2001 dan Tahun 2005

No.	Penggunaan Lahan	Tahun 2001		Tahun 2005	
		Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)
1.	Hutan Lahan Kering Primer	4.541.439	29,57	4.540.245	29,57
2.	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.744.152	11,36	1.842.159	12,00
3.	Hutan Rawa Primer	864.759	5,63	865.459	5,64
4.	Hutan Rawa Sekunder	1.425.743	9,28	1.412.744	9,20
5.	Hutan Mangrove Primer	34.090	0,22	34.090	0,22
6.	Hutan Mangrove Sekunder	24.563	0,16	24.497	0,16
7.	Hutan Tanaman	197.570	1,29	197.570	1,29
8.	Belukar Rawa	1.186.936	7,73	1.136.765	7,40
9.	Rawa	24.671	0,16	24.671	0,16
10.	Badan Air (sungai, danau)	141.965	0,92	141.965	0,92
11.	Semak Belukar	3.997.661	26,03	3.774.076	24,58
12.	Pertambangan	1.339	0,01	1.339	0,01
13.	Tanah Terbuka	465.680	3,03	255.680	1,66
14.	Perkebunan (besar & rakyat)	445.669	2,90	808.094	5,26
15.	Pertanian lahan kering	170.780	1,11	186.265	1,21
16.	Sawah	74.765	0,49	85.346	0,56
17.	Permukiman	14.616	0,10	25.435	0,17
Kalimantan Tengah		15.356.400	100	15.356.400	100

Sumber : Data land-cover yang diekstrak dari citra LandSat tahun 2005
Revisi RTRWP Kalimantan Tengah, 2007

b. Pola Penggunaan Lahan Areal Non Hutan

Areal non hutan didominasi oleh jenis-jenis penggunaan lahan pertanian. Areal-areal penggunaan pertanian non perkebunan besar, bersama-sama dengan areal pemukiman, secara umum berkembang sepanjang sungai-sungai besar. Areal-areal perkebunan besar yang berkembang kemudian, memulai pola perkembangan berbeda, yakni tidak cenderung mengikuti sungai besar. Total perusahaan besar di Kalimantan Tengah berjumlah 336 unit dengan luas 4.200.418,982 Ha terdiri dari komoditi Kelapa Sawit 302 unit, Karet 30 unit dan Kelapa Sawit/Karet 4 unit. Perusahaan besar yang sudah operasional sebanyak 154 unit dengan luas 1.744.799,722 Ha terdiri dari komoditi Kelapa Sawit 144 unit, Karet 9 unit dan Kelapa Sawit/Karet 1 unit. Sedangkan perusahaan besar yang belum operasional sebanyak 182 unit dengan luas 2.455.619,260 Ha terdiri dari komoditi Kelapa Sawit 158 unit, Karet 21 unit dan Kelapa Sawit/Karet 3 unit. Adapun luas areal dan produksi tanaman perkebunan sampai tahun 2008 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Luas Areal dan Komoditas Perkebunan Kalimantan Tengah
Tahun 2008

No.	Komoditas	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Karet	413.244	251.053
2.	Kelapa	84.721	79.295
3.	Kelapa Sawit	876.217	1.449.302
4.	Kopi	7.184	2.489
5.	Lada	4.336	1.785
6.	Kakao	929	308
7.	Cengkeh	38	1
8.	Jambu Mete	1.294	49
9.	Pinang	469	93
10.	Aren	256	12
11.	Kemiri	1.347	17
12.	Kapuk Randu	61	4
13.	Nilam	509	63
14.	Mendong	987	47
JUMLAH		1.391.591	1.784.519

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, 2009.

Pertambahan areal pemukiman cukup fenomenal, yakni sebanyak 74 persen. Hal ini sejalan dengan fakta tumbuhnya pemukiman baru pada titik-titik strategis di jalur arteri jalan lintas Kalimantan, emplasemen-emplasemen di perkebunan, dan pembukaan kompleks perkantoran pada kota-kota kabupaten pemekaran. Sementara itu, luas semak belukar semakin berkurang secara signifikan.

Mengingat sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah dataran rendah dengan topografi yang praktis relatif datar, mulai dari wilayah di sektor selatan ke tengah yang menerus dari barat hingga ke timur. Luasnya lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah telah mendasari pelaksanaan proyek pengembangan lahan gambut (PLG) untuk pertanian tanaman pangan sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan nasional. Proyek ini berhasil membuka areal baru pertanian (ekstensifikasi), meningkatkan intensitas tanam, memanfaatkan lahan-lahan berawa, membangun berbagai jenis saluran, pintu-pintu air, mencetak sawah, jalan dan jembatan, sarana permukiman, serta mendatangkan transmigran, baik dari luar maupun lokal. Di areal PLG terdapat potensi lahan padi seluas 160.000 Ha yang setiap tahunnya menyumbangkan pangan tanaman padi bagi masyarakat di Kalimantan Tengah.

Sektor peternakan di Kalimantan Tengah pada umumnya masih digarap secara tradisional dalam bentuk usaha kecil atau rumah tangga. Namun demikian, melihat luasnya lahan rumput di Kalimantan Tengah dirasa cukup potensial untuk mengembangkan bisnis di bidang peternakan seperti sapi, kerbau, kambing/domba dan unggas.

Sebagai provinsi terluas ketiga di Indonesia, Kalimantan Tengah mempunyai kawasan hutan seluas 10.294.388,72 Ha atau sekitar 64,04 persen dari total luas wilayah. Luas hutan ini bisa dipastikan sangat menguntungkan Provinsi Kalimantan Tengah.

Di sektor pertambangan, Kalimantan Tengah memiliki potensi yang menjanjikan dan merata di seluruh daerahnya. Kalimantan Tengah memiliki sumber daya tambang bahan mineral dan bahan galian golongan C. Adapun bahan tambang yang sudah dimanfaatkan antara lain tambang emas, kaolin, batu gamping, batu bara, biji besi, mangan, mika dan pasir kuarsa. Bahan-bahan ini tersebar di beberapa daerah, dengan kandungan yang relatif besar dan potensial untuk dikembangkan secara lebih modern yang dapat menghasilkan nilai ekspor untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD). Sementara itu, bahan galian golongan C di antaranya adalah batu, kerikil, pasir urug dan tanah liat.

Di sektor industri, terutama yang berbasis sumber daya alam, lebih khusus lagi industri pengolahan hasil hutan dan tanaman pangan, Kalimantan Tengah memiliki potensi yang cukup baik. Industri kayu lapis dan produk kayu ikutannya merupakan andalan utama Provinsi Kalimantan Tengah. Industri olahan seperti rotan, karet dan kayu telah dipasarkan secara luas, baik untuk kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.

Kalimantan Tengah juga berpotensi baik dalam bidang pariwisata, terutama wisata alam yang berupa wisata hutan atau cagar alam antara lain Bukit Raya, kelompok hutan monumental dan pantai Ujung Pandaran di Kotawaringin Timur; Bukit Sapat Hawung di Barito Utara; suaka alam, darat, laut dan pantai yang indah serta alami di Kotawaringin Barat; air terjun Malau Besar dan Pauras di Barito Utara dan Bukit Tangkiling di Palangka Raya. Daerah-daerah tersebut adalah beberapa obyek wisata alam yang indah di daerah Kalimantan Tengah.

Sebagai tujuan investasi, Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang diantaranya Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya, Bandara Iskandar di Pangkalan Bun, Bandara H. Asan di Sampit serta bandara-bandara lainnya. Demikian juga halnya dengan pelabuhan dimana terdapat beberapa pelabuhan yakni Pelabuhan Kumai, Pelabuhan Pangkalan Bun, Pelabuhan Sampit, Pelabuhan Teluk Segintung di Kuala Pembuang, dan Pelabuhan Batanjung/Lupak Dalam. Dengan tersedianya sarana infrastruktur tersebut memberikan kemudahan bagi para investor dalam maupun dari luar negeri untuk berkunjung ke Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu sumber daya alam yang tak kalah memikat di Bumi Tambun Bungai adalah perkebunan Kelapa Sawit. Sektor ini dari tahun ke tahun terus memikat para investor. Pada 2010, terhampar 969.282 Ha Kebun Sawit, dengan jumlah

perusahaan sebanyak 148 unit. Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB Kalimantan Tengah pada tahun 2009 mencapai 12,21 persen, dimana sebagian besar merupakan kontribusi dari perkebunan Kelapa Sawit.

Di sektor pertambangan, sebagaimana di uraikan di atas, secara geologis, Kalimantan Tengah terdiri atas satuan batuan beku (25%), bantuan sedimen (65%) dan batuan metamorf (10%). Ketiga satuan batuan ini membawa potensi bahan galian tambang yang beragam. Pada satuan beku ini, terdapat di bagian utara Kalimantan Tengah dan dikenal sebagai "*Borneo Gold Belt*", tersimpan potensi emas dan perak serta beberapa jenis logam dasar. Satuan sedimen terdiri atas tiga cekungan besar masing-masing Cekungan Barito, Cekungan Melawi dan Cekungan Kutai. Ketiga cekungan ini mengandung cebakan minyak dan gas bumi, batubara, logam mulia dan logam dasar sekunder. Kondisi ini menarik para investor untuk berinvestasi di bumi Kalimantan Tengah. Ini terlihat dari jumlah perizinan dan kontrak yang ada mulai dari enam Kontrak Karya (KK), 15 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), 289 Kuasa Pertambangan (KP), 60 Surat Izin Pertambangan Rakyat Daerah, 23 Surat Izin Pertambangan Rakyat (WPR).

Di lokasi seluas 87.537,94 Ha tersedia potensi 3,5 miliar ton batubara, terdiri atas 1.6064 Miliar Ton dengan klasifikasi tereka, dan 684.931 Juta Ton dengan klasifikasi terukur. Meski Pemerintah Kalimantan Tengah telah menargetkan jumlah produksi sektor pertambangan sebesar 5 juta ton per tahun, namun realisasinya baru mencapai 2 Juta Ton per tahun. Hal ini disebabkan karena adanya kendala angkutan. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah Provinsi merencanakan pembangunan jalan kereta api dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), dimana untuk tahap I akan dibangun pada ruas Puruk Cahu – Bangkuang sepanjang 185 km, yang saat ini sudah memasuki tahapan penawaran/*bidding*.

7. Kawasan Rawan Bencana

Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 153,564 Km² (15.356.400 Ha) memiliki lahan gambut di wilayah selatan dengan luas mencapai 3.010.640 Ha, dengan kedalaman 0 – 2 Meter seluas 1.496.875 Ha dan kedalaman di atas 2 Meter seluas 1.513.765 Ha. Lahan gambut ini merupakan daerah rawan kebakaran karena telah mengalami degradasi akibat pembukaan kanal untuk proyek PLG.

Kejadian kebakaran pada tahun 1997 di Kalimantan Tengah tercatat sebagai suatu kejadian kebakaran yang terparah sepanjang kurun waktu 20 tahun belakangan ini, dimana tanah gambut yang dulunya tidak mudah terbakar karena selalu tergenang air, kini sudah menjadi bagian yang sulit dihindarkan dari api.

Di Provinsi Kalimantan Tengah, dilaporkan tidak kurang dari 2,7 Juta Ha lahan dan hutan yang telah terbakar (Aldhous, 2004), sedangkan pada periode tahun 2002 yang dimulai pada bulan Juli sampai Oktober dilaporkan seluas 790.000 Ha terbakar (Siegert et al. 2002). Dari pengamatan lapangan awal Oktober 2006, sebagaimana dilaporkan oleh dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, kebakaran tahun 2006 seluas 14.930 Ha umumnya terjadi pada areal semak belukar, dan ini menyebabkan masalah asap yang cukup signifikan khususnya pada kawasan yang berakses tinggi seperti di sekitar jalur jalan lintas Kalimantan poros selatan.

8. Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumber-daya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya manusia merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai input dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

a. Gambaran Umum Penduduk Kalimantan Tengah

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 2.202.599 orang, yang terdiri atas 1.147.878 laki-laki dan 1.054.721 perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga (KK) tercatat sebanyak 550.650 KK. Dari hasil Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) tersebut, penyebaran penduduk Kalimantan Tengah tampak masih bertumpu pada beberapa kabupaten induk.

Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas dan Kotawaringin Barat adalah tiga Kabupaten dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 373.842 orang, 329.406 orang, dan 235.274 orang.

Kabupaten Katingan merupakan Kabupaten pemekaran dengan jumlah penduduk terbanyak diantara kabupaten pemekaran lainnya di Kalimantan Tengah yakni sebanyak 141.350 orang.

Dengan luas wilayah Kalimantan Tengah sekitar 153.564 kilometer persegi yang didiami oleh 2.202.599 orang, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kalimantan Tengah adalah sebanyak 14 orang per kilometer persegi. Kota Palangka Raya sebagai ibukota provinsi memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi, yakni sebanyak 82 orang per kilometer persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Murung Raya yakni sebanyak 4 orang per kilometer persegi.

b. Sex Ratio Penduduk Kalimantan Tengah

Data *Sex Ratio* berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa *sex ratio* penduduk Kalimantan Tengah adalah sebesar 109, yang artinya adalah penduduk laki-laki di provinsi ini 9 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuannya. *Sex ratio* terbesar terjadi di Kabupaten Seruyan yakni sebesar 116, sedangkan yang terkecil terjadi di Kabupaten Kapuas, Barito Selatan dan Palangka Raya yakni sebesar 104. Informasi tentang jumlah penduduk, per jenis kelamin dan *sex ratio* diuraikan pada tabel 2.9

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2010.

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan	Sek Ratio
Kotawaringin Barat	124.475	110.799	235.274	112
Kotawaringin Timur	197.213	176.629	373.842	112
Kapuas	167.945	161.461	329.406	104
Barito Selatan	63.169	60.822	123.991	104
Barito Utara	62.689	58.190	120.879	108
Sukamara	23.821	21.017	44.838	113
Lamandau	33.436	29.340	62.776	114
Seruyan	74.988	64.455	139.443	116
Katingan	73.591	67.759	141.350	109
Pulang Pisau	62.385	57.245	119.630	109
Gunung Mas	51.385	45.453	96.838	113
Barito Timur	49.984	47.096	97.080	106
Murung Raya	50.428	46.601	97.029	108
Palangka Raya	112.369	107.854	220.223	104
Kalimantan Tengah	1.147.878	1.054.721	2.202.599	109

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah, tahun 2010

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Masing-masing fokus tersebut dibahas pada bagian di bawah ini:

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Provinsi Kalimantan Tengah, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup: masalah pertumbuhan ekonomi, perkembangan PDRB sektoral, struktur perekonomian, inflasi, perkembangan PDRB per kelompok sektor,

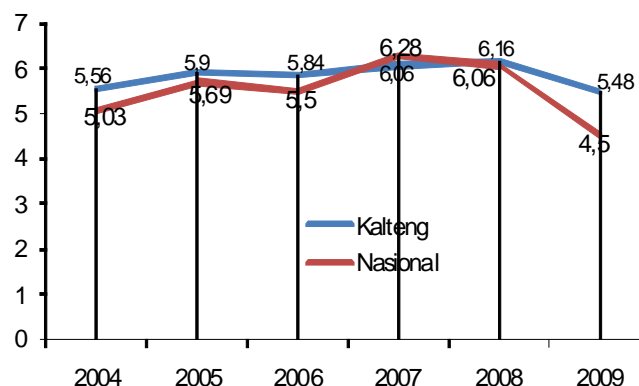
pendapatan per kapita; produktifitas tenaga kerja, PDRB menurut penggunaan, dan gambaran singkat sektor.

a. Pertumbuhan PDRB Regional

Pertumbuhan ekonomi regional sangat erat hubungannya dengan masing-masing sektor yang membentuknya. Hal ini berkaitan erat dengan kontribusi masing-masing sektor yang berpotensi besar maupun sektor-sektor yang masih perlu mendapat perhatian lebih untuk dijadikan prioritas pengembangan sehingga diharapkan dapat menjadi sektor yang mempunyai peranan lebih besar dimasa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan pemerataan yang sebaik mungkin. Laju pertumbuhan PDRB tahun 2009 sebesar 5,48 persen. Sumbangan terbesar PDRB tahun 2009 atas dasar Harga Berlaku adalah dari sektor pertanian yaitu sebesar Rp. 10.241,39 Milyar dan atas dasar Harga Konstan (tahun 2000) sebesar Rp. 5.700,23 Milyar.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 relatif mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 sebesar 5,84 persen., tahun 2007 sebesar 6,06 persen. sementara pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 6,28 persen.. Pada tahun 2009 meskipun ada pengaruh krisis ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah masih dapat mencapai 5,48 persen. atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,5 persen.. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2010 sampai dengan Triwulan III (*Cum to Cum*) berdasarkan data BPS Kalimantan Tengah tahun 2010 adalah sebesar 6,42 persen.

Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah
Tahun 2004 – 2009



Sumber : Hasil Analisis, 2010.

b. Pertumbuhan PDRB Sektoral

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Perkembangan PDRB secara sektoral tahun 2008 dan 2009 dilihat dari laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan sebagaimana diuraikan pada tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000 Tahun 2008 dan 2009
Menurut Lapangan Usaha, Laju Pertumbuhan serta Sumber Pertumbuhan

LAPANGAN USAHA	Atas dasar harga berlaku (Milyar Rupiah)		Atas dasar harga konstan (Milyar Rupiah)		Laju Pertumbuhan (Persen)	Sumber Pertumbuhan (Persen)
	2008	2009	2008	2009	2009	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	9.539,94	10.241,39	5.465,63	5.700,23	4,3	1,4
2. Pertambangan dan Penggalian	2.325,44	2.695,84	1.459,63	1.587,20	8,7	0,8
3. Industri Pengolahan	2.721,54	2.997,93	1.352,24	1.380,59	2,1	0,2
4. Listrik, Gas & Air Bersih	227,45	238,05	76,22	78,82	3,4	0,0
5. Bangunan	1.950,64	2.181,85	900,15	983,26	9,2	0,5
6. Perdagangan, hotel & Restoran	6.463,68	7.761,57	2.997,53	3.249,03	8,4	1,5
7. Pengangkutan dan Komunikasi	3.318,66	3.433,97	1.440,11	1.419,32	-1,4	-0,1
8. Keuangan, Persew & Jasa Pers.	1.823,73	2.087,27	856,82	970,83	13,3	0,7
9. Jasa-jasa	4.067,19	4.586,11	2.177,18	2.272,89	4,4	0,6
P D R B	32.438,26	36.223,98	16.725,51	17.642,17	5,5	5,5

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2010.

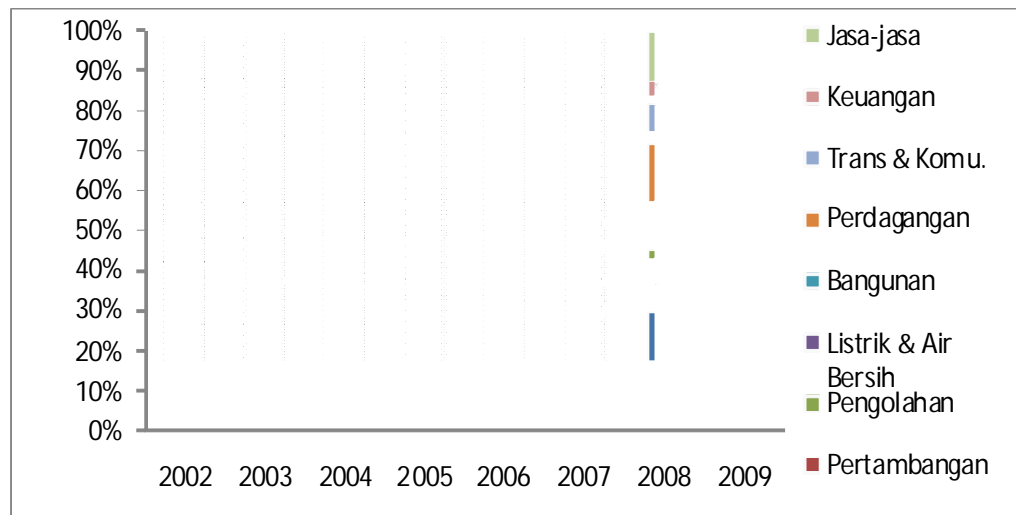
Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2009, sektor yang tumbuh relatif tinggi (8,4%) dan memberikan kontribusi paling besar (1,5%) terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 adalah sektor perdagangan, hotel & restoran. Sektor bangunan meskipun mengalami pertumbuhan paling tinggi namun hanya berkontribusi sebesar 0,5 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara sektor pertanian mampu tumbuh 4,3 persen dan memberikan kontribusi 1,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2009.

c. Struktur Perekonomian

Sektor pertanian merupakan sektor yang terbesar andilnya dalam kegiatan perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB. Pada tahun 2009, sektor pertanian memberi sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB, yaitu 28,2 persen. Kemudian disusul secara berturut-turut oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar 21,4 persen, sektor jasa-jasa 12,6 persen, sektor

pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,4 persen , dan sektor industri pengolahan sebesar 8,2 persen. Sementara sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 7,4 persen, sektor bangunan 6,0 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa 5,7 persen, serta listrik dan air bersih sebesar 0,6 persen. Struktur ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2009 dapat dilihat pada Grafik 2.2 berikut.

Grafik 2.2
Struktur Ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2002-2009



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2010.

d. Inflasi

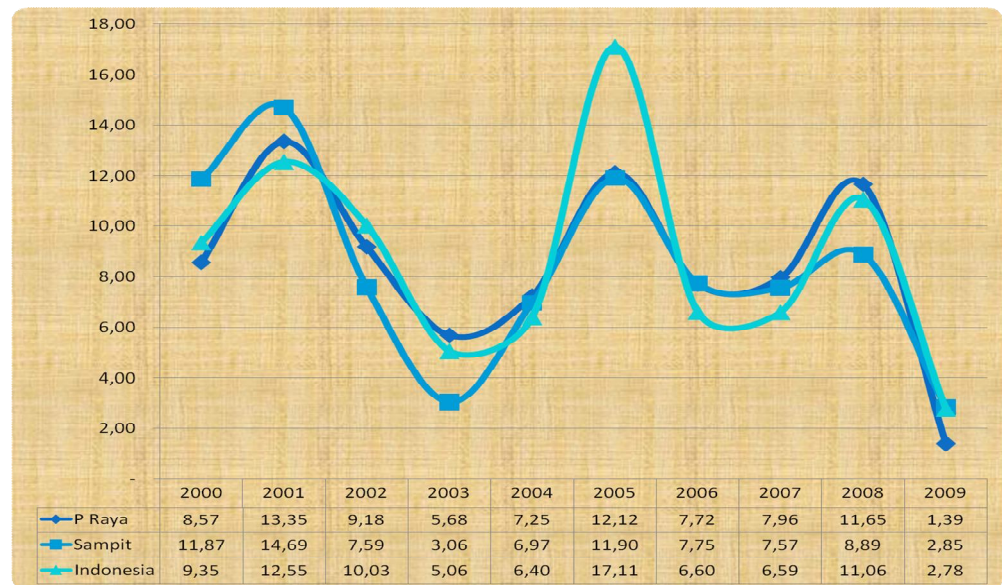
Fluktuasi harga barang-barang kebutuhan pokok tercermin dari perkembangan laju inflasi suatu daerah. Pada bulan Oktober 2010, Kota Palangka Raya terjadi deflasi sebesar -0,59 persen. Laju inflasi tahun kalender tahun 2010 sampai dengan Bulan Oktober adalah 6,70 persen dan laju inflasi “year on year” (Oktober 2010 terhadap Oktober 2009) Kota Palangka Raya sebesar 7,69 persen.

Di Kota Sampit pada bulan Oktober 2010 mengalami inflasi sebesar 1,01 persen. Laju inflasi tahun kalender 2010 sebesar 7,50 persen dan laju inflasi “year on year” (Oktober 2010 terhadap Oktober 2009) Kota Sampit sebesar 7,92 persen.

Pada bulan Oktober 2010, Kalimantan Tengah yang merupakan gabungan dari Kota Palangka Raya dan Kota Sampit mengalami inflasi sebesar 0,10 persen. Laju inflasi tahun kalender 2010 sebesar 7,05 persen, sedangkan laju inflasi “year on year” (Oktober 2010 terhadap Oktober 2009) Kalimantan Tengah sebesar 7,79 persen.

Perkembangan inflasi kota Palangka Raya dan Sampit serta Indonesia selama sepuluh tahun terakhir disajikan dalam grafik 2.3.

Grafik 2.3
Inflasi Palangka Raya, Sampit & Indonesia
Tahun 2000-2009



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2010.

e. Perkembangan PDRB per Kelompok Sektor

Indeks *Location Quotient* dapat digunakan untuk melihat sektor-sektor yang berpotensi di suatu daerah untuk dikembangkan, yang memungkinkan dapat menjadi tumpuan perekonomian suatu daerah. Sektor-sektor perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai nilai *Location Quotient* (LQ) lebih cukup besar yaitu sektor pertanian, jasa-jasa serta pengangkutan dan komunikasi. Hal ini berarti bahwa tiga sektor tersebut merupakan sektor unggulan yang dimiliki Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat dioptimalkan pengelolaannya. Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki lahan cukup luas dan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, di harapkan sektor ini dapat mendongkrak peningkatan pendapatan, dan bisa menaikkan tingkat kesejahteraan penduduk.

Tabel 2.10
Identifikasi Sektor Unggulan berdasarkan Analisis LQ
terhadap PDRB atas dasar Harga Berlaku tahun 2008

Sektor	Analisa LQ
1 Pertanian	2,76
2 Pertambangan & Penggalian	0,20
3 Industri Pengolahan	0,29
4 Listrik, Gas & Air Bersih	2,09
5 Bangunan	1,67
6 Perdagangan, Hotel & Restoran	2,04
7 Pengangkutan & Komunikasi	2,21
8 Keuangan, persewaan, & js. Prsh.	2,06
9 Jasa-Jasa	2,81
Total	1,00

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2009.

Memperhatikan tabel pertumbuhan ekonomi menurut sektor, pertumbuhan tahun 2009 melambat dibanding tahun 2008. Sementara sektor keuangan; konstruksi dan pertambangan tumbuh paling tinggi tahun 2009, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.11
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah menurut Sektor
Tahun 2005-2009 (Persen)

Sektor	2005	2006	2007	2008	2008
1. Pertanian	1,07	2,66	1,10	(0,57)	4,29
2. Pertambangan dan Penggalian	74,79	34,45	12,39	6,69	8,47
3. Industri Pengolahan	1,47	(1,62)	6,44	3,72	2,10
4. Listrik dan Air Bersih	5,31	1,80	7,09	2,99	3,41
5. Bangunan	7,40	8,21	13,43	13,42	9,23
6. Perdagangan, hotel dan restoran	3,33	5,29	4,94	9,91	8,39
7. Pengangkutan dan Komunikasi	4,61	8,47	7,32	16,42	9,43
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	11,55	9,50	16,45	9,43	13,31
9. Jasa-jasa	5,00	3,09	10,63	10,48	4,40
PDRB	5,90	5,84	6,06	6,16	5,48

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2010.

f. Pendapatan Perkapita

Perkembangan perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah yang diikuti dengan penambahan jumlah penduduk akan berdampak pada PDRB perkapita. Tingkat kesejahteraan suatu daerah salah satunya dapat tercermin dari besarnya PDRB perkapita, meskipun angka tersebut tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata, karena angka ini hanya merupakan rata-rata.

PDRB perkapita penduduk Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan harga konstan tahun 2000 mengalami peningkatan terus menerus sejak tahun 2004 hingga tahun 2009. Pada tahun 2004 PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Tengah hanya sebesar Rp 7,1 Juta rupiah meningkat menjadi Rp 8,5 Juta rupiah pada tahun 2009. Rata-rata kenaikan pendapatan per kapita sejak tahun 2004 sampai 2009 adalah sebesar 3,63 persen.

Tabel 2.12
PDRB dan Pendapatan Regional Perkapita Kalimantan Tengah
Tahun 2004-2009

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Persentase Kenaikan	Atas Dasar Harga Konstan 2000	Persentase Kenaikan
2004	9.783,03	14,47	7.084,99	3,70
2005	10.957,84	12,01	7.329,17	3,45
2006	12.634,77	15,30	7.665,43	4,59
2007	13.771,08	8,99	7.767,33	1,33
2008*)	15.767,36	14,50	8.129,82	4,67
2009*)	17.366,79	10,14	8.458,15	4,04

*) Angka Sementara

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

Pada tahun 2004-2009, pertumbuhan PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Tengah berfluktuasi. Pertumbuhan PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Tengah mencapai titik terendah pada tahun 2007 yakni sebesar 1,33 persen, sedangkan titik tertinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar 4,67 persen.

g. Produktivitas tenaga kerja

Kemajuan di bidang pembangunan akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian provinsi Kalimantan Tengah. Struktur ekonomi mengalami pergeseran yang relatif lambat dari ekonomi agraris tradisional menjadi perekonomian yang lebih maju dengan struktur lebih kokoh, yaitu perekonomian yang didukung oleh industri makin kuat dan sektor jasa yang tangguh sehingga perekonomian relatif stabil. Belum berkembangnya sektor industri dan jasa menyebabkan ekonomi masih mengandalkan sector primer. Struktur perekonomian yang disusun oleh sektor *tradeable* biasanya tidak begitu bermasalah dengan kondisi tenaga kerja. Dengan karakteristik yang padat karya, sektor ini secara bertahap akan selalu membutuhkan suplay tenaga kerja. Kontras dengan kondisi tersebut, struktur perekonomian yang disusun oleh sektor *non tradeable* biasanya akan cenderung rapuh dan tidak ramah terhadap penyerapan tenaga kerja. Sektor ini biasanya mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu yang harus dimiliki oleh calon tenaga kerjanya. Pada bagian lain, struktur perekonomian yang demikian biasanya didominasi oleh tenaga kerja informal. Sektor *tradeable* terdiri dari sektor pertanian, pertambangan dan industri merupakan sektor-sektor padat karya, sedangkan lainnya adalah sektor *nontradeable* yaitu sektor padat modal. Pertumbuhan sektor *tradeable* di Kalimantan Tengah cenderung meningkat, sedangkan sektor *nontradeable* cenderung melambat.

Beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi yang didukung laju pertumbuhan penduduk yang semakin kecil menimbulkan perubahan struktur lapangan kerja yang seimbang dan produktif. Peningkatan produktivitas seluruh perekonomian, peningkatan produktivitas tenaga kerja masyarakat per sektor dan efisiensi guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang terus produktif menyebabkan tingkat produktifitas tenaga kerja perlu dihitung di masing-masing sektor.

Komposisi angkatan kerja menurut kelompok umur di Kalimantan Tengah didominasi penduduk yang berumur 20 sampai dengan 44 tahun. Sebagian besar (60%) penduduk berumur 15 tahun keatas bekerja di sektor Pertanian, sedangkan sektor terkecil penyerapannya adalah sektor keuangan 0,74 persen.

Relatif masih rendahnya tingkat pendidikan SDM pekerja, terlihat dari tingkat pendidikan penduduk yang bekerja itu sendiri. Hampir 78,35 persen penduduk yang bekerja diberbagai sektor, memiliki tingkat pendidikan dasar yaitu tidak/belum tamat SD/ sederajat hingga tamat SLTP/ sederajat.

Tabel 2.13
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2007-2009

No.	Pendidikan Tertinggi /Yang Ditamatkan/ <i>Education Attainment</i>	2007	2008	2009
1.	Tidak/Belum pernah Sekolah/ <i>Not/Never at School</i>	12.833	18.764	17.938
2.	Tidak/Belum Tamat SD/ <i>No/Not Yet Completed Primary School</i>	97.790	125.405	173.000
3.	Sekolah Dasar/ <i>Primary School</i>	424.189	429.632	351.140
4.	SMTP Umum/ <i>General Junior High School</i>	222.017	192.060	212.108
5.	SLTA/ <i>Senior High School</i>	152.622	162.852	179.842
6.	Diploma/Akademi/ <i>Univ/S2/S3</i>	56.559	53.485	64.939
Jumlah/Total		966.010	982.198	998.967

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

h. PDRB menurut penggunaan

Produk Domestik Regional Bruto menurut penggunaan memperlihatkan komposisi penggunaan barang dan jasa baik yang dihasilkan didalam wilayah provinsi Kalimantan Tengah maupun barang dan jasa yang berasal dari luar provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2.14
PDRB, Laju dan sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Triwulan III-2010 terhadap Triwulan III-2009 (*Cum to Cum*)

No	Jenis Penggunaan	Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)		Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah)		Laju Pertumbuhan (Persen)	Sumber Pertumbuhan (Persen)
		Triwulan III-2009	Triwulan III-2010	Triwulan III-2009	Triwulan III-2010	III-2010	III-2010
1	Konsumsi Rumah Tangga	14.545,59	15.846,19	6.111,78	6.433,79	5,27	2,43
2	Konsumsi Pemerintah	4.643,29	5.356,00	2.209,56	2.283,80	3,36	0,56
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.68,80	13.643,50	4.962,18	5.388,33	8,18	3,07
4	Ekspor	8.819,83	11.292,77	4.593,15	5.572,15	21,31	7,39
5	Impor	12.829,23	15.594,41	7.024,17	7.024,17	7,11	3,52
PDRB		26.976,78	30.642,12	14.092,63	14.092,63	6,42	6,42

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2010.

Dari tabel PDRB diatas, terlihat bahwa penggunaan untuk konsumsi rumah tangga mencapai Rp. 15.846,19 Milyar dari total Rp. 30.624,12 Milyar atau 52 persen sedangkan untuk pembentukan modal tetap bruto mencapai Rp. 13.242,71 Milyar dari total Rp. 30.624,12 Milyar atau 44 persen. Namun demikian dari segi pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto pada triwulan III 2010 mampu tumbuh sebesar 3,07 persen.

i. Gambaran Singkat Sektor

1) Pertanian

Sektor yang paling memungkinkan untuk dikembangkan adalah sektor pertanian, mengingat ketersediaan lahan yang masih cukup besar. Di sektor pertanian ini, sub sektor yang berpeluang untuk dikembangkan adalah sub sektor perkebunan. Saat ini sudah masuk permohonan untuk berinvestasi di sub sektor perkebunan Kelapa Sawit dan Karet, Singkong dalam skala cukup luas.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan investasi di sektor perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, terbentur pada aspek tata ruang, di mana lokasi yang dimohon masuk dalam kriteria kawasan hutan yang memerlukan proses alih fungsi. Sedangkan sub sektor lainnya yang perlu didorong adalah sub sektor peternakan, ini dimaksudkan untuk mampu mencukupi kebutuhan lokal, bahkan dimungkinkan untuk mampu memasok kebutuhan provinsi lain. Selain itu sub sektor perikanan juga memiliki prospek cerah, karena Provinsi Kalimantan Tengah memiliki cukup banyak kawasan perairan danau yang dapat dikembangkan menjadi usaha perikanan air tawar.

2) Perdagangan dan Jasa

Dalam sektor perdagangan dan jasa di provinsi Kalimantan Tengah yang paling berperan dalam penciptaan nilai tambah yang besar dan perlu dikembangkan adalah sektor perdagangan besar dan eceran. Kegiatan ini tersebar disepanjang jalan utama di pusat-pusat Kota di wilayah provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Tengah dengan 13 kabupaten dan 1 kota, dimana di tiap-tiap wilayah dapat dikembangkan menjadi pusat jasa dan perdagangan, hotel, perkantoran dan lain sebagainya.

3) Industri

Secara umum industri yang berkembang di provinsi Kalimantan Tengah meliputi industri pengolahan yang merupakan jenis usaha kecil, industri rumah tangga dan industri menengah yang meliputi pangan, sandang, kerajinan dan industri perkayuan. Dari beberapa jenis usaha kecil dan industri rumah tangga tersebut sudah dapat menampung tenaga kerja yang cukup besar.

4) Pariwisata

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu pembangunan yang dapat melibatkan masyarakat dalam jumlah besar, dan karena itulah, pembangunan bidang ini akan memberikan kesempatan kepada masyarakat

untuk berkembang dan akan meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan. Pengembangan pariwisata tidak akan terlepas dari pembangunan lain, seperti pengembangan infrastruktur daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan di daerah lain. Secara umum memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata terutama dikarenakan posisi geografis dan kondisi alamnya.

Pengembangan pariwisata perlu diarahkan pada terciptanya kesempatan kerja dan berusaha, setidaknya di daerah sekitar obyek wisata. Oleh karena itu, penataan dan pemeliharaan obyek-obyek wisata perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk mendukung pengembangan kepariwisataan tersebut maka keterlibatan masyarakat luas baik dalam bentuk sadar wisata maupun keterlibatan langsung sebagai investor di bidang kepariwisataan perlu dikembangkan. Oleh karena itu, bentuk kerjasama pengelolaan obyek/kawasan wisata dengan pihak swasta/investor perlu mendapat perhatian khusus, terutama bagi obyek wisata yang potensial dipasarkan.

Sementara ini belum didapat data lebih mengenai kunjungan wisatawan ke provinsi Kalimantan Tengah baik domestik maupun luar negeri serta kontribusinya secara ekonomi. Namun dari pengamatan sementara, kegiatan ini dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan asli daerah yang diperkirakan akan terus berkembang. Sektor pariwisata diarahkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan daya tarik obyek wisata yang meliputi keindahan dan kekayaan alam flora dan fauna, daya tarik tradisi yang mengandung seni dan budaya serta peninggalan masa lampau. Semua itu ditunjang jasa dan sarana pariwisata seperti biro perjalanan, penyediaan akomodasi serta pembangunan dan pembenahan fasilitas wisata. Adapun objek wisata di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain: wisata alam, seperti Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Air Kuala Kapuas, danau Tahai dan lain sebagainya; wisata sejarah, seperti Monumen Palagan Sambi, Masjid Kiai Gede di Kotawaringin Barat dan lain sebagainya; wisata budaya, seperti Festival Tira Tangka Balang; wisata religius; wisata kuliner; wisata minat khusus; wisata olah raga; wisata belanja serta wisata umum.

5) Pertambangan

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terbesar ketiga di Indonesia setelah Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan timur. Dengan luasnya wilayah tersebut serta letak geografis yang dilalui oleh garis katulistiwa, maka secara fisik kawasan ini memiliki beberapa hasil tambang yang cukup menonjol.

Penambangan bahan galian industri golongan C di kawasan ini belum ditangani secara serius oleh pemerintah setempat, hal ini tentunya akan menimbulkan kerugian yang cukup besar dikarenakan penambangan dilakukan dengan sistem penambangan terbuka, hal ini akan mengakibatkan perubahan kondisi lingkungan .

Data potensinya dan komoditi bahan galian golongan C di Kalimantan Tengah telah diinventarisir secara keseluruhan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah dan apabila dikelola dengan bekerjasama dengan swasta/investor akan dapat membuka lapangan kerja dibidang pertambangan, sehingga upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan dapat direalisasikan. Untuk itu, pengelolaan usaha harus dilakukan dengan tepat sejak mulai eksplorasi, eksploitasi hingga pasca penambangan untuk mempertahankan/menjaga kualitas lingkungan.

Orientasi pembangunan bidang pertambangan dan penggalian adalah peningkatan produktivitas kegiatan usaha pertambangan dan penggalian oleh masyarakat, pengukuran pendataan dan pemetaan dalam rangka updating sebaran potensi dan mutu sumberdaya mineral, serta pembinaan kegiatan usaha pertambangandan penggalian yang ramah lingkungan. Sampai saat ini potensi yang sudah tergali, baru terbatas untuk keperluan konsumsidalam daerah antara lain untuk keperluan dukungan pembangunan prasarana fisik daerah.

Sementara itu potensi batubara Kalimantan Tengah yang telah terdeteksi dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.15
Rekapitulasi Sumber Daya (*Resources*) Batubara
Provinsi Kalimantan Tengah (Ton) Per 20 Agustus 2009

No	Kabupaten	Tereka (<i>Inferred</i>)	Tertunjuk (<i>Indicated</i>)	Terukur (<i>Measured</i>)	Jumlah
1	Murung Raya	1.365.413.701	218.871.850	328.178.352	1.912.464.083
2	Barito Utara	493.776.632	679.795.887	609.626.839	1.783.199.358
3	Barito Timur	42.524.289	71.515.732	40.077.754	154.117.775
4	Barito Selatan	51.507.530	60.542.123	22.936.958	134.986.611
5	Kapuas	372.989.580	188.370.884	123.725.358	685.085.822
6	Kotawaringin Barat	-	306.334.795	104.294.417	410.629.212
7	Kotawaringin Timur	17.400.000	-	-	17.400.000
8	Katingan	17.485.491	-	-	17.485.491
9	Gunung Mas	21.540.000	-	-	21.540.000
JUMLAH		2.382.637.233	1.525.431.271	1.228.839.858	5.136.908.352

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, 2009

Produksi batubara Kalimantan Tengah mulai tahun 2007-2009 seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.16
Produksi Batubara Kalimantan Tengah
Mulai Tahun 2007-2009

Tahun	Produksi (ton)
2007	847.407,46
2008	1.443.221,08
2009	1.549.526,06

Sumber : Kementerian ESDM, 2010

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kondisi pengangguran, kondisi kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta seni budaya dan olah raga.

a. Kependudukan

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya manusia menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai input dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 2,01 persen.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukamara adalah yang tertinggi dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Tengah yakni sebesar 4,32 persen, sedangkan yang terendah di Kabupaten Kapuas yakni 0,12 persen walaupun dari sisi jumlah penduduknya Kabupaten Kapuas menempati urutan kedua di Kalimantan Tengah. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.17 berikut.

Tabel 2.17
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2000	Jumlah Penduduk Tahun 2010	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
Kotawaringin Barat	168.472	235.274	3,32
Kotawaringin Timur	308.765	373.842	1,91
Kapuas	325.243	329.406	0,12
Barito Selatan	108.560	123.991	1,21
Barito Utara	109.273	120.879	1,01
Sukamara	29.561	44.838	4,32
Lamandau	47.969	62.776	2,76
Seruyan	92.037	139.443	4,17
Katingan	121.047	141.350	1,58
Pulang Pisau	111.488	119.630	0,74
Gunung Mas	74.823	96.838	2,65
Barito Timur	71.907	97.080	3,02
Murung Raya	74.050	97.029	2,67
Palangka Raya	158.770	220.223	3,25
Kalimantan Tengah	1.801.965	2.202.599	2,01

Sumber : Hasil Analisis, 2010

Catatan : Untuk kabupaten pemekaran, data tahun 2000 diambil dari data per kecamatan menurut kondisi.

b. Kesehatan

Pada tahun 2005 jumlah tenaga kerja kesehatan di Kalimantan Tengah yang terdiri atas dokter, bidan, pengatur rawat, apoteker dan tenaga teknis lainnya sebanyak 4.053 orang. Sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi 5.202 orang, khususnya terjadi peningkatan pada tenaga dokter, bidan, pengatur perawat dan tenaga teknis.

Hingga tahun 2009 pembangunan prasarana kesehatan untuk masyarakat seperti puskesmas, dan rumah sakit dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Rasio posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu per 1.000 balita. Rasio posyandu dalam 5 tahun terakhir ini hampir selalu mengalami perubahan baik meningkat maupun menurun. Pada tahun 2005 rasio posyandu sebesar 10,13 dan menurun pada tahun 2007 sebesar 8,3. Penurunan di tahun 2007 tersebut terjadi karena jumlah balita meningkat, sedangkan posyandu justru menurun dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 1837 unit. Pada tahun 2008 rasio posyandu sebesar 11,73 dan menurun lagi pada tahun 2009 menjadi 10,67. Penurunan rasio ini disebabkan bertambahnya jumlah balita pada tahun 2010 menjadi 15.847 jiwa, sedangkan jumlah posyandu tetap yakni 2147 unit.

Pada tahun 2009, jumlah puskesmas di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 166 unit dan Jumlah puskesmas pembantu (Pustu) sebanyak 912 unit. Dengan jumlah penduduk sebanyak 2.132.838 jiwa, sehingga nilai rasio puskesmas sebesar 0,08 dan rasio pustu sebesar 0,43. Nilai rasio yang rendah

menggambarkan masih terbatasnya cakupan prasarana kesehatan, terutama puskesmas dan pustu untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

Pada tahun 2009 jumlah rumah sakit di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 17 unit, yang terdiri dari rumah sakit daerah di masing-masing kabupaten, 1 Rumah Sakit TNI Angkatan Darat, 1 Rumah Sakit Bhayangkara POLRI dan 1 Rumah Sakit Swasta PKU Muhammadiyah. Sampai saat ini belum tersedia rumah sakit paru dan rumah sakit khusus lainnya baik milik pemerintah maupun swasta.

Rasio dokter (dokter umum) per-jumlah penduduk hingga tahun 2007 relatif belum ideal karena seorang dokter harus menangani lebih dari 5.594 orang penduduk. Pada tahun 2009 jumlah dokter berjumlah 564 orang, untuk jumlah penduduk sebesar 2.085.798 jiwa, sehingga rasio 0,27 nampaknya masih cukup rendah. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Sementara untuk jumlah tenaga medis selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 jumlahnya sebanyak 5.291 orang, dengan rasio 2,53.

Dalam 5 tahun terakhir di Kalimantan Tengah, menunjukkan terjadinya peningkatan proporsi rumah tinggal bersanitasi terhadap jumlah rumah tinggal. Pada tahun 2009 dari 702.433 Jumlah rumah tinggal terdapat 398.534 rumah tinggal berakses sanitasi, jika dilihat prosentasenya sebesar 56,73 persen. Persentase tertinggi untuk rumah tinggal berakses sanitasi adalah di Kota Palangka Raya sebesar 86,65 % disusul Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 86,20 %. Rumah tinggal berakses sanitasi ini adalah sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi seperti fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas) dan pembuangan sampah.

c. Pendidikan

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan sejak tahun 2005. Hal ini ditunjukkan dengan angka melek huruf dari 97 persen pada tahun 2005 menjadi 98,84 persen pada tahun 2009. Namun begitu, masih ada sebagian penduduk yang buta aksara. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009/2010, jumlah penduduk buta aksara di Kalimantan Tengah sebesar 27.150 jiwa dengan rincian berdasarkan tingkat

usia 15-24 tahun sebanyak 8.919 jiwa, usia 25-44 tahun sebanyak 8.592 jiwa dan usia 45-80 tahun sebesar 9.639 jiwa.

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah, baik tingkat SD/MI, SMP/MTS maupun tingkat SMA/MA/SMK dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 juga mengalami kenaikan. Ini menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu mengalami kenaikan. Begitu pula untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) mengalami kenaikan. Namun begitu jika dilihat dari perbandingan antar kabupaten/ kota, nampaknya angka partisipasi sekolah untuk tingkat SMP dan SMA masih menunjukkan kesenjangan antar wilayah, hal ini disebabkan antara lain oleh terbatasnya akses pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil dan rendahnya ketersediaan tenaga pengajar. Khusus untuk partisipasi penduduk sekolah SMA dirasa masih rendah, bahkan di Kabupaten Lamandau nilai APM tahun 2009/2010 hanya sebesar 13,03 persen dan di Kabupaten Kapuas serta Kabupaten Kotawaringin Timur masing-masing sebesar 33,55 persen dan 34,71 persen.

Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) untuk penduduk Kalimantan Tengah tahun 2009/2010 dengan penduduk 2.085.798 jiwa, persentase untuk pendidikan SMP masih yang terbesar yaitu 40 persen, disusul SMA sebesar 35 persen, SD 22 persen dan Perguruan Tinggi baru mencapai 3 persen.

Maju mundurnya pembangunan ekonomi suatu bangsa atau wilayah tidak terlepas dari kondisi atau kemampuan sumberdaya manusia yang terdapat di negara atau wilayah tersebut. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa mundur atau hancurnya perekonomian suatu bangsa terutama disebabkan oleh rendahnya sumberdaya manusia di negara tersebut. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah tingkat pendidikan penduduk, yang dapat diamati dari tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada. Pada Tabel berikut disajikan komposisi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2.18
Jumlah Angkatan Kerja menurut Tingkat Pendidikan
di Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2009

No.	Tingkat Pendidikan	2005		2006		2007		2008		2009	
		Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%
1.	Tidak/belum pernah sekolah	19.705	2,18	27.837	2,75	13.036	1,28	19.155	1,86	18.325	1,75
2.	Tidak/belum tamat SD	107.664	11,88	124.838	12,34	100.657	9,89	128.597	12,49	176.394	16,84
3.	Sekolah Dasar (SD)	349.488	38,58	389.662	38,51	437.658	42,99	441.782	42,91	359.893	34,36
4.	SLTP	200.524	22,13	226.691	22,40	232.940	22,88	199.930	19,42	221.346	21,13
5.	SMTA	178.027	19,65	193.699	19,14	171.410	16,84	179.918	17,48	201.331	19,22
6.	Diploma/Akademi/Univ/S2/S3	50.508	5,58	49.170	4,86	62.324	6,12	60.063	5,83	70.113	6,69
J U M L A H		905.916	100,00	1.011.897	100,00	1.018.025	100,00	1.029.445	100,00	1.047.402	100,00

Sumber : Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2010.

Dari tabel 2.18 dapat dilihat bahwa sumberdaya manusia (angkatan kerja) di Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh tamatan SD, yaitu berkisar antara 34,36 – 42,99 persen. Kemudian diikuti oleh tamatan SLTP (19,42 – 22,88%), tamatan SMTA (17,48 – 19,65 %), tidak/belum tamat SD (9,89 – 16,84%), diploma/Akademi/ Universitas/S2/S3 (4,86 – 6,69%) dan tidak/belum pernah sekolah (1,28 – 2,75%). Terlihat adanya tren peningkatan peranan angkatan kerja berpendidikan perguruan tinggi dan trend penurunan peranan angkatan kerja tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD, tetapi perubahannya masih kecil dan belum signifikan. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas sumberdaya manusia di Kalimantan Tengah dilihat dari pendidikan formal yang ditamatkan masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan.

d. Pengangguran

Kalimantan Tengah berhasil menekan angka pengangguran 0.74 persen dibanding Agustus 2009 mencapai 4.62 persen (48.435 orang dari angkatan kerja 1.047.402 orang). Jadi tingkat pengangguran di Kalimantan Tengah pada Februari 2010 sebesar 3.88 persen (42.731 orang dari jumlah tenaga kerja 1.101.012). Dimana angka ini yang terendah se-Kalimantan. Pengangguran tertinggi untuk regional Kalimantan terjadi di Kalimantan Timur 10.45 persen (160.477 orang). Kalimantan Selatan 5,89 persen (108.745 orang) dan Kalimantan Barat 5.50 persen (125.188 orang).

Secara keseluruhan struktur ketenagakerjaan Kalimantan Tengah pada Februari 2010 mengalami perubahan berarti, dimana jumlah angkatan kerja bertambah sekitar 53.610 orang dibanding bulan Agustus 2009 atau naik 5,12 persen. Sementara jumlah penduduk yang bekerja bertambah 59.314 orang atau 5.94 persen.

e. Kondisi Kemiskinan

1) Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, tahun 2000 – 2010.

Selama 2000-2005 di Kalimantan Tengah jumlah penduduk miskin menurun sebesar 61.317 orang dari 292.118 orang pada tahun 2000 menjadi 230.801 orang pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 16,31 persen pada tahun 2000 menjadi 10,73 persen pada tahun 2005. Namun pada tahun 2006 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang signifikan menjadi 257.089 orang atau 13,42 persen. Hal ini disebabkan adanya kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005. Pada bulan Maret 2007, terjadi penurunan kembali jumlah penduduk miskin yaitu menjadi 210.327 orang (9,38 persen), kemudian Maret 2008 menjadi

199.991 orang (8,71 persen), dan pada bulan Maret 2009 jumlah penduduk miskin menjadi 165.854 (7,02 persen). Pada bulan Maret 2010, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 164.221 orang atau 6,77 persen, terdiri dari penduduk perkotaan sebesar 33.229 orang dan perdesaan 130.992 orang. Ini berarti selama periode Maret 2009-2010 jumlah penduduk miskin turun sebesar 1.633 orang. Penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 2.546 orang, atau secara relatif persentase penduduk miskin perkotaan turun 0,42 persen dari 4,45 persen menjadi 4,03 persen. Sedangkan di daerah perdesaan bertambah 913 orang, namun secara relatif persentase penduduk miskin perdesaan turun 0,15 persen dari 8,34 persen menjadi 8,19 persen pada periode yang sama, sebagaimana tabel dibawah ini.

Penurunan persentase penduduk miskin selama Maret 2009-Maret 2010 terjadi / dipengaruhi oleh menurunnya angka pengangguran terbuka (TPT) dari 4,53 persen di Februari 2009 menjadi 3,88 persen di bulan Februari 2010.

Tabel 2.19
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kalimantan Tengah Menurut Daerah, 2000-2010

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2000	-	-	292,1	-	-	16,31
2002	-	-	231,4	-	-	11,93
2004	33,0	161,1	194,1	6,13	12,20	10,44
2005	48,5	182,4	230,8	6,62	12,84	10,73
2006	54,1	203,0	257,1	6,96	13,41	13,42
2007	51,2	159,2	210,3	6,72	10,76	9,38
2008	45,3	154,6	200,0	5,81	10,20	8,71
2009	35,78	130,08	165,85	4,45	8,34	7,02
2010	33,23	130,99	164,22	4,03	8,19	6,77

Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

2) Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, 2008-2009.

Tabel 2.20 menunjukkan persentase dan jumlah penduduk miskin serta besarnya garis kemiskinan menurut kabupaten/kota tahun 2008-2009. Untuk tingkat kabupaten/kota, persentase penduduk miskin bulan Juli 2009 tertinggi adalah Kabupaten Barito Timur sebesar 9,24 persen, sedangkan terendah di Kota Palangka Raya yaitu sebesar 4,76 persen. Secara umum terjadi penurunan persentase penduduk miskin di kabupaten/kota selama periode Juli 2008-Juli 2009. Penurunan persentase penduduk miskin terbesar adalah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 2,19 persen, hanya Kota Palangka Raya yang mengalami kenaikan sebesar 0,12 persen. Disamping itu, besarnya garis kemiskinan secara umum mengalami kenaikan selama periode Juli 2008-Juli 2009.

Kenaikan terbesar adalah Kabupaten Seruyan sebesar 26,32 persen yaitu dari 178.657 ribu rupiah per kapita per bulan menjadi 225.683 ribu rupiah per kapita per bulan, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.21

Tabel 2.20
Garis Kemiskinan, Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin
Menurut Kabupaten/Kota, 2008-2009

Kab/Kota	Kemiskinan Tahun 2008			Kemiskinan Tahun 2009			Perubahan (%)		
	GK (Rp/kap/bln)	Po (%)	Pend. Miskin (000)	GK (Rp/kap/bln)	Po (%)	Pend. Miskin (000)	GK	Po	Pend. Miskin
Kotawaringin Barat	186.618	7,76	19,60	212,060	6,87	17,78	13,63	-0,89	-9,27
Kotawaringin Timur	217.684	10,40	38,00	219.104	8,21	30,83	0,65	-2,19	-18,87
Kapuas	166.944	8,25	31,74	169.307	6,34	25,05	1,42	-1,91	-21,10
Barito Selatan	213.197	9,25	13,30	227.118	8,14	12,01	6,53	-1,11	-9,76
Barito Utara	206.022	7,56	9,94	232.267	6,43	8,68	12,74	-1,13	-12,63
Sukamara	230.697	7,92	3,45	240.051	5,91	2,64	4,05	-2,01	-23,51
Lamandau	214.994	6,97	4,63	219.016	5,57	3,79	1,87	-1,40	-18,26
Seruyan	178.657	10,21	12,97	225.683	8,84	11,50	26,32	-1,37	-11,30
Katingan	192.808	7,74	11,94	234.586	7,00	11,07	21,67	-0,74	-7,30
Pulang Pisau	205.288	8,20	11,13	210.428	6,23	8,67	2,50	-1,97	-22,13
Gunung Mas	190.043	8,32	8,66	216.805	7,43	7,92	14,08	-0,89	-8,57
Barito Timur	232.539	11,09	10,95	250.920	9,24	9,36	7,90	-1,85	-14,53
Murung Raya	210.392	7,95	8,03	236.786	6,94	7,19	12,54	-1,01	-10,38
Palangka Raya	191.951	4,64	9,93	193.662	4,76	10,44	0,89	0,12	5,23
Kalimantan Tengah	197.325	8,36	194,26	212.268	7,01	166,92	7,57	-1,35	-14,07

Sumber : Diolah dari data Susenas, Juli 2008 dan 2009

f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat.

Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan nasional selanjutnya memberikan akses yang memadai bagi perempuan dan anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta turut mempunyai andil dalam proses pengendalian/kontrol pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional harus memegang prinsip pemenuhan hak asasi manusia, yang salah satunya tercermin dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta hak-hak anak yang tidak terabaikan.

Berdasarkan data SUSENAS tahun 2009, partisipasi perempuan di dibidang pendidikan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.21
Partisipasi Perempuan di bidang Pendidikan

No.	Jenjang	Perempuan (%)	Laki-Laki (%)
1.	Tidak / Belum Pernah Bersekolah	4,20	1,75
2.	SD	34,06	33,46
3.	SLTP	18,85	20,46
4.	SLTA	15,29	18,73
5.	Perguruan Tinggi	4,14	4,17

Sumber : *Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Provinsi Kalimantan Tengah, 2010*

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

1). **Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah**

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan hak penduduk perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan yang sama, baik dalam hal mengakses, menerima manfaat, mengendalikan, maupun berpartisipasi dalam pembangunan. Keberhasilan dari upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan yang antara lain tercermin dalam angka persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.

Tabel 2.22
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2009 di Provinsi Kalimantan Tengah

NO	Uraian	Tahun 2009
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	11
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	139
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	667
4	Jumlah pekerja perempuan yang menempati jabatan eselon V	0
5	Pekerja perempuan di pemerintah	1.088
6	Jumlah pekerja perempuan	58.789
7	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	1,85

Sumber : *Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Provinsi Kalimantan Tengah, 2010*

Data persentase perempuan di lembaga pemerintah, yang dirinci menurut kabupaten/kota dan provinsi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.23
Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah
Tahun 2009 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Jumlah pekerja perempuan	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah
1	Barito Utara	798	7682	10.39
2	Palangka Raya	3551	5263	67.47
3	Lamandau	876	5608	15.62
4	Sukamara	491	8189	6.00
5	Gunung Mas	1247	12395	10.06
6	Katingan	271	12783	2.12
7	Barito Selatan	477	2705	17.63
8	Murung Raya	1135	14776	7.68
9	Pulang Pisau	1462	3740	39.09
10	Kotawaringin Barat	749	1639	45.73
11	Barito Timur	1940	23138	8.38
12	Kotawaringin Timur	2651	33531	7.91
13	Seruyan	685	26744	2.56
14	Kapuas	2804	5623	49.87
Jumlah		19137	163815	11.68

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

2). Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Akses dan partisipasi perempuan dalam mendapatkan pekerjaan di lembaga swasta seharusnya diperlakukan sama dengan laki-laki. Kinerja seseorang juga sebaiknya jangan berdasarkan jenis kelamin semata. Secara nasional, persentase penduduk yang bekerja lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan dengan perbandingan 2:1. Dengan semakin banyaknya kesempatan perempuan di dunia pekerjaan termasuk sektor swasta menunjukkan perkembangan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat melalui angka partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga swasta.

Untuk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2009, dari jumlah pekerja perempuan sebanyak 177.684 orang, terdapat pekerja perempuan yang bekerja di lembaga swasta sebanyak 5.878 orang, sehingga diperoleh persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah 33,08%.

Data persentase perempuan di lembaga swasta menurut kabupaten/kota disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.24
Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2009
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Uraian	Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta	Jumlah pekerja perempuan	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta
1	Barito Utara	11	7,682	0.14
2	Palangka Raya	42	5,263	0.80
3	Lamandau	16	5,608	0.29
4	Sukamara	6	8,189	0.07
5	Gunung Mas	2	12,395	0.02
6	Katingan	2	12,783	0.02
7	Barito Selatan	16	2,705	0.59
8	Murung Raya	30	14,776	0.20
9	Pulang Pisau	-	3,740	0.00
10	Barito Timur	-	1,638	0.00
11	Ktw. Barat	35	23,138	0.15
12	Ktw Timur	69	33,531	0.21
13	Seruyan	23	26,744	0.09
14	Kapuas	8	5,623	0.14
Jumlah		260	163,815	0.16

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

3). Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Lingkup rumah tangga yang dimaksud meliputi: (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau, (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, meliputi :

- a) Kekerasan fisik; adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat
- b) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c) Kekerasan seksual meliputi : (I) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (II) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d) Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Data rasio KDRT, dirinci menurut kabupaten/kota dan provinsi, dalam tabel sebagai berikut

Tabel 2.25
Rasio KDRT Tahun 2008 dan 2009 Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Uraian	2008	2009
1	Jumlah KDRT	39	69
2	Jumlah Rumah Tangga	448.058	469.220
3	Rasio KDRT	0,0087	0,0014

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

Tabel 2.26
Rasio KDRT Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2009 menurut kabupaten/kota

No.	Uraian	Jumlah KDRT	Jumlah rumah tangga	Rasio KDRT
1	Palangka Raya	85	26.395	0.32
2	Barito Utara	5	29.453	0.01
3	Kapuas	2	84.240	0.002
4	Kotawaringin Timur	1	68.786	0.001
5	Kotawaringin Barat	2	47.855	0.004

*) Kabupaten yang lain tidak melapor.

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

g. Seni Budaya dan Olahraga

Organisasi pemuda di suatu wilayah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

Perkembangan jumlah klub olah raga di Provinsi Kalimantan Tengah, dalam lima tahun terakhir mengalami penambahan. Tahun 2009 berjumlah 15 klub. Klub olahraga tersebut adalah klub olahraga pelajar (yang ada disekolah) dan klub olahraga di masyarakat yang sudah dianggap memiliki manajemen pelatihan yang baik. Terdapat 1 buah gedung olahraga yang merupakan gedung olahraga serba guna atau multi fungsi, yaitu gedung olahraga (GOR) KONI Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk kabupaten/ kota, gedung olah raga serba guna berkisar antara 1-3 gedung.

Organisasi pemuda yang ada merupakan organisasi pemuda yang ada di masyarakat, seperti AMPI, KNPI, Karang Taruna, OKP dan Kelompok Pemuda Produktif yang telah terdaftar dan dibina oleh pemerintah, baik provinsi maupun di kabupaten/kota. Pada tahun 2009, organisasi pemuda yang terbanyak jumlahnya berada di Kota Palangka Raya berjumlah 60 organisasi, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya berjumlah 27 organisasi.

Organisasi olah raga Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2009 berjumlah 31, untuk Kabupaten/kota jumlah organisasi terbesar adalah Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 41. Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga.

Penyelenggaraan kegiatan olah raga, yang dilaksanakan/diprogramkan oleh Pemerintah Daerah meliputi: PORDA, PORKAB, PORCAM, POPDA, POKAB, POPCAM, PORDEKEL, Invitasi, Kompetisi, Festival, Kejurda, Kejurnas dan Turnamen-turnamen lainnya dan kegiatan-kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta, sponsor dan pihak ketiga. Jumlah kegiatan olah raga tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 sebanyak 28 kali. Tingkat kabupaten/kota jumlah kegiatan olah raga diselenggarakan oleh Kota Palangka Raya sebanyak 48 kali, selanjutnya Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 37 kali. Jumlah kegiatan olah raga yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum mencakup pelayanan dasar dan pelayanan penunjang. Kondisi pelayanan dasar dapat dilihat dari pelayanan umum pada berbagai bidang yakni bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum, penataan ruang dan perhubungan. Sedangkan kondisi pelayanan penunjang dapat diketahui dari beberapa bidang yakni penanaman modal, KUKM, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, KB dan KS, komunikasi dan informatika, pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemuda dan olah raga. Uraian mengenai kondisi pelayanan umum di Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dibahas pada bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pelayanan umum yang telah dicapai sampai dengan saat ini dan berbagai permasalahan yang dihadapi.

1. Pelayanan Dasar

a) Jalan dan Angkutan Darat serta Jalan Kereta Api

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas provinsi, kabupaten dan kota serta beberapa Kecamatan yang ada di Kalimantan Tengah, disamping itu pengembangan dan pembangunannya diarahkan sebagai upaya untuk membuka isolasi bagi daerah-daerah pedalaman/terpencil yang dimungkinkan untuk dibangun jalan darat dengan maksud untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat. serta orang/penumpang. Melihat kondisi Kalimantan Tengah, moda transportasi jalan kereta api sangat tepat dan pembangunannya perlu mendapat prioritas khususnya untuk angkutan sumber daya alam pertambangan batubara ke outlet. Beberapa ruas prioritas adalah: Puruk Cahu-Bangkuang-Batanjung, Kudangan-Kumai, Puruk Cahu-Kuala Kurun-Kuala Pembuang, Tumbang Samba-Nanga Bulik, Kuala Kurun-Batanjung.

Panjang dan kondisi jalan di Kalimantan Tengah sampai dengan Juli 2010 adalah seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.27
Kondisi Jalan di Kalimantan Tengah Per Juli 2010

No	Status Jalan	Panjang Jalan (Km)	Kondisi (Km/%)					
			Mantap			Tidak Mantap		
			Baik	Sedang	Total	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total
			Km/%	Km/%	Km/%	Km/%	Km/%	Km/%
1	Provinsi	1.642,95	641,37 39,04	446,62 27,18	1.008,44 66,25	354,97 21,61	238,20 14,50	554,51 33,75
2	Nasional	1.917,38	945,65 49,32	242,53 18,63	1.302,84 67,95	247,19 12,89	367,36 19,16	614,55 32,05
	- Poros Selatan	819,48	600,42 73,27	138,90 16,95	739,32 90,22	74,15 9,05	6,01 0,73	80,16 9,78
	- Jalan Penghubung Lintas	292,39	174,10 59,54	63,13 63,13	237,23 81,13	44,06 15,07	11,11 3,80	55,17 18,87
	- Poros Tengah	805,51	171,13 21,24	40,51 19,26	326,29 40,51	128,98 13,01	350,24 43,48	479,22 59,49
	Total	3.560,33	1.587,02 44,58	689,15 19,36	2.391,28 67,16	602,16 16,91	605,56 17,01	1.169,06 32,84

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

Dari total panjang jalan sepanjang 3.560 km, 67 persen dalam keadaan mantap sementara sisanya rusak ringan dan rusak berat. Sementara itu dari segi tipe permukaan jalan, 62 persen aspal/beton dan penetrasi, 14,78 persen agregat/ kerikil dan 23 persen masih jalan tanah seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 2.28
Tipe Permukaan Jalan di Kalimantan Tengah Per Juli 2010

No	Status Jalan	Panjang Jalan (Km)	Tipe Permukaan (Km/%)			
			Aspal/Beton	Penetrasi	Agregat/ Kerikil	Tanah
			Km/%	Km/%	Km/%	Km/%
1	Provinsi	1.642,95	<u>740,83</u> 49,09	<u>284,27</u> 17,30	<u>262,13</u> 15,95	<u>355,72</u> 21,65
2	Nasional	1.917,38	<u>1.143,23</u> 59,62	<u>42,10</u> 2,20	<u>264,05</u> 13,77	<u>468,00</u> 24,41
	- Poros Selatan	819,48	<u>728,48</u> 88,90	<u>11,00</u> 1,34	<u>40,00</u> 4,88	<u>40,00</u> 4,88
	- Jalan Penghubung Lintas	292,39	<u>250,29</u> 85,60	<u>4,00</u> 1,37	<u>32,05</u> 10,96	<u>6,05</u> 2,07
	- Poros Tengah	805,51	<u>164,46</u> 20,42	<u>27,10</u> 3,36	<u>192,00</u> 23,84	<u>421,95</u> 52,38
	Total	3.560,33		<u>2.210,43</u> 62,09	<u>526,18</u> 14,78	<u>823,72</u> 23,14

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

b) Pelabuhan Laut

Tersedia pelabuhan laut untuk sarana jasa perdagangan, angkutan penumpang dan barang (ekspor dan impor maupun lokal) yakni:

- 1) Pelabuhan Pengumpul:
 - a) Pelabuhan Sukamara
 - b) Pelabuhan Kumai
 - c) Pelabuhan Pangkalan Bun
 - d) Pelabuhan Sampit
 - e) Pelabuhan Pulang Pisau
 - f) Pelabuhan Kuala Kapuas
- 2) Pelabuhan Pengumpan:
 - a) Pelabuhan Pegatan Mendawai
 - b) Pelabuhan Kuala Pembuang
 - c) Pelabuhan Samuda
 - d) Pelabuhan Kereng Bangkirai

Rencana Pengembangan Pelabuhan:

Ada 4 pelabuhan yang direncanakan sebagai pelabuhan *inlet/outlet* utama, yakni:

- 1) Pelabuhan Kumai – Kabupaten Kotawaringin Barat
- 2) Pelabuhan Sampit – Kabupaten Kotawaringin Timur,
- 3) Pelabuhan Teluk Segintung di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan
(sedang dalam proses pembangunan)
- 4) Pelabuhan Batanjung, Lupak Dalam – Kabupaten Kapuas

c) Bandar Udara

Di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 9 buah bandar udara yang melayani penerbangan untuk berbagai tipe dan jenis pesawat terbang, sebagai berikut:

Tabel 2.29
Bandara di Kalimantan Tengah

No	Nama Bandara	Nama Kota	Type/jenis pesawat
1.	Tjilik Riwut	Palangka Raya	B737-400
2.	Iskandar	Pangkalan Bun	B737-200 terbatas
3.	H. Asan	Sampit	B737-200 terbatas
4.	Beringin	Muara Teweh	C-212
5.	Sangkalemo	Kuala Kurun	C-212
6.	Sunggu	Buntok	C-212
7.	Dirung	Puruk Cahu	C-212
8.	Kuala Pembuang	Kuala Pembuang	C-212
9.	Tumbang Samba	Tumbang samba	BN-2A

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2010

Maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan di Kalimantan Tengah ada beberapa maskapai, yaitu: Garuda Indonesia, Lion Air, Sriwijaya Air, Batavia Air, Trigana Air/Kalstar, Merpati, Susi Air dan Aviastar. Disamping itu, untuk melayani kota-kota kecil ada juga pesawat dari MAF dan yang terbang secara regular serta bisa pula dicarter. Tabel *Traffic Movement* Bandara Tjilik Riwut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.30
Traffic Movement Tabel Bandara Tjilik Riwut
Tahun 2005 – 2010 (Per 30 September 2010)

No	Traffic Type	Year 2005	Year 2006	Year 2007	Year 2008	Year 2009	Year 2010/30 Sept.
1	Aircraft (Arrival/Departures)	3.468	3.939	3.630	3.622	5.333	3.950
2	Pasenger (Arrival/Departures/Transit)	172.899	217.011	276.634	276.634	327.112	289.271
3	Bagage (Loading/Unloading)	463.334	1.660.803	11.632.232	1.998.068	2.528.963	2.411.719
4	Cargo (Loading/Unloading)	506.098	1.003.906	1146.098	1.311.233	1.792.371	1.360.559
5	Post (Loading/Unloading)	46.049	57.689	15.180	22.290	77.506	584.142

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2010

d) Listrik

Pelayanan tenaga listrik sudah menjangkau sebagian besar kota dan desa baik yang berasal dari PLTD yang tersebar di Kabupaten–Kabupaten Kalimantan Tengah maupun langsung dialirkan dari interkoneksi PLTU / PLTA di Kalimantan Selatan. Sekitar 22 persen listrik di Kalimantan Tengah dilayani dari Sistem Barito (Sistem Kalselteng) yang dikirim melalui jaringan transmisi tegangan tinggi (SUTT) 150 KV dari Banjarmasin menuju Gardu Induk (GI) Kuala Kapuas, Gardu Induk (GI) Pulang Pisau dan GI Palangka Raya Km.6,5 sekitar 23% dilayani dari sistem *isolated* yakni:

- 1) Sistem Pangkalan Bun
- 2) Sistem Sampit
- 3) Sistem Muara Teweh
- 4) Sistem Buntok

Kondisi kelistrikan di Kalimantan Tengah sampai akhir tahun 2010 masih mengalami kekurangan karena daya yang tersedia hanya sebesar 76.537 MW sedangkan beban puncak sebesar 111.815 MW. Produksi Kwh sampai bulan Juli 2010 sebesar 308.672.536 Kwh dan produksi terjual sampai bulan Juli 2010 sebesar 279.895.499 Kwh, dengan jumlah pelanggan sampai bulan Juli 2010 sebesar 284.320 pelanggan, yang tersebar di 871 desa yang sudah berlistrik dari 1.446 desa yang ada di Kalimantan Tengah.

Adapun kondisi kelistrikan di Kalimantan Tengah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31
Data Kelistrikan Provinsi Kalimantan Tengah
Serta Produksi Kwh Sampai Juli 2010

No	URAIAN	SATUAN	PT.PLN (PERSERO) WIL. KALSELTENG		TOTAL	Ket.
			Cab. P.Raya	Cab.Kapuas		
1	2	3	4	5	6	7
I. PENGUSAHAAN						
1.	Daya terpasang	KW	65.371	7.330	70.417	-
2.	Daya terpasang dari pihak lain	KW	57.605	1.000	40.905	-
3.	Total Daya Terpasang	KW	122.976	18.562	121.554	-
4.	Total Daya Mampu	KW	90.370	12.872	76.537	-
5.	Beban Puncak	KW	75.399	36.416	111.815	-
6. Panjang Jaringan						
	JTR	Kms	1.582,98 + 35,74	125.931	2.460.943	-
	JTM	Kms	1.981,33 + 28,26	156.575	2.135.049	-
7. Jumlah Gardu Distribusi Terpasang (Trafo)						
	Daya Gardu Distribusi Terpasang (Trafo)	Kva	107.204 + 1.920	42.477	150.904	-
9.	Jumlah PLTD	Unit	41	103	144	-
10.	Jumlah Pelanggan	Plg	158.135	57.582	245.540	-
11.	Jumlah Daftar Tunggu	Plg	19.200	4.719	11.713	-
12.	Kebutuhan Daya Daftar Tunggu	KW	106.881	7.441.300	7.453.484	-

No	URAIAN	SATUAN	PT.PLN (PERSERO) WIL. KALSELTENG		TOTAL	Ket.
			Cab. P.Raya	Cab.Kapuas		
1	2	3	4	5	6	7
II. PRODUKSI						
1.	Produksi Sendiri	KWH	68.426.617	23.870.402	92.297.019	-
2.	Produksi dari pihak lain (sewa)	KWH	72.910.666	12.596.537	85.507.201	-
3.	Diterima dari Sistem (GI)	KWH	86.010.079	51.382.978	137.393.057	-
4.	Total Produksi	KWH	227.347.362	81.325.174	308.672.536	-
5.	Total Penjualan	KWH	204.500.419	75.395.080	279.895.499	-
6.	Dikirim ke pihak lain	KWH	73.848.882	5.296.875	79.145.757	-
7.	Pemakaian Sendiri	KWH	3.244.212	1.217.866	15.462.078	-
8.	Losses	%	3.531	3.590	7.121	-

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

e) Air bersih

Pelayanan air bersih dikelola oleh perusahaan Daerah/BUMD yang ada di Kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah dan pelayanannya sudah menjangkau beberapa ibukota kecamatan dan desa. Jumlah pelanggan PDAM di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah dan banyaknya air minum yang disalurkan berdasarkan data dari BPS provinsi Kalimantan Tengah mulai tahun 2005 sampai dengan 2009 ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Salah satu penyebabnya berfluktuasinya jumlah pelanggan PDAM adalah karena ada beberapa Kabupaten yang tidak tersedia datanya pada tahun-tahun tertentu.

Tabel 2.32
Banyaknya Pelanggan PDAM dan Banyaknya Air Minum yang Disalurkan di Kalimantan Tengah Tahun 2005-2009

URAIAN	TAHUN					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah Pelanggan PDAM	98.122	41.796	73.247	74.659	67.309	92.723
Banyaknya Air Minum yang disalurkan (M ²)	15.199.622	11.830.027	17.345.949	10.835.416	14.337.773	20.306.337

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

f) Perumahan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan fasilitasi pembangunan diberbagai sektor termasuk dalam bidang perumahan agar masyarakat Kalimantan Tengah dapat hidup layak. Saat ini terdapat 544.231 unit rumah layak huni yang tersebar di 14 kabupaten/kota se Kalimantan Tengah. Dengan demikian rasio kepala keluarga (KK) yang menempati rumah, baik yang dimiliki maupun yang tidak adalah 1,01, dengan asumsi bahwa 1 KK terdiri dari 4 jiwa, maka jumlah KK adalah 550.650. Artinya 1 unit rumah layak huni ditempati oleh rata-rata 1,01 KK.

2. Pelayanan Penunjang

a) Perbankan

Secara kelembagaan, jumlah jaringan kantor bank di Kalimantan Tengah yaitu bank milik pemerintah daerah, bank BUMN, bank swasta nasional dan BPR mengalami pertambahan dari tahun ke tahun. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa peluang sektor perbankan untuk memberikan pembiayaan dan pelayanan di Kalimantan Tengah masih cukup potensial. Jumlah bank di Kalimantan Tengah pada triwulan II-2010 adalah 14 bank yang terdiri dari 10 bank umum konvensional, 2 bank umum syariah dan 2 Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan jumlah jaringan kantor bank di Kalimantan Tengah pada triwulan III-2010 sebanyak 155 kantor dengan komposisi 153 kantor bank umum (termasuk kantor BRI unit) dan 2 kantor BPR. PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) sudah beroperasi pada periode ini di Kota Palangka Raya sehingga dapat meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat di Kota Palangka Raya dan sekitarnya.

Tabel 2.33
Perkembangan Kelembagaan Perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah

Jenis Bank	Tw IV-07	Tw I-08	Tw II-08	Tw III-08	Tw IV-08	Tw I-09	Tw II-09	Tw III-09	Tw IV-09	Tw I-10	Tw II-10
1. Bank Pemerintah											
- Jumlah Bank	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Jumlah Kantor*)	78	78	79	82	95	95	95	95	104	104	104
2. Bank Pemerintah Daerah											
- Jumlah Bank	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Jumlah Kantor	25	27	27	28	29	29	30	32	32	32	32
3. Bank Swasta Nasional											
- Jumlah Bank	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	7
- Jumlah Kantor	6	7	10	11	14	14	15	15	17	18	19
4. Bank Perkreditan Rakyat											
- Jumlah Bank	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
- Jumlah Kantor	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2

Keterangan : *) termasuk kantor BRI Unit

Sumber : Bank Indonesia, 2010

Total aset perbankan Kalimantan Tengah pada triwulan III-2010 mencapai 10.094 Miliar Rupiah, atau turun 5,80 persen (yoy) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,33 persen .

Menurut lokasi bank, Palangka Raya masih mendominasi persentase jumlah aset yaitu 37,06 persen atau 3.740,57 Miliar Rupiah dari total aset Kalimantan Tengah. Peringkat kedua adalah Kotawaringin Timur sebesar 1.958,39 Miliar Rupiah (19,40%), disusul dengan Kotawaringin Barat sebesar 1.762,23 Miliar Rupiah (17,46%), Kabupaten Kapuas, Barito Utara, dan Barito Selatan masing-masing dengan nilai aset sebesar 610,66 Miliar Rupiah

(6,05%), 656,22 Miliar Rupiah (6,50%), dan 388,64 Miliar Rupiah (3,85%). Selanjutnya, kabupaten lainnya yang terdiri dari Kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau, Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, dan Sukamara total asetnya sebesar 977,60 Miliar Rupiah (9,68%).

Dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan Kalimantan Tengah triwulan III-2010 tumbuh 3,25 persen (*yoy*) atau sebesar 8.294,23 Miliar Rupiah, melambat dari periode sebelumnya (6,49%). Jenis simpanan giro mengalami penurunan mencapai 21,04 persen. Namun demikian, simpanan masyarakat jenis deposito mengalami peningkatan sebesar 21,70 persen dan untuk simpanan berupa tabungan tumbuh 18,44 persen. Penurunan DPK ditengarai akibat pengaruh penggunaan dana untuk keperluan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang berlangsung di tingkat provinsi dan 2 kabupaten utama (Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat) pada triwulan III-2010.

Tabel 2.34
Dana Pihak Ketiga Menurut Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah
Triwulan II-2010 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	Giro	Tabungan	Deposito	Jumlah
Kotawaringin Timur	592.529	920.908	368.292	1.887.729
Kotawaringin Barat	316.767	557.080	219.718	1.093.565
Palangka Raya	697.707	1.620.259	804.890	3.122.856
Barito Utara	157.224	321.726	158.351	637.301
Barito Selatan	137.434	184.213	24.015	345.662
Kapuas	63.477	243.843	112.124	419.444
Lainnya *)	569.927	136.888	86.682	793.677
Jumlah	2.535.065	3.984.917	1.774.252	8.294.234

Sumber : LBU (KBI Palangka Raya)) Kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau, Katingan, Gunung Mas, Murung Raya dan Sukamara*

Perkembangan penyaluran kredit pada triwulan III-2010 melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dari 28,66 persen (*yoy*) menjadi 18,28 persen. Meski melambat, namun tingkat penyaluran kredit perbankan Kalimantan Tengah masih cukup tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK yang hanya sebesar 3,25 persen (*yoy*). *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan yang mencapai 70,10 persen.

b) Pos dan Telekomunikasi

Tahun 2004 dengan 2003 penjualan materai dan benda pos lainnya pada umumnya mengalami penurunan. Demikian pula dengan surat pos yang dikirim.

Komunikasi yang telah dimiliki daerah yaitu fasilitas telepon seluler dan otomatis tersedia disemua ibukota kabupaten bahkan sampai ke beberapa ibukota kecamatan, selain itu ada juga stasiun RRI Palangka Raya serta puluhan stasiun Radio Swasta Niaga dan amatir, Stasiun TVRI, Stasiun Relay

RCTI dan Stasiun Relay Metro TV. Jumlah pelanggan telepon di tahun 2006 sebanyak 37.355 SST dan pada tahun 2007 bertambah 38.066 SST atau menjadi 73.421 SST. Namun kemudian turun menjadi 44.949 pada tahun 2008 dan terus menurun menjadi 41.237 pada tahun 2009 seiring meningkatnya penggunaan telepon seluler. Demikian juga untuk telepon umum (wartel) dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan sejalan dengan makin meluasnya penggunaan telepon selular.

c) Perhotelan

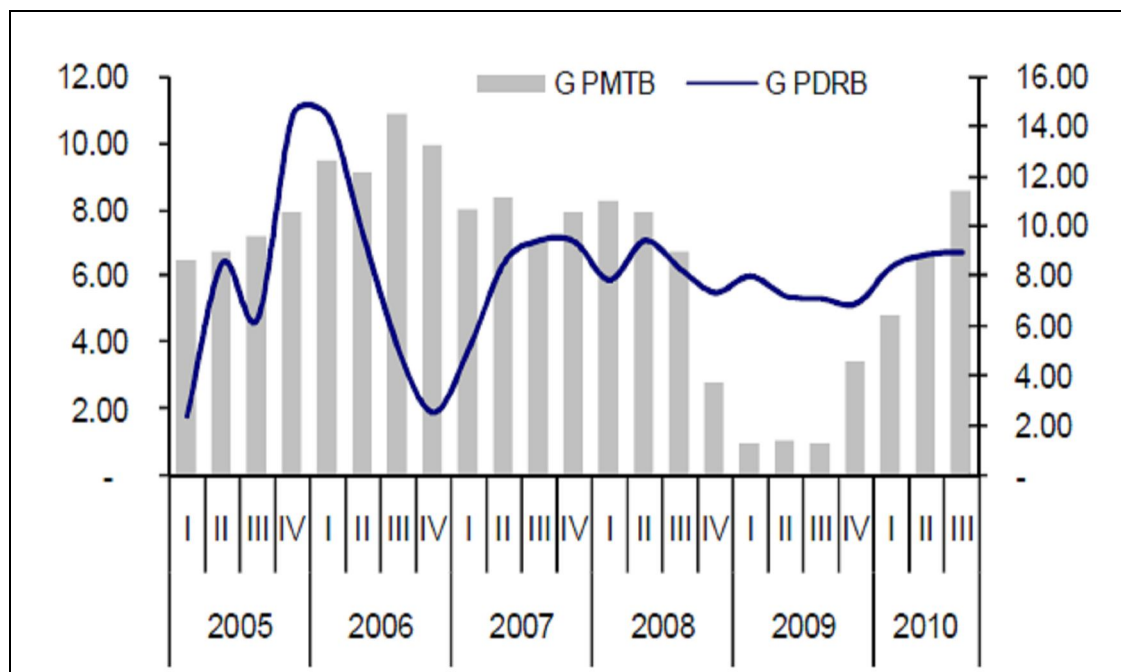
Di Kalimantan Tengah terdapat 1 (satu) hotel bintang 3 (tiga), 2 (dua) hotel bintang 2 (dua) dan 60 Hotel melati, dan ada Resort Rungan Sari yang dikelola oleh Yayasan Susila Budi Dharma dengan fasilitas, kolam renang, lapangan tenis dan *meeting centre* bertaraf internasional. Secara keseluruhan, jumlah hotel dan akomodasi lainnya di Kalimantan Tengah tahun 2009 sebanyak 317 unit, naik dibandingkan tahun 2006 sebanyak 308 unit. Sedangkan tingkat hunian untuk hotel berbintang mencapai sekitar 60%.

d) Penanaman Modal

Sesuai laporan Bank Indonesia cabang Palangka Raya, kegiatan investasi yang ditunjukkan oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) secara tahunan pada triwulan III-2010 mengalami peningkatan sebesar 11,38 persen (*yoy*) dibandingkan triwulan sebelumnya (8,88%), atau berkontribusi 4,27 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah. Meningkatnya laju investasi ditengarai berasal dari realisasi investasi pembelian alat – alat berat dan masuknya investor baru khususnya pada sub sektor perkebunan.

Sementara itu, kegiatan investasi berdasarkan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) dibandingkan dengan rencananya, masih relatif kecil pada triwulan III-2010 tercatat 10,67 persen dan 30,78 persen. Namun demikian, realisasi investasi PMDN pada triwulan ini meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, salah satunya disebabkan adanya 1 (satu) perusahaan di sektor perkebunan yang telah merealisasikan investasi sebesar 2 Triliun Rupiah.

Grafik 2.4
Pertumbuhan Investasi dan Ekonomi (yoy)
Tahun 2005-2010



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

Tabel 2.35
Realisasi Investasi PMDN Kalimantan Tengah Triwulan III-2010

No	Sektor/Sub Sektor	Jumlah Perusahaan	PMDN dalam Rp. Juta		Persentase
			Rencana	Realisasi	
1	Kehutanan	63	4.108.951,50	2.771.793,62	67,46
2	Industri Kayu	14	3.441.313,53	4.204.549,79	122,18
3	Perkebunan	79	167.637.774,23	10.421.787,67	6,22
				\$ 104.318,10	
4	Pertambangan	7	262.962,16	65.709,06	24,99
5	Perikanan	1	3.277,00	5.917,93	180,59
6	Jasa Angkutan	1	6.250,00	-	-
7	Industri Minyak	4	154.619,34	72.282,70	-
8	Industri Kimia	7	9.435.430,30	1.841.700,85	19,52
9	Real Estate	-	-	-	-
10	Jasa Lainnya	12	861.152,55	476.891,53	55
11	Peternakan	1	6.509,50	-	-
12	Industri Karet Remah	2	130.000,00	2.000	2
13	Perhotelan	-	-	-	-
	Jumlah	191	186.048.240,41	19.860.633,15	10.67
				\$ 104.318,10	

Sumber : BPMD Prov.Kalimantan Tengah, 2010

Tabel 2.36

Realisasi Investasi PMA Kalimantan Tengah Triwulan III-2010

No	Sektor/Sub Sektor	Jumlah Perusahaan	PMA dalam US \$ Ribu		Persentase
			Rencana	Realisasi	
1	Kehutanan	9	364.196,10	114.557,50 Rp.617.822,95	31,45
2	Industri Kayu	8	1.995.899,20	645.799,62	32,36
3	Perkebunan	46	2.393.220,22 +Rp.6.429.059,63	2.425.944,90 Rp.7.077.701,53	101,37
4	Pertambangan	26	2.786.530,00 +Rp.164.578,03	1.760.870,53	101,09
5	Perikanan	1	+Rp.275.000,00	0,00	63,19
6	Jasa Angkutan	1	2.500,00	2.587,50	0,00
7	Industri Minyak	4	+Rp.945.429,00	Rp.20.000,00	103,50
8	Industri Kimia	2	715,00 +Rp.105.700,00	0,00	2,12
9	Real Estate	1	400,00	0,00	0,00
10	Jasa Lainnya	83	11.042.836,07 +Rp.308.758,57	68.242,25	0,00
11	Peternakan	0	-	-	0,62
12	Industri Karet Remah	1	- +Rp.24.789,62	0,00 0,00	0,00
13	Perhotelan	1	600,00	+Rp.10.550,00	42,56
Jumlah		183	18.586.896,59	Rp.7.715.524,48	93,48

Sumber : BPMD Prov.Kalimantan Tengah, 2010

e) Harga-harga

Secara umum perkembangan harga komoditas kebutuhan rumah tangga khususnya untuk sembilan bahan pokok pada beberapa kota di Kalimantan Tengah ditunjukkan oleh perkembangan laju inflasi. Tekanan inflasi pada triwulan III-2010, terutama dipengaruhi kenaikan harga bahan pokok (beras, bawang putih, bawang merah, daging ayam ras), kenaikan harga emas, dan pengaruh kenaikan *administrated price* yaitu tarif dasar listrik. Secara periodik, laju inflasi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, serta Sampit kini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi nasional yang mencapai 5,80 persen (*yoy*) pada akhir triwulan III-2010.

Kenaikan harga komoditas terutama beras jenis premium, masih menjadi faktor utama pemicu inflasi pada sisi penawaran. Meskipun beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah mengalami surplus beras, pengaturan distribusi beras jenis premium yang diatur oleh tengkulak yang sekaligus sebagai ijon bagi petani ditengarai menjadi penyebab masih tingginya harga beras pada triwulan III-2010 ini. Selain itu, kenaikan tarif dasar listrik di bulan Agustus 2010 ikut memberikan sumbangan pada inflasi di provinsi Kalimantan Tengah.

D. Aspek Daya Saing Daerah

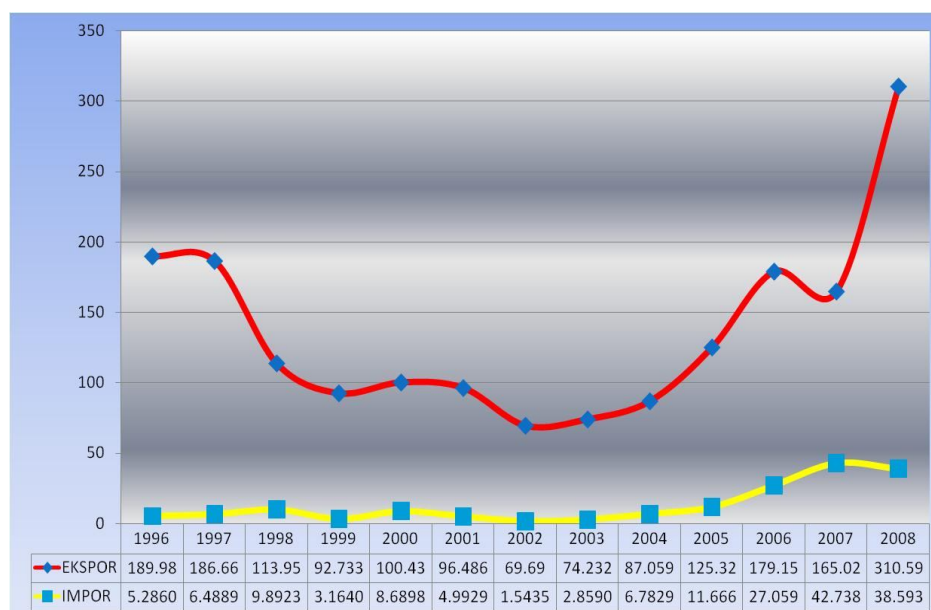
Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai

tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari tingkat PDRB, semakin tinggi tingkat PDRB per kapita maka semakin tinggi kemampuan ekonomi suatu daerah tersebut. PDRB perkapita penduduk Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan harga konstan tahun 2000 mengalami peningkatan terus menerus sejak tahun 2004 hingga tahun 2009. Pada tahun 2004 PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Tengah hanya sebesar 7,1 Juta Rupiah meningkat menjadi 8,5 Juta Rupiah pada tahun 2009. Dibandingkan dengan PDRB perkapita Regional Kalimantan, PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 berada di urutan kedua setelah Provinsi Kalimantan Timur.

Grafik 2.5
Nilai Ekspor dan Impor Kalimantan Tengah
Tahun 1996-2008 (US\$ JUTA)



Sumber: BPS Kalimantan Tengah, 2010

Jenis komoditi yang memiliki nilai ekspor terbesar di Provinsi Kalimantan adalah minyak lemak, minyak hewani/nabati (15), sedangkan nilai import terbesar adalah mesin/pesawat mekanik (84). Tabel dibawah ini menguraikan komoditas ekspor-impor di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2.37
Ekspor dan Impor Kalimantan Tengah Menurut Komoditas
Januari – September 2010 (US\$ Juta)

Komoditas	Nilai (juta US\$)				% Perubahan Sept. 2010 terhadap Agust. 2010	% Perubahan Jan-Sept. 2010 terhadap 2009	% Peran terhadap total Jan-Sept.2010
	Agust. 2010	Sept. 2010	Jan-Sept 2010	Jan-Sept. 2009			
Ekspor	28.14	30.71	261.18	256.78	9,13	1,71	100,00
1) Kayu , barang dari kayu (44)	5.74	8.14	61.01	169.67	41,81	-64,04	23,36
2) Bijih, kerak dan abu logam (26)	0.60	1.36	30.94	18.92	126,67	63,53	11,85
3) Lemak&minyak hewani/nabati (15)	21.80	20.80	162.41	61.95	-4,59	162,16	62,18
4) Lainnya	0.00	0.41	6.82	6.24		9,29	2,61
Impor	4.65	4.27	44.60	32.37	-18,17	37,78	100,00
1. Mesin/pesawat mekanik(84)	3.88	3.33	32.79	21.24	-14,18	54,38	73,52
2. Mesin/pesawat listrik(85)	0.22	0.18	4.46	1.08	-18,18	312,96	10,00
3. Benda-benda dari besi dan baja (73)	0.45	0.13	3.49	5.01	-71,11	-30,34	7,83
4. Lainnya	0.10	0.63	3.86	5.04	530,00	-23,41	8,65

Sumber: BPS Kalimantan Tengah,2010

2. Iklim Berinvestasi

Merupakan komitmen pemerintah daerah bahwa kebijakan penanaman modal daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, meliputi 2 (dua) langkah yakni:

a) Arah dan tujuan kebijakan pemerintah daerah dibidang penanaman modal mempunyai maksud sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan dan mengembangkan investasi yang sudah ada.
- 2) Menambah dan mencari serta menarik investor-investor baru baik lokal, nasional maupun asing.
- 3) Pemberdayaan masyarakat dan ekonomi rakyat.

b) Strategi kebijakan pemerintah daerah di bidang penanaman modal, meliputi:

- 1) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian proyek investasi PMA dan PMDN melalui satuan tugas (satgas) terpadu baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan sehat.
- 2) Memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bersama aparat keamanan terhadap para investor.
- 3) Memberikan kemudahan pelayanan perizinan yang cepat, keringanan pajak, pembebasan pajak untuk masa persiapan dan kontrustruksi (berupa *tax holiday* secara selektif)

- 4) Melakukan promosi: kedalam dan luar negeri dengan mengikuti even-even pameran, penyebaran booklet dan leaflet melalui perwakilan/kedutaan Indonesia dan asing di dalam dan di luar negeri baik melalui jasa pos, website/internet, dan email.
- 5) Menjalin dan mewujudkan kerjasama sektoral, nasional, regional, serta internasional yang mengutamakan kepentingan nasional dalam rangka meningkatkan penanaman modal didaerah, seperti kerjasama BIMP-EAGA, ASEAN, AIDA, AFTA dan lainnya.
- 6) Peningkatan pengembangan dan pembangunan Prasarana dasar/Infrastruktur daerah, sebagai sarana pendukung peningkatan investasi dan perdagangan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Perkembangan penanaman modal, baik PMA/PMDN, mengalami perubahan/peningkatan, baik dalam jumlah proyek maupun jumlah investasi. Jumlah perusahaan PMA/PMDN secara kumulatif (data sampai dengan Agustus tahun 2010) sebanyak 374 buah perusahaan dengan perincian PMA sebanyak 183 buah perusahaan dengan rencana investasi sebesar 18,5 Milyar Dollar lebih dan realisasi sebesar 5,0 Milyar Dollar lebih atau 26,99 persen sedangkan PMDN sebanyak 191 buah perusahaan dengan rencana investasi sebesar 186,0 Triliun Rupiah lebih dan realisasi sebesar 19,8 Triliun Rupiah lebih atau 10,67 persen.

Tabel 2.38
Jumlah PMA dan PMDN di Provinsi Kalimantan Tengah
per 31 Agustus 2010

No.	TAHUN	PMA	PMDN	JUMLAH
1.	2006	68	200	268
2.	2007	89	205	294
3.	2008	118	176	294
4.	2009	165	181	346
5.	2010	183	191	374

Sumber : BPMD Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

Tabel 2.39
Perkembangan PMA/PMDN di Provinsi Kalimantan Tengah
per 31 Agustus 2010

NO.	TINGKAT PERKEMBANGAN	Agustus 2010		JUMLAH
		PMA	PMDN	
1	Persiapan	136	30	166
2	Konstruksi	7	28	35
3	Produksi Percobaan	0	6	6
4	Produksi Komersial	40	127	167
JUMLAH		183	191	374

Sumber : BPMD Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

Tabel 2.40

**Rencana dan Realisasi Investasi PMDN di Provinsi Kalimantan Tengah
s/d akhir Agustus 2010**

NO.	SEKTOR / SUB SEKTOR	JUMLAH PERUSAHAAN	PMDN dalam Rp. Juta		PERSENTASE	
			RENCANA	REALISASI		
1.	Kehutanan	63	4.108.951,80	2.771.793,62	67,46	%
2.	Industri kayu	14	3.441.313,53	4.204.549,79	122,18	%
3.	Perkebunan	79	167.637.774,23	10.421.787,67	6,22	%
4.	Pertambangan	7	262.962,16	\$ 104.318,10	24,99	%
5.	Perikanan	1	3.277,00	65.709,06	180,59	%
6.	Jasa Angkutan	1	6.250,00	5.917,93	-	%
7.	Industri minyak	4	154.619,34	-	-	%
8.	Industri kimia	7	9.435.430,30	72.282,70	19,52	%
9.	Real estate	-	-	1.841.700,85	-	%
10.	Jasa lainnya	12	861.152,55	-	55	%
11.	Peternakan	1	6.509,50	476.891,53	-	%
12.	Industri karet remah	2	130.000,00	-	2	%
13.	Perhotelan	-	-	2.000		%
JUMLAH		191	186.048.240,41	19.860.633,15 \$ 104.318,10	10,67	%

Sumber : BPMD Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

Tabel 2.41

Rencana dan Realisasi Investasi PMA s/d akhir Agustus 2010

NO.	SEKTOR / SUB SEKTOR	JUMLAH PERUSAHAAN	PMA dalam US \$ RIBU			
			RENCANA	REALISASI	PERSENTASE	
1.	KEHUTANAN	9	+ Rp 364.196,10	114.557,50	31,45 %	
			-	617.822,95	%	
2.	INDUSTRI KAYU	8	+ Rp 1.995.899,20	645.799,62	32,36 %	
3.	PERKEBUNAN	46	+ Rp 2.393.220,22	2.425.944,90	101,37 %	
			6.429.059,63	7.077.701,53	110,09 %	
4.	PERTAMBANGAN	26	2.786.530,00	1.760.870,53	63,19 %	
			164.578,03		0,00 %	
5.	PERIKANAN	1	275.000,00	-	0,00 %	
6.	JASA ANGKUTAN	1	2.500,00	2.587,50	103,50 %	
7.	INDUSTRI MINYAK	4	945.429,00	20.000,00	2,12 %	
8.	INDUSTRI KIMIA	2	715,00	-	0,00 %	
			+ Rp 105.700,00		0,00 %	
9.	REAL ESTATE	1	400,00	-	0,00 %	
10	JASA LAINNYA	83	11.042.836,07	68.242,25	0,62 %	
			+ Rp 308.758,57	-	0,00 %	
11	PETERNAKAN	0	-	-	%	
12	INDUSTRI KARET REMAH	1	24.789,62	+Rp. 10.550,00	42,56 %	
13	PERHOTELAN	1	+ Rp 600,00			
JUMLAH		183	+Rp 18.586.896,59 8.253.314,85	5.018.002,30 Rp.7.715.524,48	26,9975 93,48	%

Sumber : BPMD Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

Untuk menunjang kegiatan investasi telah tersedia 10 (sepuluh) pelabuhan laut serta 10 (sepuluh) bandar udara. Pelabuhan laut terbesar adalah Pelabuhan Kumai dengan panjang dermaga 900 m, diikuti Pelabuhan Sampit (316 m) dan Pelabuhan Kuala Kapuas (150 m). Sedangkan 10 (sepuluh) bandar udara tersebut meliputi: Bandara Sanggu, Beringin, Sangkalemu, Kuala Kurun, Iskandar, H. Asan, Kuala Pembuang, Tubang Samba, Air Strip IMK dan Tjilik Riwut. Adapun bandara terbesar di provinsi ini adalah Bandara Tjilik Riwut yang terletak di Kota Palangka Raya dengan panjang landasan mencapai 2.500 m diikuti bandara Iskandar di Kotawaringin Barat dengan panjang landasan 1.850 m dan Bandara H. Asan yang memiliki panjang landasan 1.850m.

Selain data primer maupun sekunder yang disajikan diatas, Upah Minimum Regional merupakan salah satu penarik investasi bagi investor, kejelasan regulasi tentang upah minimum akan memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi. Kalimantan Tengah yang memiliki 13 kabupaten 1 kota, rata-rata memiliki UMR pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.001.744,-. Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kabupaten yang memberikan UMR paling besar di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar Rp. 1.059.754,-. Pada tahun 2010, Pemerintah Provinsi Kalimantan memberlakukan UMR sama pada 13 kabupaten dan 1 kota yaitu sebesar Rp. 1.134.580,-. Data jumlah data UMR kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.42
UMR Daerah Tahunan
Tahun 2008-2010

Upah Minimum Regional (Rp/bulan)			
Tahun	2008	2009	2010
Provinsi Kalimantan Tengah		986.590,-	1.134.580,-
Kabupaten Barito Selatan	765.868,-	873.089,-	1.029.153,-
Kabupaten Barito Timur	765.868,-	873.089,-	986.590,-
Kabupaten Barito Utara	788.844,-	895.338,-	1.002.778,-
Kabupaten Gunungmas	765.868,-	873.089,-	986.590,-
Kabupaten Kapuas	765.868,-	873.089,-	986.590,-
Kabupaten Katingan	765.868,-	873.089,-	986.590,-
Kabupaten Kotawaringin Barat	781.185,-	890.550,-	1.059.754,-
Kabupaten Kotawaringin Timur	765.868,-	873.089,-	1.008.418,-
Kabupaten Lamandau	765.868,-	873.089,-	986.590,-
Kabupaten Murung Raya	804.161,-	924.785,-	1.045.007,-
Kabupaten Seruyan	765.868,-	873.089,-	986.590,-
Kabupaten Sukamara	765.868,-	873.089,-	986.590,-
Kota Palangka Raya	873.089,-	873.089,-	986.590,-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Tak dapat disangkal, bahwa agenda pembangunan sepenuhnya tergantung sejauh mana pendanaan yang memadai dapat disediakan. Keberhasilan pembangunan juga ditunjang oleh sejauh mana dana riil untuk alokasi pembangunan disediakan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 5 (lima) tahun mendatang.

A. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun kebelakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan kedepan. Analisis terhadap kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Tengah mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah.

1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengukuran kinerja pelaksanaan APBD dilaksanakan dengan mengukur sumber pendapatan dan belanja. Sumber utama pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari dana perimbangan yang sebagian besar berasal dari dana alokasi umum. Dana alokasi umum Kalimantan Tengah setiap tahun selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun sebesar 6,59 persen.

Selain dari dana perimbangan, sumber utama pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD Provinsi Kalimantan Tengah terbesar diperoleh dari pajak daerah. Pajak daerah Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,21 persen mulai dari tahun 2006-2010. Ini mengindikasikan bahwa SKPD yang bertugas sebagai pemungut PAD dapat memaksimalkan potensi PAD yang ada di Kalimantan Tengah.

Kontribusi dari PAD ini dari tahun ke tahun memang selalu mengalami kenaikan, sehingga saat ini sudah mendekati kondisi ideal dimana belanja tidak langsung diluar gaji PNS bisa dibiayai dari PAD. Hal ini berarti bahwa untuk menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan sudah mampu mandiri, namun untuk membiayai anggaran belanja keseluruhan masih tetap bergantung dari Dana

Perimbangan. Akibatnya sangat rentan terhadap kondisi ekonomi makro nasional dan global yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya pulih dari krisis. Sisi lain dari kenyataan ini adalah bahwa keuangan daerah masih sangat tergantung dari transfer dana dari Pemerintah Pusat.

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2010 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Rata – rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2005-2010

No.	Uraian	2005 (Rp)	2006 (Rp)	2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	Pendapatan	569.090.326.721,36	906.028.941.732,97	1.073.400.956.554,56	1.246.835.943.857,85	1.367.412.136.149,02	1.563.654.255	14,66
1.1	Pendapatan Asli Daerah	154.82.628.880,36	215.715.647.347,91	273.258.238.632,96	380.665.558.786,85	382.020.409.095,02	512.445.360.620,47	25,12
1.1.1	Pajak Daerah	128.105.737.782,84	177.793.231.043,00	216.074.120.014,00	318.109.353.865,00	300.825.199.020,00	416.518.895.519,00	20,21
1.1.2	Retribusi Daerah	11.253.605.127,00	17.528.749.612,00	17.075.910.831,66	23.495.499.119,00	24.073.561.964,00	25.029.736.981,00	10,36
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	4.559.544.772,00	7.096.249.626,53	12.725.874.152,01	12.297.018.496,16	22.897.144.439,69	17.303.859.607,10	34,43
1.1.4	Lain - lain PAD Yang Sah	10.263.741.198,52	13.297.417.066,38	27.382.333.635,29	26.763.687.306,69	34.224.503.671,33	53.592.868.513,37	47,03
1.2	Dana Perimbangan	372.615.588.966,00	673.708.294.385,06	735.142.717.921,20	859.670.385.071,00	913.061.727.054,00	921.225.167.161,00	8,29
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	85.038.977.030	121.708.294.385,06	163.852.717.921,60	149.278.295.071,00	158.943.521.054,00	181.048.474.161,00	11,53
1.2.2	Dana Alokasi Umum	287.576.611.936,00	552.000.000.000	571.290.000.000,00	670.213.090.000,00	694.822.206.000,00	707.880.493.000,00	6,59
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	40.179.000.000	59.296.000.000	32.296.200.000,00	

No.	Uraian	2005 (Rp)	2006 (Rp)	2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	42.292.108.875	16.605.000.000,00	65.000.000.000	6.500.000.000	72.330.000.000,00	129.983.728.141,00	3,23
1.3.1	Hibah	-	-	-	2.000.000.000	-	-	
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	4.500.000.000	-	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	12.728.110.000	-	65.000.000.000	-	60.000.000.000	-	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Kabupaten dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	29.563.998.875	-	-	-	5.185.000.000	-	

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

Dari tabel 3.1 di atas diketahui bahwa secara umum pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah meningkat dalam 5 tahun terakhir dengan persentase kenaikan sebesar **14,66 persen**. Pada akhir tahun 2006 pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 906.028.941.732,97 sedangkan pada akhir tahun 2010 pendapatan naik menjadi Rp. 1.563.654.225.922,47,-. Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap. Semakin banyak belanja yang terserap semakin bagus kinerja suatu daerah.

Belanja pegawai mendapatkan porsi terbesar dari anggaran yang tersedia untuk belanja tidak langsung dalam APBD. Pada tahun 2007, 2008 dan 2009, persentase belanja pegawai terhadap total belanja tidak langsung adalah masing-masing sebesar 50,30 persen, 51,55 persen dan 48,80 persen. Belanja pegawai Provinsi Kalimantan Tengah selalu mengalami peningkatan, karena adanya kebijakan pemerintah menaikkan gaji pegawai, adanya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kenaikan tunjangan, adanya pengangkatan CPNS dan lain-lain, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 26,94% seperti terlihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007-2009

No.	Uraian	2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	Belanja Pegawai	167.667.833.562,00	217.159.592.692,00	270.081.653.656,00	26,94
2	Belanja Bunga	-	-	-	
3	Belanja Subsidi	-	1.882.051.800,00	22.575.300.000,00	549,75
4	Belanja Hibah	-	882.000.000,00	69.685.350.000,00	3900,42
5	Belanja Bantuan Sosial	41.330.633.690,00	41.543.262.165,00	80.595.836.358,00	47,26
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	109.628.852.129,00	133.960.232.176,00	207.206.951.678,00	38,44
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	13.498.474.225,00	25.769.815.000,00	15.250.000.000,00	25,04
8	Belanja Tidak Terduga	1.236.297.283,00	31.797.100.000,00	5.904.842.338,32	1.195,27
Jumlah Belanja Tidak Langsung		333.362.090.889,00	421.228.750.933,00	671.299.934.030,32	42,86

Sumber : Biro Keuangan dan Aset Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

2. Neraca Daerah

Neraca merupakan gambaran posisi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi. Dalam ilmu manajemen keuangan untuk mengukur kinerja keuangan suatu entitas dapat digunakan analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

Analisis rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan entitas memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Sehingga analisis likuiditas digunakan oleh Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengukur kemampuan Provinsi Kalimantan Tengah untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek.

Analisis rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan besarnya equitas Provinsi Kalimantan Tengah. Neraca Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2007 sampai dengan periode tahun 2009 mengalami perkembangan yang sangat baik, seiring dengan perkembangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tersebut, terutama terkait dengan belanja. Perkembangan ini dapat dilihat terutama dari pertumbuhan aset tetap Provinsi Kalimantan Tengah rata-rata sebesar 16,25% setiap tahunnya. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3. berikut ini.

Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2007-2009

No.	Uraian	2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	ASET				
1.1	ASET LANCAR	214.307.740.542,81	166.078.577.465,25	24.849.277.493,10	-22,50
1.1.1.	Kas	192.853.028.266,81	145.991.813.678,54	22.353.289.923,74	-24,30
1.1.2.	Piutang	16.282.672.366,00	10.395.176.927,71	880425595,36	-36,16
1.1.3.	Persediaan	5.172.039.910,00	9.691.586.859,00	1.615.561.974,00	8,38
1.2.	ASET TETAP	2.974.364.273.549,00	3.457.604.637.724,78	3.967.147.719.746,05	16,25
1.2.1.	Tanah	365.633.550.945,00	368.810.022.329,48	366.472.736.952,48	0,87
1.2.2.	Peralatan dan Mesin	208.980.417.633,00	240.314.074.640,88	262.709.945.786,38	14,99
1.2.3.	Gedung dan Bangunan	342.340.219.065,00	370.896.210.514,72	413.050.934.939,37	8,34
1.2.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.896.565.823.683,00	2.151.746.623.708,24	2.344.927.206.359,73	13,45
1.2.5.	Aset Tetap Lainnya	23.016.949.980,00	25.205.083.135,46	25.983.342.156,00	9,51
1.2.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	137.827.312.243,00	300.632.623.396,00	554.003.553.552,00	118,12
1.2.7.	dst.....				
1.3.	ASET LAINNYA	43.503.959.077,00	113.696.182.167,70	228.200.270.516,39	161,35
1.3.1.	Tagihan Penjualan Angsuran	2.416.232.540,00	4.907.689.918,70	3.972.039.819,00	103,11
1.3.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.039.244.109,00	1.039.244.109,00	822.694.024,00	0,00
1.3.3.	Lain – lain Aset	40.048.482.428,00	107.749.248.140,00	223.405.536.673,39	169,05
	JUMLAH ASET DAERAH	3.232.175.973.168,81	3.737.379.397.357,73	4.338.976.633.160,40	15,63
2	KEWAJIBAN	10.534.234.498,00	7.820.095.604,00	215.128.230,00	-25,76
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10.439.826.498,00	7.820.095.604,00	215.128.230,00	-25,09
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	9.700.431,00	28.309.330,00	39.079.280,00	191,84
2.1.2.	Utang Jangka Pendek Lainnya	10.430.126.067,00	7.791.786.274,00	176.048.950,00	25,30
2.1.3.	Pendapatan Diterima Dimuka				
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	94.408.000,00	-	-	-100
2.2.1	Utang Dalam Negeri	94.408.000,00	-	-	-100

No.	Uraian	2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.2.2	Utang Luar Negeri		-	-	
2.2.3	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-	
3	EKUITAS DANA	3.303.831.415.752,81	3.819.701.813.971,73	4.338.763.504.930,40	15,61
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR				
3.1.1.	SILPA	192.853.028.266,81	145.977.801.895,32	23.929.772.617,74	-24,31
3.1.2.	Pendapatan Yang Ditangguhkan	-	14.011.783,22	880.425.595,36	100
3.1.3.	Cadangan Piutang	16.282.672.366,00	10.395.176.927,71	4.449.294.861,86	-93,71
3.1.4.	Cadangan Persediaan	5.172.039.910,00	9.691.586.859,00	11.469.330.091,00	87,38
3.1.5.	Dana Yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	10.439.826.498,00	7.820.095.604,00	176.048.950,00	-25,09
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI				
3.2.1.	Diinvestasikan dalam investasi jangka Panjang	59.216.810.134,00	69.216.810.134,00	70.020.010.134,00	16,89
3.2.2.	Diinvestasikan Dalam Aset tetap	2.974.364.273.549,00	3.457.604.637.724,78	3.967.147.719.746,05	115,25
3.2.3.	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya		113.696.182.167,70	228.200.270.516,39	161,35
3.2.4.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	94.408.000,00	-	-	-100
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN				
3.3.1	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	22.784.050.948,00	20.925.702.084,00	32.842.722.318,00	-8,16
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.314.365.650.250,81	3.827.521.909.575,73	4.338.976.633.160,40	15,48

Sumber : Biro Keuangan dan Aset Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni sekitar 50% - 63%. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi masih perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain: Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan sendiri oleh daerah.

1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis ini sekurang-kurangnya dilakukan melalui analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran, yang dapat dilihat pada tabel 3.4 sedangkan analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.4
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Tahun 2007-2009

No.	Uraian	2007	2008	2009	Rata-rata pertumbuhan (%)
		%	%	%	
A. Belanja Tidak Langsung					
1	Belanja Pegawai	16,26	16,14	36,98	16,20
2	Belanja Bunga	-	-	-	
3	Belanja Subsidi	-	0,15	2,49	0,5
4	Belanja Hibah	-	0,09	2,03	0,09
5	Belanja Bantuan Sosial	4,23	3,34	5,24	3,79
6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi dan Pemerintah Desa	10,07	10,08	24,99	10,08
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	1,22	5,68	2,16	3,45
8	Belanja Tidak Terduga	2,99	0,56	0,02	1,78

B. Belanja Langsung					
1	Belanja Pegawai	4,81	4,34	5,48	4,58
2	Belanja Barang dan Jasa	17,99	19,31	28,39	18,65
3	Belanja Modal	42,43	44,18	60,98	43,31

Sumber : Biro Keuangan dan Aset Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007-2009

No.	Uraian	2007	2008	2009	Rata-rata pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
A	Belanja Tidak Langsung				21,93
		167.667.833.562,00	217.159.592.692,00	248.296.583.284	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	121.222.942.973,00	158.752.487.587,00	179.146.764.460	21,90
2	Belanja Tambahan Penghasilan	28.411.625.640,00	36.520.580.500,00	49.767.130.985	32,41
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.164.000.000,00	4.345.510.000,00	4.450.000.000	3,38
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	13.869.264.949,00	17.541.014.605,00	14.932.687.839	5,80
B	Belanja Langsung				20,15
		85.796.426.382,69	119.674.634.057,31	120.637.113.905,60	
1	Belanja Honorarium PNS	10.699.135.276,00	14.201.594.208,00	16.557.506.305	24,66
2	Belanja Uang Lembur	2.111.410.000,00	1.849.777.000,00	1.862.800.250	-5,84
3	Belanja Bea Siswa Pendidikan PNS	326.475.000,00	647.775.000,00	282.595.000	21,02
4	Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.256.204.800,00	4.296.955.365,00	4.141.441.630	14,17
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.752.670.983,69	1.415.160.342,31	667.052.654,60	-36,06
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	19.070.125.808,00	25.777.630.525,00	25.541.344.180	17,13
7	Belanja Pakaian Dinas dan atributnya	1.476.908.550,00	1.804.963.300,00	1.797.168.500	10,89
8	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.432.188.400,00	1.728.432.800,00	1.647.413.000	8,00
9	Belanja perjalanan dinas	45.603.667.565,00	67.772.304.317,00	68.009.942.386	24,48
10	Belanja perjalanan pindah tugas	67.640.000,00	180.041.200,00	128.850.000	68,87
	Total	253.464.259.944,69	336.834.226.749,31	368.933.697.189,60	21,21

Sumber : Biro Keuangan dan Aset Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap periodik oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar secara periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan serta keberlangsungan pelayanan dasar pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru, dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Pengeluaran pembiayaan yang wajib, mengikat dan prioritas utama adalah pengeluaran pembiayaan yang harus dibayai, baik karena amanat perundang-undangan maupun komitmen/kontrak perjanjian pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Data analisis realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007-2009

No.	Uraian	2007	2008	2009	Rata-rata pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
A	Belanja Tidak Langsung	125.386.942.973,00	163.097.997.587,00	431.50.183.239	97,32
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	121.222.942.973,00	158.752.487.587,00	179.146.764.460	21,90
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.164.000.000,00	4.345.510.000,00	4.450.000.000	3,38
4	Belanja Bunga	-	-	-	-
5	Belanja Subsidi	-	1.882.051.800,00	16.721.050.000	394,22
6	Belanja Hibah	-	882.000.000,00	13.646.756.973	723,63
7	Belanja Bantuan Sosial	41.330.633.690,00	41.543.262.165,00	35.149.721.602	-7,44
8	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /Kab/Kota dan Desa	109.628.852.129,00	133.960.232.176,00	167.793.817.704	23,73
9	Belanja Bantuan Keuangan	13.498.474.225,00	25.769.815.000,00	14.491.572.500	23,57
10	Belanja Tidak Terduga	1.236.297.283,00	31.797.100,00	150.500.000	137,94
B	Belanja Langsung	36.254.199.349,69	52.806.324.103,31	54.475.943.044,60	24,41
1	Belanja Honorarium PNS khusus untuk Guru dan tenaga medis				
2	Belanja Bea Siswa Pendidikan PNS	326.475.000,00	647.775.000,00	282.595.000	21,12
3	Belanja Jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	15.104.927.558,00	24.965.758.236,00	27.984.951.210	38,69
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)				

No.	Uraian	2007	2008	2009	Rata-rata pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.752.670.983,69	1.415.160.342,31	667.052.654,60	-36,06
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	19.070.125.808,00	25.777.630.525,00	25.541.344.180	17,13
7	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	-
C	Pembiayaan Pengeluaran	20.000.000.000,00	30.050.881.909,00	18.127.697.344	5,29
1	Pembentukan dana cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	803.200.000	-45,98
3	Pembayaran pokok utang	-	10.050.881.909,00	7.324.497.344	-13,56
Total (A+B+C)		181.641.142.322,69	245.955.203.599,31	504.153.823.627,60	70,19

Sumber : Biro Keuangan dan Aset Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah untuk analisis kerangka pendanaan.

Analisis proporsi belanja pendidikan dapat dikategorikan sebagai pengeluaran wajib dan mengikat dan pengeluaran yang tidak dapat dihindari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan kebijakan pendanaan pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD. Data proporsi belanja pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7
Proporsi Belanja Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2007-2009

No	Uraian	2007		2008		2009	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Belanja Tidak Langsung	12.269.985.930	16,99	13.884.644.031	16,00	66.621.923.163	23,78
1	Belanja gaji dan tunjangan (PNS pada Dinas Pendidikan)	-	-	-	-	-	-
2	Belanja gaji dan tunjangan (Tenaga Kependidikan)	10.369.785.930	14,35	11.387.344.031	13,16	13.049.583.235	4,66
3	Belanja tambahan penghasilan (tenaga kependidikan)	1.900.200.000	2,63	2.461.300.000	2,84	3.367.200.000	1,20
4	Belanja bantuan keuangan (pelaksanaan Fungsi Pendidikan)	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2007		2008		2009	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
5	Belanja Hibah (pelaksanaan Fungsi Pendidikan)	-	-	-	-	50.205.139.928	17,92
6	Belanja bantuan sosial (pelaksanaan Fungsi Pendidikan)	-	-	-	-	-	-
B	Belanja Langsung	59.966.354.050	83,01	72.704.154.050	84,00	213.574.624.800	76,22
1	Belanja Kegiatan (pada dinas pendidikan)	59.966.354.050	83,01	72.704.154.050	84,00	213.574.624.800	76,22
2	Belanja Kegiatan (pelaksanaan fungsi pendidikan)	-	-	-	-	-	-
	Belanja Anggaran (pelaksanaan Fungsi Pendidikan termasuk Gaji Pendidik)	-	-	-	-	-	-
A+B	Total Belanja Daerah Fungsi Pendidikan	72.236.339.980		86.552.798.081		280.196.547.963	
C	Total Belanja Daerah	72.236.339.980	100	86.552.798.081	100	280.196.547.963	100

Sumber : Biro Keuangan dan Aset Setda Provinsi Kalimantan Tengah, 2010

% = dihitung dengan pembilang komponen belanja dan penyebut total belanja daerah dikali 100%

2. Analisis Pembiayaan

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan menggunakan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana Cadangan.

Melihat prediksi lima tahun ke depan, terlihat bahwa persentase kenaikan belanja lebih besar dari pada kenaikan pendapatan. Oleh karena itu dalam upaya membiayai kegiatan Pemerintahan diperlukan langkah-langkah pembiayaan baik dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, hutang dan sebagainya.

Tabel 3.8
Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2008-2009

Uraian	2008 (Rp)	2009 (Rp)
Realisasi Pendapatan Daerah Dikurangi realisasi:	1.246.835.943.857,85	1.367.412.136.149,02
- Belanja Daerah	978.628.833.703,69	1.276.361.391.219,34
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20.000.000.000,00	30.050.881.909,00
Defisit riil	248.207.110.154,16	60.999.863.020,68

Sumber : Hasil analisis, diolah dari berbagai sumber, 2010

Tabel 3.9
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2007-2009

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	191,65	323,71	100
2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	21,32	0,00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
7.	Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00

Sumber : Hasil analisis, diolah dari berbagai sumber, 2010

C. Kerangka Pendanaan

Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2010-2015 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode tahun 2006-2010, maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2010-2015.

1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan

strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni sekitar 50% hingga 63%. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka kebijakan umum pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

- 1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- 3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah.
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- 3) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
- 4) Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.
- 5) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
- 6) Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah.
- 7) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
- 8) Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD dan Kantor Bersama Samsat sebagai ujung tombak pelayanan publik.
- 9) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

Peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU tersebut telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

b. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlahnya realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin

meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil PBB, PPH dan CHT adalah:

- 1) Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah,
- 2) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi

sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, secara berkelanjutan.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta, sesuai ketentuan.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

3. Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan umum anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh para aparatur pengelola keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

a. Pendapatan Daerah

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, pemerintah daerah merencanakan peningkatan pendapatan baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang

bersumber dari pusat (dana perimbangan), maupun pendapatan lain-lain yang sah. Diprediksi bahwa pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah akan meningkat sebesar 15% setiap tahun sejak tahun 2011, sehingga pada tahun 2015 besarnya pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp. 2,98 Triliun Rupiah lebih, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.10.

Saat ini, sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibanding dana-dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Pertumbuhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD lima tahun mendatang, apabila sumber PAD tersebut menunjukkan peningkatan dalam kualitas dan kuantitas terutama sumber-sumber yang menjadi objek PAD. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh.

b. Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus menjadi kebijakan yang diaplikasikan pada semua pos-pos belanja.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk Belanja Tidak Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu, untuk Belanja Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

1). Belanja Tidak Langsung

Pada tahun anggaran 2011, sebagaimana tahun 2009 dan 2010, pemerintah menetapkan menaikkan gaji PNS. Tentunya hal ini akan berpengaruh pada APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima tahun ke depan.

Kenaikan gaji pegawai negeri sipil tersebut dibiayai oleh sumber pendapatan DAU. Dengan demikian kenaikan gaji pegawai diharapkan dapat diikuti oleh kenaikan DAU. Belanja yang signifikan pada kelompok

belanja tidak langsung adalah belanja bantuan sosial. Alokasi bantuan sosial diarahkan kepada masyarakat dan berbagai organisasi baik profesi maupun kemasyarakatan. Tujuan alokasi belanja bantuan sosial adalah sebagai manifestasi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Mekanisme anggaran yang dilaksanakan adalah bersifat *block grant*, artinya masyarakat dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan, dengan tidak keluar dari koridor peraturan yang berlaku. Selain itu, komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan juga berimplikasi pada meningkatnya belanja subsidi pendidikan dan kesehatan yang juga akan berpengaruh pada peningkatan Belanja Tidak Langsung dalam lima tahun ke depan.

2). Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

Belanja Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Belanja Pegawai dalam Belanja Langsung ini berbeda dengan Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung. Belanja Pegawai pada Belanja Langsung antara lain untuk Honorarium, Uang Lembur, Belanja Beasiswa Pendidikan, dan Belanja Kursus. Sementara itu, Belanja Langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, perbaikan infrastruktur untuk mempercepat peningkatan akses masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk Belanja Modal, pengeluaran belanja modal pada lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya visi misi provinsi Kalimantan Tengah.

Secara lengkap gambaran tentang prospek belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1.	Pendapatan	1.705.516.480.000	1.961.343.952.000	2.255.545.544.800	2.593.877.376.520	2.982.958.982.998
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	91.562.977.954	101.319.275.749	112.116.158.524	124.182.772.137	137.506.073.024
	Total penerimaan	1.797.079.457.954	2.062.663.227.749	2.367.661.703.324	2.718.060.148.657	3.120.465.056.022
	Dikurangi:					
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.201.959.150.751	1.400.015.368.693	1.585.334.301.658	1.802.592.388.444	2.026.153.679.574
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	595.120.307.203	662.647.859.057	782.327.401.666	915.467.760.213	1.094.311.376.449

Sumber : Hasil analisis, diolah dari berbagai sumber, 2010

Dari tabel 3.10 di atas dapat dilihat bahwa pendapatan diprediksikan naik sebesar sebesar 15 persen. Hal tersebut didasarkan pada data historis pendapatan seperti terlihat pada tabel 3.1, dimana pendapatan tumbuh rata-rata 14,66 persen pada periode tahun 2006-2010. SILPA untuk menutup defisit anggaran yang diprediksikan pada tahun 2011-2015 masing-masing sebesar Rp.12.500.000.000; Rp.14.350.000.000; Rp.16.450.000.000; Rp.18.950.000.000 dan Rp. 1.750.000.000. Kemudian untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah belanja yang digunakan untuk belanja yang wajib dikeluarkan meliputi belanja tidak langsung untuk belanja pegawai dan belanja bagi hasil, belanja untuk sektor pendidikan yang ditetapkan tidak kurang dari 20 persen dari APBD, belanja langsung wajib untuk belanja bayar listrik, PDAM, belanja langsung untuk uang makan pegawai. Selain itu juga belanja untuk mendanai belanja langsung, misi 1 sampai dengan misi 7. Kemudian yang harus dipenuhi adalah pengeluaran pembiayaan yang mengikat.

Selanjutnya untuk penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan secara lengkap gambarannya sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.11 berikut ini:

Tabel 3.11
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	595.120.307.203	662.647.859.057	782.327.401.666	915.467.760.213	1.094.311.376.449
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	-	-	-	-	-
II.a	Belanja Langsung	838.102.705.137	1.007.788.799.651	1.207.299.832.416	1.441.662.090.657	1.716.427.192.223
II.b	Pembentukan dana cadangan	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	Dikurangi:					
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	386.109.184.036	494.679.829.498	580.381.895.286	686.690.574.375	786.646.562.313
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas II (II.a+II.b-II.c-II.d)	451.993.521.101	513.108.970.153	626.917.937.130	754.971.516.283	929.780.629.910
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	143.126.786.102	149.538.888.904	155.409.464.537	160.496.243.930	164.530.746.539
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas III	-	-	-	-	-
III.a	Belanja Tidak Langsung	879.913.774.863	967.905.152.349	1.064.695.667.584	1.171.165.234.343	1.288.281.757.777
	Dikurangi:					
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	736.786.988.761	818.366.263.446	909.286.203.048	1.010.668.990.412	1.123.751.011.238
III	Total rencana pengeluaran prioritas III (III.a-III.b)	143.126.786.102	149.538.888.904	155.409.464.537	160.496.243.930	164.530.746.539
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*	0	0	0	0	0

Sumber : Hasil analisis, diolah dari berbagai sumber, 2010

Dari tabel 3.11 dapat dijelaskan bahwa setelah belanja digunakan untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib, baru digunakan untuk pembiayaan SKPD untuk program non visi misi atau disebut belanja untuk pelayanan SKPD atau belanja SPM. Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan

daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II) digunakan untuk belanja tidak langsung wajib dan prioritas berikutnya. Selanjutnya proporsi untuk belanja masing-masing prioritas dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut ini:

Tabel 3.12
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Tahun 2011-2015

No.	Jenis Dana	Alokasi									
		2011		2012		2013		2014		2015	
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
1.	Prioritas I	66,88	1.201.959.150.751	67,87	1.400.015.368.693	66,96	1.585.334.301.658	32,53	1.802.592.388.444	32,32	2.026.153.679.574
2.	Prioritas II	25,15	451.993.521.101	24,88	513.108.970.153	26,48	626.917.937.130	31,38	754.971.516.283	33,56	929.780.629.910
3.	Prioritas III	7,96	143.126.786.102	7,25	149.538.888.904	6,56	155.409.464.537	36,09	160.496.243.930	34,12	164.530.746.539
	Total	100	1.797.079.457.954	100	2.062.663.227.749	100	2.367.661.703.324	100	2.718.060.148.657	100	3.120.465.056.022

Sumber : Hasil analisis, diolah dari berbagai sumber, 2010

Keterangan:

1. *Prioritas I untuk belanja wajib belanja tidak langsung untuk belanja pegawai dan belanja bagi hasil, belanja untuk sektor pendidikan yang dipatok tidak kurang dari 20% dari APBD, belanja langsung wajib untuk belanja bayar listrik, PDAM, belanja langsung untuk uang makan pegawai. Selain itu juga belanja untuk mendanai belanja langsung, misi 1 sampai dengan misi 7. Kemudian yang harus dipenuhi adalah pengeluaran pembiayaan yang mengikat.*
2. *Prioritas II untuk pembiayaan SKPD untuk program non visi misi atau disebut belanja untuk pelayanan SKPD atau belanja SPM.*
3. *Prioritas III untuk belanja tidak langsung wajib dan prioritas berikutnya.*
4. *Total pagu merupakan total pendapatan ditambah dengan total penerimaan pembiayaan (dari SILPA) yang digunakan untuk belanja langsung dan tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan*

4. Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Dari prediksi lima tahun ke depan, terlihat bahwa persentase kenaikan belanja lebih besar dari pada kenaikan pendapatan. Oleh karena itu dalam upaya membiayai kegiatan pemerintahan diperlukan langkah-langkah pembiayaan baik dengan sisa lebih, hutang dan sebagainya.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah terpilih mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah di masa depan. Isu-isu strategis tersebut apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta berdasarkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut.

A. Permasalahan Pembangunan Kalimantan Tengah

Permasalahan pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan antara kinerja pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Guna membantu memastikan visi dan misi kepala daerah terpilih dirumuskan dengan tepat, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Tengah.

Permasalahan pembangunan diperlukan dalam proses penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, yang selanjutnya akan menjadi salah satu input dalam perumusan tujuan dan sasaran RPJMD. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan maka permasalahan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah yang berhubungan dengan penerjemahan visi dan misi adalah, sebagai berikut:

1. Masalah penyediaan infrastruktur pembangunan;

Permasalahan dalam infrastruktur pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang paling utama adalah menyangkut ketersediaan infrastruktur dasar bagi berjalannya roda pembangunan daerah meliputi permasalahan aksesibilitas

daerah, irigasi teknis, dan kelistrikan. Permasalahan-permasalahan tersebut mencakup:

a. Belum terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informasi yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan.

Karakteristik geomorfologi pembentukan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari daerah rawa dan daerah aliran sungai, menyebabkan Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan transportasi antar moda yang memadukan antara transportasi darat dan sungai.

b. Masih terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.

Pertanian merupakan sektor/sub-sektor yang memiliki laju pertumbuhan PDRB rata-rata relatif tinggi yaitu 1,2 persen. Oleh karena itu, ketersediaan dan operasional sarana irigasi teknis menjadi suatu kebutuhan untuk mendukung agar sektor pertanian terus dapat dipacu pertumbuhannya.

c. Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat.

Berbagai sumber energi yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Tengah belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan pemanfaatan sumber energi listrik yang hingga saat ini masih hanya bisa dinikmati oleh warga diperkotaan sementara untuk wilayah pedalaman/perdesaan belum seluruhnya mampu menikmati fasilitas listrik.

d. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan jembatan, serta prasarana lalu lintas air antarkabupaten/kota.

Pelayanan umum karena semakin membaiknya akses jaringan jalan ke semua wilayah baik antar kecamatan, kabupaten, hingga antarprovinsi mesti diimbangi dengan jasa layanan angkutan secara terpadu untuk memenuhi lalu lintas jalan barat-timur dan utara-selatan. Kondisi sarana dan prasarana sektor angkutan, khususnya terminal yang memadai dan modern masih belum memadai.

e. Luasnya wilayah Kalimantan Tengah yang dihuni oleh penduduk relatif sedikit dan terpencar-pencar tidak merata menyebabkan pelayanannya menjadi sulit.

2. Masalah pengembangan ekonomi lokal;

Permasalahan bidang ekonomi menjadi isu utama perencanaan pembangunan menyangkut upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografi, demografi, dan corak daerah yang paling mampu meningkatkan kinerja ekonomi daerah. Permasalahan dalam bidang ekonomi antara lain menyangkut optimalisasi lahan pertanian, ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, pengembangan industri hilir, penanganan budidaya perikanan, kesejahteraan nelayan, pengembangan tata niaga komoditas, pemanfaatan potensi tambang, dan masih rendahnya investasi.

- a. Pengelolaan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan belum dikelola secara profesional dan sebagian besar masih dikelola secara tradisional.
- b. Masih rendahnya produktifitas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan.
- c. Belum terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu.
- d. Masih rendahnya kualitas pengembangan pemasaran pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata.
- e. Masih rendahnya kualitas kelembagaan dalam pelayanan penanaman modal.
- f. Masih rendahnya kualitas iklim usaha, promosi dan kerjasama investasi.
- g. Terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif (bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar).
- h. Masih rendahnya produktifitas dan daya saing produk koperasi dan UMKM.
- i. Belum optimalnya penyelenggaraan kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar.
- j. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak memenuhi kaidah-kaidah teknis menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor lain.

3. Masalah kualitas dan keterjangkauan pendidikan

Pendidikan merupakan ujung tombak sebuah kemajuan daerah. Tingkat kesejahteraan daerah salah satunya dapat diukur melalui seberapa besar tingkat kemajuan yang diraihinya. Tak terkecuali provinsi Kalimantan Tengah. Berbagai kendala dan permasalahan yang masih ditemui terkait dengan bidang pendidikan, adalah:

- a. Kondisi geografis Kalimantan Tengah yang begitu luas dan sulit dijangkau memerlukan strategi khusus dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang prima.

- b. Tingkat pelayanan pendidikan kepada publik masih perlu ditingkatkan terutama pelayanan pendidikan pada masyarakat di daerah pedalaman/ terpencil/terpinggir.
- c. Kompetensi dan relevansi serta daya saing lulusan satuan pendidikan masih perlu ditingkatkan.
- d. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

4. Masalah bidang kesejahteraan sosial

Permasalahan sumber daya manusia merupakan salah satu indikator utama keberhasilan layanan yang masih perlu diperbaiki dan menjadi isu utama tujuan pembangunan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang, baik sebagai *enabler* (penggerak) aktivitas pembangunan maupun tujuan dari pembangunan itu sendiri. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping untuk meningkatkan derajat kesejahteraan juga berfungsi agar penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan layanan yang baik, seperti layanan bidang kesehatan, penanggulangan kemiskinan, serta pengembangan budaya dan wisata. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. Tingginya angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan serta tingginya proporsi balita kurang gizi.
- b. Tingginya kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, gender dan kelompok pendapatan.
- c. Terjadinya beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular.
- d. Masih perlunya ditingkatkan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

5. Masalah pengembangan kapasitas birokrasi

Kapasitas kelembagaan menjadi permasalahan utama mengingat peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai agen pembangunan masih sangat sentral dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bagaimana menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki daya saing dalam ekonomi dan berkehidupan pada umumnya. Permasalahan penyelenggaraan kelembagaan juga menyangkut dukungan umum fungsi-fungsi birokrasi dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah, utamanya menyangkut keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan dan pengembangan aparatur.

Permasalahan penyelenggaraan kelembagaan ini ditandai dengan:

- a. Pelaksanaan otonomi daerah yang masih setengah-setengah, antara lain dengan masih banyaknya instansi pemerintah di daerah (“kanwil-kanwil”) menyebabkan proses koordinasi masih lemah.
- b. Masih kurangnya peran gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.
- c. Masih adanya “kebijakan” pembangunan oleh pemerintah yang kurang berpihak ke wilayah Indonesia bagian timur.
- d. Masih diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan serta masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan.
- e. Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum.
- f. Ketentraman dan ketertiban masih perlu ditingkatkan secara lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.
- g. Masih perlu ditingkatkan pemahaman pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta masih perlunya ditingkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan khususnya di bidang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- h. Pembangunan di sektor lingkungan hidup belum menjadi isu sentral pembangunan.
- i. Masih belum optimalnya produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai aturan hukum yang berlaku.

6. Masalah pengelolaan sumber daya alam

Potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah yang berlimpah berupa wilayah yang luas, sumber daya hutan, pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, pertambangan, kawasan gambut dan lain sebagainya belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal. Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan. Namun demikian masih banyak ijin-ijin pengelolaan sumber daya alam yang telah dikeluarkan pemerintah namun belum sepenuhnya didayagunakan. Selain itu pendayagunaan sumber daya alam umumnya masih pada tahap menghasilkan bahan mentah atau komoditas primer yang mempunyai nilai tambah yang rendah.

Potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah tersebar pada beberapa kawasan. Di bagian barat, terhampar tanaman perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 900.000 Ha. Perkebunan karet tersebar hampir di semua kawasan.

Sedangkan potensi tambang batubara berada di bagian timur-utara, dengan jumlah potensi cadangan sekitar 4,8 milyar ton.

Selain mempunyai nilai ekonomi, potensi sumber daya alam juga mempunyai nilai daya dukung lingkungan yang strategis. Kawasan lahan gambut di Kalimantan Tengah yang mencapai luas sekitar 3 juta hektar dengan kandungan gambut sekitar 6,3 giga ton merupakan ekosistem yang perlu dilindungi karena berfungsi sebagai sumber air dan sumber plasma nutfah yang sangat berharga. Selain itu kawasan gambut juga berfungsi penting sebagai penahan emisi karbon yang jika terusik dan rusak akan berdampak terhadap perubahan iklim global.

Kawasan lainnya yang mempunyai fungsi daya dukung lingkungan penting adalah kawasan *Heart of Borneo* (HoB). Inisiatif *Heart of Borneo* (Jantung Borneo) adalah sebuah inisiatif yang dirancang sebagai program pemanfaatan berkelanjutan dan konservasi yang bertujuan mempertahankan keberlanjutan manfaat salah satu hutan terbaik yang masih tersisa di Pulau Borneo bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Cakupan wilayah kerja *HoB* membentang pada rangkaian dataran tinggi Borneo yang terhubung secara langsung dengan dataran rendah di bawahnya. Wilayah kerja ini melintasi wilayah Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam meliputi areas seluas kira-kira 22 juta hektar yang secara ekologis saling terhubung. Jika pola pendayagunaan sumber daya alam terus berlanjut seperti sekarang yang cenderung tidak terkendali maka berbagai kawasan seperti kawasan lahan gambut dan kawasan *HoB* serta kawasan strategis yang mempunyai fungsi daya dukung lingkungan lainnya yang merupakan sumber daya alam yang tak ternilai akan terancam serta terdegradasi semakin meluas dan pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap perubahan iklim global.

B. Isu Strategis

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan sebagaimana telah diuraikan di sub bab di atas, juga berasal dari analisis lingkungan eksternal. Di samping harus mampu menciptakan peluang, sekaligus harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

Analisis lingkungan eksternal dapat diambil dari berbagai informasi dari dunia internasional (MDG's), kebijakan nasional (RPJMN), regional (RPJMD 4 provinsi se-Kalimantan), dan lain-lain yang berdampak langsung pada pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah selama lima tahun ke depan, antara lain:

1. Kebijakan Internasional

Isu-isu strategis dari dunia internasional perlu mendapat perhatian adalah isu-isu yang memiliki kausalitas dan kemungkinan tinggi untuk berdampak bagi pengembangan dan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) tahun akan datang. Pengembangan visi dan misi yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran pokok, sekurang-kurangnya telah memperhatikan atau menjawab capaian-capaian dalam isu dimaksud. Salah satu isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun mendatang bagi Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain:

a. **Meningkatnya kerjasama ekonomi yang ditandai dengan lahirnya Forum Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC, EEC, ASEAN, AFTA, ACFA, G-8 dan lain sebagainya.**

Berbagai kerjasama regional pada umumnya adalah untuk menghapuskan hambatan terhadap arus barang dan jasa antarnegara dalam bentuk penghapusan berbagai bea dan pajak dan ketentuan lain yang menghambat. Hal yang menjadi sentral adalah munculnya ancaman terhadap sektor-sektor industri atau perdagangan regional yang masih kalah kualitas dan efisien produksinya. Hampir dapat dipastikan akan berakibat matinya komoditas lokal dimaksud.

b. **Penghormatan terhadap hak-hak individu terlalu ditonjolkan sehingga dapat mengorbankan hak-hak masyarakat secara keseluruhan**

Merebaknya berbagai sarana yang memudahkan masyarakat mengakses internet dan sarana informasi lainnya menciptakan kebebasan individu yang perlu diwaspadai dapat menggerus hak dan kepatutan umum serta kearifan lokal yang makin terabaikan. Kebijakan publik perlu menyeimbangkan dua aspek tersebut dengan tetap menjaga keberpihakan pada pelestarian budaya lokal.

c. **Adanya kesadaran masyarakat dunia untuk menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi telah terjadinya degradasi lingkungan yang mengglobal**

Dengan luas wilayah lebih dari 2/3 daratan berupa hutan, maka kebijakan pembangunan harus lebih bijaksana (*prudent*) menyangkut penggunaan lahan hutan bagi pembangunan daerah karena akan berpotensi mendapat sorotan dunia internasional. Pengembangan aktivitas ekonomi harus selalu dalam konteks menjaga kelestarian alam dan khususnya vegetasi hutan dan ekosistem di dalamnya.

d. Komitmen MDG's yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB

Dengan telah diadopsinya komitmen MDG's secara nasional maka tak ada pilihan lain bagi Provinsi Kalimantan Tengah kecuali turut mencermati indikator yang harus dicapai sampai akhir tahun 2015. Capaian-capaian penting itu menyangkut pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem, peningkatan persamaan *gender* dan pemberdayaan kaum wanita, penurunan tingkat kematian anak, antisipasi terjadinya penyakit HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya yang menjadi masalah internasional, dan memastikan keberlangsungan lingkungan (*environmental sustainability*) sesuai target yang harus dicapai.

2. Kebijakan Nasional (RPJMN)

Penentuan isu strategis di tingkat nasional diwarnai oleh kebijakan nasional dimaksudkan untuk sinkronisasi dan menjamin tujuan pembangunan nasional telah didukung dan dilaksanakan oleh daerah. sehingga penentuan arah kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah sejalan dengan arah kebijakan yang dituju oleh nasional.

a. Isu demokratisasi yang cenderung melebihi porsi, dimana masyarakat menuntut peran yang lebih besar dalam berbagai aspek pembangunan;

Dengan struktur masyarakat yang masih belum terdidik secara merata, penerapan prinsip demokrasi di lapangan kerap tidak mengikuti pakem dan cenderung destruktif. Dengan ketimpangan sosial dan ekonomi yang belum terjawab sepenuhnya oleh keberhasilan pembangunan, memunculkan bahaya laten yang setiap waktu dapat dipicu baik oleh isu nasional maupun lokal.

b. Keterbatasan sumber daya energi listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal

Keterbatasan pasokan dan jaringan pembangkit listrik di wilayah Kalimantan sudah sangat mendesak untuk ditingkatkan seiring dengan permasalahan kebutuhan listrik secara nasional. Permasalahan listrik bukan saja menyangkut kebutuhannya di masa datang untuk menggenjot aktivitas ekonomi daerah, bahkan untuk kebutuhan dalam skala normal saja hingga kini masih menjadi kendala bahkan masih sering terjadi pemadaman bergilir pada saat beban puncak. Arah pengembangan wilayah Kalimantan sebagai pusat pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam mutlak membutuhkan pasokan energi listrik yang andal dengan sistem jaringan yang terintegrasi untuk satu wilayah. Pengembangan ekonomi lokal dalam kegiatannya memerlukan pasokan energi listrik yang andal dalam proses

produksi, kedepan perlu diantisipasi dengan menaikkan rasio ketersediaan daya listrik di Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditandai dengan dibentuknya beberapa lembaga yang menangani HAM;

Perkembangan pengaturan hukum hak asasi manusia di dunia internasional memberikan dampak besar bagi Indonesia. Pemerintah dan masyarakat telah menyadari akan pentingnya masalah HAM dan ini terbukti dengan telah dibentuknya beberapa lembaga/institusi yang menangani HAM seperti Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perempuan, Komisi Ombudsman Nasional, serta LSM yang peduli dan kegiatan utamanya di bidang HAM. Saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat diadukan ke Komnas HAM bukan kepada aparat penegak hukum. Ini menandakan bahwa terjadi peningkatan terhadap penghormatan kepada hak-hak individu, dan hal ini diprediksi akan tetap menjadi fokus perhatian dunia ke depan.

d. Isu lingkungan hidup, dengan meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Masalah kelestarian lingkungan hidup akan tetap menjadi fokus perhatian masyarakat Indonesia ke depan. Sebagaimana halnya pada lingkup global, pada tataran nasional pun masalah lingkungan hidup ini tetap menjadi hal yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di suatu daerah akan dengan sangat cepat menjadi berita nasional. Masalah kerusakan lingkungan hidup di suatu daerah sering menjadi tajuk berita dari surat-surat kabar nasional. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup pementapan kelembagaan, sumber daya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan.

e. Isu otonomi daerah, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pemberlakuan otonomi daerah adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyak cerita keberhasilan (*success story*) dari pemberlakuan otonomi daerah ini namun tidak sedikit pula yang sebaliknya. Bagi daerah yang kurang berhasil meningkatkan kesejahteraan

masyarakatnya harus bekerja lebih keras lagi sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.

3. Kebijakan Regional

Dalam penentuan isu strategis perlu memperhatikan kebijakan regional. Memperhatikan kebijakan regional dimaksudkan untuk penyelarasan arah kebijakan pembangunan jangka panjang antar daerah, antara lain:

a. Tantangan untuk meningkatkan derajat ekonomi kawasan dengan tetap menjaga isu tentang kelestarian lingkungan hidup;

Dengan wilayah di Pulau Kalimantan yang secara umum masih didominasi hutan, sebagaimana beberapa pulau besar di luar Jawa, pengembangan ekonomi berbasis hutan bukan lagi pilihan mengingat isu pemanasan global memberi cara pandang agar hutan harus dijaga. Ditambah kondisi geografi dan persebaran penduduk yang terpencar, mengakibatkan dampak pembangunan yang implikatif meliputi isu-isu strategis, antara lain:

- 1) Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal.
- 2) Adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah.
- 3) Degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
- 4) Masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di daerah..
- 5) Masih tingginya kebutuhan investasi di sektor strategis di wilayah pusat-pusat pertumbuhan.
- 6) Masih belum optimalnya perkembangan produktivitas dan pendapatan masyarakat di sektor pertanian dalam arti luas.

b. Kendala infrastruktur dan keterjangkauan berbagai kawasan;

Sebagai wilayah terluas ketiga se Indonesia setelah Provinsi Papua dan Kalimantan Timur, serta dengan kondisi alam yang relatif masih berhutan, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas antarkawasan di Kalimantan Tengah menjadi isu pokok pembangunan bahkan dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini disebabkan karena dibutuhkan dana yang tidak sedikit dalam rangka membangun kondisi infrastruktur dan aksesibilitas antarkawasan tersebut. Lebih dalam, isu-isu strategis yang berhubungan dengan infrastruktur, antara lain:

- 1) Terbatasnya kuantitas dan kualitas prasarana perhubungan
- 2) Lemahnya integrasi jaringan infrastruktur multimoda
- 3) Lemahnya aksesibilitas wilayah-wilayah pedalaman
- 4) Masih banyaknya infrastruktur strategis yang harus dibangun dan dikembangkan untuk membuka keterisolasian dan percepatan pembangunan wilayah.

c. Rendahnya mutu layanan umum;

Kinerja daerah dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sangat ditentukan oleh mutu, cakupan/jangkauan serta meratanya layanan umum yang ada. Beberapa isu terkait masih rendahnya mutu layanan umum tersebut antara lain :

- 1) Masih belum meratanya jangkauan pelayanan dasar pendidikan dan rendahnya mutu pelayanan pendidikan di daerah perdesaan dan pedalaman di Kalimantan Tengah
- 2) Masih belum optimalnya cakupan layanan kesehatan dasar dan kualitas pelayanan kesehatan di pusat-pusat yankesmas di daerah
- 3) Masih belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya
- 4) Masih belum optimalnya cakupan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di pusat-pusat pendidikan di daerah
- 5) Masih belum meratanya jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rendahnya mutu pelayanan kesehatan di daerah perdesaan dan pedalaman di Kalimantan Tengah.

d. Masih banyaknya desa tertinggal.

Sebagian besar penduduk Kalimantan Tengah bermukim di kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan umumnya dicirikan oleh lemahnya daya dukung dan kualitas SDM lokal, antara lain rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, terbatasnya infrastruktur terbatas, akses kesehatan, minimnya akses pendidikan, masih tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman perdesaan. Lemahnya daya dukung dan kualitas SDM lokal akan menentukan daya saing yang akan mempengaruhi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Beberapa isu terkait lemahnya daya dukung dan kualitas SDM perdesaan tersebut, antara lain:

- 1) Rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja
- 2) Masih tingginya jumlah desa tertinggal (895 desa) atau 61,81 persen dengan kondisi terbatas bidang infrastruktur, akses pendidikan, akses

kesehatan, perekonomian rakyat yang belum berkembang serta kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat yang masih rendah.

4. Komitmen internasional terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global

Dalam berbagai forum internasional yang diikuti oleh bangsa-bangsa di dunia seperti Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim Tahun 2009 atau yang lebih dikenal dengan *Copenhagen Summit* yang berlangsung pada bulan Desember 2009, masyarakat internasional menyadari perlunya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim global. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penurunan emisi karbon. Meskipun belum ada kesepakatan internasional mengenai target angka penurunan karbon masing-masing negara, namun Pemerintah Indonesia telah menargetkan penurunan emisi karbon sebesar 26 persen pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 41 persen apabila ada dukungan nyata negara-negara maju. Sementara itu, negara-negara maju menyatakan kesanggupan menurunkan emisi karbonnya sebesar 13-20 persen pada tahun 2020, kecuali Jepang dan Uni Eropa.

Sebagai bagian dari upaya penurunan emisi karbon tersebut, Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Letter of Intent* kerjasama Indonesia-Norwegia di bidang kehutanan dan perubahan iklim. Kerjasama ini akan membantu Indonesia dalam mengelola sumber daya hutan secara lestari sekaligus mengurangi gas rumah kaca yang keluar dari kegiatan deforestasi dan kerusakan lahan gambut. Indonesia merupakan negara dengan profil emisi karbon yang unik karena sebagian besar berasal dari sektor kehutanan dan hutan gambut. Presiden RI dalam salah satu arahannya menekankan bahwa kemitraan RI-Norwegia ini harus berhasil karena saat ini Indonesia dinilai sebagai salah satu negara terdepan dalam urusan perubahan iklim.

Pada tahap selanjutnya, Presiden RI telah menunjuk Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan untuk melaksanakan tahapan awal pengurangan emisi karbon dari kegiatan deforestasi dan degradasi atau lebih dikenal dengan istilah REDD⁺ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*). Penetapan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan penerapan REDD⁺ diantara sembilan kandidat provinsi diputuskan oleh Presiden RI pada Sidang Kabinet tanggal 23 Desember 2010. Terpilihnya Kalimantan Tengah didasarkan pada kombinasi hasil evaluasi kualitatif dan kuantitatif dimana terlihat bahwa Kalimantan Tengah merupakan provinsi ketiga terluas dalam hal tutupan hutan serta kawasan gambutnya dan sedang menghadapi tantangan nyata deforestasi dan kerusakan gambut. Tingkat kesiapan dan komitmen dari Gubernur Kalimantan Tengah dalam implementasi REDD⁺ juga merupakan salah satu pertimbangan dalam penunjukan tersebut.

Penunjukkan Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan pelaksanaan REDD⁺ akan membawa implikasi yang luas. Kalimantan Tengah harus mampu mengelola kompleksitas dari implementasi tersebut yang antara lain mencakup reformasi birokrasi untuk menjamin terwujudnya transparansi dan anti korupsi, penegakan hukum dalam memberantas pembalakan liar, penataan batas kawasan hutan, integrasi data bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan dan pertanian pada tingkat kabupaten/kota. Untuk ini Gubernur Kalimantan Tengah telah menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Presiden tersebut. Melalui kerjasama Indonesia-Norwegia, Pemerintah Norwegia akan mendukung dalam hal transformasi kelembagaan dan penguatan kapasitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi dan misi merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) tahun mendatang melalui gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2010-2015. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD periode yang sama. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional yang harus dipedomani.

A. Visi

Visi Provinsi Kalimantan Tengah merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada akhir tahun 2010-2015. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi gubernur dan wakil gubernur terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2015 adalah:

***“Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah
agar Rakyat Lebih Sejahtera dan Bermartabat
Demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”***

Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat provinsi Kalimantan Tengah, selaras dengan RPJM Nasional 2010-2014, dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2005-2025.

Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah yang mampu meneruskan dan menuntaskan pembangunan Kalimantan Tengah agar rakyat lebih sejahtera dan bermartabat demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pengertian tentang **masyarakat sejahtera** adalah:

1. Tercapai angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahun dan meratanya hasil-hasil pembangunan keseluruh wilayah provinsi Kalimantan Tengah.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan sarana prasarana penunjang.
3. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya kesenjangan pendapatan.
4. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka.
5. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat dan membaiknya mutu lingkungan hidup.

Sedangkan, pengertian tentang **masyarakat bermartabat** adalah terciptanya masyarakat yang memiliki nilai martabat yang tinggi dengan tetap menjunjung budaya bangsa dan didasarkan kepada semangat HUMA BETANG dan BHINNEKA TUNGGAL IKA.

Meneruskan dan menuntaskan pembangunan bukanlah semata menjadi tujuan, namun dalam banyak hal merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan yang setara (*equal*) bagi segenap komponen masyarakat Kalimantan Tengah, baik di pedalaman maupun di perkotaan, di hulu maupun hilir daerah aliran sungai, di kawasan barat maupun timur, asli maupun pendatang, Dayak maupun non-Dayak, dan agama apapun dengan semangat HUMA BETANG dan BHINNEKA TUNGGAL IKA.

Kesejahteraan dan kemajuan dalam kesetaraan adalah bahasa universal yang melintasi sekat-sekat spasial, generasi, kelompok, kesukuan, keagamaan, dan kategori pemisah lainnya. Dengan membangun kesejahteraan dan kemajuan Kalimantan Tengah melalui instrumen membuka isolasi yang berkelanjutan, niscaya Kalimantan Tengah akan memberikan kontribusi penting guna menunjukkan bahwa nilai kesejahteraan dan kemajuan adalah perekat sangat kokoh di masyarakat yang multikultur, layaknya Indonesia, sehingga terciptanya suatu daya dorong semangat yang luar biasa dengan sinergitas dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

B. Misi

Perwujudan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah jangka menengah ditempuh melalui misi pembangunan daerah. Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Untuk mewujudkan visi di atas, yang menjadi kontinuitas dari arah pembangunan Kalimantan Tengah dalam lima tahun terakhir, maka misi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah jangka menengah, sebagai berikut:

1. Sinergi dan Harmonisasi Pembangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah melalui pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.
2. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata.
3. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau.
4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat.
5. Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.
6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah.
7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah.

Penjelasan atas masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kalimantan Tengah melalui pemantapan rencana penataan ruang provinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.

Untuk mencapai derajat kemajuan yang setara dan kesejahteraan rakyat yang merata, pembangunan Kalimantan Tengah harus dikerangkai dengan sebuah perencanaan yang komprehensif yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Dengan RTRWP yang komprehensif, maka bisa dipetakan potensi-potensi pengembangan kawasan, sehingga arah pembangunan daerah dapat menjadi sarana untuk mengoptimalkan potensi setiap sudut Kalimantan Tengah. Dengan semangat semacam ini, masing-masing kabupaten/kota dan setiap kelurahan/desa dan kademangan memiliki potensi untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Penggalan dan pemanfaatan keunggulan komparatif (*comparative advantages*) ini akan menjadi penggerak utama (*prime mover*) dan basis utama pemantapan RTRWP. Selain itu, dalam RTRWP akan ditentukan klaster-klaster pengembangan ekonomi dan sosial, yang akan menjadi cetak biru (*blue print*) dan menjadi visi bersama (*shared vision*) seluruh komponen di Kalimantan Tengah.

Misi 2 : Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata

Melanjutkan capaian-capaian penting selama lima tahun yang lalu, upaya untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terakses serta merata adalah misi lima tahun ke depan. Saat ini, sudah tidak lagi terdapat bangunan sekolah yang kondisinya memprihatinkan dan tidak mendukung proses pembelajaran. Berbeda dengan kondisi sebelum lima tahun lalu dimana hanya sepertiga bangunan SD dan SMP yang berada dalam kondisi baik. Lima tahun ke depan, misi pendidikan di Kalimantan Tengah akan bergeser dari kebutuhan dasar berkaitan dengan kondisi fisik, menuju penciptaan pendidikan yang berkualitas dan terakses.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan anak didik yang berintelektual, mampu memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjelma dalam diri lulusan yang memiliki iman dan takwa. Artinya, selain dibekali dengan kemampuan-kemampuan teknokratis, manajerial dan substantif, pendidikan juga harus menjamin tercapainya peningkatan iman dan takwa. Kemampuan intelektual yang diperoleh dari sistem pendidikan yang terselenggara digunakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, tidak saja untuk masa sekarang, juga untuk kesejahteraan generasi mendatang. Pendidikan yang berkualitas juga dimaksudkan untuk menciptakan lulusan yang mampu bersaing di era global. Pada awal 2010, telah diberlakukan *Asean China Free Trade Area (ACFTA)* yang membuka pasar persaingan semakin lebar dan keras. Keunggulan komparatif China yang didapat dari upah buruh yang murah dapat dilawan dengan tenaga kerja yang berkualitas. Kualitas tenaga kerja ini sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang berorientasi pada persaingan global.

Pendidikan yang berkualitas akan terus didukung oleh anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah. Hanya dengan dukungan dana yang signifikan, cita-cita investasi pendidikan yang berkualitas dapat terwujud. Apabila pada dua tahun terakhir, 20 persen anggaran pendidikan difokuskan pada perbaikan fasilitas dasar pendidikan, dalam lima tahun ke depan anggaran akan digunakan untuk meningkatkan kualitas mutu peserta didik dan pendidik. Kualitas peserta didik dapat ditingkatkan dengan menambah fasilitas pendukung pendidikan. Kualitas pendidik dapat ditingkatkan dengan

berbagai upaya peningkatan SDM. Variasi metode pengajaran yang dilakukan pendidik berkualitas didukung dengan fasilitas yang memadai.

Selain itu, pendidikan yang berkualitas tersebut harus dapat diakses oleh penduduk Kalimantan Tengah. Pendidikan berkualitas harus terjangkau oleh semua penduduk, baik dari sisi geografis dan terutama ekonomis. Dalam lima tahun ke depan, pendidikan di Kalimantan Tengah selain berkualitas, juga harus dekat dan murah. Aksesibilitas ini penting berdasarkan kesadaran bahwa potensi SDM yang ada di Kalimantan Tengah menyebar di semua daerah. Hanya dengan meningkatkan akses pendidikan, potensi maksimal Kalimantan Tengah dapat tergali maksimal.

Peningkatan kualitas pendidikan yang terakses ini juga akan dilakukan melalui pelibatan *stakeholders* lainnya. Hal ini didasarkan pada pengalaman memimpin Kalimantan Tengah bahwa upaya memajukan pendidikan Kalimantan Tengah akan lebih efektif apabila memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pendidikan.

Misi 3 : Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau

Dilihat dari beberapa indikator penting bidang kesehatan dalam lima tahun, Kalimantan Tengah telah mampu meningkatkan pelayanan secara menyeluruh dan merata. Indikator yang menjadi acuan pada 2005-2010 meliputi upaya penyelamatan ibu, bayi dan balita. Proses kelahiran diharapkan dapat berlangsung dengan selamat untuk bayi dan ibunya, serta bayi yang dilahirkan dapat berkurang resiko kematiannya. Secara umum, terdapat peningkatan sekitar 30 persen dalam semua sektor tersebut dalam lima tahun terakhir.

Namun demikian, misi yang dicanangkan pada 2005 belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan dalam *MDG's* maupun target Indonesia Sehat (IS) 2010. Hal ini bukan semata-mata akibat kurangnya kerja keras dari seluruh aparat kesehatan di tingkat provinsi, tetapi terlebih karena warisan kondisi kesehatan yang tidak menguntungkan. Sebagai contoh, walaupun angka kematian bayi dapat ditekan dari 36 per seribu kelahiran hidup pada tahun 2005 menjadi 30 per seribu kelahiran hidup pada tahun 2009, hal itu belum mampu memenuhi target RPJMN Tahun 2009 sebanyak 26 bayi. Perlu upaya yang serius untuk mampu mencapai standar *MDG's* pada tahun 2015 yakni sebanyak 19 per seribu kelahiran hidup.

Upaya penjaminan kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Kalimantan Tengah hanya akan terwujud apabila capaian selama lima tahun terakhir terus dipertahankan dan ditingkatkan. Selain itu, diperlukan sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan. Segegap kemampuan dan kewenangan yang ada akan dioptimalkan agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota senafas dalam upaya menjadikan kesehatan sebagai capaian penting yang harus mendapatkan prioritas.

Penjaminan kesehatan masyarakat yang merata akan diwujudkan dengan memenuhi tenaga kesehatan yang masih kurang. Sampai saat ini, Provinsi Kalimantan Tengah masih kekurangan ribuan tenaga kesehatan, baik untuk dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya. Kekurangan inilah yang menjadi salah satu penyebab masih dibutuhkannya kerja keras untuk meningkatkan tingkat kesehatan rakyat. Kekurangan ini dapat ditutupi dengan mengundang tenaga kesehatan di luar Kalimantan Tengah untuk mengabdikan diri di Kalimantan Tengah melalui berbagai insentif untuk kepentingan jangka pendek. Untuk jangka panjang, dibutuhkan pembangunan pendidikan profesi di bidang kesehatan di tingkat perguruan tinggi. Harapannya, Kalimantan Tengah dapat memenuhi secara permanen kebutuhan tenaga kesehatannya, termasuk program mendirikan Fakultas Kedokteran di Universitas Palangka Raya bekerjasama dengan Universitas Indonesia yang telah dimulai pada tahun 2010.

Misi 4 : Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman dan memfasilitasi ekonomi rakyat.

Tantangan terbesar Kalimantan Tengah adalah menghubungkan antar kawasan dan menghubungkan Kalimantan Tengah secara lebih intensif dengan dunia luar. Ketersediaan infrastruktur yang layak adalah bagian dari nilai kesejahteraan itu sendiri, sekaligus menjadi prasyarat dasar bagi pengembangan ekonomi masyarakat, baik yang berbasis ekonomi kerakyatan maupun sektor-sektor ekonomi modern. Banyak capaian sudah bisa dilihat dalam lima tahun terakhir, ditunjukkan dengan bukti fisik kehadiran infrastruktur jalan dan jembatan yang melintasi tantangan alam Kalimantan Tengah yang bergambut dan bersungai lebar. Capaian bersama Kalimantan Tengah ini tentu saja baru sebuah awal, namun telah membangkitkan optimisme bersama bahwa apa yang nampaknya sangat berat dan tidak mungkin dilakukan, ternyata mampu dihadirkan secara bersama-sama di Kalimantan Tengah.

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur berikutnya yang menjadi bagian dari visi-misi meneruskan dan menuntaskan pembangunan Kalimantan Tengah adalah infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman penduduk Kalimantan Tengah, baik yang berada di pedalaman hutan, maupun di sepanjang aliran sungai. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur haruslah menjadi bagian dari pelayanan kepada masyarakat, dan oleh karenanya karakter pembangunan dan peningkatannya harus ramah terhadap karakter khas penyebaran pemukiman penduduk Kalimantan Tengah. Kedepan, selain pembangunan dan peningkatan infrastruktur darat, pembangunan dan peningkatan infrastruktur sungai juga akan diperhatikan. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur rakyat ini akan disinergikan dengan pembangunan infrastruktur ekonomi yang lebih besar.

Pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan antar kabupaten/kawasan di Kalimantan Tengah misalnya, akan menjadi langkah konkret yang ditempuh dalam lima tahun ke depan. Adanya jalur kereta api tentu saja tidak sekedar memfasilitasi ekonomi skala besar, namun juga sarana untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan barang sebagai bagian dari tapak kemajuan. Selain itu, pembukaan rute-rute penerbangan baru, baik yang bersifat lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional akan diupayakan secara simultan. Salah satu *milestone* yang diupayakan untuk pengembangan infrastruktur penerbangan ini adalah mendorong Bandara Tjilik Riwut sebagai embarkasi haji.

Untuk itu, *grand strategy* pembangunan dan peningkatan infrastruktur akan menjadi salah satu pilar perencanaan pembangunan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Pembangunan infrastruktur tentu saja bukan hanya tanggung jawab provinsi, namun juga nasional dan kabupaten/kota, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya secara intensif akan terus dikembangkan jejaring, baik ke tingkat nasional, ke kabupaten/kota, dan ke masyarakat. Dengan langkah-langkah yang terukur, maka pembangunan dan peningkatan infrastruktur sebagai jalan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan Kalimantan Tengah akan bisa diretas dan bahkan diwujudkan dalam beberapa tahun mendatang.

Misi 5 : Pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan

Dalam lima tahun ke depan, meneruskan dan menuntaskan pembukaan isolasi fisik Kalimantan Tengah akan dijadikan sebagai jalan bagi pengembangan serta memacu peningkatan ekonomi rakyat. Dengan

cara pikir seperti ini, membuka isolasi akan menghadirkan maknanya bagi kesejahteraan masyarakat. Penegasan ini sangat penting, mengingat arus ekonomi modal yang sangat kuat bisa melahirkan implikasi-implikasi negatif bagi keberadaan ekonomi berbasis rakyat. Sebagaimana diyakini adalah tugas pemerintah untuk memberikan proteksi, sekaligus memfasilitasi ekonomi rakyat Kalimantan Tengah. Banyak upaya sudah dilakukan pemerintah provinsi dalam lima tahun terakhir untuk memastikan agar ekonomi rakyat tidak tersingkirkan oleh ekonomi padat modal, dan sekaligus memastikan agar ekonomi padat modal juga membawa implikasi positif bagi penguatan ekonomi rakyat. Kebijakan PM2L, sarjana masuk desa, Geber MLT (Gerakan Bersama Memanfaatkan Lahan Terlantar), pemberian sertifikat lahan kepada masyarakat lokal, fasilitasi pengembangan kawasan pedalaman dan lain sebagainya adalah kebijakan-kebijakan yang menjadi momentum signifikan bagi tumbuh serta kuatnya perekonomian rakyat. Lima tahun ke depan, berbagai kebijakan di atas akan lebih diintensifkan.

Guna pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan, sejumlah langkah strategis akan disiapkan, dan dilaksanakan di tahun-tahun mendatang. Penguatan kembali dan pengembangan ekonomi berbasis karet akan menjadi salah satu target. Karet adalah kekayaan Kalimantan Tengah, dan bahkan menjadi tradisi ekonomi yang melekat di sebagian besar masyarakat. Selama ini, hasil karet langsung dibawa keluar Kalimantan Tengah, tanpa ada nilai tambah ekonomi yang tertinggal. Untuk itu, pengembangan industri pengolahan karet setengah jadi akan diupayakan, sehingga perputaran ekonomi karet akan lebih besar di Kalimantan Tengah. Selain itu, peremajaan dan perlindungan kawasan perkebunan karet rakyat akan menjadi titik berat kebijakan pembangunan perekonomian di Kalimantan Tengah, yang saat ini identik dengan semata pengembangan kelapa sawit dan pertambangan. Dimensi ekonomi kerakyatan lainnya yang akan diupayakan adalah pengembangan lahan gambut sebagai kawasan ekonomi produktif, melalui sejumlah suntikan teknologi dan inovasi.

Pengembangan ekonomi rakyat juga akan digerakkan melalui pembentukan koperasi-koperasi rakyat berikut penguatan kapasitas pengelolaan atas koperasi-koperasi yang dibentuk. Basis kolektifitas masyarakat Kalimantan Tengah akan memungkinkan pengembangan koperasi, sebuah sistem ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik sekaligus pengelola aktifitas ekonomi. Pengembangan ekonomi rakyat juga akan dihubungkan (*linkage*) dengan ekonomi modern yang padat modal. Agar mampu menjangkau ke seluruh kantong pemukiman dan rumah tangga, misi ekonomi kerakyatan ini akan didialogkan secara terus

menerus dan dilakukan bersama-sama dengan seluruh kabupaten/kota dan kekuatan masyarakat lainnya. Selain dari itu juga akan dikembangkan Bank Perkreditan Rakyat yang akan membantu pengembangan ekonomi rakyat di Kalimantan Tengah.

Misi 6 : Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah

Terbukanya isolasi menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan yang berasal dari luar. Harus dipastikan bahwa masyarakat Kalimantan Tengah tidak gagap dalam menghadapi kemajuan, dan mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan yang diperoleh sebagai implikasi langsung terbukanya isolasi. Sejak awal akan dipastikan masyarakat Kalimantan Tengah tidak sekedar menjadi penonton dan bahkan korban dari kemajuan, namun justru sebagai penikmat dan pengendali atas semua proses perubahan yang dihasilkan oleh kemajuan. Mewujudkan hal ini tidaklah sederhana, mengingat kecepatan perubahan dan modernisasi seringkali jauh lebih tinggi dari kecepatan kesiapan masyarakat. Untuk itu, upaya penguatan kapasitas SDM masyarakat (termasuk pemerintah) menjadi misi yang tidak terpisahkan dari gairah membuka isolasi.

Penguatan kapasitas SDM masyarakat bisa dilakukan melalui pengembangan pendidikan dan kesehatan, sebagaimana terjelaskan dalam misi kedua dan ketiga. Selain mengembangkan pendidikan dasar yang menjadi tanggungjawab dasar negara, pengembangan kapasitas SDM Kalimantan Tengah juga akan ditempuh melalui pembukaan sekolah vokasional (kejuruan) yang memungkinkan generasi muda secara cepat terserap dalam lapangan-lapangan ekonomi baru yang sedang berkembang dan akan menguat di tahun-tahun mendatang.

Pengembangan pendidikan tinggi, dalam hal ini Universitas Palangka Raya, juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari penguatan SDM masyarakat. Sejumlah program studi yang relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa depan Kalimantan Tengah akan dibuka misalnya kedokteran dan pertambangan, dengan harapan bibit-bibit unggul SDM Kalimantan Tengah mendapatkan ruang pengembangan yang cukup, yang ke depan diharapkan menjadi transformator sosial-kemasyarakatan. Buah dari upaya ini mungkin tidak langsung terasa dalam 1-2 tahun ke depan, namun langkah nyata dalam 1-2 tahun tersebut akan menjadi fondasi bagi penguatan SDM masyarakat Kalimantan Tengah dalam jangka menengah dan panjang.

Penguatan SDM juga akan dilakukan secara terencana dan terus menerus di lingkungan pemerintahan, termasuk pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain-lain). Transformasi mentalitas birokrasi akan terus dilanjutkan dalam rangka memantapkan sistem *good governance* yang sudah mulai terintis dalam beberapa tahun belakangan, selain upaya penguatan kapasitas inovasi birokrasi melalui berbagai program beasiswa pendidikan dan pelatihan. Khususnya untuk aparatur pelayanan langsung; misalnya guru, petugas kesehatan, dan penyuluh lapangan, pengembangan dan penguatan kapasitas akan terus dilakukan. Upaya sertifikasi guru dan *updating* kemampuan profesional pendidikan akan menjadi perhatian utama, sama halnya dengan peningkatan profesionalitas tenaga pelayanan dan penyuluhan masyarakat lainnya.

Misi 7 : Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan terbukanya isolasi serta dampaknya, maka diperlukan adanya suatu program yang komprehensif dan holistik guna terciptanya kerukunan dan keharmonisan serta kesejahteraan rakyat di Kalimantan Tengah dengan semangat HUMA BETANG dan BHINNEKA TUNGGAL IKA. Implementasi program ini disamping melalui forum yang sudah ada seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), juga harus secara berkesinambungan dimasyarakatkan nilai-nilai positif kemajemukan melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh lainnya seperti para Damang, sehingga terciptanya kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah serta kerukunan dan kedamaian antar suku, ras dan golongan masyarakat di Kalimantan Tengah.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi RPJMD provinsi Kalimantan Tengah secara lebih detil, terinci, lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan yang baik dapat memberi gambaran apa yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk menjabarkan misi agar jelas wujudnya dalam masa lima tahun ke depan ditetapkan **tujuan pembangunan** sebagai berikut.

1. Revitalisasi dan terciptanya *cluster-cluster* ekonomi unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
2. Terselenggaranya penataan ruang yang memperhatikan keberlanjutan sumberdaya wilayah
3. Terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau.
4. Tersedianya akses infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok wilayah.
5. Meningkatnya sistem layanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau.
6. Tersedianya akses infrastruktur Kesehatan dasar hingga ke pelosok wilayah.
7. Terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan.
8. Tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.
9. Tersedianya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat.
10. Terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu.
11. Terselenggaranya kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar.
12. Meningkatnya daya saing masyarakat.
13. Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah.
14. Terwujudnya soliditas antarkelompok masyarakat

Keempat belas tujuan di atas merupakan kristalisasi dari apa yang ingin diwujudkan secara nyata melalui visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah untuk periode yang akan berakhir pada tahun 2015. Secara teknokratik, gambaran nyata dari cita-cita pembangunan di atas akan dicapai secara bertahap, sinambung, dan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan APBD. Indikator capaian diterjemahkan ke dalam sasaran yang akan dicapai dari tahun ke tahun selama masa 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah.

Pertama, Revitalisasi dan terciptanya cluster-cluster ekonomi unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut ditentukan sasaran-sasaran, sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya *cluster-cluster* ekonomi unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
 - Indikator : - PDRB
- Jumlah *cluster* ekonomi
2. Tumbuhnya *cluster-cluster* ekonomi unggulan daerah yang belum berkembang.
 - Indikator : - PDRB
- Jumlah *cluster* ekonomi

Kedua, Terselenggaranya penataan ruang yang memperhatikan keberlanjutan sumberdaya wilayah.

Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukanlah sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata ruang yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah dan mengarusutamakan lingkungan.
 - Indikator : - Dokumen RTRW

2. Diperolehnya persetujuan dari pemerintah pusat yang mendukung kota Palangka Raya sebagai pusat pemerintahan NKRI.
 - Indikator : - Dokumen RTRW Kota Palangka Raya
- Persetujuan pemerintah pusat

3. Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup.
 - Indikator : - Data kualitas udara dan air
- Dokumen KLHS, RPP LH, SLHD, NSDA
- Rekomendasi Komda REDD dan Dewan Daerah Perubahan Iklim

Ketiga, terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau.

Untuk mewujudkan tujuan ketiga tersebut, maka dipilih 2 (dua) sasaran untuk mencapainya sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
 - Indikator : - Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
- Jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
- Rupiah per-pendidik
- Rupiah per-tenaga kependidikan

2. Penaatan sistem pendidikan yang efektif dan efisien.
 - Indikator : - APS
- Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
- Rasio guru/murid
- Angka putus sekolah
- Angka kelulusan
- Angka melanjutkan
- Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Keempat, Tersedianya akses infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok wilayah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
 - Indikator : - Jumlah sarana dan prasarana untuk tenaga pendidik
 - Jumlah sarana dan prasarana untuk tenaga kependidikan

2. Tersedianya akses infrastruktur menuju pusat-pusat pendidikan.
 - Indikator : - Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
 - Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik
 - Panjang jalan fungsional/waktu tempuh (jam)/biaya transport (rupiah)

Kelima, meningkatnya sistem layanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau.

Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukanlah sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya standar pelayanan kesehatan.
 - Indikator : - Regulasi standar pelayanan kesehatan

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan.
 - Indikator : - Rasio dokter per satuan penduduk
 - Rasio tenaga medis per satuan penduduk
 - Jumlah dokter yang memiliki ijin praktek

Keenam, tersedianya akses infrastruktur kesehatan dasar hingga ke pelosok wilayah.

Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukanlah sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan.
 - Indikator : - Rasio posyandu persatuan balita
 - Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk
 - Rasio rumah sakit persatuan penduduk

2. Tersedianya akses infrastruktur kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
 - Indikator : - Panjang jalan fungsional/waktu tempuh (jam)/biaya transport (rupiah)
 - Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Ketujuh, Terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan.

Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya sistem transportasi (SISTRRAWIL), informasi dan komunikasi wilayah
 - Indikator : - Dokumen Sistrawil
2. Terwujudnya jaringan transportasi serta komunikasi dan Informatika
 - Indikator : - Sarana penunjang transportasi, komunikasi dan informatika
3. Terwujudnya peningkatan kelas bandara Tjilik Riwut dan bandara penunjang di Kalimantan Tengah
 - Indikator : - Ditetapkannya bandara Tjilik Riwut sebagai bandara embarkasi haji

Kedelapan, Tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.

Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Terpeliharanya dan terbangunnya infrastruktur pengairan makro dan mikro, serta pencetakan sawah.
 - Indikator : - Luas pengairan/irigasi
 - Luas sawah tercetak

Kesembilan, Tersedianya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya payung hukum bidang ketenagalistrikan dan energi.
 - Indikator : - Perda/Perkada tentang kelistrikan dan energi
2. Tersedianya sumber daya energi yang terjangkau.
 - Indikator : - Jumlah dan jenis energi alternatif yang dikembangkan
3. Tersedianya sarana dan prasarana kelistrikan.
 - Indikator : - Pembangunan PLTU/PLTH/PLPH
 - Jumlah rumah di daerah yang dialiri listrik
 - Tersedianya jaringan bawah tanah

Kesepuluh, Terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu.

Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya regulasi dan fasilitasi yang mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan
 - Indikator : - Perda/Perkada bidang ekonomi
2. Penguatan kelembagaan ekonomi rakyat
 - Indikator : - Persentase koperasi aktif
 - Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
 - Jumlah BPR/LKM

3. Meningkatkan kemampuan managerial pelaku ekonomi kerakyatan
 - Indikator : - Jumlah Pelatihan
4. Terciptanya produktifitas pada sektor ekonomi berbasis sumber daya lokal.
 - Indikator : - PDRB

Kesebelas, Terselenggaranya kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar.

Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Terlaksananya program pembangunan daerah berbasis kemitraan usaha
 - Indikator : - Jumlah Kemitraan
2. Meningkatkan daya saing dan orientasi ekspor komoditas-komoditas lokal
 - Indikator : - Jumlah ekspor komoditas lokal

Keduabelas, Meningkatnya daya saing masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan ketrampilan masyarakat yang menunjang kegiatan ekonomi.
 - Indikator : - Jumlah pelatihan

Ketigabelas, Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah.

Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis.
 - Indikator : - Jumlah pelatihan

Keempatbelas, Terwujudnya soliditas antar kelompok masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan itu ditentukan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai dan sejahtera di bumi Tambun Bungai
 - Indikator : - Angka kriminalitas
 - Jumlah unjuk rasa
 - Sikap toleransi
2. Meningkatnya pemahaman dan penghargaan terhadap adat istiadat lokal.
 - Indikator : - Jumlah grup kesenian
 - Jumlah gedung kesenian

Untuk mewujudkan misi agar mampu terealisasi dalam masa lima tahun ke depan serta mencapai tujuan pembangunan yang dikehendaki maka ditetapkan serangkaian sasaran yang dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Provinsi Kalimantan Tengah

Visi : Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat Lebih Sejahtera dan Bermartabat Demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator		
1. Sinergi dan harmonisasi Pembangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah melalui pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.	1. Revitalisasi dan terciptanya <i>cluster-cluster</i> ekonomi unggulan di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota	1.1 Teridentifikasinya <i>cluster-cluster</i> ekonomi unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • Jumlah <i>cluster</i> ekonomi 		
		1.2 Tumbuhnya <i>cluster-cluster</i> ekonomi unggulan daerah yang belum berkembang.	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB • Jumlah <i>cluster</i> ekonomi 		
	2. Terselenggaranya penataan ruang yang memperhatikan keberlanjutan sumberdaya wilayah	2.1 Terwujudnya rencana tata ruang yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah dan mengarusutamakan lingkungan	2.1 Terwujudnya rencana tata ruang yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah dan mengarusutamakan lingkungan	• Dokumen RTRW	
				2.2 Diperolehnya persetujuan dari pemerintah pusat yang mendukung Kota Palangka Raya sebagai pusat pemerintahan NKRI.	• Dokumen RTRW Kota Palangka Raya
					• Persetujuan Pemerintah Pusat
					2.3 Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup
• Dokumen KLHS, RPP LH, SLHD, NSDA					
2. Rekomendasi Komda REDD dan Dewan Daerah Perubahan Iklim	3.1 Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.	3.1 Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.	• Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		
			• Jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		
2. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata	3. Terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau.	3.2 Penataan sistem pendidikan yang efektif dan efisien.	• Rupiah per-pendidik		
			• Rupiah per-tenaga kependidikan		
			• APS		
			• Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		
			• Rasio guru/murid		
			• Angka putus sekolah		
			• Angka kelulusan		
			• Angka melanjutkan		
			• Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
	4. Tersedianya akses infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok wilayah.	4.1 Tersedianya sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sarana dan prasarana untuk tenaga pendidik Jumlah sarana dan prasarana untuk tenaga kependidikan
		4.2 Tersedianya akses infrastruktur menuju pusat-pusat pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/ MA kondisi bangunan baik Panjang jalan fungsional/waktu tempuh (jam)/biaya transport (Rp.)
3. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau	5. Meningkatnya sistem layanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau.	5.1 Tersedianya standar pelayanan kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi standar pelayanan kesehatan
		5.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Jumlah dokter yang memiliki ijin praktek
	6. Tersedianya akses infrastruktur Kesehatan dasar hingga ke pelosok wilayah.	6.1 Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk
		6.2 Tersedianya akses infrastruktur kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Panjang jalan fungsional/waktu tempuh (jam)/biaya transport (Rp.) Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)
4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat.	7. Terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan.	7.1 Terwujudnya sistem transportasi (SISTRAWIL), informasi dan komunikasi wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen SISTRAWIL
		7.2 Terwujudnya jaringan transportasi serta komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> Sarana penunjang jaringan transportasi, komunikasi dan informatika
		7.3 Terwujudnya peningkatan kelas bandara Tjilik Riwut dan bandara penunjang di Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Ditetapkannya bandara Tjilik Riwut sebagai bandara embarkasi haji
	8. Tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.	8.1 Terpeliharanya dan terbangunnya infrastruktur pengairan makro dan mikro, serta pencetakan sawah.	<ul style="list-style-type: none"> Luas pengairan/irigasi Luas pencetakan sawah

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
	9. Tersedianya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat.	9.1 Tersedianya payung hukum bidang ketenagalistrikan dan energi.	<ul style="list-style-type: none"> Perda/Perkada tentang Kelistrikan dan energi
		9.2 Tersedianya sumber daya energi yang terjangkau.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan jenis energi alternatif yang dikembangkan
		9.3 Tersedianya sarana dan prasarana kelistrikan.	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan PLTU/PLTH/PLPH Jumlah rumah di daerah yang dialiri listrik Tersedianya jaringan bawah tanah
5. Pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan	10. Terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu.	10.1 Tersedianya regulasi dan fasilitasi yang mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan.	<ul style="list-style-type: none"> Perda/Perkada bidang ekonomi
		10.2 Penguatan kelembagaan ekonomi rakyat.	<ul style="list-style-type: none"> Persentase koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM
		10.3 Meningkatkan kemampuan managerial pelaku ekonomi kerakyatan.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pelatihan
		10.4 Terciptanya produktifitas pada sektor ekonomi berbasis sumber daya lokal.	<ul style="list-style-type: none"> PDRB
	11. Terselenggaranya kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar.	11.1 Terlaksananya program pembangunan daerah berbasis kemitraan usaha.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kemitraan
		11.2 Meningkatkan daya saing dan orientasi ekspor komoditas-komoditas lokal.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah ekspor komoditas lokal
6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan Pemerintah	12. Meningkatnya daya saing masyarakat.	12.1 Peningkatan ketrampilan masyarakat yang menunjang kegiatan ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pelatihan
	13. Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah.	13.1 Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pelatihan
7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah	14. Terwujudnya soliditas antar kelompok masyarakat	14.1 Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai dan sejahtera di bumi Tambun Bungai.	<ul style="list-style-type: none"> Angka kriminalitas Jumlah unjuk rasa Sikap toleransi
		14.2 Meningkatnya pemahaman dan penghargaan terhadap adat istiadat lokal.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah grup kesenian Jumlah gedung kesenian

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Strategi pada dasarnya adalah upaya-upaya sistematis dari analisis yang rasional bagaimana sasaran strategik dicapai dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah mencapai visi dan misi melalui program prioritas yang sesuai dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategik dilakukan dari waktu ke waktu, arah kebijakan membedah kapan indikator capaian masing-masing sasaran harus dicapai. Sekaligus, memandu pada rentang waktu mana strategi harus dijalankan dalam kurun 2011-2015 tersebut.

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan memberikan pedoman bagaimana strategi terhubung ke sasaran dan kapan sasaran tersebut harus tercapai. Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus atau prioritas capaian dari waktu ke waktu. Mengingat bahwa semua program adalah merupakan kesinambungan dalam rangka penuntasan maka umumnya program yang ada dimulai dari tahun pertama. Beberapa program tetap diteruskan sampai dengan tahun 2015 namun ada juga program yang hanya dilaksanakan dalam satu atau dua tahun.

Sesuai dengan periodisasi RPJMD yakni tahun 2010-2015, namun dalam penyajian arah kebijakannya dimulai pada tahun 2011, mengingat pada tahun 2010 program yang ada sudah dilaksanakan. Berdasarkan analisis kekuatan dan potensi yang ada serta memperhatikan ketersediaan pendanaan pembangunan maka fokus dan prioritas masing-masing tahun adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan pembangunan tahun 2011-2012

Seperti diuraikan di atas, semua program pada dasarnya adalah merupakan kesinambungan dari program-program sebelumnya, sehingga pelaksanaannya dimulai dari tahun pertama yakni tahun 2011. Namun karena fokus pembangunan daerah 2011-2015 disesuaikan dengan misi yang ada, maka untuk mendapatkan hasil pembangunan yang optimal perlu dilakukan beberapa penataan antara lain pembuatan dan penyempurnaan regulasi, pembuatan dan penyempurnaan berbagai dokumen perencanaan sebelum pelaksanaannya dimulai.

Beberapa fokus prioritas yang harus dilaksanakan pada tahap ini, meliputi:

- 1) Penyiapan tata ruang yang berdimensi ekonomi unggulan daerah
- 2) Pengembangan pusat-pusat ekonomi unggulan daerah

- 3) Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan kependidikan
- 4) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
- 5) Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan penyelenggaraan sistem pendidikan dan kesehatan.
- 6) Penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan
- 7) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
- 8) Penyusunan regulasi sistem transportasi, komunikasi, dan informasi
- 9) Peningkatan kelas Bandara Tjilik Riwut
- 10) Penyediaan energi terjangkau dan regulasinya
- 11) Pengembangan infrastruktur dan jaringan transportasi, komunikasi, informatika, pengairan dan kelistrikan
- 12) Fundamentasi ekonomi kerakyatan
- 13) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat
- 14) Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi kerakyatan
- 15) Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur
- 16) Pengembangan budaya lokal

2. Arah kebijakan pembangunan tahun 2013

Arah kebijakan pada tahap ini difokuskan pada keberlanjutan dari fokus tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan dokumen perencanaan dan regulasi yang telah dibuat. Melalui RTRW Provinsi Kalimantan Tengah yang didalamnya telah berisi pusat-pusat unggulan ekonomi daerah dan jabaran teknis dalam dokumen kajian lainnya pelaksanaan lebih lanjut dilakukan guna mengembangkan berbagai pusat ekonomi unggulan daerah. Koordinasi menjadi salah satu agenda utama untuk mencapai tujuan dimaksud. Begitu pula untuk perbaikan layanan bidang pendidikan dan kesehatan. Sarana dan prasarana menjadi salah satu fokus pada tahap ini. Secara lengkap, fokus prioritas tahap ini adalah:

- 1) Pengembangan pusat-pusat ekonomi unggulan daerah (lanjutan)
- 2) Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan kependidikan (lanjutan)
- 3) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (lanjutan)
- 4) Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan penyelenggaraan sistem pendidikan dan kesehatan (lanjutan)
- 5) Penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan (lanjutan)

- 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan (lanjutan)
- 7) Penyediaan energi terjangkau (lanjutan)
- 8) Pengembangan infrastruktur dan jaringan transportasi, komunikasi, informatika, pengairan dan kelistrikan (lanjutan)
- 9) Fundamentasi ekonomi kerakyatan (lanjutan)
- 10) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat (lanjutan)
- 11) Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi kerakyatan
- 12) Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur
- 13) Pengembangan budaya lokal

3. Arah kebijakan pembangunan tahun 2014

Arah kebijakan pada tahap ini difokuskan pada kelanjutan upaya-upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui berbagai program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan dukungan kelembagaan lainnya, disamping keberlanjutan dari upaya-upaya sebelumnya. Tahap ini juga mulai dilakukan secara khusus upaya-upaya memberdayakan budaya lokal dalam berbagai bentuk. Tujuannya adalah agar tercipta soliditas struktur masyarakat yang berbeda golongan dengan tetap menjadikan budaya lokal sebagai basis penguatan dalam keberagaman. Kelanjutan perbaikan sistem layanan kesehatan dan pendidikan juga tetap dilakukan. Secara lengkap, fokus pada tahapan ini adalah:

- 1) Pengembangan pusat-pusat ekonomi unggulan daerah (lanjutan)
- 2) Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan kependidikan (lanjutan)
- 3) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (lanjutan)
- 4) Penyelenggaraan sistem pendidikan dan kesehatan (lanjutan)
- 5) Penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan (lanjutan)
- 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan (lanjutan)
- 7) Penyediaan energi terjangkau (lanjutan)
- 8) Pengembangan infrastruktur dan jaringan transportasi, komunikasi, informatika, pengairan dan kelistrikan (lanjutan)
- 9) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat (lanjutan)
- 10) Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi kerakyatan
- 11) Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur
- 12) Pengembangan budaya lokal

4. Arah kebijakan pembangunan tahun 2015

Arah kebijakan pada tahun 2015 ini merupakan tahapan akhir, namun masih tetap merupakan kelanjutan dan penuntasan bagi keseluruhan tahap pembangunan selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan ini harus dipandang sebagai kebijakan akhir dengan tetap melihat keberhasilan tahap-tahap sebelumnya. Dengan asumsi bahwa tahap-tahap sebelumnya telah berhasil dilakukan, maka pemberdayaan ekonomi kerakyatan berujung pada pengembangan daya saing ke segi orientasi ekspor untuk komoditas unggulan tertentu. Upaya yang dilakukan antara lain adalah fasilitasi pemasaran, insentif ekspor, dan berbagai kemudahan birokrasi lainnya. Tahap ini juga mengakhiri tahapan-tahapan dalam perbaikan sistem layanan pendidikan dan upaya penguatan struktur dan kultur masyarakat yang kondusif bagi agenda pembangunan. Secara lengkap, fokus pada tahap ini adalah:

- 1) Pengembangan pusat-pusat ekonomi unggulan daerah (lanjutan)
- 2) Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan kependidikan (lanjutan)
- 3) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (lanjutan)
- 4) Penyelenggaraan sistem pendidikan dan kesehatan (lanjutan)
- 5) Penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan (lanjutan)
- 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan (lanjutan)
- 7) Pengembangan infrastruktur dan jaringan transportasi, komunikasi, informatika, pengairan dan kelistrikan (lanjutan)
- 8) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat (lanjutan)
- 9) Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi kerakyatan
- 10) Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur
- 11) Pengembangan budaya lokal
- 12) Pengembangan daya saing dan orientasi ekspor komoditas lokal
- 13) Pengembangan kultur masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera

B. Strategi

Memperhatikan RPJM Nasional yang berkeinginan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah yang ingin mewujudkan Kalimantan Tengah yang maju, mandiri dan adil, maka arah dan agenda pembangunan nasional dan pembangunan provinsi mengandung muatan atas pentingnya pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan wilayah, pembangunan sosial-budaya, dan pembangunan pemerintahan.

Berkenaan dengan pembangunan daerah, telah digariskan bahwa apa yang menjadi visi-misi daerah harus selaras dengan visi-misi pembangunan nasional. Dalam pada itu, pandangan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah bahwa visi dari pembangunan daerah adalah terwujudnya kapasitas daerah yang maju dengan masyarakat yang mandiri. Sedangkan misi pembangunan daerah adalah: (1) memantapkan otonomi daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; (2) mempercepat pengembangan wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah; (3) pemerataan antardaerah; (4) pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan; (5) meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk pengembangan diri; serta (6) mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta hukum di beberapa daerah.

Memperhatikan berbagai uraian tersebut di atas, Provinsi Kalimantan Tengah secara umum memiliki kesamaan dengan arah pembangunan daerah yang digariskan oleh pemerintah pusat, dan bila dijabarkan lebih rinci sesuai karakteristik daerah akan ditekankan pada aspek-aspek: (1) peningkatan kualitas SDM sehingga bisa menjadi aset utama keunggulan kompetitif provinsi; (2) pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk menjangkau daerah-daerah yang masih terisolir; (3) pengembangan pertanian dalam arti luas sehingga dapat menghasilkan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar nasional; (4) perbaikan lingkungan hidup; dan (5) penanganan kemiskinan dengan prioritas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kelima prioritas pembangunan tersebut dipadukan dalam kerangka vitalisasi dan aktualisasi melalui pelaksanaan strategi, seperti peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik yang sulit terlaksana tanpa diimbangi oleh peningkatan kualitas SDM.

Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Strategi pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 - 2015, adalah sebagai berikut:

1. Strategi I (Pertama) : Penataan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah yang mengarusutamakan lingkungan hidup

Strategi pertama merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan Misi 1, yaitu “Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kalimantan Tengah

melalui pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup”.

Strategi penataan ruang memiliki prioritas penting karena akan menjadi pedoman dalam implementasi program pembangunan dalam pemanfaatan ruang dan program kewilayahan serta menjadi *enabler* agenda pembangunan dari strategi lainnya. Strategi ini mengedepankan pemetaan berbagai potensi pengembangan kawasan sehingga arah pembangunan daerah dapat ditentukan jauh-jauh hari dengan mempertimbangkan sentra-sentra pengembangan wilayah.

Penggalian dan pemanfaatan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) merupakan salah satu inti dari strategi ini, baik dari perencanaan dan pengembangannya di masa-masa datang dengan tetap mempertimbangkan upaya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Strategi ini juga tetap mengedepankan pengarusutamaan lingkungan hidup sebagai salah satu isu global yang harus diperhatikan. Pemetaan kawasan atau pusat-pusat unggulan ekonomi daerah tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

Adapun tujuan yang ingin diraih melalui strategi ini adalah: (a) Revitalisasi dan terciptanya *cluster-cluster* ekonomi unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan (b) Terciptanya rencana tata ruang yang memperhatikan keberlanjutan sumberdaya wilayah.

Sasaran yang ingin dicapai dari strategi ini adalah:

- 1) Teridentifikasinya *cluster-cluster* ekonomi unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
- 2) Tumbuhnya *cluster-cluster* ekonomi unggulan daerah yang belum berkembang;
- 3) Terwujudnya rencana tata ruang yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah dan berwawasan lingkungan;
- 4) Diperolehnya persetujuan dari pemerintah pusat yang mendukung Kota Palangka Raya sebagai pusat pemerintahan NKRI.
- 5) Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup

2. Strategi II (Kedua) : Perbaikan Sistem dan Akses Pendidikan

Strategi kedua merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan Misi 2, yaitu **“Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata”**.

Suatu perbaikan sistem memerlukan perencanaan yang holistik terhadap seluruh pelaku sistem, baik aspek manajemen (organisasi, prosedur, dan pengendalian), aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan), sarana dan prasarana, faktor penunjang lain bagi peserta didik, dan infrastruktur pendidikan, dan komponen

lainnya. Suatu perbaikan sistem diharapkan dapat mengefisiensikan biaya dan mengefektifkan tujuan sistem pendidikan antara lain menghasilkan siswa yang bermutu dan sesuai kriteria. Sementara itu, sistem pendidikan yang telah diperbaiki, khususnya (diprioritaskan) pendidikan dasar, ditindaklanjuti dengan agenda pembangunan untuk memenuhi syarat aksesibilitas; baik secara geografis maupun teraksesnya pendidikan dasar oleh masyarakat ekonomi lemah.

Tujuan yang ingin diraih melalui strategi kedua ini adalah: (a) terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau, dan (b) tersedianya infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok wilayah.

Sasaran yang ingin dicapai dari strategi ini adalah:

- 1) Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- 2) Penaatan sistem pendidikan yang efektif dan efisien;
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4) Tersedianya akses infrastruktur menuju pusat-pusat pendidikan

3. Strategi III (Ketiga) : Perbaikan Sistem dan Akses Kesehatan

Strategi ketiga merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan Misi 3, yaitu **“Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau”**.

Target urusan kesehatan di masa lalu masih perlu peningkatan antara lain juga untuk memenuhi target MDGs (bidang kesehatan) dan Indonesia Sehat yang belum tercapai dimasa lalu. Langkah mendasar strategi ini adalah perbaikan regulasi sistem kesehatan. Selanjutnya penyelenggaraan sistem kesehatan diarahkan pada pengembangan berbagai komponen sistem, antara lain peningkatan kapasitas kinerja tenaga kesehatan hingga perbaikan infrastruktur kesehatan untuk mewujudkan penjaminan kesehatan masyarakat secara merata.

Salah satu pijakan utama strategi ini adalah permasalahan rendahnya jumlah tenaga kesehatan di Kalimantan Tengah. Untuk itu, upaya-upaya peningkatan kuantitas (dan sekaligus, kualitas) mendesak untuk dilakukan antara lain dengan perbaikan sistem remunerasi dalam jangka pendek untuk menambah tenaga yang ada. Dalam jangka panjang, dilakukan melalui pembangunan pendidikan profesi dibidang kesehatan di perguruan tinggi.

Adapun tujuan yang ingin diraih melalui strategi ini adalah: (a) Meningkatnya sistem layanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau, dan (b) Tersedianya akses infrastruktur Kesehatan dasar hingga ke pelosok wilayah.

Sasaran yang ingin dicapai dari strategi ini adalah:

- 1) Tersedianya standar pelayanan kesehatan
- 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan
- 4) Tersedianya akses infrastruktur kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat

4. Strategi IV (Keempat) : Penataan sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika

Strategi keempat merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan Misi 4, yaitu **“Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat”**.

Salah satu pijakan utama strategi ini adalah berkaitan dengan permasalahan utama pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah masih minimnya infrastruktur antarkawasan dan keterhubungan Kalimantan Tengah dengan daerah atau provinsi lainnya mengingat tantangan alam yang didominasi oleh kawasan penuh gambut dengan sungai yang cukup lebar. Termasuk dalam strategi ini adalah program pengembangan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman, baik di pedalaman hutan maupun di sepanjang aliran sungai dilanjutkan dengan pengembangan infrastruktur ke pusat-pusat ekonomi rakyat.

Adapun tujuan yang ingin diraih melalui strategi ini adalah: Terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan.

Sasaran yang ingin dicapai dari strategi ini adalah:

- 1) Terwujudnya sistem transportasi (SISTRAWIL), informasi dan komunikasi wilayah
- 2) Terwujudnya jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika
- 3) Terwujudnya peningkatan kelas Bandara Tjilik Riwut dan bandara penunjang di Kalimantan Tengah

5. Strategi V (Kelima) : Pengembangan infrastruktur pengairan

Strategi kelima merupakan upaya untuk mendukung salah satu tujuan pelaksanaan misi 4, yaitu **“Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat”**.

Adapun tujuan yang ingin diraih melalui strategi ini adalah tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.

Infrastruktur pengairan dilihat sebagai salah satu masalah dan faktor sukses untuk meningkatkan kinerja bidang pertanian, khususnya agar menjaga keberhasilan target lumbung padi se Kalimantan Tengah dan di sisi lain adalah bagian dari komitmen penggerakan ekonomi kerakyatan. Pengembangan infrastruktur pengairan, di samping untuk memenuhi kebutuhan pengairan sawah yang ada juga untuk kebutuhan pencetakan sawah yang baru.

Sasaran yang ingin dicapai dari strategi ini adalah :

- 1) Terpeliharanya dan terbangunnya infrastruktur pengairan makro dan mikro, serta pencetakan sawah.

6. Strategi VI (Keenam) : Pengembangan Sumber Energi untuk Masyarakat

Strategi keenam merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan misi 4, yaitu “Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat”. Adapun tujuan yang ingin diraih melalui strategi ini adalah: Tersedianya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat. Tak dapat dipungkiri bahwa sumber energi menjadi sangat vital dalam penggerakan ekonomi daerah, khususnya pada ekonomi kerakyatan. Perlu regulasi yang baik agar kebutuhan sumber energi, khususnya bagi ekonomi rakyat terpenuhi. Strategi ini mensyaratkan pentingnya koordinasi berbagai pihak atau instansi mengingat kewenangan dalam penanganan masalah kelistrikan, sebagai salah satu jenis sumber energi.

Sasaran yang ingin dicapai dari strategi ini adalah:

- 1) Tersedianya payung hukum bidang ketenagalistrikan dan energi
- 2) Tersedianya sumber daya energi yang terjangkau
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana kelistrikan

7. Strategi VII (Ketujuh) : Menyelenggarakan sistem dan kemitraan ekonomi kerakyatan

Strategi ketujuh adalah merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan Misi 5, yaitu **“Pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan”**.

Ekonomi kerakyatan berpilar pada ekonomi lokal yang telah ada selama ini yang diselenggarakan oleh masyarakat menengah-bawah, termasuk yang berbasis hasil-hasil pertanian. Keberhasilan Kalimantan Tengah dalam meningkatkan surplus lumbung padinya menjadi salah satu basis pengembangan strategi ini. Ekonomi kerakyatan juga mengedepankan kemandirian, dalam arti manufaktur hasil-hasil ekonomi hulu juga diupayakan dapat diselenggarakan di Kalimantan Tengah agar nilai tambah produk lebih optimal (PDRB). Untuk itu diperlukan kerja

keras berbagai pihak, dari berbagai aspek secara holistik dan benar-benar mendapatkan penekanan pada alokasi anggaran yang memadai dari tahun ke tahun.

Dalam upaya untuk memacu agar ekonomi kerakyatan mendapat porsi yang memadai dalam pembangunan (ekonomi) daerah maka pengembangan kawasan di pedalaman juga harus diprioritaskan. Kajian tentang infrastruktur apa yang harus dipenuhi di masing-masing kawasan dimaksud, mutlak diperlukan. Pemaduan komponen penggerak ekonomi lainnya juga perlu diperhatikan. Lembaga-lembaga keuangan, perdagangan, dan lain-lain, perlu difasilitasi kehadirannya. Pada akhirnya, sebagian komoditas yang dihasilkan dari ekonomi kerakyatan dipetakan untuk dapat diarahkan pada orientasi ekspor.

Adapun tujuan yang ingin diraih melalui strategi ini adalah: (a) Terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu (b) Terselenggaranya kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar.

Sasaran yang ingin dicapai dari strategi ini adalah:

- 1) Tersedianya regulasi dan fasilitasi yang mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan
- 2) Penguatan kelembagaan ekonomi rakyat
- 3) Meningkatkan kemampuan managerial pelaku ekonomi kerakyatan
- 4) Terciptanya produktifitas pada sektor ekonomi berbasis sumber daya lokal
- 5) Terlaksananya program pembangunan daerah berbasis kemitraan usaha
- 6) Meningkatkan daya saing dan orientasi eksport komoditas-komoditas lokal

8. Strategi VIII (Kedelapan): Peningkatan daya saing masyarakat

Strategi kedelapan adalah upaya untuk mendukung pelaksanaan misi 6, yaitu **“Pelebagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan Pemerintah”**.

Suatu pelembagaan merupakan kerangka holistik mendukung capaian misi secara keseluruhan, utamanya keberhasilan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Artinya, strategi ini juga menekankan pada aspek pelembagaan terhadap upaya-upaya peningkatan daya saing masyarakat melalui penguatan kapasitas SDM. Suatu pelembagaan mencerminkan perlunya perencanaan yang baik, sistematis dan memiliki sasaran yang sinambung dari waktu ke waktu.

Adapun tujuan yang ingin diraih melalui strategi ini adalah: Meningkatkan daya saing masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari strategi ini adalah:

- 1) Peningkatan ketrampilan masyarakat yang menunjang kegiatan ekonomi.

9. Strategi IX (Kesembilan): Peningkatan kapasitas aparatur dan standar operasional birokrasi

Strategi kesembilan adalah upaya untuk mendukung pelaksanaan salah satu tujuan dari misi 6, yaitu **“Pelebagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan Pemerintah”**.

Dalam peningkatan kapasitas aparatur dan standar operasional birokrasi, tidak dapat dipungkiri bahwa profesionalitas aparatur dan efektivitas kelembagaan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan. Fokus strategi ini adalah pada aparatur. Namun demikian, strategi ini juga menekankan perbaikan tata laksana, akuntabilitas, dan terbebasnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dari KKN. Adapun tujuan yang ingin diraih melalui strategi ini adalah: meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah.

Sasaran yang ingin dicapai dari strategi ini adalah:

- 1) Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis.

10. Strategi X (Kesepuluh) : Penguatan sendi budaya dan kearifan lokal yang mendukung aktivitas pembangunan

Strategi kesepuluh adalah upaya untuk mendukung pelaksanaan misi 7, yaitu **“Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah”**.

Kondusifitas kehidupan sosial masyarakat merupakan hasil dari proses agenda pembangunan yang terencana di satu sisi. Di sisi lain, terwujudnya kondisi masyarakat yang rukun dan damai menjadi *“enabler”* (penggerak) bagi keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pewujudan masyarakat yang rukun damai, tak sekedar himbauan. Pemerintah daerah akan proaktif memfasilitasi proses dan agenda pembangunan untuk merajut serpihan-serpihan yang terpisah. Mempererat rasa persaudaraan dan menempatkan kembali budaya lokal sebagai salah satu faktor perekat dilakukan dengan semangat HUMA BETANG dan BHINNEKA TUNGGAL IKA.

Adapun tujuan yang ingin diraih melalui strategi ini adalah: terwujudnya soliditas antar kelompok masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari strategi ini adalah:

- 1) Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai dan sejahtera di bumi Tambun Bungai
- 2) Meningkatnya pemahaman dan penghargaan terhadap adat istiadat lokal.

Keterhubungan antara masing-masing arah kebijakan dan strategi serta sasaran dapat dilihat dalam gambar 6.1. Keterhubungan antara Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran.

Gambar 6.1.
Keterhubungan antara Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran.

Sasaran/Target Kinerja	Arahan Kebijakan			
	Tahun 2011-2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Sasaran 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3	Strategi I			
Sasaran 3.1; 3.2; 4.1; 4.2	Strategi II			
Sasaran 5.1; 5.2; 6.1; 6.2	Strategi III			
Sasaran 7.1; 7.2; 7.3	Strategi IV			
Sasaran 8.1	Strategi V			
Sasaran 9.1; 9.2; 9.3	Strategi VI			
Sasaran 10.21; 10.2; 10.3; 10.4; 11.1; 11.2	Strategi VII			
Sasaran 12.1	Strategi VIII			
Sasaran 13.1	Strategi IX			
Sasaran 14.1; 14.2	Strategi X			

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai target indikator kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas. Guna mendapatkan “sekumpulan” program prioritas yang inheren di setiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program-program prioritas di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah. Indikator kinerja diperlukan untuk menggambarkan tingkat pencapaian secara langsung dari sasaran pembangunan daerah tersebut.

A. Kebijakan Umum

Perumusan kebijakan umum bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

1. Kebijakan Umum Strategi I (Pertama) : Penataan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah yang mengarusutamakan lingkungan hidup.

Terlaksananya penataan tata ruang yang sesuai dengan arahan dan selaras dengan sasaran pembangunan diharapkan dapat menumbuhkan dan mengembangkan *cluster-cluster* ekonomi, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota dengan tidak lupa memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kebijakan umum untuk mendukung pencapaian strategi ini adalah:

- 1) Pengembangan ekonomi unggulan direncanakan terlebih dahulu dalam tata ruang dengan memperhatikan pelestarian alam dan lingkungan;
- 2) Koordinasi dengan pihak terkait untuk menghasilkan tata ruang yang juga untuk menyiapkan kota Palangka Raya sebagai pusat pemerintahan NKRI.

Kebijakan pertama bertujuan agar daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota dengan cara membuat regulasi, fasilitasi, dan identifikasi *cluster-cluster* perekonomian unggulan. Program penyusunan rencana tata ruang harus didahului oleh program penetapan sentra-sentra ekonomi unggulan baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Kebijakan kedua bertujuan agar Kota Palangka Raya terpilih sebagai pusat pemerintahan baru bagi NKRI. Untuk itu upaya-upaya yang dilakukan mulai dari

membuat kajian hingga sosialisasi kajian-kajian tentang potensi sumberdaya, sarana prasarana dan tata ruang harus diperhatikan.

2. Kebijakan Umum Strategi II (Kedua) : Perbaikan sistem Dan akses pendidikan.

Dunia pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah masih membutuhkan perbaikan sistem penyelenggaraan pendidikan. Dalam menciptakan pembelajaran yang baik diperlukan perbaikan sistem pendidikan. Sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik.

Kebijakan umum untuk mendukung strategi ini adalah:

- 1) Perbaikan sistem bagi tenaga pendidik dan kependidikan untuk merangsang dan meningkatkan motivasi pengabdian dan profesionalisme dalam bekerja;
- 2) Peningkatan kapasitas organisasi dan manajerial serta dukungan infrastruktur data dan informasi pendidikan;
- 3) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana pendidikan serta infrastruktur pendidikan secara bertahap.

3. Kebijakan Umum Strategi III (Ketiga) : Perbaikan sistem dan akses kesehatan.

Salah satu permasalahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah masih terbatasnya jangkauan pelayanan kesehatan dan masih rendahnya mutu pelayanan kesehatan di daerah pedesaan. Perbaikan sistem dan akses kesehatan dinilai penting untuk meningkatkan derajat kesehatan baik masyarakat di kota maupun di pedesaan.

Kebijakan umum untuk mendukung pencapaian strategi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perbaikan regulasi dan standarisasi pelayanan kesehatan;
- 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan;
- 3) Peningkatan dan dukungan sarana dan prasarana serta infrastruktur bidang kesehatan secara bertahap.

4. Kebijakan Umum Strategi IV (Keempat) : Penataan sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika.

Sebagai provinsi dengan wilayah sangat luas dan penyebaran penduduk tidak merata, masalah transportasi, komunikasi, dan informatika perlu mendapat perhatian yang serius. Dengan misi dimana lima tahun kedepan pengembangan ekonomi diarahkan pada ekonomi kerakyatan maka kebijakan umum diarahkan

pada program-program yang secara khusus memberikan daya dukung pada pengembangan ekonomi lokal.

Kebijakan umum untuk mendukung pencapaian strategi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perbaikan regulasi dan pengaturan bidang transportasi, komunikasi, dan informatika;
- 2) Pengembangan dan perbaikan infrastruktur dan sarana/prasarana transportasi, komunikasi, dan informatika dengan tetap memperhatikan prioritas pada daya dukungnya bagi pengembangan ekonomi lokal dan kerakyatan.

5. Kebijakan Umum Strategi V (Kelima) : Pengembangan infrastruktur pengairan.

Strategi ini sangat spesifik untuk memberikan penajaman pada sektor pertanian rakyat sebagai salah satu komponen ekonomi kerakyatan yang perlu ditunjang secara khusus. salah satu permasalahan yang mendapat sorotan penting adalah pada infrastruktur pengairan. Program prioritas yang perlu ditekankan juga antara lain pencetakan sawah.

Kebijakan umum untuk mendukung pencapaian strategi ini adalah: pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan makro dan mikro, serta pencetakan sawah.

6. Kebijakan Umum Strategi VI (Keenam) : Pengembangan sumber energi untuk masyarakat.

Penajaman pada kebijakan umum ini antara lain terciptanya berbagai sumber energi alternatif yang murah bagi masyarakat yang secara mandiri dapat menunjang kegiatan ekonomi lokal.

Kebijakan umum untuk mendukung pencapaian strategi ini adalah penyediaan prasarana pembangkit listrik yang memprioritaskan pengembangan ekonomi kerakyatan dan interkoneksi jaringan listrik dengan sistem se Kalimantan.

7. Kebijakan Umum Strategi VII (Ketujuh) : Menyelenggarakan sistem dan kemitraan ekonomi kerakyatan.

Kebijakan umum untuk mendukung pencapaian strategi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan pilar dan fundamentasi sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya dan bahan baku lokal;
- 2) Pengembangan ekonomi kerakyatan disokong oleh industri kecil dan menengah serta koperasi yang handal;

- 3) Peningkatan produksi dan perluasan jaringan pemasaran dalam rangka peningkatan daya saing,
- 4) Pengembangan kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar
- 5) Pengembangan industri kecil dan menengah

8. Kebijakan Umum Strategi VIII (Kedelapan) : Peningkatan daya saing masyarakat.

Kebijakan umum untuk mendukung pencapaian strategi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ketrampilan masyarakat yang menunjang perekonomian melalui efektifitas fungsi BLK dan sejenisnya.
- 2) Rekrutmen, diklat bagi tenaga penyuluh, instruktur serta fasilitator.
- 3) Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan keterampilan dan sarana produksi.
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan dan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan.

9. Kebijakan Umum Strategi IX (Kesembilan) : Peningkatan kapasitas aparatur dan standar operasional birokrasi.

Kebijakan umum untuk mendukung pencapaian strategi tersebut adalah peningkatan kapasitas aparatur dilakukan secara terencana dan sistematis, dihubungkan dengan perencanaan karier untuk menghasilkan layanan dan kinerja yang lebih baik

10. Kebijakan Umum Strategi X (Kesepuluh) : Penguatan sendi budaya dan kearifan lokal yang mendukung aktifitas pembangunan.

Kebijakan umum untuk mendukung pencapaian strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan dan penguatan peran budaya lokal dalam aktivitas sosial dan ekonomi kemasyarakatan;
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kamtibmas dan pemberantasan penyakit masyarakat.
- 3) Pembuatan regulasi dalam rangka penggunaan simbol-simbol adat dalam bidang seni dan budaya dalam acara-acara resmi pemerintahan

- 4) Pelaksanaan sosialisasi tentang budaya dan kesenian lokal dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan budaya lokal

B. Program Pembangunan Daerah

Berbagai program prioritas yang telah terpilih melalui beberapa tahap pembahasan pada masing-masing strategi dinamakan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah adalah program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah dibuat di masing-masing strategi untuk menunjukkan cerita strategi dan kelogisannya mencapai sasaran terkait.

1. Program Pembangunan Daerah Strategi I (Pertama) : Penataan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah yang mengarusutamakan lingkungan hidup.

Program pembangunan daerah yang dilakukan untuk mencapai strategi ini adalah:

1). Program Pengembangan *Cluster* Ekonomi

Program pengembangan *cluster* ekonomi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan kawasan strategis khususnya *cluster-cluster* ekonomi unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten

- Indikator : - PDRB
- Jumlah *cluster*
- SKPD Penanggungjawab : Bappeda
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

2). Program Perencanaan Tata Ruang

Program perencanaan tata ruang adalah dasar untuk pemanfaatan ruang serta melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan ruang yang partisipatif dan akuntabel

- Indikator : - Dokumen RTRWP
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pekerjaan Umum
- Pelaksanaan Program : 2011-2012

3). Program Pemanfaatan Ruang

Program pemanfaatan ruang adalah dasar untuk pemanfaatan ruang serta melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan ruang yang partisipatif dan akuntabel

- Indikator : - Dokumen detail rencana pengembangan kawasan strategis provinsi
- SKPD Penanggungjawab : Bappeda
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

4). Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program pengendalian pemanfaatan ruang ini bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai arahan rencana tata ruang

- Indikator : - Dokumen laporan pengendalian RTRWP
- SKPD Penanggungjawab : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

5). Program Penyiapan Kota Palangka Raya sebagai Pusat Pemerintahan NKRI

Program ini dilaksanakan dengan melakukan berbagai kajian potensi sumberdaya, sarana dan prasarana, menyusun tata ruang berikut sosialisasinya kepada semua stakeholder

- Indikator : - Dokumen RTRW Kota Palangka Raya
 - Partisipasi masyarakat
 - Dokumen RDTR Kota Palangka Raya
- SKPD Penanggungjawab : Bappeda
- Pelaksanaan Program : 2011-2013

6). Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Program ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi tingkat degradasi lingkungan, berikut sosialisasinya kepada semua *stakeholder*

- Indikator : - Data Kualitas Air
 - Data Kualitas Udara
 - Data Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3)
- SKPD Penanggungjawab : Badan Lingkungan Hidup
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

7). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup.

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup

- Indikator : - Dokumen Rancangan peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup (RPPLH)
 - Dokumen KLHS, NSDA
 - Dokumen informasi sumber daya mineral
 - Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi geografis, untuk menunjang sektor pertambangan
- SKPD Penanggungjawab : Badan Lingkungan Hidup,
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

8). Program Penyiapan Pengembangan Wilayah Pertambangan

Program ini dilaksanakan dalam rangka menyiapkan pengembangan data dasar wilayah pertambangan

- Indikator : - Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi geografis, untuk menunjang sektor pertambangan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pertambangan dan Energi
- Pelaksanaan Program : 2011-2012

9). Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Mineral Dan Batubara, Migas Dan Panas Bumi

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses informasi sumberdaya mineral dan batubara, migas dan panas bumi

- Indikator : - Tersedia data potensi bahan galian
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pertambangan dan Energi
- Pelaksanaan Program : 2011-2013

10). Program Mitigasi dan Adaptasi Bencana serta Perubahan Iklim

Program ini dilaksanakan dalam upaya melakukan Mitigasi dan adaptasi Perubahan iklim

- Indikator : - Rekomendasi Komda REDD
- Rekomendasi Dewan Daerah Perubahan Iklim
- SKPD Penanggungjawab : Badan Lingkungan Hidup
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

2. Program Pembangunan Daerah Strategi II (Kedua) : Perbaikan sistem dan akses pendidikan.

Program pembangunan daerah yang dilakukan untuk mencapai strategi tersebut diatas adalah:

1) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan melakukan kegiatan kegiatan seperti sertifikasi tenaga pendidik, diklat kompetensi dan pelatihan-pelatihan.

- Indikator : - Jumlah Guru bersertifikasi 11.687 orang
- Persentase kualifikasi pendidik SD/SDLB 83,54 persen , SMP/SMPLB 98,45 persen
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pendidikan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

- 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan**
 Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan terutama di daerah yang terpencil dengan memberikan insentif.
- Indikator : - Rupiah alokasi kesejahteraan lebih dari 7000 guru di daerah
 - SKPD Penanggungjawab : Dinas Pendidikan
 - Pelaksanaan Program : 2011-2015
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
- Indikator : - Rata-rata jam latihan per orang/tahun Dinas Pendidikan
 - SKPD Penanggungjawab : Dinas Pendidikan
 - Pelaksanaan Program : 2011-2015
- 4) Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan**
 Program ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan, termasuk fasilitasi pendirian Program Studi Pendidikan Dokter , Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Palangka Raya.
- Indikator : - Jumlah Jenis pelatihan 10 kegiatan
 - Terasilitasinya pendirian Program Studi Pendidikan Dokter , Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Palangka Raya
 - SKPD Penanggungjawab : Dinas Pendidikan
 - Pelaksanaan Program : 2011-2015
- 5) Program Pengembangan Data/Informasi**
 Program ini bertujuan untuk pengembangan data/informasi bidang pendidikan
- Indikator : - Tersedianya database pendidikan tiap kabupaten, kota dan provinsi sebanyak 75 Kegiatan
 - SKPD Penanggungjawab : Dinas Pendidikan
 - Pelaksanaan Program : 2011-2015
- 6) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**
 Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan fasilitas pendidikan untuk peserta didik
- Indikator : - Jumlah penerima beasiswa 15.000 siswa
 - Rupiah beasiswa Rp. 7.500.000.000,-
 - Jumlah buku 75000
 - SKPD Penanggungjawab : Dinas Pendidikan
 - Pelaksanaan Program : 2011-2015

7) Program Pendidikan Menengah

Program ini bertujuan untuk dukungan fasilitas pendidikan untuk peserta didik

- Indikator : - Jumlah penerima beasiswa 35.000 siswa
 - Rupiah beasiswa Rp. 27.300.000.000,-
 - Jumlah buku 75000
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pendidikan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

8) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program ini bertujuan untuk Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

- Indikator : - Jumlah anggota/pengunjung 319.366 orang
 - Jumlah perpustakaan 1247 unit
 - Jumlah buku 569.071 judul
- SKPD Penanggungjawab : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

9) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana pendidikan

- Indikator : - Terbangun dan terehabnya rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah SD, SMP, SMA sebanyak 295 paket
 - Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
 - Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pendidikan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

10) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini bertujuan untuk pembangunan Jalan dan Jembatan, dalam rangka peningkatan akses pendidikan.

- Indikator : - Koordinasi program pembangunan jalan dan jembatan, khusus yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
 - Terbangunnya jalan dan jembatan khususnya yang menjadi kewenangan provinsi secara bertahap dan berkesinambungan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pekerjaan Umum
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

11) Program Pengadaan Alat Angkutan Jalan Raya

Program ini bertujuan untuk pengadaan alat angkutan jalan raya dalam rangka peningkatan akses pendidikan.

- Indikator : - Jumlah trayek menuju kawasan pendidikan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

12) Program Pengadaan Alat Angkutan Air

Program ini bertujuan untuk pengadaan alat angkutan air dalam rangka peningkatan akses pendidikan.

- Indikator : - Jumlah trayek menuju kawasan pendidikan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

3. Program Pembangunan Daerah Strategi III (Ketiga) : Perbaikan sistem dan akses kesehatan.

Program pembangunan daerah yang dilakukan untuk mencapai strategi tersebut diatas adalah:

1) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program standarisasi pelayanan kesehatan ini bertujuan agar di seluruh kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Tengah memiliki standar pelayanan kesehatan sesuai ketentuan, terutama di daerah yang terpencil.

- Indikator : - Regulasi Standar Pelayanan Kesehatan
- Meningkatnya mutu layanan kesehatan
- Akreditasi RSUD dr. Doris Sylvanus menjadi RS Tipe B Pendidikan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kesehatan, RSUD dr. Doris Sylvanus
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, terutama di daerah terpencil.

- Indikator : - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terlaksananya upaya pencegahan kesehatan masyarakat
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kesehatan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini bertujuan agar di seluruh kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Tengah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, terutama di daerah terpencil

- Indikator : - Meningkatnya persentase keluarga dengan pola hidup bersih dan sehat
- Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS)
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kesehatan, RSUD dr. Doris Sylvanus
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

4) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan anak.

- Indikator : - Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan ibu dan reproduksi serta pelayanan kesehatan
- *Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)*
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Doris Sylvanus
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

5) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita dalam rangka menurunkan angka kematian balita.

- Indikator : - Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan anak balita
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Doris Sylvanus
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

6) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada lansia

- Indikator : - Meningkatnya pelayanan kesehatan lansia
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kesehatan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

7) Program Peningkatan Pelayanan Tenaga Kesehatan

Program bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan yang terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah

- Indikator : - Rasio dokter per satuan penduduk
- Jumlah layanan tenaga kesehatan
- Rasio tenaga medis per satuan penduduk
- Rasio dokter berijin praktek
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kesehatan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

8) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Tenaga Kesehatan.

Program ini bertujuan untuk melaksanakan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

- Indikator : - Jumlah peralatan pendukung kesehatan
- Jumlah sarana dan prasarana pendukung tenaga kesehatan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kesehatan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

9) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Program ini bertujuan untuk melaksanakan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana kesehatan di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah,

- Indikator : - Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
- Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kesehatan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

10) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Infrastruktur Kesehatan

Program Ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur penunjang kesehatan di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah

- Indikator : - Koordinasi program pembangunan jalan dan jembatan, khusus yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pekerjaan Umum
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

11) Program Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial

Program Ini dilaksanakan dengan untuk meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur penunjang kesehatan dan fasilitas sosial lainnya di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah

- Indikator : - Rasio rumah sakit/satuan penduduk
- Rasio rumah ibadah/satuan penduduk
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pekerjaan Umum
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

4. Program Pembangunan Daerah Strategi IV (Keempat) : Penataan sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika.

Program pembangunan daerah yang dilakukan untuk mencapai strategi tersebut diatas adalah:

1) Program Penyusunan Sistem Transportasi

Program ini bertujuan untuk menyusun Sistem Transportasi Wilayah (Sistrawil),

- Indikator : - Perda/perkada sistem transportasi
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

2) Program Penyusunan Sistem Komunikasi dan Informatika

Program ini bertujuan untuk menyusun sistem komunikasi dan informasi wilayah

- Indikator : - Perda/perkada sistem komunikasi dan informatika
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

3) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini bertujuan untuk membangun jaringan transportasi menuju pemukiman, sentra industri rakyat, antar daerah industri serta penghubung dari ibukota provinsi dari ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, atau antar ibukota kabupaten, juga Ibukota kabupaten dengan jalan nasional serta ke daerah strategis provinsi/pelabuhan

- Indikator : - Panjang jalan dilalui kendaraan roda 4 menuju pemukiman
- Panjang jalan dilalui kendaraan roda 4 menuju sentra industri rakyat

- Jumlah jembatan yang menghubungkan antar daerah industri
- Jalan penghubung dari ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, atau antar ibukota kabupaten, juga ibukota kabupaten dengan jalan nasional serta ke daerah strategis provinsi/pelabuhan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pekerjaan Umum
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program ini bertujuan untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

- Indikator : - Jumlah perbaikan jalan
- Jumlah perbaikan Jembatan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pekerjaan Umum
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

5) Program Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program ini bertujuan untuk membangun sarana dan prasarana perhubungan antara lain terminal bus, halte, dermaga pelabuhan, bandara dan jalan kereta api untuk angkutan sumber daya alam (batubara).

- Indikator : - Jumlah terminal bus, halte, dermaga pelabuhan, bandara, panjang jalan kereta api untuk angkutan sumber daya alam.
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

6) Program Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informatika

Program ini bertujuan untuk membangun jaringan komunikasi dan informasi wilayah sampai ke desa

- Indikator : - Jumlah daerah/desa yang terlayani jaringan telepon
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

7) Program Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi Dan Informatika

Program ini bertujuan untuk membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informasi wilayah

- Indikator : - Jumlah tower komunikasi
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pelaksanaan Program : 2011-2014

8) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Komunikasi Dan Informatika

Program ini bertujuan untuk memperbaiki dan memelihara sarana dan prasarana komunikasi

- Indikator : - Jumlah perbaikan-perbaikan terhadap sarana dan prasarana komunikasi
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

9) Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang.

- Indikator : - Jumlah penumpang yang di layani per tahun
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

10) Program Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

- Indikator : - Jumlah perencanaan/studi sarana dan prasarana transportasi
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

11) Program Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara

- Indikator : - Jumlah master plan
- Jumlah perencanaan fasilitas prasarana dan keselamatan bandar udara
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pelaksanaan Program : 2011-2012

5. Program Pembangunan Strategi V (Kelima) : Pengembangan infrastruktur pengairan.

Strategi ini dilakukan dengan membangun dan memelihara infrastruktur pengairan makro dan mikro serta pencetakan sawah di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Program pembangunan daerah yang dilakukan untuk mencapai strategi tersebut di atas adalah:

1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

- Indikator : - Rasio jaringan irigasi
- Luas irigasi di wilayah kabupaten dengan kondisi baik
- luas sawah tercetak
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pekerjaan Umum
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

- Indikator : - Jumlah perencanaan/studi saluran drainase
- Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pekerjaan Umum
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

3) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong.

- Indikator : - Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pekerjaan Umum
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

6. Program Pembangunan Daerah Strategi VI (Keenam) : Pengembangan sumber energi untuk masyarakat.

Program pembangunan daerah yang dilakukan untuk mencapai strategi tersebut diatas adalah:

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagaan Listrikan dan Energi

Program ini dilaksanakan dengan menyusun peraturan/pedoman tentang ketenagalistrikan dan energi, melakukan penghematan pada pemanfaatan energi yang tidak terbarukan dan menciptakan sumber-sumber energi baru yang terbarukan.

- Indikator : - Pembangunan PLTU/PLTH/PLPH
- Jumlah rumah didaerah yang dialiri listrik
- Tersedianya jaringan bawah tanah
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pertambangan dan Energi
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

7. Program Pembangunan Daerah Strategi VII (Ketujuh) : Menyelenggarakan sistem dan kemitraan ekonomi kerakyatan.

Strategi ini dilaksanakan dengan membuat regulasi dan fasilitas penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi tumbuhnya ekonomi kerakyatan, mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif pelaku ekonomi kerakyatan, meningkatkan produksi dan perluasan jaringan pemasaran dalam rangka peningkatan daya saing, mengembangkan kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar, serta mengembangkan industri kecil dan menengah. Program pembangunan daerah yang dilakukan untuk mencapai strategi tersebut diatas adalah:

1) Program Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dari pelaku usaha KUMKM

- Indikator : - Sinergi program dan kegiatan Koperasi UMKM
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini diarahkan untuk menumbuhkembangkan industri kecil dan menengah

- Indikator : - Pertumbuhan Industri
- Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri
- Cakupan bina kelompok pengrajin
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

3) Program Peningkatan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM

Program ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM agar dapat mengembangkan usahanya

- Indikator : - Peningkatan KUMKM dalam mengembangkan usaha
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

4) Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

Program ini diarahkan untuk dapat memperkuat kelembagaan koperasi agar dapat meningkatkan pelayanan kepada anggotanya

- Indikator : - Jumlah koperasi aktif
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan nilai investasi baik skala nasional maupun asing.

- Indikator : - Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
- Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
- SKPD Penanggungjawab : Badan Penanaman Modal Daerah
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

6) Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

Program ini diarahkan untuk penguatan Kelembagaan Koperasi

- Indikator : - Persentase koperasi aktif
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

7) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan lembaga ekonomi pedesaan melalui pengembangan koperasi pedesaan

- Indikator : - Jumlah koperasi pedesaan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

8) Program Pengembangan dan Pengendalian Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan untuk menaikkan produksi perikanan tangkap secara terkendali

- Indikator : - Produksi perikanan tangkap 53.371 ton
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kelautan dan Perikanan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

9) Program Kerawanan dan Kewaspadaan Pangan

Program ini bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya masalah kerawanan pangan dengan pendekatan wilayah

- Indikator : - Dokumen pemantauan dan peta rawan pangan
- Jumlah desa mandiri pangan
- SKPD Penanggungjawab : Badan Ketahanan Pangan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

10) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan untuk dapat menciptakan cadangan pangan masyarakat melalui pengembangan lumbung pangan

- Indikator : - Jumlah lumbung pangan
- SKPD Penanggungjawab : Badan Ketahanan Pangan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

11) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan riil petani

- Indikator : - Nilai Tukar Petani
- Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pertanian dan Peternakan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

12) Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing SDM koperasi dan UMKM

- Indikator : - Jumlah diklat bagi KUKM
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

13) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini bertujuan untuk melindungi konsumen melalui penerbitan sertifikat halal dan pengawasan berbagai produk perdagangan

- Indikator : - Produk halal yang berlabel
- Produk makanan dan minuman aman di konsumsi
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

14) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan

- Indikator : - Rasio produksi pangan dengan kebutuhan
- SKPD Penanggungjawab : Badan Ketahanan Pangan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

15) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi tenaga kerja

- Indikator : - Partisipasi angkatan kerja perempuan
- Rasio daya serap tenaga kerja
- Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

16) Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi tenaga kerja khususnya perempuan di pedesaan

- Indikator : - Partisipasi angkatan kerja perempuan
- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah desa
- SKPD Penanggungjawab : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

17) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Program ini bertujuan untuk menaikkan tingkat penerapan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan produktifitas sektor pertanian

- Indikator : - Jumlah terapan teknologi pertanian
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pertanian dan Peternakan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

18) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan

Program ini bertujuan untuk menaikkan tingkat penerapan teknologi perkebunan dalam rangka peningkatan produktifitas sub sektor perkebunan

- Indikator : - Jumlah terapan teknologi perkebunan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perkebunan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

19) Program Peningkatan Produksi Pertanian

Program ini bertujuan untuk menaikkan produksi beberapa komoditas pertanian khususnya komoditas pangan

- Indikator : - Jumlah produksi pertanian
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pertanian dan Peternakan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

20) Program Peningkatan Produksi Perkebunan

Program ini bertujuan untuk menaikkan produksi beberapa komoditas perkebunan khususnya komoditas yang berasal dari perkebunan rakyat

- Indikator : - Jumlah produksi perkebunan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perkebunan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

21) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian

Program ini diarahkan untuk menaikkan kapasitas tenaga penyuluh pertanian dalam rangka menaikkan produksi beberapa komoditas pertanian khususnya komoditas pangan

- Indikator : - Jumlah pelatihan pada penyuluh pertanian
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pertanian dan Peternakan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

22) Program Pemberdayaan Penyuluh Perkebunan Lapangan

Program ini diarahkan untuk menaikkan kapasitas tenaga penyuluh perkebunan dalam rangka menaikkan produksi beberapa komoditas perkebunan khususnya komoditas perkebunan rakyat

- Indikator : - Jumlah pelatihan penyuluh perkebunan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perkebunan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

23) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program ini bertujuan untuk menaikkan produksi beberapa komoditas hasil peternakan

- Indikator : - Jumlah Ternak pertahun
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pertanian dan Peternakan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

24) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemasaran beberapa komoditas hasil produksi peternakan

- Indikator : - Jumlah pemasaran ternak pertahun
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pertanian dan Peternakan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

25) Program Pengembangan Wirausaha

Program ini bertujuan untuk mengembangkan semangat dan jiwa kewirausahaan para nelayan dan pembudidaya ikan dalam rangka mewujudkan beberapa kawasan minapolitan

- Indikator : - Terbentuknya kawasan minapolitan di 13 lokasi
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kelautan dan perikanan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

26) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemasaran beberapa komoditas hasil pertanian di berbagai komoditas pertanian

- Indikator : - Jumlah pemasaran hasil pertanian pertahun
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pertanian dan Peternakan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

27) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemasaran beberapa komoditas hasil produksi perkebunan terutama komoditas perkebunan rakyat

- Indikator : - Jumlah pemasaran hasil perkebunan pertahun
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perkebunan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

28) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan teknologi peternakan dalam rangka menaikkan produktifitas sektor peternakan

- Indikator : - Jumlah terapan teknologi peternakan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pertanian dan Peternakan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

29) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya hutan

- Indikator : - Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
- Jenis dan jumlah hasil pengolahan sumber daya hutan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kehutanan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

30) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan pengembangan hutan yang optimal dan berkelanjutan

- Indikator : - Dokumen perencanaan dan kebijakan
- pengembangan hutan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kehutanan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

31) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan

- Indikator : - Pemanfaatan wilayah pesisir
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kelautan dan perikanan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

32) Program Pengawasan dan Pengendalian SDKPI

Program ini diarahkan untuk mengefektifkan upaya pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan sehingga dapat menurunkan illegal fishing

- Indikator : - Penurunan *illegal fishing* 40 persen
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kelautan dan perikanan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

33) Program Penumbuhan Industri Agro

Program ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan industri agro untuk memperkuat struktur ekonomi daerah yang lebih berimbang

- Indikator : - Jumlah industri agro pertahun
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

34) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi beberapa komoditas perikanan budidaya

- Indikator : - Produksi perikanan budaya 414.009 ton
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kelautan dan perikanan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

35) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing beberapa produk perikanan melalui perbaikan kualitas produk olahan hasil perikanan

- Indikator : - Produksi produk olahan hasil perikanan
56.408 ton
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kelautan dan perikanan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

36) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program ini bertujuan untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis pada beberapa kawasan DAS

- Indikator : - Berkurangnya lahan kritis pada DAS
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kehutanan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

37) Program Pengembangan Agribisnis dan Keamanan Pangan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan agribisnis dan keamanan pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan di daerah

- Indikator : - Berkembangnya agribisnis produk pangan lokal
- SKPD Penanggungjawab : Badan Ketahanan Pangan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

38) Program Ketahanan Pangan dan Gizi Keluarga

Program ini bertujuan untuk mengembangkan ketahanan pangan dan gizi keluarga

- Indikator : - Naiknya cadangan pangan dan status gizi keluarga
- SKPD Penanggungjawab : Badan Ketahanan Pangan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

39) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri melalui beberapa kegiatan promosi dan kontak dagang

- Indikator : - Promosi produk unggulan daerah
- Terjalin kontak dagang produk lokal
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kehutanan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

8. Program Pembangunan Daerah Strategi VIII (Kedelapan) : Peningkatan daya saing masyarakat.

Program pembangunan daerah yang dilakukan untuk mencapai strategi tersebut diatas adalah:

1) Program Pendidikan Non Formal

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan non formal antara lain pendidikan kecakapan hidup, pelatihan, peningkatan keterampilan.

- Indikator : - Jumlah Pelatihan 80 paket
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pendidikan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

2) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Program ini bertujuan untuk memberikan pembinaan bagi eks penyandang penyakit sosial, antara lain melalui pendidikan keterampilan, pelatihan, kursus, atau sosialisasi.

- Indikator : - Jumlah Pelatihan keterampilan dan Bimbingan Sosial
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Sosial
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

3) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM serta produktifitas tenaga kerja antara lain melalui pelatihan, peningkatan keterampilan.

- Indikator : - Jumlah pelatihan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Pelaksanaan Program : 2013-2015

4) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat dengan membuka lapangan kerja baru maupun meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sudah ada.

- Indikator : - Jumlah Lapangan Kerja
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

5) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan mengembangkan kapasitas regulasi di bidang ketenagakerjaan

- Indikator : - Dokumen/regulasi tentang perlindungan pekerja
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Pelaksanaan Program : 2011-2012

6) Program Peningkatan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM

Program ini bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM, antara lain dengan memfasilitasi/regulasi

- Indikator : - Dokumen/regulasi
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Pelaksanaan Program : 2011-2012

7) Program Peningkatan Akses Terhadap Sumberdaya Produktif

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap Sumberdaya lembaga keuangan/pembiayaan

- Indikator : - Jumlah KUKM terakses untuk pembiayaan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

8) Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM koperasi dan usaha mikro kecil menengah, antara lain melalui pelatihan

- Indikator : - Jumlah Pelatihan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

9) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan mengembangkan kapasitas regulasi di bidang ketenagakerjaan

- Indikator : - Dokumen/regulasi tentang perlindungan pekerja
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Pelaksanaan Program : 2011-2012

10) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan kerjasama dalam pengelolaan kekayaan budaya

- Indikator : - Jumlah kerjasama dibidang kebudayaan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

11) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta kapasitas pemuda dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan kepemudaan

- Indikator : - Jumlah kegiatan kepemudaan 230 kegiatan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pemuda dan Olahraga
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

12) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, sehingga mampu mandiri dan tercipta jiwa kewirausahaan.

- Indikator : - Jumlah wirausahawan muda
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pemuda dan Olah Raga
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

13) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Program ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pemasyarakatan olah raga, dengan terselenggaranya lembaga/wadah-wadah olah raga di masyarakat.

- Indikator : - Jumlah klub olahraga
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pemuda dan Olah Raga
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

14) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan

- Indikator : - Jumlah fasilitasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- SKPD Penanggungjawab : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

15) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desanya

- Indikator : - Jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- SKPD Penanggungjawab : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

16) Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM

Program ini bertujuan untuk mengembangkan produk yang dihasilkan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sekaligus mengembangkan cara pemasaran produk.

- Indikator : - Jumlah KUMKM mengikuti panduan/promosi dan kemitraan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

9. Program Pembangunan Daerah Strategi IX (Kesembilan) : Peningkatan kapasitas aparatur dan standar operasional birokrasi.

Program pembangunan daerah yang dilakukan untuk mencapai strategi tersebut diatas adalah:

1) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

- Indikator : - Percepatan layanan
- SKPD Penanggungjawab : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

10. Program Pembangunan Daerah Strategi X (Kesepuluh) : Penguatan seni budaya dan kearifan lokal yang mendukung aktivitas pembangunan.

Program pembangunan daerah yang dilakukan untuk mencapai strategi tersebut di atas adalah:

1) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemitraan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan

- Indikator : - Jumlah kemitraan seminar, sarasehan dan diskusi, sosialisasi
- SKPD Penanggungjawab : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

2) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

- Indikator : Angka kriminalitas
- SKPD Penanggungjawab : Satuan Polisi Pamong Praja
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

3) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan serta memberikan keamanan dan kenyamanan lingkungan

- Indikator : - Kerjasama dengan pihak terkait (KOREM, POLDA, siswa, dan mahasiswa)
- Angka kriminalitas
- SKPD Penanggungjawab : Satuan Polisi Pamong Praja
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

4) Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal, agar tercipta keamanan dan kenyamanan lingkungan

- Indikator : - Deteksi dini setiap tahun
- Jumlah linmas per-10000 penduduk
- SKPD Penanggungjawab : Satuan Polisi Pamong Praja
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

5) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara

- Indikator : - Jumlah siswa, mahasiswa, dan ormas/LSM yang dibina
- SKPD Penanggungjawab : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

6) Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik

- Indikator : - Kerjasama ormas/LSM, parpol dan lembaga legislatif
- SKPD Penanggungjawab : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- Pelaksanaan Program : 2011-2015

7) Program Pengembangan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Program ini diarahkan untuk pengembangan kekayaan dan keragaman Budaya, melalui peningkatan pemahaman untuk melestarikan dan memelihara kekayaan serta keragaman budaya

- Indikator : - Jumlah Pelatihan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Pelaksanaan Program : 2014-2015

8) Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam mengelola, melestarikan kekayaan dan keragaman budaya

- Indikator : - Jumlah Pelatihan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Pelaksanaan Program : 2013-2014

Ringkasan kebijakan umum dan program pembangunan masing-masing strategi dapat dilihat pada Tabel 7.1 di bawah ini:

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Strategi I : Penataan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah yang mengarusutamakan lingkungan hidup			
Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator	SKPD Penanggungjawab
1. Pengembangan ekonomi unggulan direncanakan terlebih dahulu dalam tata ruang yang memperhatikan pelestarian alam dan lingkungan. 2. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menghasilkan tata ruang yang juga untuk penyiapan kota Palangka Raya sebagai pusat pemerintahan NKRI	1) Program pengembangan <i>cluster</i> ekonomi	· PDRB · Jumlah <i>cluster</i>	· Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2) Program Perencanaan Tata Ruang	· Dokumen RTRWP	· Dinas Pekerjaan Umum
	3) Program Pemanfaatan Ruang	· Dokumen detail rencana pengembangan kawasan strategis provinsi	
	4) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	· Dokumen laporan pengendalian RTRWP	
	5) Program penyiapan Kota Palangka Raya sebagai pusat pemerintahan NKRI	· Dokumen RTRW Kota Palangka Raya · Gerakan masyarakat · Dokumen RDTR Kota Palangka Raya	· Badan Perencanaan Pembangunan Daerah · Sekretariat Daerah
	6) Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	· Data kualitas air · Data kualitas udara · Data limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3),	· Badan Lingkungan Hidup
	7) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan LH	· Dokumen Rancangan Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup (RPPLH) · Dokumen KLHS, NSDA · Dokumen informasi sumber daya mineral · Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi geografis untuk menunjang sektor pertambangan	· Badan Lingkungan Hidup
	8) Program penyiapan pengembangan wilayah pertambangan	· Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi geografis untuk menunjang sektor pertambangan	· Dinas Pertambangan dan Energi
	9) Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya mineral dan batubara, migas dan panas bumi	· Tersedianya data potensi bahan galian	· Dinas Pertambangan dan Energi

Strategi I : Penataan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah yang mengarusutamakan lingkungan hidup

Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator	SKPD Penanggungjawab
	10) Program mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> · Rekomendasi Komda REDD · Rekomendasi Dewan Daerah Perubahan Iklim 	· Badan Lingkungan Hidup

Strategi II : Perbaikan sistem dan akses pendidikan

Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator	SKPD Penanggungjawab
1. Perbaikan sistem bagi tenaga pendidik dan kependidikan untuk merangsang dan meningkatkan motivasi pengabdian dan profesionalisme dalam berkerja.	1) Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah guru bersertifikasi 11.687 orang. · Persentase kualifikasi pendidik SD/SDLB 83,54 persen, SMP/SMPLB 98,45 persen 	· Dinas Pendidikan
2. Peningkatan kapasitas organisasi dan manajerial serta dukungan infrastruktur data dan informasi pendidikan	2) Program peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan	· Rupiah alokasi kesejahteraan lebih dari 7000 guru di daerah	· Dinas Pendidikan
3. Peningkatan dukungan saran dan prasarana pendidikan serta infrastruktur pendidikan secara bertahap	3) Program Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur	· Rata-rata jam latihan per orang per tahun dinas pendidikan	· Dinas Pendidikan
	4) Program peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	· Jumlah jenis pelatihan 10 kegiatan	· Dinas Pendidikan
	5) Program pengembangan data/informasi	· Tersedianya database pendidikan tiap kabupaten, kota dan provinsi sebanyak 75 dokumen	· Dinas Pendidikan
	6) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah penerima Beasiswa 15.000 siswa · Rupiah beasiswa Rp. 7.500.000.000, · Jumlah buku 75.000 	· Dinas Pendidikan
	7) Program Pendidikan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah Penerima beasiswa 35.000 siswa · Rupiah Beasiswa Rp. 27.300.000.000,- 	· Dinas Pendidikan
	8) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah anggota/pengunjung 319.366 orang · Jumlah perpustakaan 1.247 unit · Jumlah buku 569.071 judul 	· Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Strategi II : Perbaikan sistem dan akses pendidikan

Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator	SKPD Penanggungjawab
	9) Program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	<ul style="list-style-type: none">· Terbangun dan terehabnya rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah SD, SMP, SMA, SMK 295 paket.· Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik· Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	· Dinas Pendidikan
	10) Program pembangunan jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none">· Koordinasi program pembangunan jalan dan jembatan, khusus yang menjadi kewenangan kabupaten/kota· Terbangunnya jalan dan jembatan khususnya yang menjadi kewenangan provinsi secara bertahap dan berkesinambungan	· Dinas Pekerjaan Umum
	11) Program pengadaan alat angkutan jalan raya	<ul style="list-style-type: none">· Jumlah trayek menuju kawasan pendidikan	· Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	12) Program pengadaan alat angkutan air	<ul style="list-style-type: none">· Jumlah trayek menuju kawasan pendidikan	· Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Strategi III : Perbaikan sistem dan akses kesehatan

Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator	SKPD Penanggungjawab
1. Perbaikan regulasi dan standarisasi pelayanan kesehatan;	1) Program standarisasi pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none">· Regulasi Standar Pelayanan Kesehatan· Meningkatnya mutu layanan kesehatan· Akreditasi RSUD dr. Doris Sylvanus menjadi RS Type B Pendidikan	· Dinas Kesehatan
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan;			
3. Peningkatan dan dukungan sarana dan prasarana serta infrastruktur bidang kesehatan secara bertahap	2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">· Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terlaksananya upaya pencegahan kesehatan masyarakat	· Dinas Kesehatan
	3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">· Meningkatnya persentase keluarga dengan pola hidup bersih dan sehat· Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS)	· Dinas Kesehatan

Strategi III : Perbaikan sistem dan akses kesehatan

Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator	SKPD Penanggungjawab
	4) Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> · Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan ibu dan reproduksi serta pelayanan kesehatan · Pelayanan <i>Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif</i> (PONEK) 	· Dinas Kesehatan
	5) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	<ul style="list-style-type: none"> · Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan anak balita 	· Dinas Kesehatan
	6) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	<ul style="list-style-type: none"> · Meningkatnya pelayanan kesehatan lansia 	· Dinas Kesehatan
	7) Program Peningkatan Pelayanan tenaga Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> · Rasio dokter per satuan penduduk · Jumlah layanan tenaga kesehatan · Rasio tenaga medis per satuan penduduk · Rasio dokter ber-ijin praktek 	· Dinas Kesehatan
	8) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana tenaga kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah peralatan pendukung kesehatan · Jumlah sarana dan prasarana tenaga kesehatan 	· Dinas Kesehatan
	9) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> · Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk · Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 	· Dinas Kesehatan
	10) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Infrastruktur Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> · Koordinasi program pembangunan jalan dan jembatan, khusus yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 	· Dinas Pekerjaan Umum
	11) Program pembangunan rumah ibadah dan fasilitas sosial	<ul style="list-style-type: none"> · Rasio rumah sakit per satuan penduduk · Rasio rumah ibadah per satuan penduduk 	· Dinas Pekerjaan Umum

Strategi IV : Penataan sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika”

Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator	SKPD Penanggungjawab
<p>1. Perbaikan regulasi dan pengaturan bidang transportasi, komunikasi, dan informatika;</p> <p>2. Pengembangan dan perbaikan infrastruktur dan sarana/prasarana transportasi, komunikasi, dan informatika dengan tetap memperhatikan prioritas pada daya dukungnya bagi pengembangan ekonomi lokal dan kerakyatan</p>	1) Program penyusunan sistem transportasi	<ul style="list-style-type: none"> · Perda/Perkada Sistem transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> · Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	2) Program penyusunan sistem Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> · Perda/Perkada Sistem Komunikasi & Informatika 	<ul style="list-style-type: none"> · Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	3) Program Pembangunan jalan dan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> · Panjang jalan dilalui kendaraan Roda 4 menuju pemukiman · Panjang jalan dilalui kendaraan Roda 4 menuju sentra industri rakyat · Jumlah jembatan yang menghubungkan antar daerah industri · Jalan penghubung dari ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, atau antar ibukota kabupaten, juga ibukota kabupaten dengan jalan nasional serta ke daerah strategis provinsi/ pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> · Dinas Pekerjaan Umum
	4) Program rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah perbaikan-perbaikan jalan · Jumlah perbaikan jembatan 	<ul style="list-style-type: none"> · Dinas Pekerjaan Umum
	5) . Program pembangunan/ pengandaan sarana dan prasarana perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah terminal bus, halte, dermaga pelabuhan, bandara dan jalan kereta api untuk sumber daya alam 	<ul style="list-style-type: none"> · Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	6) 6. Program pembangunan jaringan komunikasi dan informatika	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah daerah/desa yang terlayani jaringan telepon 	<ul style="list-style-type: none"> · Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	7) Program pembangunan/ pengadaan sarana dan prasarana komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah tower komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> · Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Strategi IV : Penataan sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika”

Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator	SKPD Penanggungjawab
	8) Program rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	· Jumlah perbaikan-perbaikan terhadap sarana dan prasarana komunikasi	· Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	9) Program peningkatan pelayanan perhubungan	· Jumlah penumpang yang di layani per-tahun	· Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	10) Program Peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan.	· Jumlah perencanaan/studi, sarana dan prasarana transportasi	· Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	11) Program peningkatan prasarana dan fasilitas transportasi udara	· Jumlah master plan · Jumlah perencanaan fasilitas prasarana dan keselamatan Bandar udara	· Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Strategi V : Pengembangan infrastruktur pengairan

Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator	SKPD Penanggungjawab
1. Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur pengairan makro dan mikro serta pencetakan sawah	1) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.	· Rasio Jaringan Irigasi · Luas irigasi dalam kondisi baik · Luas Sawah tercetak	· Dinas Pekerjaan Umum
	2) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	· Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	· Dinas Pekerjaan Umum
	3) Program pembangunan turap/talud/bronjong	· Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	· Dinas Pekerjaan Umum

Strategi VI : Pengembangan sumber energi untuk masyarakat

Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator	SKPD Penanggungjawab
1. Penyediaan prasarana pembangkit listrik yang memprioritaskan pengembangan ekonomi kerakyatan dan interkoneksi jaringan listrik dengan sistem se Kalimantan	1) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan energi	· Pembangunan PLTU/PLTH/PLPH · Jumlah rumah di daerah yang dialiri listrik · Tersedianya jaringan bawah tanah	· Dinas Pertambangan dan Energi

Strategi VII : Menyelenggarakan sistem dan kemitraan ekonomi kerakyatan

Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator	SKPD Penanggungjawab
1. Penguatan pilar dan fundamntasi sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya dan bahan baku lokal;	1) Program Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif	· Sinergi program dan kegiatan KUMKM	· Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	· Pertumbuhan Industri · Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri · Cakupan bina kelompok pengrajin	· Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan disokong oleh industri kecil dan menengah serta koperasi yang handal;	3) Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM	· Peningkatan KUMKM dalam mengembangkan usaha	· Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3. Peningkatan produksi dan perluasan jaringan pemasaran dalam rangka peningkatan daya saing,		4) Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	· Jumlah Koperasi aktif
4. Pengembangan kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar	5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	· Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) · Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	· Badan Penanaman Modal Daerah
5. Pengembangan industri kecil dan menengah		6) Program penguatan Kelembagaan Koperasi	· Persentase koperasi aktif
	7) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	· Jumlah koperasi pedesaan	· Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	8) Program Pengembangan dan Pengendalian Perikanan Tangkap	· Produksi perikanan tangkap 53.371 ton	· Dinas Perikanan dan Kelautan
	9) Program Kerawanan dan Kewaspadaan Pangan	· Dokumen, Pemantauan dan Peta Rawan Pangan	· Badan Ketahanan Pangan
		· Jumlah desa Mandiri Pangan	
	10) Pengembangan dan Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat	· Jumlah Lumbung Pangan	· Badan Ketahanan Pangan
	11) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	· Nilai Tukar Petani · Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	· Dinas Pertanian dan Peternakan
	12) Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM	· Jumlah diklat bagi KUKM	· Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Strategi VII : Menyelenggarakan sistem dan kemitraan ekonomi kerakyatan

Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator	SKPD Penanggungjawab
	13) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> · Produk makanan dan minuman aman di konsumsi · Produk halal yang berlabel 	<ul style="list-style-type: none"> · Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	14) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> · Rasio produksi pangan dengan kebutuhan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> · Badan Ketahanan Pangan
	15) Program Peningkatan Kesempatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> · Rasio daya serap tenaga kerja · Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur · Partisipasi angkatan kerja perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> · Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
	16) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> · Partisipasi angkatan kerja perempuan · Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah desa 	<ul style="list-style-type: none"> · Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	17) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah terapan teknologi pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> · Dinas Pertanian dan peternakan
	18) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah terapan teknologi perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> · Dinas Perkebunan
	19) Program Peningkatan Produksi Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah Produksi pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> · Dinas Pertanian dan peternakan
	20) Program Peningkatan Produksi Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah Produksi perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> · Dinas Perkebunan
	21) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah pelatihan pada penyuluh pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> · Dinas Pertanian dan peternakan
	22) Program Pemberdayaan Penyuluh Perkebunan Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah pelatihan pada penyuluh perkebunan lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> · Dinas Perkebunan
	23) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah ternak pertahun 	<ul style="list-style-type: none"> · Dinas Pertanian dan peternakan
	24) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah pemasaran ternak pertahun 	<ul style="list-style-type: none"> · Dinas Pertanian dan peternakan
	25) Program Pengembangan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> · Terbentuknya kawasan minapolitan di 13 lokasi 	<ul style="list-style-type: none"> · Dinas Kelautan dan Perikanan
	26) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah pemasaran hasil pertanian pertahun 	<ul style="list-style-type: none"> · Dinas Pertanian dan peternakan
	27) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> · Jumlah pemasaran hasil perkebunan pertahun 	<ul style="list-style-type: none"> · Dinas Perkebunan

Strategi VII : Menyelenggarakan sistem dan kemitraan ekonomi kerakyatan

Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator	SKPD Penanggungjawab
	28) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	· Jumlah terapan teknologi peternakan	· Dinas Pertanian dan peternakan
	29) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	· Jenis dan jumlah hasil pengelolaan sumber daya hutan · Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	· Dinas Kehutanan
	30) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	· Dokumen perencanaan dan kebijakan pengembangan hutan	· Dinas Kehutanan
	31) Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir	· Tertatanya dan dimanfaatkannya kawasan pesisir	· Dinas Kelautan dan perikanan
	32) Program Pengawasan dan Pengendalian SDKP	· Menurunnya tindakan Illegal fishing 40%	· Dinas Kelautan dan perikanan
	33) Program penumbuhan Industri agro	· Jumlah industri agro pertahun	· Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	34) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	· Produksi perikanan budidaya 414.009 ton	· Dinas Kelautan dan perikanan
	35) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	· Volume produk olahan hasil perikanan 56.408 ton	· Dinas Kelautan dan perikanan
	36) Program rehabilitasi Hutan dan lahan	· Berkurangnya lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai	· Dinas Kehutanan
	37) 37. Program Pengembangan Agribisnis dan Keamanan Pangan	· Berkembangnya agribisnis produk pangan lokal	· Badan Ketahanan Pangan
	38) Program ketahanan pangan dan gizi keluarga	· Naiknya cadangan pangan dan status gizi keluarga	· Badan Ketahanan Pangan
	39) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	· Terjalin kontak dagang produk lokal · romosi produk unggulan daerah	· Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Strategi VIII : Peningkatan daya saing masyarakat

Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator	SKPD Penanggungjawab
1. Peningkatan masyarakat yang menunjang perekonomian melalui efektifitas fungsi BLK, dan sejenisnya.	1) Program pendidikan non formal	· Jumlah pelatihan 80 paket	· Dinas Pendidikan
	2) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,	· Terselenggaranya bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan	· Dinas Sosial

Strategi VIII : Peningkatan daya saing masyarakat

Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator	SKPD Penanggungjawab
2. Rekrutmen, diklat bagi tenaga penyuluh, instruktur serta fasilitator.	narkoba dan penyakit sosial lainnya	berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 65 orang (Loka Bina Karya, Bimbingan Napza)	
3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan ketrampilan dan sarana produksi.	3) Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	· Jumlah pelatihan	· Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. Peningkatan sarana dan prasarana, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan dan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan.	4) Program Peningkatan Kesempatan Kerja	· Jumlah lapangan kerja	· Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	5) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	· Dokumen/regulasi tentang perlindungan pekerja	· Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	6) Program peningkatan iklim usaha Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM	· Dokumen/regulasi	· Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	7) Program Peningkatan Akses Terhadap Sumberdaya Produktif	· Jumlah KUMKM terakses untuk pembiayaan	· Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	8) Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	· Jumlah pelatihan	· Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	9) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	· Dokumen/regulasi tentang perlindungan pekerja	· Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	10) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	· Jumlah kerjasama dibidang kebudayaan	· Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	11) Program peningkatan peran serta kepemudaan	· Jumlah kegiatan kepemudaan 230 kegiatan	· Dinas pemuda dan olahraga
	12) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	· Jumlah wirausahawan muda 300 orang	· Dinas pemuda dan olahraga
	13) Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	· Jumlah club olahraga yang dibentuk 34 klub	· Dinas pemuda dan olahraga
	14) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	· Jumlah fasilitasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	· Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	15) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	· Jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa	· Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	16) Program pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM	· Jumlah KUMKM mengikuti panduan/promosi dan kemitraan	· Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Strategi IX : Peningkatan kapasitas aparatur dan standar operasional birokrasi

Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator	SKPD Penanggungjawab
1. Peningkatan kapasitas aparatur dilakukan secara terencana dan sistematis, dihubungkan dengan perencanaan karier untuk menghasilkan layanan dan kinerja yang lebih baik	1) Program peningkatan kapasitas aparatur	· Percepatan layanan	· Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Strategi X : Penguatan sendi budaya dan kearifan lokal yang mendukung aktivitas pembangunan

Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator	SKPD Penanggungjawab
1. Pengembangan dan penguatan peran budaya lokal dalam aktivitas sosial dan ekonomi kemasyarakatan;	1) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	· Jumlah kemitraan · Seminar, sarasehan, diskusi dan sosialisasi	· Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	2) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	· Angka kriminalitas	· Satuan Polisi Pamong Praja
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kamtibmas dan pemberantasan penyakit masyarakat.	3) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	· Angka kriminalitas · Kerjasama dengan korem, polda, siswa dan mahasiswa	· Satuan Polisi Pamong Praja
	4) Program pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	· Jumlah linmas per-10000 penduduk · Deteksi dini setiap tahun	· Satuan Polisi Pamong Praja
3. Pembuatan regulasi dalam rangka penggunaan simbol-simbol adat dalam bidang seni dan budaya dalam acara-acara resmi pemerintahan	5) Program pengembangan wawasan kebangsaan	· Jumlah Siswa, mahasiswa, ormas/LSM	· Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	6) Program pendidikan politik masyarakat	· Kerjasama dengan ormas/LSM, partai politik dan lembaga legislatif	· Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
4. Pelaksanaan sosialisasi tentang budaya dan kesenian lokal dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan budaya lokal	7) Program Pengembangan kekayaan dan keragaman Budaya	· Jumlah pelatihan	· Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	8) Program Pengelolaan Kekayaan dan keragaman Budaya	· Jumlah pelatihan	· Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Provinsi Kalimantan Tengah berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

A. Program Prioritas Untuk Pencapaian Visi Misi

Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagaimana diuraikan diatas program-program prioritas terdiri dari program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah dan program untuk pemenuhan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada bagian ini disajikan program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011-2015 dimana terdiri dari 7 (tujuh) misi sebagaimana diuraikan pada Bab V. Untuk jelasnya program-program prioritas dimaksud disajikan secara lengkap pada tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk mencapai Visi dan Misi.

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk mencapai Visi dan Misi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
Misi 1																		
SINERGI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN KALIMANTAN TENGAH MELALUI PEMANTAPAN RENCANA PENATAAN RUANG PROVINSI (RTRWP) SECARA BERKELANJUTAN DENGAN MEMPERHATIKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN HIDUP																		
xx	03	15	Program Perencanaan Tata Ruang	• dokumen RTRWP	2 Dokumen (8%)	45%	400.000.000	18%	440.000.000	13%	484.000.000	10%	532.400.000	6%	511.895.000	100%	2.368.295.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx	03	16	Program Pemanfaatan Ruang	• Dokumen rencana pengembangan kawasan strategis provinsi	5 Dokumen (5%)	38%	350.000.000	26%	385.000.000	14%	423.500.000	11%	2.730.300.000	6%	2.905.790.000	100%	6.794.590.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx	03	17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	• Dokumen pengendalian RTRWP	15%	31%	1.250.000.000	22%	850.000.000	14%	1.275.000.000	10%	1.402.500.000	8%	1.542.750.000	100%	6.320.250.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx	06	35	Program pengembangan cluster ekonomi	• PDRB • Jumlah Cluster	50%	-	-	65%	1.783.000.000	75%	1.961.300.000	80%	2.157.430.000	90%	2.373.173.000	100%	8.274.903.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	36	Program penyiapan Kota Palangka Raya sebagai pusat pemerintahan NKRI	• Dokumen RTRW kota Palangka Raya • Gerakan masyarakat • Dokumen RDTR kota Palangka Raya	25%	-	-	35%	890.000.000	50%	979.000.000	70%	1.076.900.000	75%	1.184.590.000	80%	4.130.490.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	08	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	• Data kualitas air • Data kualitas udara • Data limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3)	Kualitas air ringan-buruk, kualitas udara baik, data B3 belum ada, 1 keg tidak terlaksana	80%	670.943.000	85%	738.037.300	85%	811.841.030	80%	893.025.133	100%	982.327.646	100%	4.096.174.109	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
xx	08	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	• Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) • Dokumen KLHS, NSDA	Belum ada dokumen KLHS dan RPPLH, 9 kegiatan 2 tidak terlaksana	80%	892.870.000	85%	982.157.000	85%	1.080.372.700	80%	1.188.409.970	85%	1.307.250.967	100%	5.451.060.637	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
	08	26	Program Mitigasi dan Adaptasi Bencana serta Perubahan Iklim	• Operasionalisasi Komda REDD • Operasionalisasi Dewan Daerah Perubahan Iklim	-	80%	-	85%	300.000.000	85%	300.000.000	80%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	1.200.000.000	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
	20		Program penyiapan Kota Palangka Raya sebagai pusat pemerintahan NKRI	• Dokumen RTRW kota Palangka Raya • Gerakan masyarakat • Dokumen RDTR kota Palangka Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
xx	03	19	Program peningkatan kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara	• Dokumen Informasi Sumberdaya Mineral • Terselenggaranya pengelolaan sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menunjang sektor pertambangan	70%	80%	90.000.000	85%	99.000.000	85%	108.900.000	85%	119.790.000	85%	131.769.000	100%	549.459.000	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
xx	03	21	Bimbingan teknis dan penyiapan wilayah pertambangan	• Tersedianya Sistem Informasi Geografis (SIG)	70%	80%	-	85%	-	85%	-	85%	-	85%	-	100%	-	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Paqu Misi I						3.653.813.000		6.467.194.300		7.423.913.730		10.400.755.103		11.239.545.613		39.185.221.746		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
Misi 2																		
MENCIPTAKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DAN TERAKSES SERTA MERATA																		
xx	01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	• Rata-rata jam latihan per orang per tahun dinas pendidikan	10 orang, 2 kegiatan	10 org, 2 kegiatan	387.200.000	10 orang, 2 kegiatan	406.560.000	10 orang, 2 kegiatan	426.888.000	10 orang, 2 kegiatan	533.610.000	10 orang, 2 kegiatan	560.290.500	50 orang, 10 kegiatan	2.314.548.500	DINAS PENDIDIKAN
xx	01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/MI mencapai 99,04% dan APM SMP/MTs mencapai 98,02% pada tahun 2015 dan meningkatnya kualitas pembelajaran dengan kegiatan • Jumlah penerima Beasiswa 15.000 siswa • Rupiah beasiswa Rp. 7.500.000.000,- • Jumlah Buku 75.000	APM SD/MI 98,72% dan APM SMP/MTs 84,46%	3.000 siswa, 15.000 buku	78.160.074.000	3.000 siswa, 15.000 buku	85.976.081.400	3.000 siswa, 15.000 buku	94.573.689.540	3.000 siswa, 15.000 buku	104.031.058.494	3.000 siswa, 15.000 buku	114.434.164.343	15.000 siswa, 75.000 buku	477.175.067.777	DINAS PENDIDIKAN
xx	01	17	Program Pendidikan Menengah	Meningkatnya APK, dan mutu pendidikan menengah dengan pembangunan USB 15 pkt, rumah Guru 130 pkt, ruang kelas 200 pkt, lab 115 pkt perpustakaan 90 pkt, alat praktik 150 pkt, RSBI 5 pkt, kelas olimpiade 200 siswa Rp. 268.760.252.768,-	APK 65,09%, APM 62,24%, SMK Terakreditasi B 16%, E learning 5%	7.000 siswa	46.958.290.000	7.000 siswa	51.654.119.000	7.000 siswa	56.819.530.900	7.000 siswa	62.501.483.990	7.000 siswa	68.751.632.389	35.000 siswa	286.685.056.279	DINAS PENDIDIKAN
xx	01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	• Persentase kualifikasi pendidik SD/SDLB 83,54 %, SMP/SMPLB 98,45 % • Jumlah guru bersertifikasi 11.687 orang.		Kualifikasi SD/SDLB 45,65%, kualifikasi SMP 59,16%	19.915.006.000	Kualifikasi SD/SDLB 55,94%, kualifikasi SMP 68,79%	21.906.506.600	Kualifikasi SD/SDLB 65,79%, kualifikasi SMP 79,53%	24.097.157.260	Kualifikasi SD/SDLB 75,16%, kualifikasi SMP 89,46%	26.506.872.986	Kualifikasi SD/SDLB 83,54%, kualifikasi SMP 98,45%	39.760.309.479	kualifikasi pendidik SD/SDLB 83,54 %, SMP/SMPLB 98,45 % dan guru bersertifikasi 11.687 orang.	132.185.852.325	DINAS PENDIDIKAN
xx	01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	• Jumlah jenis pelatihan 10 kegiatan • Terfasilitasi pendirian PSPD dan Prodi Teknik Pertambangan UNPAR	70%	2 Keg.	5.487.129.000	2 Keg.	6.035.841.900	2 Keg.	6.639.426.900	2 Keg.	7.303.368.699	2 Keg.	10.955.053.049	10 keg.	36.420.818.738	DINAS PENDIDIKAN
xx	01	26	Program peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan	• Rupiah alokasi kesejahteraan lebih dari 7000 guru di daerah	60%		5.469.000.000	1.795 jumlah guru.	5.469.000.000	1.795 jumlah guru.	6.015.900.000	1.795 jumlah guru.	6.617.490.000	1.795 jumlah guru.	7.279.239.000	7.180 jumlah guru.	30.850.629.000	DINAS PENDIDIKAN
xx	01	28	Program pengembangan data/informasi	• Tersedianya database pendidikan tiap kabupaten, kota dan provinsi sebanyak 75 dokumen	50%			1 paket	3.750.000.000	1 paket	4.125.000.000	1 paket	4.537.500.000	1 paket	4.991.250.000	4 paket	17.403.750.000	DINAS PENDIDIKAN
xx	01	29	Program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	• Terbangun dan terehabnya rumah dinas Kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah SD, SMP, SMA, SMK 295 paket. • Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik • Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	SD/MI rusak berat 455 stadik atau 1.620 ruang kelas (13,14%), SMP 200 satdik atau 988 ruang (12,98%), SMA/MA/SMK 48 satdik atau 393 ruang (15,94%), rumah guru/kepsep SD 272 bh, SMP 66 bh, dan SMA 24 bh.	2 paket		2 paket	1.700.000.000	2 paket	1.870.000.000	3 paket	2.805.000.000	3 paket	3.085.500.000	10 paket	9.460.500.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
xx	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tersedianya fasilitas sarana penunjang transportasi Terbangunnya jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi secara bertahap dan berkelanjutan	- Km	10 Km	11.231.188.519	12 Km	8.400.000	15 Km	10.500.000	17 Km	11.900.000	20 Km	14.000.000	74 Km	11.275.988.519	DINAS PEKERJAAN UMUM
			Program Pengadaan Alat Angkutan Jalan Raya	Jumlah trayek menuju kawasan pendidikan	-	-	-	5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		20 Unit	-	DINAS PERHUBUNGAN
			Program Pengadaan Alat Angkutan Air	Jumlah trayek menuju kawasan pendidikan	-	-	-	5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		20 Unit	-	DINAS PERHUBUNGAN
	26	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah anggota/pengunjung 319.366 orang Jumlah perpustakaan 1.247 unit Jumlah buku 569.071 judul	124.800 pengunjung, 514 perpustakaan, 124.000 judul buku	124.900 pengunjung, 200 perpustakaan, 2.500 judul	1.276.500.000	125.800 pengunjung, 198 perpustakaan, 5000 judul	1.404.150.000	130.500 pengunjung, 198 perpustakaan, 7.500 judul	1.544.565.000	135.000 pengunjung, 198 perpustakaan, 10.000 judul	1.699.021.500	140.000 pengunjung, 198 perpustakaan, 10.500 judul	1.868.923.650	pengunjung 319.366 orang, perpustakaan 1.247 unit, buku 569.071 judul	7.793.160.150	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
Pagu Misi II						168.884.387.519		178.310.658.900		196.122.656.790		216.547.305.669		251.700.362.410		1.011.565.371.288		
Misi 3																		
MENJAMIN DAN MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG MERATA DAN MUDAH DIJANGKAU																		
xx	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terlaksananya upaya pencegahan kesehatan masyarakat	50%	80%	965.000.000	85%	1.061.500.000	90%	1.167.650.000	95%	1.284.415.000	100%	1.412.856.500	100%	5.891.421.500	DINAS KESEHATAN
xx	02	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya presentase keluarga dengan pola hidup bersih dan sehat.	0%	80%	1.054.800.000	85%	1.160.280.000	90%	1.276.308.000	95%	1.403.938.800	100%	1.544.332.680	100%	6.439.659.480	DINAS KESEHATAN
xx	02	43	Program Promosi, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS)	Tersedianya kegiatan promosi dan penyuluhan di lingkungan RS 10 paket	60%			75%	1.500.000.000	80%	1.650.000.000	85%	1.815.000.000	90%	1.996.500.000	90%	6.961.500.000	RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA
xx	02	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Regulasi Standar Pelayanan Kesehatan, Meningkatnya mutu layanan kesehatan, Akreditasi RSUD Dr. Doris Sylvanus menjadi RS Type B Pendidikan	70%	80%	100.000.000	85%	150.000.000	90%	165.000.000	95%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	796.150.000	DINAS KESEHATAN
xx	02	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan di RS, Terakreditasinya rumah sakit 12 pelayanan	65%	-	-	75%	100.000.000	80%	100.000.000	85%	100.000.000	90%	150.000.000	90%	450.000.000	RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA
xx	02	48	Program Peningkatan Pelayanan tenaga Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Rasio dokter ber-ijin praktek Jumlah layanan Tenaga kesehatan	Rasio Dokter : 40/100 rb penduduk; Dokter Spesialis (6/100 rb pendd; Dokter Gigi : 10/100 rb pendd; Perawat : 117/100 rb pendd; Bidan : 100/100 rb pendd; Farmasi : 309 org; Kesehatan Masyarakat : 532 org	-	-	75%	783.000.000	80%	1.174.500.000	85%	1.291.950.000	90%	1.421.145.000	95%	4.670.595.000	DINAS KESEHATAN
xx	02	49	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana tenaga kesehatan.	Jumlah peralatan pendukung kesehatan Jumlah sarana dan prasarana tenaga kesehatan	Alikes Pustu (75%)	-	-	85%	1.290.000.000	85%	1.935.000.000	95%	2.128.500.000	100%	2.341.350.000	100%	7.694.850.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
xx 02 50	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana kesehatan	* Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk * Rasio puskesmas, poliklinik,ustu per satuan penduduk	Rasio RS : 1 : 128.451; Rasio Puskesmas : 1 : 12.550; Rasio Pustu : 1 : 2.226	-	-	85%	2.350.000.000	85%	3.525.000.000	95%	3.877.500.000	100%	4.265.250.000	100%	14.017.750.000	DINAS KESEHATAN
xx 02 55	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	* Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita	0%	-	45%	980.000.000	55%	1.078.000.000	65%	1.185.800.000	75%	1.304.380.000	85%	4.548.180.000	DINAS KESEHATAN	
xx 02 56	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	* Meningkatnya pelayanan kesehatan lansia	0%	-	40%	570.000.000	60%	627.000.000	70%	689.700.000	80%	758.670.000	80%	2.645.370.000	DINAS KESEHATAN	
xx 02 58	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan ibu dan reproduksi serta pelayanan kesehatan, Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)	0%	-	85%	635.000.000	90%	698.500.000	95%	768.350.000	100%	845.185.000	100%	2.947.035.000	DINAS KESEHATAN, RSUD Dr. Doris Sylvanus	
xx 02 59	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Infrastruktur Kesehatan	* Mengkoordinasikan jalan dan jembatan, khusus yang menjadi kewenangan kabupaten kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx 02 60	Program pembangunan rumah ibadah dan fasilitas sosial	* Rasio rumah sakit per satuan penduduk * Rasio rumah ibadah per satuan penduduk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM
Pagu Misi 3				2.119.800.000	10.579.780.000	13.396.958.000	14.726.653.800	16.239.319.180	57.062.510.980							
Misi 4																
PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR YANG MENJANGKAU KANTONG-KANTONG PEMUKIMAN PENDUDUK DAN MEMFASILITASI PEMBANGUNAN EKONOMI RAKYAT																
xx 03 16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	* Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	35.805 M	1343 M	4.000.000.000	1436 M	4.263.000.000	1400 M	4.476.150.000	1500 M	5.035.680.000	1500 M	5.287.500.000	7.179 M	23.062.330.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx 03 24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	* Rasio Jaringan Irigasi * Luas irigasi dalam kondisi baik * Luas Sawah tercetak	23 keg + 43.213 Ha + 3 bh	16 keg + 56.688 Ha + 6 bh	57.231.229.675	17 keg + 77.700 Ha + 8 bh	64.125.000.000	20 keg + 97.700 Ha + 10 bh	76.975.000.000	21 keg + 119.200 Ha + 12 bh	91.975.000.000	26 keg + 120.588 Ha + 12 bh	106.525.000.000	100 keg + 524.988 Ha + 48 bh	396.831.229.675	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx 03 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	* Panjang jalan dilalui Roda 4 menuju pemukiman * Panjang jalan dilalui Roda 4 menuju sentra industri rakyat * Jumlah jembatan yang menghubungkan antar daerah industri * Jalan Penghubung dari ibukota Provinsi dengan ibukota kabupaten, atau antar ibukota kabupaten, juga ibukota kabupaten dengan jalan nasional serta ke daerah strategis Provinsi/Pelabuhan	- Km	10 Km	11.231.188.519	12 Km	8.400.000	15 Km	10.500.000	17 Km	11.900.000	20 Km	14.000.000	74 Km	11.275.988.519	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx 03	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan rutin Jalan dan Jembatan	* Jumlah perbaikan-perbaikan jalan * Jumlah perbaikan jembatan	1.642.95 Km	1568.95 Km	112.061.620	1588.40 Km	112.061.620	1593.70 Km	112.435.535	1599.15 Km	112.820.033	1610.20 Km	113.599.610	7.960,40 Km	562.978.418	DINAS PEKERJAAN UMUM
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	* Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	Koordinasi	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx 07 28	Program penyusunan sistem transportasi	* Perda/Perkada Sistem transportasi	2 Paket	-	-	4 paket	1.695.000.000	4 paket	1.864.500.000	4 paket	2.050.950.000	4 paket	2.256.045.000	16 Paket Kegiatan	7.866.495.000	DINAS PERHUBUNGAN
xx 07 29	Program pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana perhubungan	* Jumlah terminal bus, halte, dermaga pelabuhan, dan bandara	20 Paket	-	-	5 paket	1.380.000.000	5 paket	2.070.000.000	5 paket	2.277.000.000	5 paket	2.504.700.000	20 paket	8.231.700.000	DINAS PERHUBUNGAN
xx 07 30	Program peningkatan pelayanan perhubungan	* Jumlah penumpang yang di layani per-tahun	0	-	-	5 paket	855.000.000	5 paket	1.282.500.000	5 paket	1.410.750.000	5 paket	1.551.825.000	20 paket	5.100.075.000	DINAS PERHUBUNGAN
xx 07 31	Program Peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan.	* Jumlah perencanaan/study, sarana dan prasarana transportasi	18 Paket	-	-	5 paket	708.000.000	10 Paket	1.062.000.000	10 Paket	1.168.200.000	10 Paket	1.285.020.000	35 paket	4.223.220.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
xx	07	21	Program pembangunan jaringan komunikasi dan informatika	Jumlah daerah/desa yang terlayani jaringan telepon	Keg.Baru	-	-	1 Paket	1.332.000.000	1 Paket	1.998.000.000	1 Paket	2.197.800.000	1 Paket	2.417.580.000	5 Paket	7.945.380.000	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	22	Program pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana komunikasi dan Informatika	Jumlah tower komunikasi	Keg.Baru	-	-	-	1.082.000.000	1 Paket	1.623.000.000	1 Paket	1.785.300.000	1 Paket	1.963.830.000	5 Paket	6.454.130.000	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	23	Program rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	Jumlah perbaikan-perbaikan terhadap sarana dan prasarana komunikasi	Keg.Baru	-	-	1 Paket	988.500.000	1 Paket	1.482.750.000	1 Paket	1.631.025.000	1 Paket	1.794.127.500	5 Paket	5.896.402.500	DINAS PERHUBUNGAN
	07	29	Program pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah terminal bus, halte, dermaga pelabuhan, dan bandara	5 Paket	1 Paket	1.380.000.000	1 Paket	700.000.000	1 Paket	850.000.000	2 Paket	1.300.000.000	4 Paket	3.400.000.000	9 Paket	7.630.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
xx	03	17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Pembangunan PLTU/PLTH/PLPH Jumlah rumah di daerah yang dialiri listrik Tersedianya jaringan bawah tanah	70%	80%	320.000.000	85%	352.000.000	85%	387.200.000	85%	425.920.000	85%	468.512.000	100%	1.953.632.000	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Paou Misi 4							74.274.479.814		77.600.961.620		94.194.035.535		111.382.345.033		129.581.739.110		487.033.561.112	
Misi 5																		
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG SALING BERSINERGI DAN BERKELANJUTAN.																		
xx	14	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rasio daya serap tenaga kerja Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan		100%	952.500.000	100%	1.047.750.000	100%	1.571.625.000	100%	2.357.437.500	100%	2.593.181.250		8.522.493.750	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
xx	15	15	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif, 2.421 unit	99,16%	80%	955.880.000	80%	1.003.674.000	85%	1.254.592.500	85%	1.317.322.125	85%	1.383.188.231	100%	5.914.656.856	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
xx	15	16	Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM	Peningkatan KUMKM dalam mengembangkan usaha	97,64%	80%	395.000.000	80%	592.500.000	85%	651.750.000	85%	716.925.000	85%	788.617.500	100%	3.144.792.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
xx	16	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	80%	80%	1.269.000.000	80%	1.332.450.000	85%	1.665.562.500	85%	2.081.953.125	85%	2.186.050.781	100%	8.535.016.406	BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
xx	21	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Meningkatnya ketahanan pangan dan perkebunan melalui Penyiapan dan penetapan sasaran produksi pangan daerah sebanyak 5 paket, Studi Banding 75 org Petani dan Petugas Pengelola Lumbung Pangan dan Cadangan Pangan, Pemberdayaan Lumbung Pangan Desa pada 14 Kab/Kota, Pengendalian Stabilitas Harga Pangan melalui DPM-LUEP pada 11 kelompok, Pemantauan dan Analisis Tren Harga Pangan Pokok 5 paket, Survey dan Analisis Konsumsi Bahan Pangan Pokok Masyarakat 5 paket, Gerakan Tanam, Tebar dan Pelihara Untuk Ketahanan Pangan dan Gizi Keluarga 15 kelompok, Promosi Percepatan Diversifikasi Pangan Masyarakat / P2KP 5 paket, Analisis Pola Pangan Harapan 5 paket, Survey Pola Distribusi Hasil Panen di wilayah Sentra Produksi Padi 4 paket, Analisis Ketersediaan dan Harga pangan 4 paket, Analisis Neraca Bahan Makanan 4 paket.	96,01	80%	425.000.000	80%	446.250.000	85%	468.562.500	90%	491.990.625	90%	516.590.156	100%	2.348.393.281	BADAN KETAHANAN PANGAN
xx	21	16	Program Agribisnis Pertanian dan Keamanan Pangan	Berkembangnya agribisnis produk pangan lokal	49,29%	80%	160.000.000	80%	176.000.000	85%	193.600.000	90%	212.960.000	90%	234.256.000	100%	976.816.000	BADAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
xx 21 17	Program Kerawanan dan Kewaspadaan Pangan	• Dokumen pemantauan dan peta rawan pangan • Jumlah Desa Mandiri pangan	92,96%	80%	190.000.000	80%	209.000.000	85%	229.900.000	90%	252.890.000	90%	278.179.000	100%	1.159.969.000	BADAN KETAHANAN PANGAN
xx 21 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penilaian terbaik tenaga fungsional petani, pelatihan petani dan petugas, penghargaan ketahanan pangan.	89,48%	80%	275.000.000	80%	288.750.000	85%	303.187.500	90%	378.984.375	90%	397.933.594	100%	1.643.855.469	BADAN KETAHANAN PANGAN
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah Lumbung Pangan, meningkatkan cadangan pangan	0%	-	-	80%	570.000.000	85%	678.500.000	90%	767.625.000	90%	892.308.000	100%	2.908.433.000	BADAN KETAHANAN PANGAN
	Program Ketahanan Pangan dan Gizi Keluarga	• Meningkatkan pemahaman petani, ibu rumah tangga, • Sosialisasi gizi keluarga	0%	-	-	80%	215.000.000	85%	247.250.000	90%	296.700.000	90%	356.040.000	100%	1.114.990.000	BADAN KETAHANAN PANGAN
xx 22 21	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	• Partisipasi angkatan kerja perempuan • Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah desa	Kegiatan baru	-	-	20%	470.000.000	30%	705.000.000	50%	1.057.500.000	60%	1.163.250.000	60%	3.395.750.000	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
xx 01 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	• Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB • Nilai tukar petani	80%	80%	2.807.000.000	85%	2.947.350.000	85%	3.094.717.500	85%	3.868.396.875	90%	4.061.816.719	100%	16.779.281.094	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
xx 01 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	• Jumlah pemasaran hasil pertanian pertahun	80%	80%	443.732.300	85%	488.105.530	85%	536.916.083	85%	805.374.125	90%	885.911.537	100%	3.160.039.574	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
xx 01 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	• Jumlah terapan teknologi pertanian	80%	80%	1.348.289.100	85%	1.483.118.010	85%	1.631.429.811	85%	2.447.144.717	90%	2.691.859.188	100%	9.601.840.826	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
xx 01 19	Program peningkatan hasil produksi pertanian/perkebunan	• Jumlah Produksi perkebunan	9 kegiatan; 2,446 Ha	20%	8.278.745.350	20%	9.106.619.885	20%	10.017.281.874	20%	15.025.922.810	20%	16.528.515.091	100%	58.957.085.010	DINAS PERKEBUNAN
xx 01 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	• Jumlah ternak pertahun	80%	80%	4.376.402.150	85%	4.814.042.365	85%	5.295.446.602	85%	7.943.169.902	90%	8.737.486.892	100%	31.166.547.911	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
xx 01 23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	• Jumlah pemasaran ternak pertahun	80%	80%	477.041.950	85%	524.746.145	85%	577.220.760	85%	865.831.139	90%	952.414.253	100%	3.397.254.247	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
xx 01 24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	• Jumlah terapan teknologi peternakan	80%	80%	735.549.000	85%	809.103.900	85%	890.014.290	85%	1.335.021.435	90%	1.468.523.579	100%	5.238.212.204	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
xx 01 25	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	• Jumlah pelatihan pada penyuluh pertanian	80%			80%	650.000.000	85%	715.000.000	85%	1.072.500.000	90%	1.179.750.000	100%	3.617.250.000	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
xx 01 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	• Jumlah pemasaran hasil perkebunan pertahun	6 kegiatan; 30 orang	25%	285.000.000	25%	313.500.000	15%	344.850.000	10%	517.275.000	5%	569.002.500	100%	2.029.627.500	DINAS PERKEBUNAN
xx 01 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	• Jumlah terapan teknologi perkebunan	3 kegiatan	20%	1.155.575.000	20%	1.271.132.500	20%	1.398.245.750	20%	2.097.368.625	20%	2.307.105.488	100%	8.229.427.363	DINAS PERKEBUNAN
xx 01 20	Program Pemberdayaan Penyuluh Perkebunan Lapangan	• Jumlah pelatihan pada penyuluh perkebunan lapangan				80%	766.000.000	80%	842.600.000	85%	1.263.900.000	85%	1.390.290.000	100%	4.262.790.000	DINAS PERKEBUNAN
xx 02 15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	• Jenis dan jumlah hasil pengolahan sumber daya hutan • Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	77,71%	80%	1.480.000.000	80%	1.554.000.000	85%	1.631.700.000	85%	2.039.625.000	85%	2.141.606.250	100%	8.846.931.250	DINAS KEHUTANAN
xx 02 16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	• Berkurangnya lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai	63,95%	80%	320.000.000	80%	352.000.000	85%	387.200.000	85%	425.920.000	85%	468.512.000	100%	1.953.632.000	DINAS KEHUTANAN
xx 02 20	Program perencanaan dan pengembangan hutan	• Dokumen perencanaan dan kebijakan pengembangan hutan	68,69%		770.000.000	80%	847.000.000	85%	931.700.000	85%	1.397.550.000	85%	1.537.305.000	100%	5.483.555.000	DINAS KEHUTANAN
xx 05 20	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	• Produksi perikanan budidaya 414.009 ton	23.659 ton	80%	2.837.700.000	85%	3.121.470.000	85%	3.433.617.000	85%	5.150.425.500	85%	5.665.468.050	100%	20.208.680.550	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
xx 05 21	Program Pengembangan dan Pengendalian Perikanan Tangkap	• Produksi perikanan tangkap 533.71.94 ton	101.199,20 ton	80%	6.427.843.000	85%	7.070.627.300	85%	10.605.940.950	85%	15.908.911.425	85%	17.499.802.568	100%	57.513.125.243	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
xx 05 25	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	• Volume produk olahan hasil perikanan 56.408 ton	9.523 ton	80%	460.000.000	85%	506.000.000	85%	556.600.000	85%	612.260.000	85%	673.486.000	100%	2.808.346.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
xx 05 26	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir	• Tertatannya dan dimanfaatkannya kawasan pesisir	0%	80%	1.003.207.000	85%	1.103.527.700	85%	1.213.880.470	85%	1.335.268.517	85%	1.468.795.369	100%	6.124.679.056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
xx 05 27	Program Pengawasan dan pengendalian SDKP	Menurunny tindakan illegal fishing 40%	5%	80%	235.000.000	85%	258.500.000	85%	284.350.000	85%	312.785.000	85%	344.063.500	100%	1.434.698.500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
xx	05	33	Program Pengembangan Wirausaha	• Terbentuknya kawasan minapolitan di 13 lokasi	5 lokasi	-	85%	726.000.000	85%	798.600.000	85%	1.197.900.000	85%	1.317.690.000	100%	4.040.190.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
xx	06	15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	• Produk makanan dan minuman aman di konsumsi • Produk halal yang bertabel	92,65%	85%	1.286.924.000	85%	1.351.270.200	85%	1.418.833.710	85%	1.489.775.396	85%	1.564.264.165	100%	7.111.067.471	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
xx	06	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	• Terjalin kontak dagang produk lokal • Promosi produk unggulan daerah	-	85%	555.000.000	85%	610.500.000	85%	671.550.000	85%	738.705.000	85%	812.575.500	100%	3.388.330.500	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
xx	06	19	Program penumbuhan Industri agro	• Jumlah industri agro pertahun	-	-	-	85%	1.250.000.000	85%	1.375.000.000	85%	2.062.500.000	85%	2.268.750.000	100%	6.956.250.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
xx	06	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	• Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri • Pertumbuhan Industri • Cakupan bina kelompok pengrajin	99,39%	85%	1.340.000.000	85%	2.010.000.000	85%	2.211.000.000	85%	3.316.500.000	85%	3.648.150.000	100%	12.525.650.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pagu Misi 5					41.245.388.850		50.285.987.535		58.833.224.799		83.162.318.215		90.972.738.161		324.499.657.560			
Misi 6																		
PELEMBAGAAN SISTEM PENGUATAN KAPASITAS SDM MASYARAKAT DAN PEMERINTAH																		
xx	01	18	Program Pendidikan Non Formal	• Jumlah pelatihan 80 paket	75%	15 paket	960.000.000	15 paket	1.056.000.000	15 paket	1.584.000.000	15 paket	1.742.400.000	20 paket	1.916.640.000	80 paket	7.259.040.000	DINAS PENDIDIKAN
xx	13	12	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	• Terselenggaranya bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 325 (Loka Bina Karya, Bimbingan Napza)	65 Orang	65 Orang	130.000.000	65 Orang	143.000.000	65 Orang	214.500.000	65 Orang	235.950.000	65 Orang	259.545.000	325	982.995.000	DINAS SOSIAL
xx	14	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya pengetahuan mengenai manajemen produktivitas dan meningkatnya budaya produktif 80 orang peserta dan pengembangan sikap mental produktif 200 orang, melalui pelatihan manajemen produktivitas dan pelatihan perbaikan produktivitas terpadu	Terlatihnya 850 orang pencari kerja	100%	1.039.896.000	100%	1.091.890.800	100%	1.364.863.500	100%	1.433.106.675	100%	1.504.762.009	100%	6.434.518.984	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
xx	14	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	• Jumlah lapangan kerja	2.234 orang	100%	952.500.000	100%	1.047.750.000	100%	1.571.625.000	100%	2.357.437.500	100%	2.593.181.250	100%	8.522.493.750	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
xx	14	17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	• Dokumen/regulasi tentang perlindungan pekerja	Tersosialisasi 42 perusahaan	20%	400.000.000	20%	440.000.000	20%	660.000.000	20%	726.000.000	20%	798.600.000	100%	3.024.600.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
xx	15	15	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	• Jumlah koperasi aktif, 2.421 unit	99,16%	80%	955.880.000	80%	1.003.674.000	85%	1.254.592.500	85%	1.317.322.125	85%	1.383.188.231	100%	5.914.656.856	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
xx	15	16	Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM	• Peningkatan KUMKM dalam mengembangkan usaha	97,64%	80%	395.000.000	80%	592.500.000	85%	651.750.000	85%	716.925.000	85%	788.617.500	100%	3.144.792.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
xx	15	17	Program Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif	• Jumlah KUMKM terakses untuk pembiayaan, 248 KUMKM	91,67%	80%	-	80%	1.725.000.000	85%	2.587.500.000	85%	2.846.250.000	85%	4.269.375.000	100%	11.428.125.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
xx	15	18	Program Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM	• Jumlah KUMKM mengikuti pameran/promosi dan kemitraan, 108 KUMKM	96,94%	80%	-	80%	1.243.000.000	85%	1.864.500.000	85%	2.050.950.000	85%	2.256.045.000	100%	7.414.495.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			19	Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM	• Jumlah pelatihan, 4 angkatan 120 orang	97,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
xx	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah kegiatan kepemudaan 230 kegiatan	terlatihnya paskibraka 71 org, peringatan HSP 1 kegiatan, terlaksananya seleksi paskibraka 56 org, tertunjangnya kegiatan 50 OKP, diklat bidang politik bagi pemuda 30 org, penempatan SM2L 42 org.	42 orang SM2L, terlatihnya 71 orang Paskibraka, 55 OKP yang terdaftar di KNPI	2.287.071.275	42 orang SM2L, terlatihnya 71 orang Paskibraka, 55 OKP yang terdaftar di KNPI	2.515.778.403	42 orang SM2L, terlatihnya 71 orang Paskibraka, 55 OKP yang terdaftar di KNPI	3.773.667.604	42 orang SM2L, terlatihnya 71 orang Paskibraka, 55 OKP yang terdaftar di KNPI	4.151.034.364	42 orang SM2L, terlatihnya 71 orang Paskibraka, 55 OKP yang terdaftar di KNPI	4.566.137.801	210 orang SM2L, terlatihnya 355 orang Paskibraka, 275 OKP yang terdaftar di KNPI	17.293.689.446	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
xx	18	17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah wirausahawan muda 300 orang	terlatihnya kewirausahaan pemuda 20 orang, meningkatnya keterampilan pemuda dibidang penyablonan 20 org.	60 pemuda	40.000.000	60 pemuda	44.000.000	60 pemuda	66.000.000	60 pemuda	72.600.000	60 pemuda	79.860.000	300 pemuda	302.460.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
xx	18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah club olahraga yang dibentuk 34 club	Terlaksananya POPPROV, kompetisi 6 cabang, pemassalan olahraga 4 kegiatan, penunangan olahraga cacat, terlaksananya festival olahraga tradisional 1 keg, pelatihan bagi pelatih tenis meja 25 orang, penunangan olahraga dimasyarakat 1 paket.	event olah raga 7 kegiatan	1.080.000.000	event olah raga 7 kegiatan	1.188.000.000	event olah raga 7 kegiatan	1.306.800.000	event olah raga 7 kegiatan	1.437.480.000	event olah raga 7 kegiatan	1.581.228.000	event olah raga 49 kegiatan	6.593.508.000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
xx	20	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Percepatan layanan	75 Orang	100%	5.524.425.000	100%	5.800.646.250	100%	6.090.678.563	100%	6.395.212.491	100%	6.714.973.115		30.525.935.418	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
xx	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah fasilitasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	90 orang, 2 paket	20%	2.750.000.000	20%	2.887.500.000	30%	3.609.375.000	50%	3.789.843.750	70%	3.979.335.938	70%	17.016.054.688	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
xx	22	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa	562 paket	20%	1.195.930.000	20%	1.315.523.000	40%	1.973.284.500	50%	2.170.612.950	60%	2.387.674.245	60%	9.043.024.695	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
xx	04	18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kerjasama dibidang kebudayaan	0%	-	-	80%	693.000.000	80%	1.039.500.000	85%	1.143.450.000	90%	1.257.795.000	95%	4.133.745.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Pagu Misi 6			17.710.702.275		22.787.262.453		29.612.636.666		32.586.574.855		36.336.958.088		139.034.134.337	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
Misi 7																		
TERCIPTANYA KERUKUNAN DAN KEDAMAIAN SERTA SINERGITAS DAN HARMONISASI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI KALIMANTAN TENGAH																		
xx	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah kemitraan, seminar, sarasehan dan diskusi, sosialisasi	2 Kegiatan program tetap	100%	147.413.000	100%	162.154.300	100%	178.369.730	100%	196.206.703	100%	294.310.055	100%	978.453.788	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
xx	19	18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Siswa, mahasiswa, ormas/LSM		100%	21.887.500	100%	24.076.250	100%	26.483.875	100%	29.132.263	100%	32.045.489	100%	133.625.376	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
xx	19	21	Program pendidikan politik masyarakat	Kerjasama dengan ormas/LSM, partai politik dan lembaga legislatif		100%	553.072.950	100%	608.380.245	100%	669.218.270	100%	736.140.096	100%	809.754.106	100%	3.376.565.667	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
xx	19	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Angka kriminalitas Kerjasama dengan korem, polda, siswa dan mahasiswa		100%	78.000.000	100%	81.900.000	100%	85.995.000	100%	90.294.750	100%	94.809.488	100%	430.999.238	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
xx	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah linmas per-10000 penduduk Deteksi dini setiap tahun		-	-	100%	330.000.000	100%	363.000.000	100%	399.300.000	100%	439.230.000	100%	1.531.530.000	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
xx	19	20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Angka Kriminalitas		-	-	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	605.000.000	100%	907.500.000	100%	2.562.500.000	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
xx	04	19	Program Pengelolaan keragaman Budaya	Jumlah pelatihan	1 kegiatan	-	-	80%	740.000.000	80%	814.000.000	85%	895.400.000	90%	984.940.000	95%	3.434.340.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
xx	04	20	Program Pengelolaan kekayaan Budaya	Jumlah pelatihan	17 kegiatan, 3 organisasi	-	-	80%	680.000.000	80%	748.000.000	85%	822.000.000	90%	905.080.000	95%	3.155.080.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Pagu Misi 7							800.373.450		3.126.510.795		3.435.066.875		3.773.473.812		4.467.669.137		15.603.094.068	

B. Program Prioritas Untuk Pencapaian Visi Misi dan Layanan Urusan Pemerintahan Daerah

Pada bagian ini disajikan semua program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015 maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Program prioritas pada bagian ini dibuat untuk masa lima tahun bagi masing-masing SKPD. Masing-masing program dilengkapi dengan target indikator kinerja untuk menunjukkan sejauhmana capaian rencana pembangunan akan dicapai. Secara lengkap program-program tersebut disajikan pada tabel 8.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk mencapai Visi, Misi dan layanan SKPD untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah:

Tabel 8.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk Mencapai Visi, Misi
dan Layanan SKPD untuk Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Unsur Wajib																
1	01 Pendidikan																
xx	01 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi 15 paket, rutin kantor 5 paket, ATK 15 paket, Rakor, konsultasi keluar daerah 60 bulan.	3 paket, 12 bulan	3 paket, 12 bulan	2.208.407.000	3 paket, 12 bulan	2.318.827.350	3 paket, 12 bulan	2.434.768.718	3 paket, 12 bulan	2.556.507.153	3 paket, 12 bulan	2.684.332.511	100% terlaksana kegiatanjasa surat menyurat, komunikasi 5 paket, rutin kantor 5 paket, ATK 5 paket, Rakor, konsultasi keluar daerah 60 bulan.	12.202.842.731,92	DINAS PENDIDIKAN
xx	01 2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan gedung 50 pkt, rehabilitasi 25 pkt, pengdaan perlengkapan kantor 50 pkt, pemeliharaan rutin 5 pkt, pemeliharaan perlengkapan gedung 10 kegiatan.	15 paket, 10 unit, 2 kegiatan	2 paket	1.940.375.000	2 paket	2.037.393.750	2 paket	2.139.263.438	2 paket	2.246.226.609	2 paket	2.358.537.940	100% terlaksana kegiatan 15 paket, 10 unit, 2 kegiatan	10.721.796.736,72	DINAS PENDIDIKAN
xx	01 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 5 paket	1 paket	1 paket	249.672.000	1 paket	262.155.600	1 paket	275.263.380	1 paket	289.026.549	1 paket	303.477.876	100% terlaksar	1.379.595.405,45	DINAS PENDIDIKAN
xx	01 4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Pembayaran biaya pemulangan 85 orang.	17 orang	17 orang	400.000.000	17 orang	420.000.000	17 orang	441.000.000	17 orang	463.050.000	17 orang	486.202.500	85 orang	2.210.252.500,00	DINAS PENDIDIKAN
xx	01 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	* Rata-rata jam latihan per orang per tahun dinas pendidikan	10 orang, 2 kegiatan	10 orang, 2 kegiatan	387.200.000	10 orang, 2 kegiatan	406.560.000	10 orang, 2 kegiatan	426.888.000	10 orang, 2 kegiatan	533.610.000	10 orang, 2 kegiatan	560.290.500	50 orang, 10 kegiatan	2.314.548.500,00	DINAS PENDIDIKAN
xx	01 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja 5 paket, dokumen laporan keuangan 10 dokumen.	1 paket, 2 dokumen	1 paket, 2 dokumen	60.000.000	1 paket, 2 dokumen	63.000.000	1 paket, 2 dokumen	66.150.000	1 paket, 2 dokumen	69.457.500	1 paket, 2 dokumen	72.930.375	5 paket, 10 dokumen	331.537.875,00	DINAS PENDIDIKAN
xx	01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya APK PAUD menjadi 60,50%, APM PAUD menjadi 33,42%, dan meningkatnya pelayanan proses pembelajaran PAUD.	APK PAUD 57,30%, APM PAUD 25,75%	1 gedung TK, 15 ruang kelas, meubelair 50 paket, 7.000 buku, peraga 1 paket, SDM 800 orang, data 14 Kab./Kota, manajemen 1 paket.	9.482.509.000	1 gedung TK, 15 ruang kelas, meubelair 50 sekolah, 7.000 buku, alat praktik peraga 1 paket, peningkatan SDM 800 orang, pengembangan data 14 Kab/Kota, manaj 1 pkt	9.956.634.450	1 gdg TK, 15 ruang kelas, meubelair 50 sekolah, 7.000 buku, alat praktik peraga 1 pkt, peningkatan peraga 1 pkt, peningkatan SDM 800 orang, pengembangan data 14 Kab/Kota, manajemen 1 pkt	10.454.466.173	1 gdg TK, 15 ruang kelas, meubelair 50 sekolah, 7.000 buku, alat praktik peraga 1 pkt, peningkatan SDM 800 orang, pengembangan data 14 Kab/Kota, manajemen 1 pkt	10.977.189.481	1 gedung TK, 15 ruang kelas, meubelair 50 sekolah, Sarana 7.000 buku, alat praktik dan peraga 1 paket, peningkatan SDM 800 orang, pengembangan data 14 Kab./Kota, manajemen 1 paket.	11.526.048.955	5 gedung TK, 75 ruang kelas, paket meubelair 250 sekolah, Sarana 35.000 buku, alat praktik dan peraga 5 paket, peningkatan SDM 4.000 orang, pengembangan data 14 Kab./Kota, manajemen 5 paket.	52.396.848.058,81	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
xx 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatnya APM SD menjadi 99,04, APK SMP/MTS 98,02, APM SMP/MTS 84,76, didukung dengan meningkatnya Prasarana 60 gedung SD dan SMP, 150 ruang kelas SD dan SMP, 150 rumah dinas guru, 75 paket perpustakaan SD dan SMP, 50 ruang laboratorium, meubelair 70 paket, Sarana 75.000 buku, alat praktik dan peraga 10 paket, peningkatan SDM 16.895 orang, pengembangan data 5 paket, manajemen 5 paket, Jumlah penerima Beasiswa 15.000 siswa, Rupiah beasiswa Rp. 7.500.000.000,- dan Jumlah Buku 75.000	APM SD/MI 98,72% dan APM SMP/MTS 84,46%	98,82% SD/MI, dan 84,51% SMP/MTS	78.160.074.000	98,86% SD/MI, dan 84,56% SMP/MTS	85.976.081.400	98,89% SD/MI, dan 84,61% SMP/MTS	94.573.689.540	999,01% SD/MI, dan 84,66% SMP/MTS	104.031.058.494	99,04% SD/MI, dan 84,71% SMP/MTS	114.434.164.343	99,04% APM SD/MI dan 84,76% APM SMP/MTS	477.175.067.777,40	DINAS PENDIDIKAN
xx 01 17	Program Pendidikan Menengah	Meningkatnya APK SMA menjadi 69,07, APM SMA 67,03 yang didukung dengan meningkatnya Prasarana 15 gedung SMA, 150 ruang kelas SMA, 145 rumah dinas guru, 100 perpustakaan SMA, 125 ruang laboratorium, meubelair 245 paket, alat praktik dan peraga 290 paket, peningkatan SDM 11.250 orang, 3.575 jumlah beasiswa, pengembangan data 5 paket, manajemen 5 paket, 100 akreditasi sekolah, Jumlah Penerima beasiswa 35.000 siswa, Rupiah Beasiswa Rp. 27.300.000.000,-	APK 65,09%, APM 62,24%, SMK Terakreditasi B 16%, E learning 5%	APK 67,00%, APM 64,20%, SMK Terakreditasi B 22,46%, E learning 8%	46.958.290.000	APK 68,50%, APM 66,00%, SMK Terakreditasi B 26,47%, E learning 12%	51.654.119.000	APK 70,00%, APM 68,00%, SMK Terakreditasi B 28,00%, E learning 14%	56.819.530.900	APK 72,00%, APM 70,00%, SMK Terakreditasi B 31,95%, E learning 16%	62.501.483.990	APK 73,00%, APM 71,00%, SMK Terakreditasi B 35,00%, E learning 20%	68.751.632.389	APK 73,00%, APM 71,00%, SMK Terakreditasi B 35,00%, E learning 20%	286.685.056.279,00	DINAS PENDIDIKAN
xx 01 18	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah pelatihan 80 paket		15 paket	960.000.000	15 paket	1.056.000.000	15 paket	1.584.000.000	15 paket	1.742.400.000	20 paket	1.916.640.000	80 paket	7.259.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN
xx 01 19	Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya APK Pendidikan Layanan Khusus (SLB)	APK SD LB 65,63%, SMP/LB 61,29%, SMALB 53,33%	Pemb 3 gedung, ruang kelas 5 pkt, terbanggunnya taman, lapangan upacara, tempat parkir 1 pkt di 14 kab/kota, rehab 3 gedung, meubeler 11 ruang, buku 10 judul/eks di 14 kab/kota, diklat guru 1 keg.	3.710.000.000	Pemb 3 gedung, ruang kelas 5 pkt, terbanggunnya taman, lapangan upacara, tempat parkir 1 pkt di 14 kab/kota, rehab 3 gedung, meubeler 11 ruang, buku 10 judul/eks di 14 kab/kota, diklat guru 1 keg.	4.081.000.000	Pemb 3 gedung, ruang kelas 5 pkt, terbanggunnya taman, lapangan upacara, tempat parkir 1 pkt di 14 kab/kota, rehab 3 gedung, meubeler 11 ruang, buku 10 judul/eks di 14 kab/kota, diklat guru 1 keg.	4.489.100.000	Pemb 4 gedung, ruang kelas 5 pkt, terbanggunnya taman, lapangan upacara, tempat parkir 1 paket di 14 kab/kota, rehab 3 gedung, meubeler 11 ruang, buku 10 judul/eks di 14 kab/kota, diklat guru 1 kegiatan.	4.938.010.000	Pembangunan 3 gedung, ruang kelas 5 paket, terbanggunnya taman, lapangan upacara, tempat parkir 1 paket di 14 kab/kota, rehab 3 gedung, meubeler 11 ruang, buku 10 judul/eks di 14 kab/kota, diklat guru 1 kegiatan.	5.431.811.000	APK SDLB 72,83%, SMP/LB 62,74%, SMALB 61,83%	22.649.921.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
xx	01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkat kualifikasi dan sertifikasi PTK • Persentase kualifikasi pendidik SD/SDLB 83,54 %, SMP/SMPLB 98,45 % • Jumlah guru bersertifikasi 11.687 orang.	Kualifikasi S1/D4 guru SD 35,45%, SMP 55%, SMA/SMK 65,23%	Kualifikasi SD/SDLB 45,65%, kualifikasi SMP 59,16%	19.915.006.000	Kualifikasi SD/SDLB 55,94%, kualifikasi SMP 68,79%	21.906.506.600	Kualifikasi SD/SDLB 65,79%, kualifikasi SMP 79,53%	24.097.157.260	Kualifikasi SD/SDLB 75,16%, kualifikasi SMP 89,46%	26.506.872.986	Kualifikasi SD/SDLB 83,54%, kualifikasi SMP 98,45%	39.760.309.479	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi melalui Diklat, IHT KKG, MGMP, MKKS, MKPS dengan hasil Kualifikasi/sertifikasi Guru SD 83,54%, SMP98,45%, SMA/SMK 98%	132.185.852.325,00	DINAS PENDIDIKAN
xx	01	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Koleksi buku SD/MI sebanyak 25.000, peningkatan SDM perpustakaan 250 orang, penguatan 210 Taman bacaan masyarakat (TBM), tersosialisasinya melalui leaflet di 14 kab/kota.	Koleksi buku SD/MI sebanyak 5.000, peningkatan SDM perpustakaan 50 orang, penguatan 42 Taman bacaan masyarakat (TBM).	Koleksi buku SD/MI sebanyak 5.000, peningkatan SDM perpustakaan 50 orang, penguatan 42 Taman bacaan masyarakat (TBM), tersosialisasinya melalui leaflet di 14 kab/kota.	3.553.850.000	Koleksi buku SD/MI sebanyak 5.000, peningkatan SDM perpustakaan 50 orang, penguatan 42 Taman bacaan masyarakat (TBM), tersosialisasinya melalui leaflet di 14 kab/kota.	3.909.235.000	Koleksi buku SD/MI sebanyak 5.000, peningkatan SDM perpustakaan 50 orang, penguatan 42 Taman bacaan masyarakat (TBM), tersosialisasinya melalui leaflet di 14 kab/kota.	4.300.158.500	Koleksi buku SD/MI sebanyak 5.000, peningkatan SDM perpustakaan 50 orang, penguatan 42 Taman bacaan masyarakat (TBM), tersosialisasinya melalui leaflet di 14 kab/kota.	4.730.174.350	Koleksi buku SD/MI sebanyak 5.000, peningkatan SDM perpustakaan 50 orang, penguatan 42 Taman bacaan masyarakat (TBM), tersosialisasinya melalui leaflet di 14 kab/kota.	5.203.191.785	Koleksi buku SD/MI sebanyak 25.000, peningkatan SDM perpustakaan 250 orang, penguatan 210 Taman bacaan masyarakat (TBM), tersosialisasinya melalui leaflet di 14 kab/kota.	21.696.609.635,00	DINAS PENDIDIKAN
xx	01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah jenis pelatihan 10 kegiatan • Terfasilitasi pendirian PSPD dan Prodi Teknik Pertambangan UNPAR		2 keg.	5.487.129.000	2 keg.	6.035.841.900	2 keg.	6.639.426.090	2 keg.	7.303.368.699	2 keg.	10.955.053.049		36.420.818.737,50	DINAS PENDIDIKAN
xx	01	23	Program Pendidikan Tinggi	Meningkatnya gedung PTN/PTS Prasarana 100 paket, meubelair 150 ruangan, rehab gedung 50 paket, ruang praktek pendidikan dokter 1 paket.	gedung PTN/PTS 20 paket, meubelair 30 ruangan, rehab gedung 10 paket, ruang praktek pendidikan dokter 1 paket. 6.429.000.000	gedung PTN/PTS 20 paket, meubelair 30 ruangan, rehab gedung 10 paket, ruang praktek pendidikan dokter 1 paket.	12.125.000.000	gedung PTN/PTS 20 paket, meubelair 30 ruangan, rehab gedung 10 paket, ruang praktek pendidikan dokter 1 paket.	13.337.500.000	gedung PTN/PTS 20 paket, meubelair 30 ruangan, rehab gedung 10 paket, ruang praktek pendidikan dokter 1 paket.	14.671.250.000	gedung PTN/PTS 20 paket, meubelair 30 ruangan, rehab gedung 10 paket, ruang praktek pendidikan dokter 1 paket.	16.138.375.000	gedung PTN/PTS 20 paket, meubelair 30 ruangan, rehab gedung 10 paket, ruang praktek pendidikan dokter 1 paket.	17.752.212.500	Meningkatnya gedung PTN/PTS Prasarana 100 paket, meubelair 150 ruangan, rehab gedung 50 paket, ruang praktek pendidikan dokter 1 paket.	74.024.337.500,00	DINAS PENDIDIKAN
xx	01	24	Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik secara Proporsional	Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik secara proporsional 7.180 jumlah guru.	7.180 orang, 10.890.000.000	1.436 jumlah guru	12.090.000.000	1.436 jumlah guru	13.299.000.000	1.436 jumlah guru	14.628.900.000	1.436 jumlah guru	16.091.790.000	1.436 jumlah guru	17.700.969.000	7.180 jumlah guru	73.810.659.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
xx 01 25	Program Penelitian Pengembangan Dan Inovasi Pendidikan	Terselenggaranya penelitian pengembangan dan inovasi pendidikan, antara lain meningkatnya kualitas SDM melalui pelatihan 4 kegiatan, rakor/seminar 3 kegiatan, test diagnostik 36 paket.	1 Paket 5.500.000.000	pelatihan 4 kegiatan, rakor/seminar 3 kegiatan, test diagnostik 7 paket.	5.539.888.000	pelatihan 4 kegiatan, rakor/seminar 3 kegiatan, test diagnostik 7 paket.	6.093.876.800	pelatihan 4 kegiatan, rakor/seminar 3 kegiatan, test diagnostik 7 paket.	6.703.264.480	pelatihan 4 kegiatan, rakor/seminar 3 kegiatan, test diagnostik 7 paket.	7.373.590.928	pelatihan 4 kegiatan, rakor/seminar 3 kegiatan, test diagnostik 8 paket.	8.110.950.021	pelatihan 4 kegiatan, rakor/seminar 3 kegiatan, test diagnostik 36 paket.	33.821.570.228,80	DINAS PENDIDIKAN	
xx 01 26	Program peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan	Rupiah alokasi kesejahteraan lebih dari 35.000 guru di daerah terencil untuk 5 tahun	7.000 guru daerah terencil		-	1.795 jumlah guru.	5.469.000.000	1.795 jumlah guru.	6.015.900.000	1.795 jumlah guru.	6.617.490.000	1.795 jumlah guru.	7.279.239.000	7.180 jumlah guru.	25.381.629.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
xx 01 28	Program pengembangan data/informasi	Tersedianya database pendidikan tiap kabupaten, kota dan provinsi sebanyak 75 dokumen	1 paket		-	1 paket	3.750.000.000	1 paket	4.125.000.000	1 paket	4.537.500.000	1 paket	4.991.250.000	4 paket	17.403.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
xx 01 29	Program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	Terbangun dan terhabnya rumah dinas Kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah SD, SMP, SMA, SMK 295 paket. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	SD/MI rusak berat 455 stadik atau 1.620 ruang kelas (13,14%), SMP 200 satdik atau 988 ruang (12,98%), SMA/MA/SMK 48 satdik atau 393 ruang (15,94%), rumah guru/kepsep SD 272 bh, SMP 66 bh, dan SMA 24 bh.	2 paket	-	2 paket	1.700.000.000	2 paket	1.870.000.000	3 paket	2.805.000.000	3 paket	3.085.500.000	10 paket	9.460.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
xx 02 01	Kesehatan															-	DINAS KESEHATAN
xx 02 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi 5 tahun, operasional rutin kantor 5 paket, ATK 5 paket, rapat-rapat koordinasi, konsultasi keluar daerah 5 paket	100%	100%	1.688.739.450	100%	1.773.176.423	100%	1.861.835.244	100%	1.954.927.006	100%	2.052.673.356	100%	9.331.351.478,03	DINAS KESEHATAN	
xx 02 2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan gedung 5 paket, perlengkapan, peralatan gedung 5 paket	65%	70%	649.997.500	75%	682.497.375	80%	716.622.244	85%	752.453.356	90%	790.076.024	90%	3.591.646.498,42	DINAS KESEHATAN	
xx 02 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 5 paket	100%	100%	90.800.000	100%	95.340.000	100%	100.107.000	100%	105.112.350	100%	110.367.968	100%	501.727.317,50	DINAS KESEHATAN	
xx 02 4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Pembayaran biaya pemulangan 38 orang	100%	100%	250.000.000	100%	262.500.000	100%	275.625.000	100%	289.406.250	100%	303.876.563	100%	1.381.407.812,50	DINAS KESEHATAN	
xx 02 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelaksanaan bimtek 5 paket, kegiatan olahraga karyawan 250 kali	0%	Bimtek 1 paket, Kegiatan olah raga 50 Kali	75.000.000	Bimtek 1 paket, Kegiatan olah raga 50 Kali	78.750.000	Bimtek 1 paket, Kegiatan olah raga 50 Kali	82.687.500	Bimtek 1 paket, Kegiatan olah raga 50 Kali	86.821.875	Bimtek 1 paket, Kegiatan olah raga 50 Kali	91.162.969	Bimtek 5 paket, Kegiatan olah raga 250 Kali	414.422.343,75	DINAS KESEHATAN	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab			
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp		
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)		
xx	02	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terjaminnya kebutuhan masyarakat akan obat, vaksin, dan makanan minuman sehat, melalui fasilitasi pengadaan obat-obatan, vaksin dan alat kesehatan; terlatihnya Dokter, Tenaga Farmasi, Bidan dan Perawat tentang Penggunaan Obat Rasional (POR) 5 kali, Bimtek Obat di Kabupaten/Kota dan Sarana Pedagang Farmasi (FBF) 5 kali, pelatihan pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat 2 kali, pelatihan Pengenalan Resiko Hazard Bahan Berbahaya 2 kali, terlaksananya pengadaan obat buffer dan perbekalan kesehatan 5 kali, terlaksananya pengadaan obat program 5 kali, terlaksananya monitoring bahan berbahaya 4 kali, terlaksananya bimtek makanan & minuman 4 kali, tersedianya operasional Tim Penggerak POR 5 kali	Operasional POR (65%); Pengadaan Buffer stock (70%); Pengadaan Obat program (60%); Pengadaan Obat dan Alkes Balai Jiwa (65%); Pelatihan POR utk dokter, farmasi bidan dan perawat (65%); Bimtek Ketersediaan Obat di Kab/Kota (65%); Monitoring Peredaran Alkes (65%); Monev Pelaksanaan POR(85%); Monitoring penerapan farmasi komunitas di RS dan Apotik (65%); Bimtek pengelolaan obat publik (65%); Sampling Alkes (65%); Operasional Instalasi Farmasi (70%); Monitoring	80%	3.132.750.750	85%	3.289.388.288	90%	3.453.857.702	95%	3.626.550.587	100%	3.807.878.116	100%	17.310.425.442,66	DINAS KESEHATAN
xx	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terlaksananya upaya pencegahan kesehatan masyarakat	50%													
					80%	965.000.000	85%	1.061.500.000	90%	1.167.650.000	95%	1.284.415.000	100%	1.412.856.500	100%	5.891.421.500,00	DINAS KESEHATAN	
xx	02	18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Terfasilitasinya Pengembangan Obat tradisional melalui pengadaan buku tentang kesehatan tradisional 2 paket, operasionalisasi peningkatan Kebun Percetakan Tanaman Obat Tradisional 5 paket, terlaksananya Bimtek Program Batantra ke Kab./Kota 5 kali, terlaksananya inventarisasi lanjutan obat tradisional Kalimantan Tengah 2 kali, terselenggaranya pertemuan penapisan obat tradisional Kalimantan Tengah 1 kali, terselenggaranya pelatihan bagi pengelola obat tradisional cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) 1 kali, terselenggaranya pertemuan kerjasama lintas sektoral dalam pengembangan obat tradisional 2 kali	Inventarisasi Obat Tradisional Kalteng (65%)	80%	95.000.000	85%	104.500.000	90%	114.950.000	95%	126.445.000	100%	139.089.500	100%	579.984.500,00	DINAS KESEHATAN
xx	02	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya presentase keluarga dengan pola hidup bersih dan sehat	0%	1.054.800.000	85%	1.160.280.000	90%	1.276.308.000	95%	1.403.938.800	100%	1.544.332.680	100%	6.439.659.480,00	DINAS KESEHATAN	
xx	02	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya status gizi dan kualitas penanganan masalah gizi masyarakat, yang didukung oleh terlaksananya Penanggulangan KEP, Anemia Gizi, GAKY, KVA dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya (PMT AS dan Bumi) 5 paket, tersedianya Peta Info Masyarakat Kurang Gizi 5 paket, terlaksananya Supervisi di Kab./Kota 5 paket, terselenggaranya survei garam beryodium 5 paket, terselenggaranya kampanye ASI Eksklusif 5 paket	70%	75%	959.000.000	80%	1.054.900.000	85%	1.160.390.000	90%	1.276.429.000	95%	1.404.071.900	95%	5.854.790.900,00	DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab			
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)					
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
xx	02	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan di masyarakat yang diakibatkan penyakit menular yang didukung melalui terlaksananya fasilitasi dan bimbingan teknis HIV AIDS dan P2 Kelamin bagi 14 kabupaten / kota 5 kali, terlaksananya sero survei HIV-AIDS di 14 Kabupaten / Kota 5 kali, tersedianya dokumen data evaluasi dan sinkronisasi program AIDS dan PMS se Kalteng 5 dokumen, terlaksananya sosialisasi untuk memperkuat kelembagaan KPA 5 kali, terlaksananya pertemuan Lintas Sektor untuk CDR TB di Kalimantan Tengah 5 kali, terlaksananya pengadaan reagensia dan logistik TB 5 paket, terlaksananya fasilitasi dan bimbingan teknis Kusta bagi 14 kabupaten / kota 5 kali, terlaksananya fasilitasi dan bimbingan teknis ISPA bagi 14 kabupaten / kota 5 kali, terlaksananya fasilitasi dan bimbingan teknis Diare bagi 14 kabupaten / kota 5 kali, terlaksananya fasilitasi dan bimbingan teknis DBD bagi 14 kabupaten / kota 5 kali, terlaksananya fasilitasi dan bimbingan teknis Malaria bagi 14 kabupaten / kota 5 kali, terlaksananya pengadaan paket laboratorium malaria 5 paket, terlaksananya fasilitasi dan bimbingan teknis Rabies bagi 14 kabupaten / kota 5 kali, terlaksananya fasilitasi dan bimbingan teknis Rabies bagi kabupaten / kota.	79%	80%	860.500.000	85%	946.550.000	90%	1.041.205.000	95%	1.145.325.500	100%	1.259.858.050	100%	5.253.438.550,00	DINAS KESEHATAN	
xx	02	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Regulasi Standar Pelayanan Kesehatan, Meningkatnya mutu layanan kesehatan	70%	80%	100.000.000	85%	150.000.000	90%	165.000.000	95%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	796.150.000,00	DINAS KESEHATAN	
xx	02	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Terselenggaranya pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Miskin melalui terlaksananya kegiatan operasi katarak di 4 Kab. sebanyak 5 paket	1 paket	1 paket	345.000.000	1 paket	1.300.000.000	1 paket	1.430.000.000	1 paket	1.573.000.000	1 paket	1.730.300.000	5 paket	6.378.300.000,00	DINAS KESEHATAN	
xx	02	25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Terlaksananya pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya melalui terlaksananya Pengadaan Kulkas (cold chain) untuk vaksin 50 unit, Alkes untuk Pustu 150 paket, Bidan Kit untuk bidan PTT yang Baru 140 paket, solar cell 130 unit, alat komunikasi (SSB) 50 unit, Monev Sarana dan Alkes di Puskesmas dan Jaringannya 1 paket, Pemetaan Data Sarana dan Alkes 1 paket, Pelatihan Sarana dan Alkes 5 kali, Bimtek Sarana dan Peralatan Kesehatan 5 kali, Konsultasi perizinan Sub Penyulur Alkes dan Penyulur Alkes ke Pusat 10 kali	Pembangunan Pustu (75%); Alkes Pustu (75%); Cold Chain (75%); Bidan Kit (90%); Solar cell (75%)	80%	85%	4.263.675.000	85%	4.690.042.500	90%	5.159.046.750	95%	5.674.951.425	100%	6.242.446.568	100%	26.030.162.242,50	DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab			
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp		
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)		
xx	02	35	Program Peningkatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan	Meningkatnya fasilitas pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat (termasuk seluruh penduduk miskin), melalui terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Jamkesmas dan Pembinaan verifikasi RS serta Pembina R/R 5 OT, terlaksananya Pertemuan Perbaikan Sistem Pencatatan dan Pelaporan program Jamkesmas 3 kali, Terlaksananya pertemuan Evaluasi program Jamkesmas di 14 Kab/kota 4 kali, terlaksananya sosialisasi / LS Program Jamkesmas dan tersusunnya rencana program 5 paket, terlaksananya Sosialisasi berbagai Informasi Prog. Jamkesmas melalui media di 14 Kab/ kota 5 paket, terselenggaranya monev & bintek program jamkesmas tk. Provinsi di 14 kab/kota 351 OT, terlaksananya mapping sasaran kesepesertaan program Jamkesmas 4 paket, terjaringnya anak terlantar, anak jalanan/gelandangan/pengemis sebagai kesepesertaan Jamkesmas 4 paket, terdorongnya kesepesertaan sukarela 4 paket	Monev Program Jamkesmas & Pembinaan Verifikator RS serta Pembina R/R (98%)	99%	289.000.000	100%	317.900.000	100%	349.690.000	100%	384.659.000	100%	423.124.900	100%	1.764.373.900,00	DINAS KESEHATAN
xx	02	36	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Terpelihara dan meningkatnya kesehatan serta terlaksananya upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan perorangan, melalui terselenggaranya pelayanan spesialisik di Rumah Sakit Kabupaten yang membutuhkan 2 paket, terlaksananya Pertemuan Evaluasi program kesehatan rujukan 5 paket, terlaksananya Monev Perizinan dan Penetapan kelas RS 2 paket, terlaksananya penilaian RSSI/B di 14 RS, Terlaksananya Sosialisasi Program Upaya Kesehatan Perorangan 2 paket, Terlaksananya Bimbingan Teknis (OJT) ke 3 Rumah Sakit Program PONEK 2 paket, tersedianya buku Program Kesehatan Perorangan/rujukan 5 paket, tersedianya Profil Rumah sakit Se-Kalteng 5 paket, terlaksananya pelatihan SIMRS pada 14 RS kab/kota 2 paket	70%	80%	377.840.650	85%	415.624.715	90%	457.187.187	95%	502.905.905	100%	553.196.496	100%	2.306.754.952,32	DINAS KESEHATAN
xx	02	38	Program Upaya Kesehatan Jiwa Masyarakat	Terpelihara dan meningkatnya kesehatan jiwa masyarakat serta terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan timbulnya masalah kesehatan jiwa di masyarakat, melalui tersedianya Rujukan Dokter Spesialis Jiwa, terfasilitasinya Penemuan Kasus Baru 5 paket, Tatalaksana Kasus dan Rujukan 5 paket, terlaksananya Sosialisasi Balai Kesehatan Kalawa Atei 5 paket, Terlaksananya pencegahan timbulnya gangguan jiwa paket, terlaksananya rehabilitasi medik dan sosial 5 paket, terlaksananya upaya promotif 5 paket, Terlaksananya sarana pelayanan psikologi dan tersedianya sarana fisik pelayanan yang lebih baik 5 paket	70%	80%	640.138.000	85%	704.151.800	90%	774.566.980	95%	852.023.678	100%	937.226.046	100%	3.908.106.503,80	DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
xx	02	39	Program Sumber Daya Kesehatan	Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan secara profesional, melalui tersedianya dokter spesialis 144 orang, Tersedianya Nakes yang telah mengikuti program D3 Kesehatan Program Khusus 200 orang, terlaksananya Penempatan dan Pemulangan Dokter PTT 100%, Tersedianya data Nakes kab/kota yang akurat dan up to date 100%, terselenggaranya Seleksi Pendidikan Dokter Spesialis, Tersedianya Insentif Tenaga Kesehatan di 5 Poskesdes Desa Percontohan, Teridentifikasi kebutuhan Pelatihan (Training Need Assessment), terlaksananya Pelatihan Pengembangan Organisasi (Organization Development Training) bagi Tenaga Manajerial Dinkes Prov & UPT, terakreditasinya Institut Diklat Bapelkes Prov Kalteng 1 Paket, Terakreditasinya pelatihan Bidang Kesehatan 4 Paket, terakreditasi Mjelas Tenaga Kesehatan Provinsi Kalteng 4 Paket	Dokter Spesialis (58%); Tenaga Kesehatan D3 (7%); Penempatan & Pemulangan dokter PTT (100%); Data Nakes yang Akurat (100%) Seleksi pendidikan dokter spesialis (100%) Insentif tenaga kesehatan di 5 Poskesdes (100%) Pelatihan Pengembangan Organisasi (0%); Akreditasi Institut Diklat Bapelkes (100%); Akreditasi Pelatihan Bidang (0%)	80%	3.021.736.200	85%	3.323.909.820	90%	3.656.300.802	95%	4.021.930.882	100%	4.424.123.970	100%	18.448.001.674,62	DINAS KESEHATAN
xx	02	40	Program Penanggulangan Masalah Kesehatan	Meningkatnya kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana/masalah Kesehatan, melalui terlaksananya Penanggulangan KLB, Terlaksananya Penanggulangan bencana, terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi (PE), Terlaksananya Pengadaan Bahan dan Alat Penanggulangan KLB, terlaksananya pemetaan wilayah rawan bencana, Terselenggaranya kegiatan pelatihan	50%	378.750.000	85%	416.625.000	90%	458.287.500	95%	504.116.250	100%	554.527.875	100%	2.312.306.625,00	DINAS KESEHATAN	
xx	02	41	Program Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Tersedianya kebijakan dan dukungan manajemen pembangunan Kesehatan, melalui terlaksananya Rapat Kerja Bidang Kesehatan se- Kalimantan Tengah 5 paket, terlaksananya Movev Pelaksanaan Program Kesehatan 5 paket, terlaksananya Kajian Bidang Kesehatan 4 paket, terselenggaranya Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 4 paket, terlaksananya Pertemuan Penyusunan RKA SKPD 5 paket	Rakerkes (100%); Tersusunnya RKA (100%), Movev (100%), Kajian Bid. Kesehatan (0%); Pengembangan SIK (50%)	80%	293.349.450	85%	322.684.395	90%	354.952.835	95%	390.448.118	100%	429.492.930	100%	1.790.927.727,20	DINAS KESEHATAN
xx	02	42	Penyuluhan Masyarakat PHBS	Meningkatnya Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), melalui Terlaksananya Seminar PHBS 2 paket; Pembinaan UKS 5 paket; Pembinaan Gigi, Mulut di Puskesmas 5 paket	30%	390.000.000	85%	429.000.000	90%	471.900.000	95%	519.090.000	100%	570.999.000	100%	2.380.989.000,00	DINAS KESEHATAN	
xx	02	44	Program Kesehatan Haji	Terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan timbulnya masalah kesehatan calon jemaah haji, melalui terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Haji 5 paket; Tersedianya Vaksin dan buku haji di 14 Kab/Kota 5 paket; Terlaksananya Konsultasi Program Kesehatan haji 5 paket	0%	43.000.000	85%	47.300.000	90%	52.030.000	95%	57.233.000	100%	62.956.300	100%	262.519.300,00	DINAS KESEHATAN	
xx	02	45	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar termasuk Biaya Operasional	Terfasilitasinya Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kes. Dasar termasuk biaya operasional, melalui tersedianya biaya Operasional Posyandu 5 paket	0	225.000.000	1 paket	247.500.000	1 paket	272.250.000	1 paket	299.475.000	1 paket	329.422.500	5 paket	1.373.647.500,00	DINAS KESEHATAN	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
xx	02	46	Program Pemberantasan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit Tidak Menular (PTM), melalui terlaksananya Pengelolaan Vaksin dan Cold Chain Management 5 paket, Tersedianya biaya dan logistik untuk dukungan pelaksanaan UCI kabupaten / kota 5 paket, terlaksananya pertemuan persiapan pelaksanaan Eliminasi Campak 2011 bagi Kabupaten/Kota 30 OT	70%	80%	158.140.000	85%	173.954.000	90%	191.349.400	95%	210.484.340	100%	231.532.774	100%	965.460.514,00	DINAS KESEHATAN
xx	02	47	Program Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan, melalui Terlaksananya pengendalian vektor DBD 5 paket, terlaksananya pertemuan LS untuk penanggulangan Vektor 1 paket, terlaksananya Pertemuan Pencanangan bulan bakti PSN 1 paket, Terlaksananya pengendalian vektor malaria dan filariasis yang efektif 5 paket, terlaksananya Pemantauan dampak paparan/kontaminasi bahan pestisida pada manusia 4 paket, terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) 4 paket	60%	80%	347.383.000	85%	382.121.300	90%	420.333.430	95%	462.366.773	100%	508.603.450	100%	2.120.807.953,30	DINAS KESEHATAN
xx	02	48	Program Peningkatan Pelayanan tenaga Kesehatan	• Rasio dokter per satuan penduduk • Rasio tenaga medis per satuan penduduk • Rasio dokter ber-ijin praktek • Jumlah layanan Tenaga kesehatan		75%	783.000.000	80%	1.174.500.000	85%	1.291.950.000	90%	1.421.145.000	95%	4.670.595.000,00		DINAS KESEHATAN	
xx	02	49	Program Pengadaan, Peringkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana tenaga kesehatan.	Jumlah peralatan pendukung kesehatan • Jumlah sarana dan prasarana tenaga kesehatan.	Alkes Pustu (75%)	-	-	85%	1.290.000.000	85%	1.935.000.000	95%	2.128.500.000	100%	2.341.350.000	100%	7.694.850.000,00	DINAS KESEHATAN
xx	02	50	Program Pengadaan, Peringkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana kesehatan	• Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk • Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio RS : 1 : 128.451; Rasio Puskesmas : 1 : 12.550; Rasio Pustu : 1 : 2.226	-	-	85%	2.350.000.000	85%	3.525.000.000	95%	3.877.500.000	100%	4.265.250.000	100%	14.017.750.000,00	DINAS KESEHATAN
xx	02	51	Program pengadaan, peringkatan dan perbaikan Sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	Tersedia dan terpeliharanya sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	Pembangunan Pustu (75%)	-	-	85%	850.000.000	90%	935.000.000	95%	1.028.500.000	100%	1.131.350.000	100%	3.944.850.000,00	DINAS KESEHATAN
xx	02	52	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Terjaminnya kebutuhan masyarakat akan obat dan makanan minuman sehat	80%	-	-	85%	560.000.000	90%	616.000.000	95%	677.600.000	100%	745.360.000	100%	2.598.960.000,00	DINAS KESEHATAN
xx	02	53	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Terwujudnya Lingkungan Sehat melalui Pengkajian, penyuluhan dan sosialisasi kebijakan pengembangan lingkungan sehat	60%	-	-	85%	775.000.000	90%	852.500.000	95%	937.750.000	100%	1.031.525.000	100%	3.596.775.000,00	DINAS KESEHATAN
xx	02	54	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Terwujudnya kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	70%	-	-	85%	860.000.000	90%	946.000.000	95%	1.040.600.000	100%	1.144.660.000	100%	3.991.260.000,00	DINAS KESEHATAN
xx	02	55	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	• Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita	0%	-	-	45%	980.000.000	55%	1.078.000.000	65%	1.185.800.000	75%	1.304.380.000	85%	4.548.180.000,00	DINAS KESEHATAN
xx	02	56	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	• Meningkatnya pelayanan kesehatan lansia	0%	-	-	40%	570.000.000	60%	627.000.000	70%	689.700.000	80%	758.670.000	80%	2.645.370.000,00	DINAS KESEHATAN
xx	02	57	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Terjaminnya kebutuhan masyarakat akan makanan minuman yang sehat	0%	-	-	85%	885.000.000	90%	973.500.000	95%	1.070.850.000	100%	1.177.935.000	100%	4.107.285.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab			
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp		
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)		
xx	02	58	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan ibu dan reproduksi serta pelayanan kesehatan	0%	-	-	85%	635.000.000	90%	698.500.000	95%	768.350.000	100%	845.185.000	100%	2.947.035.000,00	DINAS KESEHATAN
xx	02	59	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan Reproduksi Remaja 5 paket	0%	-	-	85%	620.000.000	90%	682.000.000	95%	750.200.000	100%	825.220.000	100%	2.877.420.000,00	DINAS KESEHATAN
xx	02	60	Program Pelayanan Kontrasepsi	Meningkatnya kualitas pelayanan Kontrasepsi	0%	-	-	85%	585.000.000	90%	643.500.000	95%	707.850.000	100%	778.635.000	100%	2.714.985.000,00	DINAS KESEHATAN
xx	02	61	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kegiatan di Masyarakat	Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kegiatan di Masyarakat melalui terlaksananya Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	0%	-	-	85%	395.000.000	90%	434.500.000	95%	477.950.000	100%	525.745.000	100%	1.833.195.000,00	DINAS KESEHATAN
xx	02	62	Program Pengembangan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Tersedianya bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	0%	-	-	45%	450.000.000	55%	495.000.000	65%	544.500.000	75%	598.950.000	80%	2.088.450.000,00	DINAS KESEHATAN
xx	02	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya sistem manajemen dan operasional RS, meningkatnya kepuasan pasien >80%	77%	Indeks Kepuasan Pasien 80%	44.050.340.800	Indeks Kepuasan Pasien 85%	46.252.857.840	Indeks Kepuasan Pasien 90%	48.565.500.732	Indeks Kepuasan Pasien 90%	50.993.775.769	Indeks Kepuasan Pasien 90%	53.543.464.557	90%	243.405.939.697,63	RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA
xx	02	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan gedung 5 paket, perlengkapan, peralatan gedung 5 paket	70%	70%	1.380.000.000	75%	1.449.000.000	80%	1.521.450.000	85%	1.597.522.500	90%	1.677.398.625	90%	7.625.371.125,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA
xx	02	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 4 paket	0%	-	360.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	90.000.000	100%	570.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA
xx	02	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Terbayarnya biaya pemulangan pegawai	100%	100%	375.000.000	100%	393.750.000	100%	413.437.500	100%	434.109.375	100%	455.814.844	100%	2.072.111.718,75	RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA
xx	02	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelaksanaan bimtek/pelatihan/workshop 500 orang	65%	70%	200.000.000	75%	210.000.000	80%	220.500.000	85%	231.525.000	90%	243.101.250	90%	1.105.126.250,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA
xx	02	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja antara lain : LAKIP, Evaluasi Program, Profil RS 5 kali, dokumen laporan keuangan dan aset 5 kali, Renja/RKA, Surveilans RS 5 kali, laporan rekam medik tahunan 5 kali	100%	100%	75.000.000	100%	78.750.000	100%	82.687.500	100%	86.821.875	100%	91.162.969	100%	414.422.343,75	RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA
xx	02	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatnya ketersediaan dan mutu obat esensial generik dan serta alat kesehatan	65%	70%	12.740.000.000	75%	13.377.000.000	80%	14.045.850.000	85%	14.748.142.500	90%	15.485.549.625	90%	70.396.542.125,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA
xx	02	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Terlaksananya pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	70%	70%	3.354.459.200	75%	3.689.905.120	80%	4.058.895.632	85%	4.464.785.195	90%	4.911.263.715	90%	20.479.308.861,92	RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA
xx	02	34	Program Persiapan Peningkatan kelas RS menjadi RS Kelas B Pendidikan	Terakreditasinya RS 12 pelayanan, tercapainya RS Kelas B Pendidikan	belum terakreditasi	12 Pelayanan	220.000.000	12 Pelayanan	1.640.000.000	12 Pelayanan	1.804.000.000	16 Pelayanan, Penetapan Status RS Pendidikan	1.984.400.000	16 Pelayanan, Penetapan Status RS Pendidikan	2.182.840.000	16 Pelayanan, Penetapan Status RS Pendidikan	7.831.240.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA
xx	02	35	Program Peningkatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan	Tersedianya jaminan kesehatan masyarakat, Terlayannya pasien miskin/ tak mampu kelas III gratis	30%	35%	4.740.000.000	37%	5.214.000.000	38%	5.735.400.000	39%	6.308.940.000	40%	6.939.834.000	40%	28.938.174.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA
xx	02	43	Program Promosi, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit /PKM/RS	Tersedianya kegiatan promosi dan penyuluhan di lingkungan RS 10 paket	60%	-	-	75%	1.500.000.000	80%	1.650.000.000	85%	1.815.000.000	90%	1.996.500.000	90%	6.961.500.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA
xx	02	44	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat melalui terpeliharanya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	65%	-	-	75%	1.000.000.000	80%	1.000.000.000	85%	1.200.000.000	90%	1.500.000.000	90%	4.700.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA
02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	70%	70%	-	75%	1.000.000.000	80%	1.500.000.000	85%	1.500.000.000	90%	1.500.000.000	90%	5.500.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan di RS, Terakreditasinya rumah sakit 12 pelayanan	0%	-	-	75%	100.000.000	80%	100.000.000	85%	100.000.000	90%	150.000.000	90%	450.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA	
		Program Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Master Plan RS Pendidikan	0%	100%	-									100%	-	RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA	
		Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan	Terwujudnya kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	70%	-	-	75%	50.000.000	80%	50.000.000	85%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	300.000.000,00	RSUD DR. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA	
	03	Pekerjaan Umum															DINAS PEKERJAAN UMUM	
xx	03	16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	35.805 M'	1343 M'	4.000.000.000	1436 M'	4.263.000.000	1400 M'	4.476.150.000	1500 M'	5.035.680.000	1500 M'	5.287.500.000	7.179 M'	23.062.330.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx	03	18	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terciptanya kondisi jalan dan jembatan yang fungsional dan mempertahankan kondisi jalan dan jembatan	1.084,35 KM	1593,95 KM	23.893.412.956	1588,4 KM	112.061.620.000	1593,7 KM	112.435.535.000	1599,15 KM	112.820.032.500	1585,2 KM	113.599.610.000	7.960,40 KM	474.810.210.456,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx	03	24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rasio Jaringan Irigasi Luas irigasi dalam kondisi baik Luas Sawah tercetak	23 keg + 43.213 Ha + 3 bh	16 keg + 56.688 Ha + 6 bh	57.231.229.675	17 keg + 77.700 Ha + 8 bh	64.125.000.000	20 keg + 97.700 Ha + 10 bh	76.975.000.000	21 keg + 119.200 Ha + 12 bh	91.975.000.000	26 keg + 120.588 Ha + 12 bh	106.525.000.000	100 keg + 524.988 Ha + 48 bh	396.831.229.675,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx	03	25	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Terlaksananya pembangunan penyediaan air baku dan mikro hidro untuk masyarakat terencil, terselenggaranya OP prasarana air baku	2 bh	9 Buah	1.567.000.000	11 Buah	1.723.700.000	12 Buah	1.896.070.000	19 Buah	2.085.677.000	29 Buah	2.294.244.700	83 Buah	9.566.691.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx	03	26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Terlaksananya peringatan Hari Air Sedunia, terlaksananya kegiatan Fasilitas Komisi Irigasi Kalimantan Tengah dan Dewan Sumber Daya Air, terwujudnya pembangunan mikro hidro, terwujudnya pembangunan OP Prasarana Mikro Hidro.	2 keg + 2 unit	2 Keg + 2 Buah	325.000.000	2 Keg + 3 unit + 2 buah	357.500.000	2 Keg + 2 Unit + 5 Buah	393.250.000	2 Keg + 2 Unit + 7 Buah	432.575.000	2 Keg + 3 unit + 9 Buah	475.832.500	10 Keg + 10 Unit+ 25 Buah	1.984.157.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx	03	27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Terlaksananya pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi, tersedianya fasilitas persampahan dan air limbah.	73.629 m ² + 1 unit	17.500 M ² + 11 unit	4.863.435.000	19.000 M ² + 11 unit	5.140.000.000	19.000 M ² + 11 unit	5.625.000.000	20.000 M ² + 11 unit	6.438.000.000	21.000 M ² + 11 unit	7.286.200.000	96.500 M ² + 55 unit	29.352.635.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx	03	28	Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai	Terlaksananya pembangunan penguatan tebing, pembangunan pengamanan abrasi pantai, pembangunan pos hidrologi, OP Hidrologi, pembangunan pos AWLR, pembangunan pos klimatologi.	70 m + 3 bh + 4 unit	230 m + 7 Buah	5.426.170.325	1500 m + 17 buah + 10 unit	42.200.000.000	4500 M + 47 Buah + 20 unit	114.550.000.000	9000 M + 97 Buah + 35 Unit	224.150.000.000	15500 M + 172 Buah + 50 Unit	369.150.000.000	30730 M + 340 Buah + 115 unit	755.476.170.325,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx	03	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terlaksananya pembangunan trotoar dan median jalan, terpeliharanya jaringan drainase, terlaksananya dukungan PSD penataan lingkungan permukiman tradisional/bersejarah, terlaksananya dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh, terselenggaranya penataan geometrik bundaran-bundaran 1 kawasan, terlaksananya pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pembangunan tugu perbatasan.	-	613 M ² + 12000 M + 7 pkt	8.323.010.000	1000 M ² + 13000 M + 9 pkt	13.117.000.000	1000 M ² + 15000 M + 9 pkt	13.557.350.000	834 M ² + 17000 M + 9 pkt	15.266.820.000	18000 M + 9 PKT	15.509.100.000	3.447 M ² + 75000 M + 43 PKT	65.773.280.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx	03	30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Terselenggaranya kegiatan Bedah Kampung (Mamanguntung Mahaga Lewu), pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan /Agropolitan /Minapolitan.	32 desa + 11.507 M'	15 Desa + 3 PKT	7.605.695.450	30 Desa + 3 Paket	14.595.000.000	30 Desa + 3 Paket	15.324.750.000	30 Desa + 3 Paket	16.089.412.500	30 Desa + 3 Paket	16.893.358.125	135 Desa + 15 PKT	70.508.216.075,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx	03	34	Program Penggantian Jembatan Tersebar Di Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya penggantian dan pemeliharaan jembatan	1.354,42	2.183,72 m	-	2.333,72 m	7.500.000.000	2.533,72 m	10.000.000.000	2.633,72 m	5.000.000.000	2.708,72 m	3.750.000.000?	26.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
xx 03 35	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik di Bidang Infrastruktur	Terselenggaranya koordinasi pelaporan infrastruktur, SDA dan permukiman, terselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan infrastruktur dan aset , terlaksananya Sistem Aplikasi Kepegawaian, terselenggaranya Forum Konsultasi Perencanaan Program/Kegiatan Bidang PU Se-Kalimantan, terselenggaranya perencanaan sistem informasi bidang Infrastruktur, terwujudnya draf final program (RASK dan DASK) DPUP; Terselenggaranya pembinaan, penilaian dan pengendalian kinerja kontraktor dilingkungan Dinas PU Provinsi Kalimantan Tengah 1(satu) laporan; Terselenggaranya mutu pekerjaan bidang ke PU an (RMP, RMK dan K3 konstruksi) 210 orang, Terselenggaranya pendidikan dan latihan perencanaan irigasi dan daerah rawa 90 orang, Terselenggaranya pemeliharaan kalibrasi peralatan laboratorium Balai Pengujian . Terselenggaranya diklat tenaga laboratorium Balai Pengujian Dinas PU 1 (satu) paket, Terakreditasi Balai Pengujian 1 (satu) paket,	100%	100%	2.750.000.000	100%	3.025.000.000	100%	3.327.500.000	100%	3.660.250.000	100%	4.026.275.000	100%	16.789.025.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx 03 36	Program Perencanaan Dan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Provinsi Di Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya pengawasan teknis jalan dan jembatan.		1,0 kegiatan	4.096.537.286	1,0 kegiatan	2.342.000.000	1,0 kegiatan	1.476.200.000	1,0 kegiatan	1.623.820.000	1,0 kegiatan	1.785.122.000	1,0 kegiatan	11.323.679.286,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx 03 43	Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya peningkatan/pembangunan jalan.	164295 Km	49 Km	110.285.442.835	64,55 Km	211.401.250.000	71,25 Km	233.343.750.000	80,80 Km	264.620.000.000	86,75Km	284.106.250.000	352,35 Km	1.103.756.692.835,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx 03 15	Program Perencanaan Tata Ruang	• dokumen RTRWP	2 Dokumen (8%)	45%	400.000.000	18%	440.000.000	13%	484.000.000	10%	532.400.000	6%	511.895.000	100%	2.368.295.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx 03 16	Program Pemanfaatan Tata Ruang	• Dokumen rencana pengembangan kawasan strategis provinsi	5 Dokumen (5%)	38%	350.000.000	26%	385.000.000	14%	423.500.000	11%	2.730.300.000	6%	2.905.790.000	100%	6.794.590.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx 03 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	•Dokumen pengendalian RTRWP	15%	31%	1.250.000.000	22%	850.000.000	14%	1.275.000.000	10%	1.402.500.000	8%	1.542.750.000	100%	6.320.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx 03 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	• Panjang jalan dilalui Roda 4 menuju pemukiman • Panjang jalan dilalui Roda 4 menuju sentra industri rakyat • Jumlah jembatan yang menghubungkan antar daerah industri • Jalan Penghubung dari ibukota Provinsi dengan ibukota kabupaten, atau antar ibukota kabupaten, juga ibukota kabupaten dengan jalan nasional serta ke daerah strategis Provinsi/Pelabuhan	- Km	10 Km	11.231.188.519	12 Km	8.400.000	15 Km	10.500.000	17 Km	11.900.000	20 Km	14.000.000	74 Km	11.275.988.519,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx 03 29	Program Tanggap Darurat jalan dan jembatan	Tersedianya program/sumber daya peralatan pendanaan pada saat di perlukan	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx 03 22	Program Pembangunan Sistem Informasi/data base jalan dan jembatan	Terwujudnya sistem Informasi/data base jalan dan jembatan 1 paket	- Paket	-	-	1 Paket	750.000	1 Paket	825.000	1 Paket	907.500	1 Paket	998.250	4 Paket	3.480.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx 03 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	15 Paket	15 Paket	3.445.000.000	15 Paket	3.659.400.000	15 Paket	3.895.240.000	15 Paket	4.154.664.000	15 Paket	4.440.030.400	15 Paket	19.594.334.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx 03 2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5 Paket	5 Paket	1.696.060.000	5 Paket	1.759.315.000	5 Paket	1.759.315.000	5 Paket	1.759.315.000	5 Paket	1.759.315.000	25 Paket	8.733.320.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx 03 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terselenggaranya pengadaan baju dinas dan kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	210.000.000	1 Paket	210.000.000	1 Paket	210.000.000	1 Paket	210.000.000	1 Paket	210.000.000	5 Paket	1.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
xx	03	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Terselenggaranya pemulangan pegawai yang pensiun	1 Paket	1 Paket	700.000.000	1 Paket	700.000.000	1 Paket	700.000.000	1 Paket	700.000.000	1 Paket	700.000.000	5 Paket	3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx	03	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal, terlaksananya sosialisasi peraturan Perundang-Undangan, terlaksana bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-Undangan	3 Paket	3 Paket	105.000.000	3 Paket	105.000.000	3 Paket	105.000.000	3 Paket	105.000.000	3 Paket	105.000.000	15 Paket	525.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx	03	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran, terlaksananya penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran, terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun,	2 Paket + 3 Laporan	2 Paket + 3 Laporan	65.000.000	2 Paket + 3 Laporan	71.500.000	2 Paket + 3 Laporan	78.650.000	2 Paket + 3 Laporan	86.515.000	2 Paket + 3 Laporan	95.166.500	10 Paket + 15 Laporan	396.831.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx	03		Program Rehabilitasi / Pemeliharaan rutin Jalan dan Jembatan	Terlaksananya pemeliharaan jalan.	1.642,95 Km	1568,95 Km	-	1588,40 Km	112.061.620	1593,70 Km	112.435.535	1599,15 Km	112.820.033	1610,20 Km	113.599.610	7.960,40 Km	450.916.797,50	DINAS PEKERJAAN UMUM
xx	04		Program pembangunan rumah ibadah dan fasilitas sosial	* Rasio rumah sakit per satuan penduduk * Rasio rumah ibadah per satuan penduduk			1.000.000.000									1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
		06	Perencanaan Pembangunan													-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
xx	06	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi 5 tahun, operasional rutin kantor 5 paket, ATK 5 paket, rapat-rapat koordinasi, konsultasi keluar daerah 5 paket	1 Paket	1 paket	2.146.990.500	1 paket	2.254.340.025	1 paket	2.367.057.026	1 paket	2.485.409.878	1 paket	2.609.680.371	5 paket	11.863.477.800,25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan gedung paket, perlengkapan, peralatan gedungpaket	1 paket	1 paket	950.000.000	1 paket	997.500.000	1 paket	1.047.375.000	1 paket	1.099.743.750	1 paket	1.154.730.938	5 paket	5.249.349.687,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 5 paket	1 paket	1 paket	104.994.500	1 paket	110.244.225	1 paket	115.756.436	1 paket	121.544.258	1 paket	127.621.471	5 paket	580.160.890,28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Pembayaran biaya pemulangan orang	1 paket	1 paket	200.000.000	1 paket	210.000.000	1 paket	220.500.000	1 paket	231.525.000	1 paket	243.101.250	5 paket	1.105.126.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja 5 paket, dokumen laporan keuangan 5 kali.	1 paket	1 paket	110.000.000	1 paket	115.500.000	1 paket	121.275.000	1 paket	127.338.750	1 paket	133.705.688	5 paket	607.819.437,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	15	Program Pengembangan data/informasi	data dan informasi pembangunan	1 paket	1 paket	2.640.000.000	1 paket	2.772.000.000	1 paket	2.910.600.000	1 paket	3.056.130.000	1 paket	3.208.936.500	5 paket	14.587.666.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	16	Program Kerjasama Pembangunan	Dokumen kerjasama pembangunan	1 paket	1 paket	100.000.000	1 paket	110.000.000	1 paket	121.000.000	1 paket	133.100.000	1 paket	146.410.000	5 paket	610.510.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	29	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Dokumen perumusan kebijakan, Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1 paket	1 paket	200.000.000	1 paket	220.000.000	1 paket	242.000.000	1 paket	266.200.000	1 paket	292.820.000	5 paket	1.221.020.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah pegawai terlatih	1 paket	1 paket	200.855.000	1 paket	220.940.500	1 paket	243.034.550	1 paket	267.338.005	1 paket	294.071.806	5 paket	1.226.239.860,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Dokumen perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan daerah	1 paket	1 paket	4.178.416.991	1 paket	4.596.258.690	1 paket	5.055.884.559	1 paket	5.561.473.015	1 paket	6.117.620.317	5 paket	25.509.653.571,75	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)
xx	06	22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Dokumen perumusan kebijakan, perencanaan bidang ekonomi	1 paket	1 paket	300.000.000	1 paket	330.000.000	1 paket	363.000.000	1 paket	399.300.000	1 paket	439.230.000	5 paket	1.831.530.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Dokumen perumusan kebijakan, perencanaan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 paket	1 paket	820.000.000	1 paket	902.000.000	1 paket	992.200.000	1 paket	1.091.420.000	1 paket	1.200.562.000	5 paket	5.006.182.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	26	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Dokumen hasil penelitian dan Pengembangan IPTEK	1 paket	1 paket	195.000.000	1 paket	214.500.000	1 paket	235.950.000	1 paket	259.545.000	1 paket	285.499.500	5 paket	1.190.494.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	27	Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK	Dokumen laporan difusi dan pemanfaatan IPTEK	1 paket	1 paket	145.000.000	1 paket	159.500.000	1 paket	175.450.000	1 paket	192.995.000	1 paket	212.294.500	5 paket	885.239.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	28	Program Penguatan Kelembagaan IPTEK		1 paket	1 paket	130.000.000	1 paket	143.000.000	1 paket	157.300.000	1 paket	173.030.000	1 paket	190.333.000	5 paket	793.663.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	29	Program Penataan Ruang Wilayah	Dokumen koordinasi penataan ruang	1 paket	1 paket	562.510.000	1 paket	618.761.000	1 paket	680.637.100	1 paket	748.700.810	1 paket	823.570.891	5 paket	3.434.179.801,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	30	Program Perencanaan Pembangunan SDM	Dokumen perumusan kebijakan, perencanaan bidang pengembangan ekonomi	1 paket	1 paket	222.000.000	1 paket	244.200.000	1 paket	268.620.000	1 paket	295.482.000	1 paket	325.030.200	5 paket	1.355.332.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	31	Program Perencanaan Pembangunan KESRA	Dokumen perumusan kebijakan, perencanaan bidang pengembangan ekonomi	1 paket	1 paket	530.000.000	1 paket	583.000.000	1 paket	641.300.000	1 paket	705.430.000	1 paket	775.973.000	5 paket	3.235.703.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	32	Program Perencanaan Pembangunan Kependudukan dan Tenaga Kerja	Dokumen perumusan kebijakan, perencanaan bidang pengembangan ekonomi	1 paket	1 paket	100.000.000	1 paket	110.000.000	1 paket	121.000.000	1 paket	133.100.000	1 paket	146.410.000	5 paket	610.510.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	33	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Dokumen perumusan kebijakan, perencanaan bidang pengembangan ekonomi	1 paket	1 paket	500.000.000	1 paket	550.000.000	1 paket	605.000.000	1 paket	665.500.000	1 paket	732.050.000	5 paket	3.052.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	34	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal	Dokumen perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan daerah tertinggal	1 paket	1 paket	200.000.000	1 paket	220.000.000	1 paket	242.000.000	1 paket	266.200.000	1 paket	292.820.000	5 paket	1.221.020.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	35	Program pengembangan cluster ekonomi	• PDRB • Jumlah Cluster	-	-	-	1 paket	1.783.000.000	1 paket	1.961.300.000	1 paket	2.157.430.000	1 paket	2.373.173.000	4 paket	8.274.903.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	36	Program penyiapan Kota Palangka Raya sebagai pusat pemerintahan NKRI	• Dokumen RTRW Kota Palangka Raya • Gerakan masyarakat • Dokumen RDTR kota Palangka Raya	-	-	-	1 paket	890.000.000	1 paket	979.000.000	1 paket	1.076.900.000	1 paket	1.184.590.000	4 paket	4.130.490.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	37	Program Perencanaan pengembangan ekonomi	Dokumen perumusan kebijakan, perencanaan pengembangan ekonomi	-	-	-	1 paket	230.000.000	1 paket	253.000.000	1 paket	278.300.000	1 paket	306.130.000	4 paket	1.067.430.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	38	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Dokumen perumusan kebijakan, perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	-	-	-	1 paket	500.500.000	1 paket	550.550.000	1 paket	605.605.000	1 paket	666.165.500	4 paket	2.322.820.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
xx	06	39	Program perencanaan sosial dan budaya	Dokumen perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	-	-	-	1 paket	215.000.000	1 paket	236.500.000	1 paket	260.150.000	1 paket	286.165.000	4 paket	997.815.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	07		Perhubungan														-	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)
xx	07	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terlaksananya Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan	18 Paket Kegiatan baik Study, design maupun Amdal	16 Paket	2.882.600.000	16 Paket	3.898.230.000	16 Paket	4.093.141.500	16 Paket	4.297.798.575	16 Paket	4.512.688.504	16 Paket	19.684.458.579,00	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	17	Program Peningkatan pelayanan angkutan	Tersedianya Pelayanan Angkutan Penumpang	70 Paket (33 Kegiatan terlaksana)	20 Paket	3.467.400.000	20 Paket	3.786.640.000	20 Paket	4.165.304.000	20 Paket	4.581.834.400	20 Paket	5.040.017.840	20 Paket	21.041.196.240,00	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terlaksananya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	49 Paket (40 kegiatan Terlaksana)	33 Paket	8.540.000.000	33 Paket	9.394.000.000	33 Paket	10.333.400.000	33 Paket	11.366.740.000	33 Paket	12.503.414.000	33 Paket	52.137.554.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Terlaksananya Kegiatan Fasilitas keselamatan Lalu Lintas Jalan	9 Paket (4 Kegiatan Terlaksana)	2 Paket	450.000.000	2 Paket	495.000.000	2 Paket	544.500.000	2 Paket	598.950.000	2 Paket	658.845.000	10 Paket	2.747.295.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	21	Program Sistem Informasi bidang transportasi jalan	Tersedianya Peraturan dan Informasi mengenai transportasi darat	Baru dilaksanakan 0%	1 Paket	50.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	60.500.000	1 Paket	66.550.000	1 Paket	73.205.000	1 Paket	305.255.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	22	Program peningkatan Aksesibilitas pelayanan angkutan LLAJ	Tersedianya fasilitas sarana pendukung transportasi jalan	Baru dilaksanakan 0%	-	-	1 Paket	362.000.000	1 Paket	398.200.000	1 Paket	438.020.000	1 Paket	481.822.000	1 Paket	1.680.042.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	23	Program Penataan dan manajemen Rekamaya Lalu Lintas	Terlaksananya kegiatan penataan dan manajemen Rekamaya Lalu Lintas	1 paket (1 kegiatan)	1 Paket	200.000.000	1 Paket	400.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	550.000.000	1 Paket	605.000.000	1 Paket	2.255.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	24	Program Pengadaan fasilitas operasional kendaraan bermotor	Tersedianya fasilitas operasional kendaraan bermotor	Baru dilaksanakan 0%	-	-	5 Paket	1.500.000.000	-	1.650.000.000	-	1.815.000.000	-	1.996.500.000	5Paket	6.961.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	25	Program Peningkatan Kelembagaan dan kualitas aparatur	Tersedianya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	5 Keg. Terlaksana	-	-	1 tahun	470.000.000	1 tahun	517.000.000	1 tahun	568.700.000	1 tahun	625.570.000	5 Keg.	2.181.270.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	26	Program penyelenggaraan sosialisasi seminar, publikasi dan workshop	Terlaksananya Sosialisasi seminar, publikasi dan workshop	5 Paket Terlaksana	2 Paket	99.200.000	1 Paket	109.120.000	1 Paket	120.032.000	1 Paket	132.035.200	1 Paket	145.238.720	5 Paket Terlaksana	605.625.920,00	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	27	Program Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	Tersedianya fasilitas keselamatan jalan	24 Paket Keg.	5 Paket	1.385.000.000	9 Paket	1.523.500.000	9 Paket	1.675.850.000	9 Paket	1.843.435.000	9 Paket	2.027.778.500	45 Paket	8.455.563.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	28	Program penyusunan sistem transportasi	Perda/Perkada Sistem transportasi	2 paket	-	-	4 paket	1.695.000.000	4 paket	1.864.500.000	4 paket	2.050.950.000	4 paket	2.256.045.000	16 Paket Kegiatan	7.866.495.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	29	Program pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah terminal bus, halte, dermaga pelabuhan, dan bandara	-	-	-	5 paket	1.380.000.000	5 paket	2.070.000.000	5 paket	2.277.000.000	5 paket	2.504.700.000	20 paket	8.231.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	30	Program peningkatan pelayanan perhubungan	Jumlah penumpang yang di layani per-tahun	-	-	-	5 paket	855.000.000	5 paket	1.282.500.000	5 paket	1.410.750.000	5 paket	1.551.825.000	20 paket	5.100.075.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	31	Program Peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah perencanaan/study, sarana dan prasarana transportasi	18 Paket	-	-	5 paket	708.000.000	10 Paket	1.062.000.000	10 Paket	1.168.200.000	10 Paket	1.285.020.000	35 paket	4.223.220.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	32	Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas	Tersedianya fasilitas keselamatan jalan	Keg. Baru	-	-	1 Paket	300.000.000	1 Paket	330.000.000	1 Paket	363.000.000	1 Paket	399.300.000	4 Paket	1.392.300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	23	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Tersedianya peningkatan pelaksanaan di bidang TI	Keg. Baru	5 Paket	2.375.000.000	5 Paket	2.612.500.000	5 Paket	2.873.750.000	5 Paket	3.161.125.000	5 Paket	3.477.237.500	25 Paket	14.499.612.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	tersedianya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	14 paket (12 kegiatan)	7 Paket	875.000.000	13 Paket	918.750.000	13 Paket	964.687.500	13 Paket	1.012.921.875	13 Paket	1.063.567.969	13 Paket	4.834.927.343,75	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	16	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	tersedianya pengkajian dan penelitian dibidang komunikasi dan informasi	7 Paket (6 kegiatan)	1 Paket	50.000.000	2 Paket	150.000.000	2 Paket	165.000.000	2 Paket	181.500.000	2 Paket	199.650.000	9 Paket	746.150.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Tersedianya Peningkatan SDM di Bidang Teknologi Informatika	1 paket (1 kegiatan)	-	-	2 paket (2 kegiatan)	490.000.000	2 paket (2 kegiatan)	539.000.000	2 paket (2 kegiatan)	592.900.000	2 paket (2 kegiatan)	652.190.000	2 Paket (8 kegiatan)	2.274.090.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	18	Program kerjasama informasi dan media massa	Tersedianya Informasi dan media massa	2 paket (2 kegiatan)	6 Paket	400.000.000	6 Paket	440.000.000	6 Paket	484.000.000	6 Paket	532.400.000	6 Paket	585.640.000	6 Paket	2.442.040.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	19	Program pengembangan pos, telekomunikasi dan informatika	Tersedianya pengembangan pos, telekomunikasi dan informatika	3 paket (3 kegiatan terlaksana)	4 Paket	150.000.000	4 Paket	165.000.000	4 Paket	181.500.000	4 Paket	199.650.000	4 Paket	219.615.000	4 Paket	915.765.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	20	Program penyusunan sistem Komunikasi dan Informatika	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informatika	Keg. Baru	1 Paket	-	1 Paket	1.200.000.000	1 Paket	1.320.000.000	1 Paket	1.452.000.000	1 Paket	1.597.200.000	5 Paket	5.569.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	21	Program pembangunan jaringan komunikasi dan informatika	Jumlah daerah/desa yang terlayani jaringan telepon	Keg. Baru	1 Paket	-	1 Paket	1.332.000.000	1 Paket	1.998.000.000	1 Paket	2.197.800.000	1 Paket	2.417.580.000	5 Paket	7.945.380.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
xx	07	22	Program pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana komunikasi dan Informatika	Jumlah tower komunikasi	Keg. Baru	-	-	-	1.082.000.000	1 Paket	1.623.000.000	1 Paket	1.785.300.000	1 Paket	1.963.830.000	5 Paket	6.454.130.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
xx 07 23	Program rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	Jumlah perbaikan-perbaikan terhadap sarana dan prasarana komunikasi	Keg. Baru	1 Paket	-	1 Paket	988.500.000	1 Paket	1.482.750.000	1 Paket	1.631.025.000	1 Paket	1.794.127.500	5 Paket	5.896.402.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
xx 07 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	18 Kegiatan Terlaksana	1 Tahun	2.158.100.000	1 tahun	2.266.005.000	1 tahun	2.379.305.250	1 tahun	2.498.270.513	1 tahun	2.623.184.038	18 Kegiatan Terlaksana	11.924.864.800,63	DINAS PERHUBUNGAN
xx 07 2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	13 Paket (5 Kegiatan Terlaksana)	7 Paket	675.000.000	7 Paket	708.750.000	7 Paket	744.187.500	7 Paket	781.396.875	7 Paket	820.466.719	35 Paket (35 kegiatan)	3.729.801.093,75	DINAS PERHUBUNGAN
xx 07 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	terlaksananya disiplin aparatur	13 Paket (5 Kegiatan Terlaksana)	1 tahun	88.200.000	1 tahun	92.610.000	1 tahun	97.240.500	1 tahun	102.102.525	1 tahun	107.207.651	1 tahun (10 Kegiatan)	487.360.676,25	DINAS PERHUBUNGAN
xx 07 4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Tersedianya fasilitas purna tugas PNS	5 tahun (10 orang pemulangan Pegawai)	1 tahun	155.000.000	1 Lokasi	162.750.000	1 lokasi	170.887.500	1 lokasi	179.431.875	1 lokasi	188.403.469	1 tahun (1 Kegiatan)	856.472.843,75	DINAS PERHUBUNGAN
xx 07 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya SDM aparatur	5 Tahun (5 kegiatan diklat)	1 tahun	75.000.000	1 tahun	78.750.000	1 tahun	82.687.500	1 tahun	86.821.875	1 tahun	91.162.969	5 tahun 5 kegiatan diklat terlaksana	414.422.343,75	DINAS PERHUBUNGAN
xx 07 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya pengembangan laporan capaian kinerja keuangan	17 Laporan (4 Kegiatan Terlaksana)	1 tahun	105.000.000	1 tahun	110.250.000	1 tahun	115.762.500	1 tahun	121.550.625	1 tahun	127.628.156	20 kegiatan Pelaporan terlaksana	580.191.281,25	DINAS PERHUBUNGAN
xx 07 19	Program Fasilitas keselamatan lalu lintas	Peningkatan keselamatan pengguna jalan	10 paket	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-	5 Paket	-	DINAS PERHUBUNGAN
08	Lingkungan Hidup															
xx 08 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran selama lima tahun, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi 5 paket, operasional rutin kantor 5 paket, ATK 5 paket, rapat-rapat koordinasi, konsultasi keluar daerah 5 paket	10 Kegiatan	80%	962.150.000	85%	1.010.257.500	85%	1.060.770.375	80%	1.113.808.894	100%	1.169.499.338	100%	5.316.486.107,19	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
xx 08 2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan gedung 5 paket, perlengkapan, peralatan gedung 5 paket	6 Kegiatan	80%	228.000.000	85%	239.400.000	85%	251.370.000	80%	263.938.500	100%	277.135.425	100%	1.259.843.925,00	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
xx 08 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 5 paket	1 Keg belum terlaksana	80%	44.772.000	85%	47.010.600	85%	49.361.130	80%	51.829.187	100%	54.420.646	100%	247.393.562,33	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
xx 08 4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Pembayaran biaya pemulangan 8 orang.	2 orang	80%	35.000.000	85%	36.750.000	85%	38.587.500	80%	40.516.875	100%	42.542.719	100%	193.397.093,75	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
xx 08 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelaksanaan bimtek 250 orang, dan diklat 20 orang	2 Keg terlaksana, 1 Keg tidak terlaksana	80%	140.000.000	85%	147.000.000	85%	154.350.000	80%	162.067.500	100%	170.170.875	100%	773.588.375,00	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
xx 08 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja 5 paket, dokumen laporan keuangan 5 kali.	1 Keg terlaksana	80%	16.850.000	85%	17.692.500	85%	18.577.125	80%	19.505.981	100%	20.481.280	100%	93.106.886,56	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
xx 08 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Data kualitas air Data kualitas udara Data limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3).	Kualitas air ringan-buruk, kualitas udara baik, data B3 belum ada, 1 keg tidak terlaksana	80%	670.943.000	85%	738.037.300	85%	811.841.030	80%	893.025.133	100%	982.327.646	100%	4.096.174.109,30	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
xx 08 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terjaganya kelestarian sumberdaya alam pada 6 Kabupaten pesisir, tersedianya 5 paket data ekowisata & jasa lingkungan, 5 paket data kerusakan hutan & lahan, 4 paket kawasan konservasi tangkapan air, 5 paket keanekaragaman hayati, 140 orang partisipan, 5 paket HoB, 11 DAS, 5 paket masyarakat hukum adat, 5 paket perubahan iklim	Data kerusakan SDA belum tersedia lengkap, kawasan konservasi data belum lengkap, 3 keg, 1 tidak terlaksana	80%	442.561.100	85%	486.817.210	85%	535.498.931	80%	589.048.824	100%	647.953.707	100%	2.701.879.771,61	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
08 18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Pulihnya cadangan sumberdaya alam melalui kegiatan 4 paket terumbu karang dan padang lamun, 4 paket data rehabilitasi hutan dan lahan, 6 paket partisipasi terumbu karang dan mangrove,	Data dan informasi belum lengkap	-	-	85%	500.000.000	85%	600.000.000	80%	600.000.000	100%	-	100%	1.700.000.000,00	BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
xx	08	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	• Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) • Dokumen KLHS, NSDA	Belum ada dokumen KLHS dan RPPLH, 9 kegiatan 2 tidak terlaksana	80%	892.870.000	85%	982.157.000	85%	1.080.372.700	80%	1.188.409.970	85%	1.307.250.967	100%	5.451.060.637,00	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
	08	21	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan	Berkembangnya ekowisata dan jasa lingkungan melalui penyediaan 4 paket data ekowisata dan jasa lingkungan, 4 paket kegiatan konservasi laut dan hutan wisata	3 kegiatan, 2 tidak terlaksana	80%	-	85%	200.000.000	85%	200.000.000	80%	200.000.000	80%		100%	600.000.000,00	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
xx	08	22	Program Pengendalian kebakaran hutan	Menurunnya frekuensi kebakaran hutan melalui kegiatan 1 paket koordinasi, 1 paket data rawan bencana kebakaran hutan	5 kegiatan, 1 tidak terlaksana	80%	141.180.000	85%	155.298.000	85%	170.827.800	80%	187.910.580	100%	206.701.638	100%	861.918.018,00	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
xx	08	23	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Meningkatnya produktifitas ekosistem wilayah pesisir secara berkelanjutan melalui kegiatan dan penyediaan 4 paket data rehabilitasi & pengelolaan ekosistem pesisir & laut, 4 paket data manajemen pesisir dan laut, 5 paket koordinasi, 5 paket data kerusakan pesisir, data base pesisir 5 paket	3 kegiatan, 2 tidak terlaksana	80%	177.000.000	85%	194.700.000	85%	214.170.000	80%	235.587.000	100%	259.145.700	100%	1.080.602.700,00	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
	08	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya kapasitas pengelolaan RTH melalui penyediaan 1 paket dokumen kebijakan pengelolaan RTH, 1 paket data pengawasan dan pengendalian RTH.	Belum ada data	0%	-	85%	75.000.000	85%	75.000.000	80%	75.000.000	100%		100%	225.000.000,00	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
xx	08	25	Program Penataan Hukum/Peraturan Perundang-undangan LH	Terwujudnya system hukum/peraturan perundangan yang tertata di bidang LH melalui 5 paket kegiatan komisi Tim Penilai AMDAL, 5 paket penyelesaian kasus lingkungan hidup, 75 perusahaan yang diawasi dan dipantau sesuai UU LH.	4 keg terlaksana	80%	447.000.000	85%	491.700.000	85%	540.870.000	80%	594.957.000	100%	654.452.700	100%	2.728.979.700,00	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
	08	26	Program Mitigasi dan Adaptasi bencana serta Perubahan Iklim	• Operasionalisasi Komda REDD • Operasionalisasi Dewan Daerah Perubahan Iklim	Belum ada data	80%	-	85%	300.000.000	85%	300.000.000	80%	300.000.000	100%		100%	900.000.000,00	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
	08	27	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Terkendalinya polusi melalui tersedianya data polusi udara daerah industri 4 paket, data kadar polusi limbah padat dan limbah cair 4 paket	Belum ada data	0%	-	85%		85%		80%		100%		100%	-	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
																	-	
	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														-	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
xx	11	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi surat menyurat, komunikasi, sumber daya air, listrik pemeliharaan kesehatan, asuransi barang milik daerah, administrasi keuangan, kebersihan	100%	100%	687.108.100	100%	721.463.505	100%	757.536.680	100%	795.413.514	100%	835.184.190	100%	3.796.705.989,49	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
xx	11	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan, sarana dan prasarana aparatur yang meliputi perlengkapan gedung, meubelair	60%	65%	717.600.800	75%	753.480.840	80%	791.154.882	85%	830.712.626	90%	872.248.257	90%	3.965.197.405,51	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
xx	11	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya disiplin aparatur melalui penyediaan pakaian dinas	100%	100%	49.000.000	100%	51.450.000	100%	54.022.500	100%	56.723.625	100%	59.559.806	100%	270.755.931,25	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
xx	11	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Terfasilitasinya purna tugas pegawai	100%	100%	125.000.000	100%	131.250.000	100%	137.812.500	100%	144.703.125	100%	151.938.281	100%	690.703.906,25	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
xx	11	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur melalui Diklat dan pelatihan	100%	100%	140.000.000	147.000.000	100%	154.350.000	100%	162.067.500	100%	170.170.875	100%	773.588.375,00	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
xx	11	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen laporan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	100%	94.570.000	99.298.500	100%	104.263.425	100%	109.476.596	100%	114.950.426	100%	522.558.947,31	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
xx	11	7	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Terlaksananya keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan, melalui pelaksanaan rakorda	100%	100%	145.321.900	152.587.995	100%	160.217.395	100%	168.228.264	100%	176.639.678	100%	802.995.231,95	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
xx	11	8	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya penguatan kelembagaan PUG melalui fasilitasi P2TP2A, Pelaksanaan PUG, publikasi, promosi dan penyebaran informasi tentang pemberdayaan perempuan, Anak dan KB	100%	100%	784.618.200	863.080.020	100%	949.388.022	100%	1.044.326.824	100%	1.148.759.507	100%	4.790.172.572,82	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
xx	11	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan melalui TOT Pelayanan dan pendampingan KDRT, Nikah massal, bimbingan manajemen usaha, penyuluhan dll.	100%	100%	297.576.000	327.333.600	100%	360.066.960	100%	396.073.656	100%	435.681.022	100%	1.816.731.237,60	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
xx	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dengan pameran pembangunan	100%	100%	34.000.000	37.400.000	100%	41.140.000	100%	45.254.000	100%	49.779.400	100%	207.573.400,00	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
xx	11	20	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak dengan perencanaan, koordinasi, fasilitasi HAN	100%	100%	222.000.000	244.200.000	100%	268.620.000	100%	295.482.000	100%	325.030.200	100%	1.355.332.200,00	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
xx	11	21	Program Penyusunan Profil Lembaga	Tersedianya profil lembaga dan berbagai data beserta analisisnya	100%	100%	141.705.000	155.875.500	100%	171.463.050	100%	188.609.355	100%	207.470.291	100%	865.123.195,50	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
xx	11	15	Program Keluarga Berencana	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja	100%	100%	261.500.000	274.575.000	100%	288.303.750	100%	302.718.938	100%	317.854.884	100%	1.444.952.571,88	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
xx	11	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya pemahaman, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksi dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang	100%	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
xx	11	18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Meningkatnya keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja, melalui Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB; Terlaksananya koordinasi dan monitoring	100%	100%	27.500.000	30.250.000	100%	33.275.000	100%	36.602.500	100%	40.262.750	100%	167.890.250,00	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Program Pelayanan Kontrasepsi	Meningkatnya kualitas pelayanan Kontrasepsi, melalui terselenggaranya pemasangan kontrasepsi mantap; yersedianya alat dan obat kontrasepsi sesuai kebutuhan terutama bagi keluarga miskin	78,37%	-	-	79%	125.000.000	805%	180.000.000	81%	200.000.000	82%	250.000.000	82%	755.000.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat	Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui Terselenggaranya fasilitasi Revitalisasi dan Lomba Gerakan Sayang Ibu; Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang pemanfaatan ASI	20%	-	-	24%	120.000.000	26%	150.000.000	28%	200.000.000	30%	250.000.000	30%	720.000.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR	Terlaksananya Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR, melalui Terselenggarakannya sosialisasi tentang PIK-KRR; Terlaksananya pelatihan bagi fasilitator PIK-KRR; Terlaksananya kegiatan koordinasi dan monitoring pelaksanaan program KRR dan PIK-KRR	98,86%	-	-	99%	100.000.000	99%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	500.000.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Terlaksananya pelatihan/ penyuluhan/ sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS dan NAPZA bagi kelompok perempuan	20%	-	-	20%	50.000.000	20%	50.000.000	20%	50.000.000	20%	50.000.000	80%	200.000.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
	Program Pengembangan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Tersedianya bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	81%	-	-	82%	135.000.000	83%	155.000.000	84%	167.000.000	85%	200.000.000	85%	657.000.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Tersedianya Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga melalui Rekrutmen tenaga Kelompok Bina Keluarga	47%	-	-	47%	125.000.000	48%	200.000.000	49%	200.000.000	50%	250.000.000	50%	775.000.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Padu	Tersedianya Model Operasional BKB-Posyandu-Padu	60%	-	-	60%	100.000.000	62%	110.000.000	64%	130.000.000	66%	150.000.000	70%	490.000.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
13	Sosial																	
xx	13	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi 60 bulan/5 gedung, operasional rutin kantor 60 bulan, ATK 60 bulan, rapat-rapat koordinasi, konsultasi keluar daerah 60 bulan	100%	100%	733.407.500	100%	770.077.875	100%	808.581.769	100%	849.010.857	100%	891.461.400	100%	4.052.539.400,98	DINAS SOSIAL
xx	13	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan gedung 60 paket/5 gedung, perlengkapan peralatan gedung 5 paket	60%	65%	193.192.500	75%	202.852.125	80	212.994.731	85%	223.644.468	90%	234.826.691	90%	1.067.510.515,27	DINAS SOSIAL
xx	13	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 820 stel/5 paket	100%	100%	42.000.000	100%	44.100.000	100%	46.305.000	100%	48.620.250	100%	51.051.263	100%	232.076.512,50	DINAS SOSIAL
xx	13	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Pembayaran biaya pemulangan 25 orang	100%	100%	130.000.000	100%	136.500.000	100%	143.325.000	100%	150.491.250	100%	158.015.813	100%	718.332.062,50	DINAS SOSIAL
xx	13	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelaksanaan bimtek 75 orang, kegiatan olahraga karyawan 10 kali	75%	80%	15.000.000	85%	15.750.000	90%	16.537.500	95%	17.364.375	100%	18.232.594	100%	82.884.468,75	DINAS SOSIAL
xx	13	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja 5 paket, dokumen laporan keuangan 60 kali	100%	100%	6.000.000	100%	6.300.000	100%	6.615.000	100%	6.945.750	100%	7.293.038	100%	33.153.787,50	DINAS SOSIAL
xx	13	7	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin di 25 Lokasi, Pemberdayaan warga KAT di 10 Lokasi	70%	75%	85.000.000	80%	89.250.000	85%	93.712.500	90%	98.398.125	95%	103.318.031	95%	469.678.656,25	DINAS SOSIAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
xx	13	8	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, antara lain melalui: Bimbingan 600 Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, pendataan 10 paket, bimbingan sosial 10 kali, renovasi gedung 2 paket, Sarana dan prasarana 4 Paket	75%	80%	1.180.000.000	85%	1.298.000.000	90%	1.427.800.000	95%	1.570.580.000	100%	1.727.638.000	100%	7.204.018.000,00	DINAS SOSIAL
xx	13	9	Program pembinaan anak terlantar	Terlaksananya pembinaan anak terlantar di 25 Lokasi	75%	80%	20.000.000	85%	22.000.000	90%	24.200.000	95%	26.620.000	100%	29.282.000	100%	122.102.000,00	DINAS SOSIAL
xx	13	10	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Terlaksananya pembinaan para penyandang cacat dan trauma, melalui: pelatihan dan pengembangan bakat 200 orang, pendataan 5 paket.	75%	80%	100.000.000	85%	110.000.000	90%	121.000.000	95%	133.100.000	100%	146.410.000	100%	610.510.000,00	DINAS SOSIAL
xx	13	11	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Terlaksananya pelayanan sosial bagi 100 orang per tahun di PSTW Sinta Rangkang	100 orang	100 orang	1.024.500.000	100 orang	1.126.950.000	100 orang	1.239.645.000	100 orang	1.363.609.500	100 orang	1.499.970.450	100 orang	6.254.674.950,00	DINAS SOSIAL
xx	13	12	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Terselenggaranya bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 325 (Loka Bina Karya, Bimbingan Naoza)	65 Orang	65 Orang	130.000.000	65 Orang	143.000.000	65 Orang	214.500.000	65 Orang	235.950.000	65 Orang	259.545.000	325	982.995.000,00	DINAS SOSIAL
xx	13	13	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya perekutan, pembinaan manajer sosial kecamatan 33, organisasi sosial 10, Karang Taruna 250, Wahana Kesejahteraan sosial 3 Paket, PMI 300 Orang, Tali asih 17 Agustus 3.140Orang dan 10 Nopember 330 Orang	75%	80%	1.699.000.000	85%	1.868.900.000	90%	2.055.790.000	95%	2.261.369.000	100%	2.487.505.900	100%	10.372.564.900,00	DINAS SOSIAL
	13	14	Program Bantuan Sosial Korban Bencana Alam	Tersalurinya bantuan sosial untuk korban bencana alam di 14 Kabupaten/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/ Kota	-	14 Kab/ Kota	110.000.000	14 Kab/ Kota	120.000.000	14 Kab/ Kota	130.000.000	14 Kab/ Kota	140.000.000	14 Kab/ Kota	500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	13	15	Program Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial	Tersalurinya bantuan sosial untuk korban bencana sosial di 14 Kabupaten/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/ Kota	-	14 Kab/ Kota	25.000.000	14 Kab/ Kota	30.000.000	14 Kab/ Kota	35.000.000	14 Kab/ Kota	40.000.000	14 Kab/ Kota	130.000.000,00	DINAS SOSIAL
	13	16	Program PKH	Peningkatan dan Akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi di 14 Kabupaten/Kota	2 Kab/Kota	2 Kab/ Kota	-	4 Kab/ Kota	30.000.000	8 Kab/ Kota	35.000.000	14 Kab /Kota	40.000.000	14 Kab /Kota	45.000.000	14 Kab /Kota	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	13	17	Program Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial Penanggulangan Bencana	Jumlah SK penyelenggaraan undian berhadiah 25 Keg	4 Keg.			6	20.000.000	6	20.000.000	6	25.000.000	7	25.000.000	25	90.000.000,00	DINAS SOSIAL
	13																	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
xx	13	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi 5 paket, operasional rutin kantor 5 paket, ATK 5 paket, rapat-rapat koordinasi, konsultasi keluar daerah 5 paket	Kantor baru 0%	65%	315.092.075	70%	330.846.679	75%	347.389.013	80%	364.758.463	85%	382.996.386	85%	1.741.082.616,25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
xx	13	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan gedung 5 paket, perlengkapan, peralatan gedung 5 paket	Kantor baru 0%		480.100.000		504.105.000		529.310.250		555.775.763		583.564.551		2.652.855.563,13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	13	4	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS				35.000.000											BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
xx	13	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan, Sosialisasi, Bimtek	Kantor baru 0%	65%	61.239.750	70%	64.301.738	75%	67.516.824	80%	70.892.666	85%	74.437.299	85%	338.388.276,34	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
xx	13	23	Dukungan Manajemen dan Teknis Penanggulangan Bencana sesuai dengan prosedur/ketentuan di 14 Kabupaten/Kota	Terlaksananya program kegiatan Penanggulangan Bencana sesuai dengan prosedur/ketentuan di 14 Kabupaten/Kota	Kantor baru 0%	65%	91.273.300	70%	100.400.630	75%	110.440.693	80%	121.484.762	85%	133.633.239	85%	557.232.623,83	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
xx	13	24	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Terlaksananya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam di 14 kab/kota selama setahun, melalui: penyebaran informasi, 1 paket tersedianya tempat penampungan sementara dan evakuasi, sarana dan prasarana evakuasi, 20 unit simulasi, brosur peraturan perundangan, 1 kegiatan	-	65%	84.307.375	70%	92.738.113	75%	102.011.924	80%	112.213.116	85%	123.434.428	85%	514.704.955,11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
xx	13	25	Tanggap Darurat	Terlaksananya penanganan korban bencana setiap tahun di 14 kab/kota, antara lain: kajian lokasi dan kerusakan, posko siaga, 1 buah penyaluran bantuan, pengadaan logistik dan obat-obatan, 1 kegiatan pemulihan dan penerangan SDM, logistik, barang dan jasa. 1 kegiatan	-	65%	115.737.500	70%	127.311.250	75%	140.042.375	80%	154.046.613	85%	169.451.274	85%	706.589.011,25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
xx	13	26	Paska Bencana	Tertanganinya masyarakat dan sarana serta prasarana pasca bencana di 14 kab/kota setiap tahun, meliputi: Buku rencana rehab rekon 1 paket, obyek pendataan, koordinasi rehabilitasi, rekonstruksi 14 Kabupaten, serta jumlah dan partisipasi meningkat. 50 orang	-	65%	67.250.000	70%	73.975.000	75%	81.372.500	80%	89.509.750	85%	98.460.725	85%	410.567.975,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
xx	13	27	Program rehabilitasi dan rekonstruksi	Terlaksananya koordinasi untuk 8 lokasi rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana di 14 kab/kota setiap tahun	-	2	-	80%	1.238.000.000	85%	1.361.800.000	90%	1.497.980.000	95%	1.647.778.000	95%	5.745.558.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
xx	13	28	Program logistik dan peralatan	Tersedianya paket logistik dan peralatan yang memadai dalam setiap tahunnya. 2.500 paket	-	10 Kab	-	625 paket	230.000.000	625 paket	253.000.000	625 paket	278.300.000	625 paket	306.130.000	2.500	1.067.430.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	13	29	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Terlaksananya koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah rawan bencana, tersedianya buku profil daerah rawan bencana, serta buku statistik bencana 1 paket	-	14 Kab	-	100%	1.050.000.000	100%	1.050.000.000	i	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	4.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	14		Ketenagakerjaan														-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
xx	14	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya keperluan pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun	100%	100%	758.213.987	100%	796.124.686	100%	835.930.921	100%	877.727.467	100%	921.613.840	100%	4.189.610.900,75	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
xx	14	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur setiap tahun	100%	100%	1.703.396.600	100%	1.788.566.430	100%	1.877.994.752	100%	1.971.894.489	100%	2.070.489.214	100%	9.412.341.484,10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
xx	14	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas setiap tahun dan olahraga bagi pegawai sebanyak 182 Orang	0%	100%	63.700.000	100%	66.885.000	100%	70.229.250	100%	73.740.713	100%	77.427.748	100%	351.982.710,63	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
xx	14	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Terwujudnya penghargaan pegawai yang pensiun sebanyak 60 orang selama 5 tahun	14 Orang	100%	335.000.000	100%	351.750.000	100%	369.337.500	100%	387.804.375	100%	407.194.594	100%	1.851.086.468,75	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
xx	14	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis sebanyak 1 paket setiap tahun	100%	100%	15.000.000	100%	15.750.000	100%	16.537.500	100%	17.364.375	100%	18.232.594	100%	82.884.468,75	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
xx	14	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan setiap tahun 1 paket sebanyak 10 buku, 50 buku selama 5 tahun	100%	100%	271.054.300	100%	284.607.015	100%	298.837.366	100%	313.779.234	100%	329.468.196	100%	1.497.746.110,53	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
xx	14	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya pengetahuan mengenai manajemen produktivitas dan meningkatnya budaya produktif 80 orang peserta dan pengembangan sikap mental produktif 200 orang, melalui pelatihan manajemen produktivitas dan pelatihan perbaikan produktivitas terpadu	Terlalu banyak 850 orang pencari kerja	100%	1.039.896.000	100%	1.091.890.800	100%	1.364.863.500	100%	1.433.106.675	100%	1.504.762.009	100%	6.434.518.983,75	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
xx	14	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah lapangan kerja	2.234 orang	100%	952.500.000	100%	1.047.750.000	100%	1.571.625.000	100%	2.357.437.500	100%	2.593.181.250	100%	8.522.493.750,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
xx	14	17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	* Dokumen/regulasi tentang perlindungan pekerja	Tersosialisasi 42 perusahaan	20%	400.000.000	20%	400.000.000	20%	660.000.000	20%	726.000.000	20%	798.600.000	100%	3.024.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
xx	14	18	Program Pendayagunaan Dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Meningkatnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan berbasis gender sebanyak 130 orang, meningkatnya jumlah kader norma ketenagakerjaan sebanyak 100 orang dan menurunnya angka kecelakaan kerja melalui penyuluhan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan berbasis gender sebanyak 130 orang, kader norma ketenagakerjaan dan SMK 3	meningkatnya pengetahuan 430 orang	20%	410.000.000	20%	451.000.000	20%	496.100.000	20%	545.710.000	20%	600.281.000	100%	2.503.091.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
xx	14	15	Program pengembangan data/informasi	Teridentifikasi 23 lokasi transmigrasi, beserta studi kelayakan, studi amdal dan studi penerimaan masyarakat serta terfasilitasi pembangunan RTJK sebanyak 7400 unit	6 lokasi transmigrasi RTJK 375 unit	20%	52.000.000	20%	54.600.000	20%	57.330.000	20%	60.196.500	20%	63.206.325	100%	287.332.825,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
xx	14	15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Terwujudnya pengembangan usaha ekonomi di kawasan transmigrasi melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis peralatan pengolahan hasil pertanian dan non pertanian sebanyak 55 paket	7 paket untuk 7 kabupaten, 7 desa	20%	2.449.250.000	20%	2.571.712.500	20%	2.700.298.125	20%	2.835.313.031	20%	2.977.078.683	100%	13.533.652.339,06	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
xx	14	18	Program Percepatan Pertumbuhan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersedianya bahan ramuan rumah (BRRPP) di PLG dan pendampingan sebanyak 500 unit, terehabilitasinya fasilitas umum (Balai Desa) sebanyak 6 unit, terwujudnya pengembangan lahan usaha produktif sebanyak 850 paket	Terbangunnya sumur pematangan 12 unit/sosialisasi kelola sapras 1 paket	20%	1.104.089.100	20%	1.214.498.010	20%	1.335.947.811	20%	1.469.542.592	20%	1.616.496.851	100%	6.740.574.364,41	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
xx	14	19	Pengembangan Masyarakat dan kawasan transmigrasi	Terwujudnya penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi dan perbatasan berupa pelatihan sebanyak 23 paket dan tersedianya prasarana di kawasan transmigrasi sebanyak 102 unit	Pelatihan untuk transmigrasi 50 orag/3paket	20%	-	20%	390.000.000	20%	455.000.000	20%	520.000.000	20%	585.000.000	100%	1.950.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah													-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
xx	15	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran selama lima tahun, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi, 5 paket, operasional rutin kantor 5 paket, ATK 5 paket, rapat-rapat koordinasi/konsultasi keluar & dalam daerah 10 paket.	93,38%	80%	680.560.000	80%	714.588.000	85%	750.317.400	85%	787.833.270	85%	827.224.934	100%	3.760.523.603,50	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
xx	15	2	Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan gedung, 5 paket, perlengkapan, peralatan gedung, 5 paket	97,71%	80%	292.500.000	80%	307.125.000	85%	322.481.250	85%	338.605.313	85%	355.535.578	100%	1.616.247.140,63	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
xx	15	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas, 10 paket	100%	80%	35.000.000	80%	36.750.000	85%	38.587.500	85%	40.516.875	85%	42.542.719	100%	193.397.093,75	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
xx	15	4	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Pembayaran biaya pemulangan PNS yang pensiun, 10 orang	100%	80%	40.000.000	80%	42.000.000	85%	44.100.000	85%	46.305.000	85%	48.620.250	100%	221.025.250,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
xx	15	5	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelaksanaan bimbingan teknis kepada 25 orang, serta kegiatan olahraga bagi karyawan 240 kali	15,11%	80%	46.000.000	80%	48.300.000	85%	50.715.000	85%	53.250.750	85%	55.913.288	100%	254.179.037,50	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
xx	15	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja 5 paket, dokumen laporan keuangan 300 kali	100%	80%	250.300.000	80%	262.815.000	85%	275.955.750	85%	289.753.538	85%	304.241.214	100%	1.383.065.501,88	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
xx	15	15	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	* Jumlah koperasi aktif, 2.421 unit	99,16%	80%	955.880.000	80%	1.003.674.000	85%	1.254.592.500	85%	1.317.322.125	85%	1.383.188.231	100%	5.914.656.856,25	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
xx	15	16	Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM	* Peningkatan KUMKM dalam mengembangkan usaha	97,64%	80%	395.000.000	80%	592.500.000	85%	651.750.000	85%	716.925.000	85%	788.617.500	100%	3.144.792.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
xx	15	17	Program Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif	• Jumlah KUMKM terakses untuk pembiayaan, 248 KUMKM	91,67%	80%	-	80%	-	85%	-	85%	-	85%	-	100%	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
xx	15	18	Program Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM	• Jumlah KUMKM mengikuti pameran/promosi dan kemitraan, 108 KUMKM	96,94%	80%	-	80%	-	85%	-	85%	-	85%	-	100%	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		19	Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM	• Jumlah pelatihan, 4 angkatan 120 orang	97,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	• Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri • Pertumbuhan Industri • Cakupan bina kelompok pengrajin	99,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	• Jumlah koperasi pedesaan 126 koperasi	97,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM		100,00%	100%	375.580.000									375.580.000,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi UKM				1.053.880.000									1.053.880.000,00		
		16	Penanaman Modal															BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
xx	16	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran selama lima tahun, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi 2 paket, operasional rutin kantor 10 paket, ATK dan barang cetakan 2 paket, rapat-rapat koordinasi, konsultasi keluar daerah dan dalam daerah 2 paket	85%	80%	567.000.000	80%	595.350.000	85%	625.117.500	85%	656.373.375	85%	689.192.044	100%	3.133.032.918,75	BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
xx	16	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan gedung 3 paket, perlengkapan, peralatan gedung 2 paket	80%	80%	105.000.000	80%	110.250.000	85%	115.762.500	85%	121.550.625	85%	127.628.156	100%	580.191.281,25	BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
xx	16	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terselenggaranya pengadaan pakaian dinas 2 paket/45 stel.	100%	100%	18.000.000	100%	18.900.000	100%	19.845.000	100%	20.837.250	100%	21.879.113	100%	99.461.362,50	BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
xx	16	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Pembayaran biaya pemulangan 3 orang.	100%	100%	50.000.000	100%	52.500.000	100%	55.125.000	100%	57.881.250	100%	60.775.313	100%	276.281.562,50	BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
xx	16	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelaksanaan bimtek dan diklat 8 orang.	62%	80%	50.000.000	80%	52.500.000	85%	55.125.000	85%	57.881.250	85%	60.775.313	100%	276.281.562,50	BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
xx	16	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja 5 paket, dokumen laporan keuangan 4 paket.	100%	100%	23.000.000	100%	24.150.000	100%	25.357.500	100%	26.625.375	100%	27.956.644	100%	127.089.518,75	BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
xx	16	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	• Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) • Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	80%	80%	1.269.000.000	80%	1.332.450.000	85%	1.665.562.500	85%	2.081.953.125	85%	2.186.050.781	100%	8.535.016.406,25	BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
xx	16	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi melalui penyediaan 50 buku master plan pengembangan investasi, mengikuti workshop, Sosialisasi dan Sinkronisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk 50 orang, penyediaan 50 buku data perkembangan PMA/PMDN.	80%	80%	62.000.000	80%	68.200.000	85%	75.020.000	85%	82.522.000	85%	90.774.200	100%	378.516.200,00	BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
xx	16	17	Program penyiapan potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Berkembangnya potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah melalui 4 kegiatan pelatihan yaitu pelatihan teknis 50 aparatur IPMK, TOT IPMK 50 orang LKPM, dan 1 unit sarana prasarana.	80%	-	-	80%	290.000.000	85%	319.000.000	85%	350.900.000	85%	385.990.000	100%	1.345.890.000,00	BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab			
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp		
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)		
xx	16	18	Program Perencanaan Pembangunan Daerah tertinggal	Pemberdayaan usaha masyarakat dengan pershi di daerah tertinggal	65%	-	-	80%	740.000.000	85%	814.000.000	85%	895.400.000	85%	984.940.000	100%	3.434.340.000,00	BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
	18		Kepemudaan dan Olah Raga															DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
xx	18	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun selama lima tahun	Jasa kesehatan pegawai 60 org, operasional kendaraan 2 buah, asuransi gedung 1 buah, jasa kebersihan kantor 3 org, bahan bacaan 13 pegawai.	Jasa kesehatan 13 orang, operasional lendaraan 2 unit, tenaga kebersihan 3 orang, bahan bacaan 13 pegawai	922.604.825	Jasa kesehatan 13 orang, operasional lendaraan 2 unit, tenaga kebersihan 3 orang, bahan bacaan 13 pegawai	968.735.066	Jasa kesehatan 13 orang, operasional lendaraan 2 unit, tenaga kebersihan 3 orang, bahan bacaan 13 pegawai	1.017.171.820	Jasa kesehatan 13 orang, operasional lendaraan 2 unit, tenaga kebersihan 3 orang, bahan bacaan 13 pegawai	1.068.030.411	Jasa kesehatan 13 orang, operasional lendaraan 2 unit, tenaga kebersihan 3 orang, bahan bacaan 13 pegawai	1.121.431.931	Jasa kesehatan 65 orang, operasional lendaraan 2 unit, tenaga kebersihan 3 orang, bahan bacaan 65 pegawai	5.097.974.052,42	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
xx	18	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya dan terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur selama 5 tahun	peralatan gedung kantor 1 paket, perlengkapan gedung kantor 1 paket, meubelir 1 paket, pemeliharaan rutin gedung kantor 1 paket, rehabilitasi gedung kantor 1 paket.	peralatan gedung kantor 1 paket, meubelir 1 paket, pemeliharaan rutin gedung kantor 1 paket, rehabilitasi gedung kantor 1 paket.	210.200.000	peralatan gedung kantor 1 paket, meubelir 1 paket, pemeliharaan rutin gedung kantor 1 paket, rehabilitasi gedung kantor 1 paket.	220.710.000	peralatan gedung kantor 1 paket, meubelir 1 paket, pemeliharaan rutin gedung kantor 1 paket, rehabilitasi gedung kantor 1 paket.	231.745.500	peralatan gedung kantor 1 paket, meubelir 1 paket, pemeliharaan rutin gedung kantor 1 paket, rehabilitasi gedung kantor 1 paket.	243.332.775	peralatan gedung kantor 1 paket, meubelir 1 paket, pemeliharaan rutin gedung kantor 1 paket, rehabilitasi gedung kantor 1 paket.	255.499.414	Peralatan gedung kantor 5 paket, pengadaan meubelir 5 paket, pemeliharaan rutin gedung kantor 5 paket, rehabilitasi gedung kantor 5 paket.	1.161.487.688,75	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
xx	18	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas setiap tahun bagi 65 orang pegawai, dan pengadaan pakaian khusus untuk hari-hari tertentu bagi 65 orang pegawai.	pakaian dinas pegawai 75 org, pakaian khusus hari-hari tertentu pegawai 75 org.	Pakaian dinas 65 pegawai, pakaian khusus 65 pegawai	39.776.000	Pakaian dinas 65 pegawai, pakaian khusus 65 pegawai	41.764.800	Pakaian dinas 65 pegawai, pakaian khusus 65 pegawai	43.853.040	Pakaian dinas 65 pegawai, pakaian khusus 65 pegawai	46.045.692	Pakaian dinas 65 pegawai, pakaian khusus 65 pegawai	48.347.977	Pakaian dinas 65 pegawai, pakaian khusus 65 pegawai selama 5 tahun	219.787.508,60	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
xx	18	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Biaya pemulangan pegawai purna tugas 3 orang setiap tahun.	3 orang	3 orang	50.000.000	3 orang	52.500.000	3 orang	55.125.000	3 orang	57.881.250	3 orang	60.775.313	15 orang	276.281.562,50	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
xx	18	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Diklat formal 15 orang setiap tahun, selama 5 tahun	4 orang	15 orang	10.000.000	15 orang	10.500.000	15 orang	11.025.000	15 orang	11.576.250	15 orang	12.155.063	75 orang	55.256.312,50	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
xx	18	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen Realisasi anggaran sebanyak 4 laporan, dan pelaporan keuangan akhir tahun 1 laporan selama 5 tahun.	7 dokumen laporan kinerja dan keuangan	5 dokumen	61.388.900	5 dokumen la	64.458.345	5 dokumer	67.681.262	5 dokumen l	71.065.325	5 dokumen la	74.618.592	25 Dokumen laporan	339.212.424,24	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
xx	18	15	Program Pengembangan dan Kereserian Kebijakan Pemuda	Data 20 pemuda pelopor, Monev di 14 Kabupaten/Kota, Diklat peningkatan lmtaq pemuda 30 orang, dan Rakor	2 data pemuda pelopor Kalteng yang berhasil meraih juara I dan III pemuda pelopor tingkat nasional.	Data 20 pemuda pelopor, Monev di 14 Kabupaten/ Kota, Diklat peningkatan lmtaq pemuda 30 orang, dan Rakor	190.000.000	Data 20 pemuda pelopor, Monev di 14 Kabupaten/ Kota, Diklat peningkatan lmtaq pemuda 30 orang, dan Rakor	199.500.000	Data 20 pemuda pelopor, Monev di 14 Kabupaten/ Kota, Diklat peningkatan lmtaq pemuda 30 orang, dan Rakor	209.475.000	Data 20 pemuda pelopor, Monev di 14 Kabupaten/ Kota, Diklat peningkatan lmtaq pemuda 30 orang, dan Rakor	219.948.750	Data 20 pemuda pelopor, Monev di 14 Kabupaten/ Kota, Diklat peningkatan lmtaq pemuda 30 orang, dan Rakor	230.946.188	Data 100 pemuda pelopor, Monev di 14 Kabupaten/ Kota, Diklat peningkatan lmtaq pemuda 150 orang, dan Rakor	1.049.869.937,50	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
xx	18	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah kegiatan kepemudaan 230 kegiatan	terlatihnya paskibraka 71 org, peringatan HSP 1 kegiatan, terlaksananya seleksi paskibraka 56 org, tertunjangnya kegiatan 50 OKP, diklat bidang politik bagi pemuda 30 org, penempatan SM2L 42 org.	42 orang SM2L , terlatihnya 71 orang Paskibraka , 55 OKP yang terdaftar di KNPPI	2.287.071.275	42 orang SM2L , terlatihnya 71 orang Paskibraka , 55 OKP yang terdaftar di KNPPI	2.515.778.403	42 orang SM2L , terlatihnya 71 orang Paskibraka , 55 OKP yang terdaftar di KNPPI	3.773.667.604	42 orang SM2L , terlatihnya 71 orang Paskibraka , 55 OKP yang terdaftar di KNPPI	4.151.034.364	42 orang SM2L , terlatihnya 71 orang Paskibraka , 55 OKP yang terdaftar di KNPPI	4.566.137.801	210 orang SM2L , terlatihnya 355 orang Paskibraka , 275 OKP yang terdaftar di KNPPI	17.293.689.445,91	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
xx	18	17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah wirausahawan muda 300 orang	terlatihnya kewirausahaan pemuda 20 orang, meningkatnya keterampilan pemuda dibidang penyablonan 20 org	60 pemuda	40.000.000	60 pemuda	44.000.000	60 pemuda	66.000.000	60 pemuda	72.600.000	60 pemuda	79.860.000	300 pemuda	302.460.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
xx	18	19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Pelatihan 30 orang, sertifikasi dan standarisasi mutu 30 orang, serta teridentifikasinya Bakat/Potensi Pelajar.	terlatihnya 30 orang pelatih tenis meja.	Pelatihan 30 orang, sertifikasi 30 orang	-	Pelatihan 30 orang, sertifikasi 30 orang	-	Pelatihan 30 orang, sertifikasi 30 orang	-	Pelatihan 30 orang, sertifikasi 30 orang	-	Pelatihan 30 orang, sertifikasi 30 orang	-	Pelatihan 150 orang, sertifikasi 150 orang	-	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
xx	18	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah club olahraga yang dibentuk 34 club	Terlaksananya POPPROV 1 kegiatan, kompetisi 6 cabang olahraga, pemassalan olahraga 4 kegiatan, penunjangan olahraga cacat, terlaksananya kegiatan festival olahraga tradisional 1 kegiatan, terlaksananya pelatihan bagi pelatih tenis meja 25 orang, penunjangan olahraga yang berkembang dimasyarakat 1 paket.	event olah raga 7 kegiatan	1.080.000.000	event olah raga 7 kegiatan	1.188.000.000	event olah raga 7 kegiatan	1.306.800.000	event olah raga 7 kegiatan	1.437.480.000	event olah raga 7 kegiatan	1.581.228.000	event olah raga 49 kegiatan	6.593.508.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
xx	18	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terbangunnya 5 paket dan terrehabnya 3 paket prasarana , kegiatan peninjakan kerjasama dengan pihak swasta.	Terehabilitasinya gedung PPLP 1 paket.	Terbangunnya 1 paket dan terrehabnya 3 paket prasarana olahraga	1.985.000.000	Terbangunnya 1 paket dan terrehabnya 3 paket prasarana olahraga	2.183.500.000	Terbangunnya 1 paket dan terrehabnya 3 paket prasarana olahraga	2.401.850.000	Terbangunnya 1 paket dan terrehabnya 3 paket prasarana olahraga	2.642.035.000	Terbangunnya 1 paket dan terrehabnya 3 paket prasarana olahraga	2.906.238.500	Terbangunnya 5 paket dan terrehabnya 3 paket prasarana olahraga	12.118.623.500,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
xx	18	22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda	Peningkatan pembangunan S/P Pemuda 2 paket, pemeliharaan setiap tahun	Terehabilitasinya gedung pemuda 1 paket, terpeliharanya Bumi Perkemahan Nyaru Menteng 1 tahun.	Peningkatan pembangunan S/P Pemuda 2 paket, pemeliharaan	628.400.000	Peningkatan pembangunan S/P Pemuda 2 paket, pemeliharaan	691.240.000	Peningkatan pembangunan S/P Pemuda 2 paket, pemeliharaan	760.364.000	Peningkatan pembangunan S/P Pemuda 2 paket, pemeliharaan	836.400.400	Peningkatan pembangunan S/P Pemuda 2 paket, pemeliharaan	920.040.440	Peningkatan pembangunan S/P Pemuda 10 paket, pemeliharaan setiap tahun	3.836.444.840,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
xx	18	25	Program Pembinaan dan Pengembangan Prestasi	Binaan dan prestasi	Program baru yang dimulai tahun 2011.	1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	550.000.000	1 paket	605.000.000	1 paket	665.500.000	4 paket	2.320.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
xx	18	26	Program pengembangan kebijakan dan Manajemen Olahraga	Kebijakan dan manajemen olahraga	terlatihnya 30 orang pelatih tenis meja.	1 paket	690.000.000	1 paket	759.000.000	1 paket	759.000.000	1 paket	834.900.000	1 paket	918.390.000	4 paket	3.202.290.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
xx	18	27	Program Peningkatan Budaya dan Prestasi Olah Raga	Pelatihan setiap tahun pemanduan bakat 30 orang, instruktur 30 orang, sosialisasi 30 orang dan test pemanduan bakat 200 orang	Program baru yang dimulai tahun 2011.	pelatihan 290 orang	-	pelatihan 290 orang	375.000.000	pelatihan 290 orang	340.000.000	pelatihan 290 orang	360.000.000	pelatihan 290 orang	400.000.000	pelatihan 1450 orang	1.475.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
		19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri														-	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
xx	19	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan operasional kerja yang didukung peralatan kerja, lingkungan kerja, yang semakin meningkat	14 Kegiatan	100%	709.951.650	100%	745.449.233	100%	782.721.694	100%	821.857.779	100%	862.950.668	100%	3.922.931.023,23	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
xx	19	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana penunjang kerja	2 Kegiatan	100%	591.127.500	100%	620.683.875	100%	651.718.069	100%	684.303.972	100%	718.519.171	100%	3.266.352.586,73	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
xx	19	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS	2 Kegiatan	100%	24.382.500	100%	25.601.625	100%	26.881.706	100%	28.225.792	100%	29.637.081	100%	134.728.703,95	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
xx	19	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Terfasilitasinya hak PNS yang pindah/purna tugas	1 Kegiatan	100%	80.000.000	100%	84.000.000	100%	88.200.000	100%	92.610.000	100%	97.240.500	100%	442.050.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
xx	19	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur melalui bintek	1 Kegiatan	100%	82.000.000	100%	86.100.000	100%	90.405.000	100%	94.925.250	100%	99.671.513	100%	453.101.762,50	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
xx	19	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan	4 Kegiatan	100%	14.000.000	100%	14.700.000	100%	15.435.000	100%	16.206.750	100%	17.017.088	100%	77.358.837,50	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
xx	19	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	• Angka kriminalitas • Kerjasama dengan korem, polda, siswa dan mahasiswa	3 Kegiatan	100%	78.000.000	100%	81.900.000	100%	85.995.000	100%	90.294.750	100%	94.809.488	100%	430.999.237,50	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
xx	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	• Jumlah linmas per-10000 penduduk • Deteksi dini setiap tahun	3 Kegiatan	100%	425.164.900	100%	467.681.390	100%	514.449.529	100%	565.894.482	100%	848.841.723	100%	2.822.032.023,75	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
xx	19	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	• Jumlah kemitraan, seminar, sarasehan dan diskusi, sosialisasi	2 Kegiatan	100%	147.413.000	100%	162.154.300	100%	178.369.730	100%	196.206.703	100%	294.310.055	100%	978.453.787,50	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
xx	19	18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Siswa, mahasiswa, ormas/LSM	1 Kegiatan	100%	21.887.500	100%	24.076.250	100%	26.483.875	100%	29.132.263	100%	32.045.489	100%	133.625.376,25	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
xx	19	21	Program pendidikan politik masyarakat	• Kerjasama dengan ormas/LSM, partai politik dan lembaga legislatif	7 Kegiatan	100%	553.072.950	100%	608.380.245	100%	669.218.270	100%	736.140.096	100%	809.754.106	100%	3.376.565.667,05	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	19	22	Program peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Angka Kriminalitas													-	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
xx	19	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran selama 5 tahun		100%	632.500.000	100%	664.125.000	100%	697.331.250	100%	732.197.813	100%	768.807.703	100%	3.494.961.765,63	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
xx	19	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur perlengkapan gedung kantor dan peralatan kantor selama 5 tahun		100%	35.000.000	100%	36.750.000	100%	38.587.500	100%	40.516.875	100%	42.542.719	100%	193.397.093,75	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
xx	19	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin kerja Aparatur untuk pengadaan pakaian dinas, khusus Pol-PP 80 orang selama 5 tahun		100%	706.000.000	100%	741.300.000	100%	778.365.000	100%	817.283.250	100%	858.147.413	100%	3.901.095.662,50	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
xx	19	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Terfasilitasinya hak PNS yang pindah/purna tugas tahun 2011 berjumlah 6 orang, tahun 2012 berjumlah 5 orang, tahun 2014 berjumlah 5 orang dan tahun 2015 berjumlah 6 orang		100%	110.000.000	100%	115.500.000	100%	121.275.000	100%	127.338.750	100%	133.705.688	100%	607.819.437,50	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
xx	19	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur sejumlah 300 orang selama 5 tahun	100%	20.000.000	100%	21.000.000	100%	22.050.000	100%	23.152.500	100%	24.310.125	100%	110.512.625,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
xx	19	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan berupa dokumen per triwulan dan semesteran selama 5 tahun	100%	61.000.000	100%	64.050.000	100%	67.252.500	100%	70.615.125	100%	74.145.881	100%	337.063.506,25	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
xx	19	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya Kemampuan anggota Satpol PP dalam operasi penegakkan PERDA dan terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat sejumlah 250 orang selama 5 tahun	100%	522.500.000	100%	548.625.000	100%	576.056.250	100%	604.859.063	100%	635.102.016	100%	2.887.142.328,13	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
xx	19	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terpeliharanya dan Terciptanya Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal bekerjasama dengan TNI-Polri dan keajaiban selama 5 tahun	-	-	100%	330.000.000	100%	363.000.000	100%	399.300.000	100%	439.230.000	100%	1.531.530.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
xx	19	20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Terciptanya lingkungan yang aman bebas narkoba, miras, perjudian dan penyakit masyarakat lainnya untuk 300 orang selama 5 tahun	-	-	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	605.000.000	100%	907.500.000	100%	2.562.500.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kependudukan dan Persandian													-	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen LPPD dan IPPD Pembangunan Daerah sejumlah 2 dokumen per tahun, dokumen laporan ket. LKPJ dan dokumen evaluasi LPPD kab/kota	100%	202.395.000	100%	222.634.500	100%	244.897.950	100%	269.387.745	100%	296.326.520	100%	1.235.641.714,50	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tersusunnya dokumen SIAK sejumlah 1 dokumen per tahun	100%	372.200.000	100%	390.810.000	100%	410.350.500	100%	430.868.025	100%	452.411.426	100%	2.056.639.951,25	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan operasional kerja yang didukung peralatan kerja, lingkungan kerja yang semakin meningkat	100%	17.061.378.000	100%	17.914.446.900	100%	18.810.169.245	100%	19.750.677.707	100%	20.738.211.593	100%	94.274.883.444,86	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Tersusunnya dokumen fasilitasi dan movev pemerintah daerah kab/kota	100%	1.180.680.400	100%	1.298.748.440	100%	1.428.623.284	100%	1.571.485.612	100%	1.728.634.174	100%	7.208.171.910,04	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terlaksananya fasilitasi penataan daerah otonomi baru melalui penyusunan dokumen data dan informasi daerah	100%	370.000.000	100%	407.000.000	100%	447.700.000	100%	492.470.000	100%	541.717.000	100%	2.258.887.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	26	Program Pembinaan Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Test masuk Perguruan Tinggi	20%	100.000.000	20%	110.000.000	20%	121.000.000	20%	133.100.000	20%	146.410.000	100%	610.510.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	33	Program Pembinaan Kesehatan	Penyuluhan tentang Program tentang HIV/AIDS, Flu Babi Demam berdarah dan Rabies	20%	75.000.000	20%	82.500.000	20%	90.750.000	20%	99.825.000	20%	109.807.500	100%	457.882.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	22	Program Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Anak	Terkoordinirnya kualitas kesejahteraan perempuan di Kalteng dan terselenggaranya rapat forum anak	20%	100.000.000	20%	110.000.000	20%	121.000.000	20%	133.100.000	20%	146.410.000	100%	610.510.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	15	Program Keluarga Berencana	Terbinanya kesadaran tentang keluarga sejahtera	20%	75.000.000	20%	78.750.000	20%	82.687.500	20%	86.821.875	20%	91.162.969	100%	414.422.343,75	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terciptanya dan Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	20%	111.716.000	20%	122.887.600	20%	135.176.360	20%	148.693.996	20%	163.563.396	100%	682.037.351,60	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	22	Program Pembinaan Masyarakat	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Peran masyarakat dan peran organisasi kemasyarakatan	20%	150.000.000	20%	165.000.000	20%	181.500.000	20%	199.650.000	20%	219.615.000	100%	915.765.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kepemudaan 14 Kab/Kota	20%	50.000.000	20%	52.500.000	20%	55.125.000	20%	57.881.250	20%	60.775.313	100%	276.281.562,50	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Hasil kerja Aparatur danTerpenuhinya rasa nyaman dan kelengkapan peralatan kerja	100%	1.498.027.000	100%	1.572.928.350	100%	1.651.574.768	100%	1.734.153.506	100%	1.820.861.181	100%	8.277.544.804,54	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	53	Program Pembinaan Pelayanan Keagamaan	Terlaksananya rapat koordinasi antar umat beragama dan terlaksananya Pembinaan Pesantren Madrasah dan Sekolah Minggu	20%	300.000.000	20%	330.000.000	20%	363.000.000	20%	399.300.000	20%	439.230.000	100%	1.831.530.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
xx	20	54	Program Pembinaan Mental	Meningkatnya dan Terlaksananya Pembinaan Mental	20%	150.000.000	20%	165.000.000	20%	181.500.000	20%	199.650.000	20%	219.615.000	100%	915.765.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya dokumen dan buku serta terlaksananya sosialisasi tentang perundang-undangan	20%	485.000.000	20%	533.500.000	20%	586.850.000	20%	645.535.000	20%	710.088.500	100%	2.960.973.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	42	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Tersusunnya dokumen dan buku serta terlaksananya penyuluhan peningkatan kesadaran hukum dan HAM	20%	150.315.000	20%	165.346.500	20%	181.881.150	20%	200.069.265	20%	220.076.192	100%	917.688.106,50	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	43	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	Terlaksananya bintek terhadap aparat pemerintah daerah guna peningkatan kualitas profesi hukum												-	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	44	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum	Tersusunnya dokumen pelayanan dan bantuan hukum	20%	283.789.000	20%	312.167.900	20%	343.384.690	20%	377.723.159	20%	415.495.475	100%	1.732.560.223,90	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	45	Program Penegakan Hukum dan HAM	Tersusunnya dokumen pengawasan, kebijakan, dan movev perda dan peraturan KDH	20%	15.000.000	20%	16.500.000	20%	18.150.000	20%	19.965.000	20%	21.961.500	100%	91.576.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	46	Program Perencanaan Hukum	Terbitnya peraturan hukum, tersusunnya dokumen prolegda provinsi dan terlaksananya sosialisasi prolegda provinsi terhadap aparat	20%	102.700.000	20%	112.970.000	20%	124.267.000	20%	136.693.700	20%	150.363.070	100%	626.993.770,00	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	47	Program pembinaan sarana dan prasarana hukum	Tersedianya buku dan dokumen produk hukum dan informasi hukum daerah	20%	110.000.000	20%	121.000.000	20%	133.100.000	20%	146.410.000	20%	161.051.000	100%	671.561.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	23	Program Pelaporan, Analisis dan Pengkajian Pembangunan	Tersedianya bahan masukan peningkatan kinerja pembangunan	100%	335.000.000	100%	368.500.000	100%	405.350.000	100%	445.885.000	100%	490.473.500	100%	2.045.208.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	51	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Terwujudnya kemampuan mengendalikan kegiatan pembangunan	100%	415.000.000	100%	456.500.000	100%	502.150.000	100%	552.365.000	100%	607.601.500	100%	2.533.616.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	20	Program pengembangan data/informasi	Terwujudnya aparat pemerintahan yang lebih melayani masyarakat	100%	1.310.164.000	100%	1.375.672.200	100%	1.444.455.810	100%	1.516.678.601	100%	1.592.512.531	100%	7.239.483.141,03	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	21	Program Peningkatan dan Pembangunan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah)	Tercapainya pola kerja sharing / networking / kerja kelompok yang harmonis	100%	162.740.000	100%	179.014.000	100%	196.915.400	100%	216.606.940	100%	238.267.634	100%	993.543.974,00	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	22	Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terlaksananya Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	100%	60.000.000	100%	66.000.000	100%	72.600.000	100%	79.860.000	100%	87.846.000	100%	366.306.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terdapat standar kinerja aparatur dalam pelayanan publik	100%	15.689.782.000	100%	16.474.271.100	100%	17.297.984.655	100%	18.162.883.888	100%	19.071.028.082	100%	86.695.949.724,89	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan pencapaian kinerja yang transparan dan akuntabel	100%	450.056.000	100%	472.558.800	100%	496.186.740	100%	520.996.077	100%	547.045.881	100%	2.486.843.497,85	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	48	Program Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	20%	2.017.522.400	20%	2.219.274.640	20%	2.441.202.104	20%	2.685.322.314	20%	2.953.854.546	100%	12.317.176.004,24	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Terwujudnya dan Terlaksananya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	20%	51.416.590	20%	77.124.885	20%	84.837.374	20%	127.256.060	20%	190.884.090	100%	531.518.999,13	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	34	Program Penyebaran Informasi, Kehumasan dan Keprotokolkan	Terlaksananya peliputan lapangan, aktivitas Gub/ Wagub serta pejabat lainnya.	100%	4.609.483.250	100%	5.070.431.575	100%	5.577.474.733	100%	6.135.222.206	100%	6.748.744.426	100%	28.141.356.189,58	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Terfasilitasinya hak PNS yang pindah/purna tugas	100%	620.000.000	100%	651.000.000	100%	683.550.000	100%	717.727.500	100%	753.613.875	100%	3.425.891.375,00	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
xx	20	31	Program Pengkajian, Pelayanan, Informasi dan Perpustakaan	Terlaksananya Pengkajian, Pelayanan, Informasi dan Perpustakaan	20%	10.000.000	20%	11.000.000	20%	12.100.000	20%	13.310.000	20%	14.641.000	100%	61.051.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	35	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas tata cara kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi	20%	660.298.200	20%	726.328.020	20%	798.960.822	20%	878.856.904	20%	966.742.595	100%	4.031.186.540,82	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	36	Program Pemerintahan yang Baik dan Pemberantasan KKN	Tersedianya dokumen Laporan Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 sejumlah 1 dokumen per tahun dimulai pada tahun 2012	100%	311.433.700	100%	342.577.070	100%	376.834.777	100%	414.518.255	100%	455.970.080	100%	1.901.333.881,87	SEKRETARIAT DAERAH
	20	37	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas		100%	124.556.575		137.012.233		150.713.456		165.784.801		182.363.281		760.430.346,03	SEKRETARIAT DAERAH
	20	39	Program Pelaporan, Analisis dan Pengkajian Pembangunan		100%	287.309.600		316.040.560		347.644.616		382.409.078		420.649.985		1.754.053.838,96	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya sosialisasi dan bintek Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	4.980.433.500	100%	5.478.476.850	100%	6.026.324.535	100%	6.628.956.989	100%	7.291.852.687	100%	30.406.044.560,85	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	18	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya sosialisasi dan bintek Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	100%	736.000.000	100%	809.600.000	100%	890.560.000	100%	979.616.000	100%	1.077.577.600	100%	4.493.353.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/kelurahan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan dana kepada pemerintah desa dan kelurahan se Kalimantan	100%	276.382.600	100%	304.020.860	100%	334.422.946	100%	367.865.241	100%	404.651.765	100%	1.687.343.411,26	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	52	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah	Terlaksananya bintek Pengelolaan Barang Daerah	100%	465.953.150	100%	512.548.465	100%	563.803.312	100%	620.183.643	100%	682.202.007	100%	2.844.690.576,07	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas (seragam) pegawai beserta kelengkapannya	100%	392.000.000	100%	411.600.000	100%	432.180.000	100%	453.789.000	100%	476.478.450	100%	2.166.047.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Meningkatnya standar pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	100%	1.587.000.000	100%	1.745.700.000	100%	1.920.270.000	100%	2.112.297.000	100%	2.323.526.700	100%	9.688.793.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
xx	20	23	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kemampuan aparatur memanfaatkan teknologi informasi	100%	90.000.000	100%	99.000.000	100%	108.900.000	100%	119.790.000	100%	131.769.000	100%	549.459.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	20		Program penyiapan Kota Palangkaraya sebagai pusat pemerintahan NKRI	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen RTRW kota Palangka Raya Gerakan masyarakat Dokumen RDTR kota Palangka Raya 												-	SEKRETARIAT DAERAH
	20															-	SEKRETARIAT DPRD
xx	20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran antara lain terkirimnya surat sebanyak 12.000 lembar, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik rumah dinas dan 1 gedung DPRD	100%	6.568.330.900	100%	6.896.747.445	100%	7.241.584.817	100%	7.603.664.058	100%	7.983.847.261	100%	36.294.174.481,38	SEKRETARIAT DPRD
xx	20	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pengadaan-pengadaan perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan rutin dan pembangunan gedung kantor	100%	2.885.775.120	100%	3.030.063.876	100%	3.181.567.070	100%	3.340.645.423	100%	3.507.677.694	100%	15.945.729.183,54	SEKRETARIAT DPRD
xx	20	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas (seragam) pegawai beserta kelengkapannya	100%	306.675.000	100%	322.008.750	100%	338.109.188	100%	355.014.647	100%	372.765.379	100%	1.694.572.963,59	SEKRETARIAT DPRD
xx	20	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Terfasilitasinya hak PNS yang pindah/purna tugas PNS	100%	100.000.000	100%	105.000.000	100%	110.250.000	100%	115.762.500	100%	121.550.625	100%	552.563.125,00	SEKRETARIAT DPRD
xx	20	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal	100%	37.000.000	100%	38.850.000	100%	40.792.500	100%	42.832.125	100%	44.973.731	100%	204.448.356,25	SEKRETARIAT DPRD
xx	20	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan semesteran	100%	49.000.000	100%	51.450.000	100%	54.022.500	100%	56.723.625	100%	59.559.806	100%	270.755.931,25	SEKRETARIAT DPRD
xx	20	31	Program Pengkajian, Pelayanan, Informasi dan Perpustakaan	Tersedianya data dan informasi berupa 1000 data dan 5000 foto dan buletin 1200 eksemplar	20%	1.622.718.980	20%	1.784.990.878	20%	1.963.489.966	20%	2.159.838.962	20%	2.375.822.859	100%	9.906.861.644,80	SEKRETARIAT DPRD
xx	20	32	Program Peningkatan Pelayanan Rapat-Rapat bagi anggota DPRD	Tersedianya dana untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke 13 kabupaten dan 1 kota bagi 45 orang anggota DPRD dan PNS Setwan	20%	50.000.000	20%	55.000.000	20%	60.500.000	20%	66.550.000	20%	73.205.000	100%	305.255.000,00	SEKRETARIAT DPRD
xx	20	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Peningkatan SDM bagi 45 anggota DPRD	20%	4.430.500.000	20%	4.652.025.000	20%	4.884.626.250	20%	5.128.857.563	20%	5.385.300.441	100%	24.481.309.253,13	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
20																		
xx	20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,82%	100%	1.264.999.350	100%	1.328.249.318	100%	1.394.661.783	100%	1.464.394.873	100%	1.537.614.616	100%	6.989.919.939,59	INSPEKTORAT PROVINSI
xx	20	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	99,89%	100%	736.042.500	100%	772.844.625	100%	811.486.856	100%	852.061.199	100%	894.664.259	100%	4.067.099.439,33	INSPEKTORAT PROVINSI
xx	20	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin kerja Aparatur	-	100%	79.720.000	100%	83.706.000	100%	87.891.300	100%	92.285.865	100%	96.900.158	100%	440.503.323,25	INSPEKTORAT PROVINSI
xx	20	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Terfasilitasinya hak PNS yang pindah/purna tugas	100,00%	100%	115.000.000	100%	120.750.000	100%	126.787.500	100%	133.126.875	100%	139.783.219	100%	635.447.593,75	INSPEKTORAT PROVINSI
xx	20	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur	91,34%	100%	681.797.500	100%	715.887.375	100%	751.681.744	100%	789.265.831	100%	828.729.122	100%	3.767.361.572,17	INSPEKTORAT PROVINSI
xx	20	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya dan Tercapainya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	92,90%	100%	27.894.000	100%	29.288.700	100%	30.753.135	100%	32.290.792	100%	33.905.331	100%	154.131.958,09	INSPEKTORAT PROVINSI
xx	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH di Palangka Raya selama 5 tahun dengan target 50% per tahun	89,56%	100%	4.770.332.650	100%	5.247.365.915	100%	5.772.102.507	100%	6.349.312.757	100%	6.984.244.033	100%	29.123.357.861,52	INSPEKTORAT PROVINSI
xx	20	21	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatnya kinerja dan kualitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan melalui pelatihan-pelatihan teknis	0,00%	100%	235.156.000	100%	258.671.600	100%	284.538.760	100%	312.992.636	100%	344.291.900	100%	1.435.650.895,60	INSPEKTORAT PROVINSI
xx	20	22	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Terlaksananya penataan naskah dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	95,35%	100%	247.058.000	100%	271.763.800	100%	298.940.180	100%	328.834.198	100%	361.717.618	100%	1.508.313.795,80	INSPEKTORAT PROVINSI
xx	20	23	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Optimalnya pemanfaatan teknologi informasi melalui penyusunan dan pelatihan teknologi informasi	0,00%	-	-	100%	905.000.000	100%	995.500.000	100%	1.095.050.000	100%	1.204.555.000	100%	4.200.105.000,00	INSPEKTORAT PROVINSI
xx	20	24	Program Mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat	Tersedianya Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	0,00%	-	-	100%	550.000.000	100%	605.000.000	100%	665.500.000	100%	732.050.000	100%	2.552.550.000,00	INSPEKTORAT PROVINSI
20																		
xx	20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan gedung...paket, perlengkapan, peralatan gedung...paket.	838.577.000	80%	760.000.000	80%	798.000.000	85%	837.900.000	85%	879.795.000	85%	923.784.750	100%	4.199.479.750,00	KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
xx	20	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas.....paket.	723.230.000	80%	982.500.000	80%	1.031.625.000	85%	1.083.206.250	85%	1.137.366.563	85%	1.194.234.891	100%	5.428.932.703,13	KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
xx	20	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pembayaran biaya pemulangan....orang.	15.000.000	80%	12.500.000	80%	13.125.000	85%	13.781.250	85%	14.470.313	85%	15.193.828	100%	69.070.390,63	KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
xx	20	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Pelaksanaan bimtek...orang, kegiatan olahraga karyawan...kali.	35.000.000	80%	25.000.000	80%	26.250.000	85%	27.562.500	85%	28.940.625	85%	30.387.656	100%	138.140.781,25	KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
xx	20	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja...paket, dokumen laporan keuangan...kali.	40.000.000	80%	20.000.000	80%	21.000.000	85%	22.050.000	85%	23.152.500	85%	24.310.125	100%	110.512.625,00	KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
xx	20	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran selama satu tahun, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi...paket, operasional rutin kantor...paket, ATK...paket, rapat-rapat koordinasi, konsultasi keluar daerah....paket.	134.200.000	80%	100.000.000	80%	105.000.000	85%	110.250.000	85%	115.762.500	85%	121.550.625	100%	552.563.125,00	KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
xx	20	16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Tersedianya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah selama 5 tahun	245.000.000	80%	100.000.000	80%	110.000.000	85%	121.000.000	85%	133.100.000	85%	146.410.000	100%	610.510.000,00	KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
xx	20	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		50.000.000	-	-	80%	458.000.000	85%	480.900.000	85%	504.945.000	85%	530.192.250	100%	1.974.037.250,00	KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
	20																	
	20																	
xx	20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran selama lima tahun, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi 15 paket, operasional rutin kantor 15 paket, ATK 4 paket, rapat-rapat koordinasi, konsultasi keluar daerah 15 paket	75%	80%	5.109.500.000	80%	5.364.975.000	85%	5.633.223.750	85%	5.914.884.938	85%	6.210.629.184	100%	28.233.212.871,88	DINAS PENDAPATAN DAERAH
xx	20	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan gedung 15 paket, perlengkapan peralatan gedung 15 paket	75%	80%	2.623.600.000	80%	2.754.780.000	85%	2.892.519.000	85%	3.037.144.950	85%	3.189.002.198	100%	14.497.046.147,50	DINAS PENDAPATAN DAERAH
xx	20	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 2 paket	75%	80%	72.850.000	80%	76.492.500	85%	80.317.125	85%	84.332.981	85%	88.549.630	100%	402.542.236,56	DINAS PENDAPATAN DAERAH
xx	20	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Pembayaran biaya pemulangan 14 orang, pemindahan pegawai 3 orang	75%	80%	325.000.000	80%	341.250.000	85%	358.312.500	85%	376.228.125	85%	395.039.531	100%	1.795.830.156,25	DINAS PENDAPATAN DAERAH
xx	20	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelaksanaan bimtek 7 orang	75%	80%	50.000.000	80%	52.500.000	85%	55.125.000	85%	57.881.250	85%	60.775.313	100%	276.281.562,50	DINAS PENDAPATAN DAERAH
xx	20	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja 4 jenis/tahun.	80%	80%	46.500.000	80%	48.825.000	85%	51.266.250	85%	53.829.563	85%	56.521.041	100%	256.941.853,13	DINAS PENDAPATAN DAERAH
xx	20	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan Keuangan Daerah melalui penyediaan 8 jenis buku panduan pengelolaan keuangan daerah, tersedianya perda pajak daerah dan retribusi daerah, rakor tim Pembina samsat setiap tahun dan penyediaan sarana prasarana operasional Samsat serta tersedianya 14 paket system pelayanan public pada kantor samsat	75%	80%	1.336.200.000	80%	1.469.820.000	85%	1.616.802.000	85%	1.778.482.200	85%	1.956.330.420	100%	8.157.634.620,00	DINAS PENDAPATAN DAERAH
xx	20	38	Program Intensifikasi PAD	Meningkatnya realisasi PAD sebesar rata-rata 10 - 20%/tahun selama periode 2011-2015	80%	80%	4.711.350.000	80%	5.182.485.000	85%	5.700.733.500	85%	6.270.806.850	85%	6.897.887.535	100%	28.763.262.885,00	DINAS PENDAPATAN DAERAH
	20																	
	20																	
																		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
xx	20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya keperluan pelayanan administrasi perkantoran	100%	20%	1.713.435.000	20%	1.799.106.750	20%	1.889.062.088	20%	1.983.515.192	20%	2.082.690.951	100%	9.467.809.980,84	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
xx	20	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur, pembangunan/rehab asrama & gedung, atap dan penambahan daya listrik	15%	20%	1.394.000.000	20%	1.463.700.000	20%	1.536.885.000	20%	1.613.729.250	20%	1.694.415.713	100%	7.702.729.962,50	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
xx	20	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas dan olahraga bagi pegawai	100%	20%	36.000.000	20%	37.800.000	20%	39.690.000	20%	41.674.500	20%	43.758.225	100%	198.922.725,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
xx	20	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Terwujudnya penghargaan pegawai yang pensiun	100%	20%	90.000.000	20%	94.500.000	20%	99.225.000	20%	104.186.250	20%	109.395.563	100%	497.306.812,50	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
xx	20	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Percepatan layanan	75%	100%	9.632.405.000	20%	10.114.025.250	20%	10.619.726.513	20%	11.150.712.838	20%	11.708.248.480	100%	53.225.118.080,66	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
xx	20	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	20%	81.000.000	20%	85.050.000	20%	89.302.500	20%	93.767.625	20%	98.456.006	100%	447.576.131,25	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
xx	20	23	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi	100%	20%	40.000.000	20%	44.000.000	20%	48.400.000	20%	53.240.000	20%	58.564.000	100%	244.204.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
xx	20	15	Program Pendidikan Kedinasan	Terpenuhinya Penyelenggaraan Pendidikan Penjurusan Struktural dan Peningkatan Ketrampilan dan profesionalisme Aparatur	100%	20%	5.286.200.000	20%	5.550.510.000	20%	5.828.035.500	20%	6.119.437.275	20%	6.425.409.139	100%	29.209.591.913,75	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
xx	20	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terkelolanya Aparatur secara tertib dan sesuai dengan aturan	100%	20%	2.716.850.000	20%	2.988.535.000	20%	3.287.388.500	20%	3.616.127.350	20%	3.977.740.085	100%	16.586.640.935,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
xx	20	18	Program peningkatan kapasitas aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	100%	20%	540.000.000	20%	540.000.000	20%	594.000.000	20%	891.000.000	20%	980.100.000	100%	3.005.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	20																	
	20																	
xx	20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya sinkronisasi, koordinasi dan penyelesaian masalah-masalah dengan lembaga penyiaran bulik	100%	100%	474.500.000	100%	498.225.000	100%	523.136.250	100%	549.293.063	100%	576.757.716	100%	2.621.912.028,13	KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
xx	20	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja	100%	100%	10.500.000	100%	11.025.000	100%	11.576.250	100%	12.155.063	100%	12.762.816	100%	58.019.128,13	KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
xx	20	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya untuk Komisioner dan pegawai sekretariat KPID Prov. Kalimantan	100%	100%	8.000.000	100%	8.400.000	100%	8.820.000	100%	9.261.000	100%	9.724.050	100%	44.205.050,00	KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
xx	20	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Terwujudnya penghargaan pegawai yang pensiun sebanyak 2 orang di tahun 2011 dan 1 orang di tahun 2013	100%	100%	50.000.000	100%	52.500.000	100%	55.125.000	100%	57.881.250	100%	60.775.313	100%	276.281.562,50	KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
xx	20	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya sosialisasi lembaga KPID dan peraturan penyiaran	100%	33.500.000	100%	35.175.000	100%	36.933.750	100%	38.780.438	100%	40.719.459	100%	185.108.646,88	KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
xx	20	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersebarannya informasi kepada LPP dan masyarakat mengenai lembaga penyiaran TV dan radio melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan 1 (satu) kali per tahun	100%	25.000.000	100%	26.250.000	100%	27.562.500	100%	28.940.625	100%	30.387.656	100%	138.140.781,25	KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
xx	20	18	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Terlaksananya temu lembaga penyiaran dengan mengundang TV dan radio yang dilaksanakan 1 (satu) kali per tahun	100%	35.000.000	100%	38.500.000	100%	42.350.000	100%	46.585.000	100%	51.243.500	100%	213.678.500,00	KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
xx	20	31	Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya program kerja lembaga penyiaran melalui 1 (satu) set alat pantau sebanyak 2 (dua) unit yang diusulkan untuk tahun anggaran 2012	100%	3.500.000	100%	3.850.000	100%	4.235.000	100%	4.658.500	100%	5.124.350	100%	21.367.850,00	KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
	20															-	
xx	20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	96%	205.400.000	100%	215.670.000	100%	226.453.500	100%	237.776.175	100%	249.664.984	100%	1.134.964.658,75	KORPS PEGAWAI NEGERI (KORPRI)
xx	20	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	4.600.000	100%	4.830.000	100%	5.071.500	100%	5.325.075	100%	5.591.329	100%	25.417.903,75	KORPS PEGAWAI NEGERI (KORPRI)
xx	20	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin kerja Aparatur	-	10.000.000	100%	10.500.000	100%	11.025.000	100%	11.576.250	100%	12.155.063	100%	55.256.312,50	KORPS PEGAWAI NEGERI (KORPRI)
xx	20	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Terfasilitasinya hak PNS yang pindah/purna tugas	100%	60.000.000	100%	63.000.000	100%	66.150.000	100%	69.457.500	100%	72.930.375	100%	331.537.875,00	KORPS PEGAWAI NEGERI (KORPRI)
xx	20	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur	-	50.000.000	100%	52.500.000	100%	55.125.000	100%	57.881.250	100%	60.775.313	100%	276.281.562,50	KORPS PEGAWAI NEGERI (KORPRI)
xx	20	49	Program Penguatan Kelembagaan KORPRI	Terlaksananya dan Tercapainya Penguatan Kelembagaan KORPRI melalui HUT KORPRI, penyediaan data dan bahan buletin dan bantuan pengadaan perumahan untuk PNS yang belum memiliki rumah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja PNS golongan I, II, dan III	75%	170.000.000	100%	187.000.000	100%	205.700.000	100%	226.270.000	100%	248.897.000	100%	1.037.867.000,00	KORPS PEGAWAI NEGERI (KORPRI)
	20															-	
	20															-	BADAN NARKOTIKA PROVINSI
xx	20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran, antara lain: jasa surat menyurat 5 paket, komunikasi 5 paket, jasa jaminan kesehatan 5 paket, jasa administrasi keuangan 5 tahun, jasa kebersihan kantor 5 paket, jasa perbaikan peralatan kerja 5 paket, penyediaan barang cetakan 5 paket, penyediaan bahan makan minum 5 paket, ATK 5 paket, penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 5 paket, rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah 5 paket, kedalam daerah 5 paket, penyusunan kompetensi PNS 5 paket dan penyusunan LAKIP 5 paket	100%	504.124.500	100%	529.330.725	100%	555.797.261	100%	583.587.124	100%	612.766.481	100%	2.785.606.091,09	BADAN NARKOTIKA PROVINSI
xx	20	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 5 paket, pengadaan peralatan gedung kantor 5 paket, pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor 5 paket, pemeliharaan rutin peralatan gedung 5 paket, pemeliharaan gedung kantor 5 paket	65%	72.436.500	75%	76.058.325	80%	79.861.241	85%	83.854.303	90%	88.047.018	90%	400.257.388,04	BADAN NARKOTIKA PROVINSI
xx	20	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 5 paket	100%	35.482.000	100%	37.256.100	100%	39.118.905	100%	41.074.850	100%	43.128.593	100%	196.060.448,01	BADAN NARKOTIKA PROVINSI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
xx	20	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Pembayaran biaya pemulangan 6 orang	100%	100%	25.000.000	100%	26.250.000	100%	27.562.500	100%	28.940.625	100%	30.387.656	100%	138.140.781,25	BADAN NARKOTIKA PROVINSI
xx	20	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelaksanaan bimtek 16 orang		3	15.000.000	3	15.750.000	3	16.537.500	3	17.364.375	4	18.232.594	16	82.884.468,75	BADAN NARKOTIKA PROVINSI
xx	20	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja 10 paket, dokumen laporan keuangan 85 kali	100%	100%	6.000.000	100%	6.300.000	100%	6.615.000	100%	6.945.750	100%	7.293.038	100%	33.153.787,50	BADAN NARKOTIKA PROVINSI
xx	20	18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Terlaksananya kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis sekolah, berbasis tempat kerja dan berbasis komunitas di 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah selama 5 tahun, antara lain Sosialisasi 852 kali, pengembangan SPM 400 kali	100%	100%	540.663.000	100%	594.729.300	100%	654.202.230	100%	719.622.453	100%	791.584.698	100%	3.300.801.681,30	BADAN NARKOTIKA PROVINSI
xx	20	23	Program peningkatan penanganan korban narkoba	Terlaksananya pelatihan penanganan korban narkoba 15 kali, seminar 20 kali, pembangunan panti rehabilitasi 1 kali, kerja sama dengan rumah sakit 5 kali, membentuk tim tenaga ahli bidang adiksi dan kerohanian 5 kali, koordinasi dengan BNK Kab/Kota dan instansi terkait 20 paket, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 5 paket, sosialisasi 5 paket, pengumpulan dan pengolahan data 5 paket, temu pakar/studi banding 8 paket	100%	100%	66.200.000	100%	72.820.000	100%	80.102.000	100%	88.112.200	100%	96.923.420	100%	404.157.620,00	BADAN NARKOTIKA PROVINSI
	20	26	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Tersedianya data, informasi laporan P4GN dan terlaksananya SI P4GN secara online	70%	75%	85.094.000	80%	89.348.700	85%	93.816.135	90%	98.506.942	95%	103.432.289	95%	470.198.066,00	BADAN NARKOTIKA PROVINSI
			Program Penanggulangan dan Penindakan Penyalahgunaan Narkoba	Terlaksananya Penanggulangan dan Penindakan Penyalahgunaan Narkoba selama 5 tahun, meliputi: sosialisasi 10 kali, razia anti narkoba 10 kali, test urine 6 kali		-	-	100%	773.000.000	100%	850.300.000	100%	935.330.000	100%	1.028.863.000	100%	3.587.493.000,00	BADAN NARKOTIKA PROVINSI
																	-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
	21	Ketahanan Pangan															BADAN KETAHANAN PANGAN	
xx	21	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran selama lima tahun, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi 5 paket, operasional rutin kantor 5 paket, ATK 5 paket, rapat-rapat koordinasi, konsultasi keluar daerah 5 paket	88,67%	80%	435.000.000	80%	456.750.000	85%	479.587.500	90%	503.566.875	90%	528.745.219	100%	2.403.649.593,75	BADAN KETAHANAN PANGAN
xx	21	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan gedung 5 paket, perlengkapan, peralatan gedung 5 paket	90,72%	80%	305.000.000	80%	320.250.000	85%	336.262.500	90%	353.075.625	90%	370.729.406	100%	1.685.317.531,25	BADAN KETAHANAN PANGAN
xx	21	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 5 paket	89,30%	80%	25.000.000	80%	26.250.000	85%	27.562.500	90%	28.940.625	90%	30.387.656	100%	138.140.781,25	BADAN KETAHANAN PANGAN
xx	21	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Pembayaran biaya pemulangan 20 orang.	85,71%	-	-	80%	60.000.000	85%	80.000.000	90%	80.000.000	90%	80.000.000	100%	300.000.000,00	BADAN KETAHANAN PANGAN
xx	21	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelaksanaan bimtek 25 orang, kegiatan olahraga karawana 240 kali	34,46%	-	-	80%	850.000.000	85%	892.500.000	90%	937.125.000	90%	983.981.250	100%	3.663.606.250,00	BADAN KETAHANAN PANGAN
xx	21	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja 5 paket, dokumen laporan keuangan 5 kali.	87,69%	80%	40.000.000	80%	42.000.000	85%	44.100.000	90%	46.305.000	90%	48.620.250	100%	221.025.250,00	BADAN KETAHANAN PANGAN
xx	21	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Meningkatnya ketahanan pangan dan perkebunan melalui Penyiapan dan penetapan sasaran produksi pangan daerah sebanyak 5 paket, Studi Banding 75 orang Petani dan Petugas Pengelola Lumbung Pangan dan Cadangan Pangan, Pemberdayaan Lumbung Pangan Desa pada 14 Kab/Kota, Pengendalian Stabilitas Harga Pangan melalui DPM-LUEP pada 11 kelompok, Pemantauan dan Analisis Tren Harga Pangan Pokok 5 paket, Survei dan Analisis Konsumsi Bahan Pangan Pokok Masyarakat 5 paket, Gerakan Tanam, Tebar dan Pelihara Untuk Ketahanan Pangan dan Gizi Keluarga 15 kelompok, Promosi Percepatan Diversifikasi Pangan Masyarakat / P2KP 5 paket, Analisis Pola Pangan Harapan 5 paket, Survei Pola Distribusi Hasil Panen di wilayah Sentra Produksi Padi 4 paket, Analisis Ketersediaan dan Harga pangan 4 paket, Analisis Neraca Bahan Makanan 4 paket.	96,01	80%	425.000.000	80%	446.250.000	85%	468.562.500	90%	491.990.625	90%	516.590.156	100%	2.348.393.281,25	BADAN KETAHANAN PANGAN
xx	21	16	Program Agribisnis Pertanian dan Keamanan Pangan	Berkembangnya agribisnis produk pangan lokal	49,29%	80%	160.000.000	80%	176.000.000	85%	193.600.000	90%	212.960.000	90%	234.256.000	100%	976.816.000,00	BADAN KETAHANAN PANGAN
xx	21	17	Program Kerawanan dan Kewaspadaan Pangan	Dokumen pemantauan dan peta rawan pangan Jumlah Desa Mandiri pangan	92,96%	80%	190.000.000	80%	209.000.000	85%	229.900.000	90%	252.890.000	90%	278.179.000	100%	1.159.969.000,00	BADAN KETAHANAN PANGAN
xx	21	18	Program Goodgovernment	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik pada pengelolaan ketahanan pangan daerah melalui 5 paket Fasilitas Operasional Kelembagaan DKP Provinsi, 10 paket perencanaan ketahanan pangan dan 5 paket evaluasi dan monitoring	92,74%	80%	145.000.000	80%	159.500.000	85%	175.450.000	90%	192.995.000	90%	212.294.500	100%	885.239.500,00	BADAN KETAHANAN PANGAN
xx	21	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penilaian terbaik tenaga fungsional petani, pelatihan petani dan petugas, penghargaan ketahanan pangan	89,48%	80%	275.000.000	80%	288.750.000	85%	303.187.500	90%	378.984.375	90%	397.933.594	100%	1.643.855.468,75	BADAN KETAHANAN PANGAN
			Program Pengembangan dan Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah Lumbung Pangan, meningkatkan cadangan pangan	0%	-	-	80%	570.000.000	85%	678.500.000	90%	767.625.000	90%	892.308.000	100%	2.908.433.000,00	BADAN KETAHANAN PANGAN
			Program Ketahanan Pangan dan Gizi Keluarga	Meningkatkan pemahaman petani, ibu rumah tangga, Sosialisasi gizi keluarga	0%	-	-	80%	215.000.000	85%	247.250.000	90%	296.700.000	90%	356.040.000	100%	1.114.990.000,00	BADAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
xx	22	1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
xx	22	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang mendukung pelayanan admn. Perkantoran setiap tahun	15 paket	100%	1.258.870.000	100%	1.321.813.500	100%	1.387.904.175	100%	1.457.299.384	100%	1.530.164.353	100%	6.956.051.411,69	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
xx	22	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja setiap tahun, pengadaan peralatan kantor 3 paket, Rehabilitasi gedung kantor 2 paket, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas setiap tahun,	1 paket, 4 kendaraan dinas	100%	48.000.000	100%	50.400.000	100%	52.920.000	100%	55.566.000	100%	58.344.300	100%	265.230.300,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
xx	22	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya 60 orang setiap tahun	60 stel	100%	29.835.000	100%	31.326.750	100%	32.893.088	100%	34.537.742	100%	36.264.629	100%	164.857.208,34	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
xx	22	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Terwujudnya penghargaan pegawai yang pensiun 8 orang	1 orang	100%	40.000.000	100%	42.000.000	100%	44.100.000	100%	46.305.000	100%	48.620.250	100%	221.025.250,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
xx	22	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis sebanyak 10 orang	2 orang	100%	10.000.000	100%	10.500.000	100%	11.025.000	100%	11.576.250	100%	12.155.063	100%	55.256.312,50	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
xx	22	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan setiap tahun	6 dokumen	100%	18.000.000	100%	18.900.000	100%	19.845.000	100%	20.837.250	100%	21.879.113	100%	99.461.362,50	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
xx	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	* Jumlah fasilitasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	90 orang, 2 paket	20%	2.750.000.000	20%	2.887.500.000	30%	3.609.375.000	50%	3.789.843.750	70%	3.979.335.938	70%	17.016.054.687,50	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
xx	22	16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Penguatan Kapasitas Lembaga Keuangan Mikro 36 org, Akses Modal Usaha bagi Pembangunan Ekonomi Masyarakat 30 org,	100 orang	20%	268.000.000	20%	294.800.000	40%	442.200.000	50%	486.420.000	60%	535.062.000	60%	2.026.482.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
xx	22	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	* Jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa	562 paket	20%	1.195.930.000	20%	1.315.523.000	40%	1.973.284.500	50%	2.170.612.950	60%	2.387.674.245	60%	9.043.024.695,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
xx	22	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Terlatihnya pengelola Alokasi Dana Desa (ADD), keuangan dan aset kekayaan desa sebagai sumber PADes, 450 orang, administrasi pemerintahan desa/kelurahan dan data base pedes sebanyak 1.484 orang dan tersalurkannya stimulan penyediaan sarana/prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan untuk pelayanan publik dan pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa/kel. sebanyak 300 desa melalui pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan dan penyusunan sistem perencanaan 1342	30 orang	30%	138.000.000	40%	151.800.000	50%	166.980.000	60%	183.678.000	70%	202.045.800	70%	842.503.800,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
xx	22	20	Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Tersedianya stimulan Jumlah bahan kontak TMMD dengan rakyat 5 paket dan terlaitnya masyarakat tentang Teknologi Tepat Guna 200 org. Pelaksanaan Gelar TTG Tk Nasional di provinsi setiap tahun, Rakor Posyantekdes dan penerapan serta pengembangan TTG 14 Kab/Kota, Bimtek Posyantekdes 200 org. Lokakarya pengelolaan sumber daya pesisir pantai berbasis masyarakat dan kearifan lokal/mendukung PNPMLPMP 210 org. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Desa dalam pengelolaan SDA berbasis lingkungan 210 org, pemanfaatan lahan kritis melalui LAMYAMSANG 14 Kab/Kota, Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR dan CD yang dilakukan oleh Perusahaan PMA PMDN dan Swasta Nasional terkait pemanfaatan SDA di wilayah Kecamatan dan Desa 14 Kab/Kota	8 paket	40%	301.365.000	50%	331.501.500	60%	364.651.650	70%	401.116.815	80%	441.228.497	80%	1.839.863.461,50	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
xx	22	21	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Partisipasi angkatan kerja perempuan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah desa	Kegiatan baru	-	-	20%	470.000.000	30%	705.000.000	50%	1.057.500.000	60%	1.163.250.000	60%	3.395.750.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		24	Kearsipan														-	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
xx	24	15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	T layanan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) 1300 entry setiap tahun.	6.500 entri	1300 entry	62.500.000	1300 entry	65.625.000	1300 entry	68.906.250	1300 entry	72.351.563	1300 entry	75.969.141	6500 entry	345.351.953,13	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
xx	24	16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumensip daerah	Pendataan dan Penataan Arsip 300 paket, Penyuluhan 2 paket setiap tahun	516 box	Pendataan& Penataan Arsip 300 box, Penyuluhan 2 paket	153.000.000	Pendataan& Penataan Arsip 300 box, Penyuluhan 2 paket	168.300.000	Pendataan & Penataan Arsip 300 box, Penyuluhan 2 paket	185.130.000	Pendataan& Penataan Arsip 300 box, Penyuluhan 2 paket	203.643.000	Pendataan& Penataan Arsip 300 box, Penyuluhan 2 paket	224.007.300	Pendataan& Penataan Arsip 300 box, Penyuluhan 2 paket	934.080.300,00	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
xx	24	17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan selama setahun.	5 paket	1 paket	20.000.000	1 paket	22.000.000	1 paket	24.200.000	1 paket	26.620.000	1 paket	29.282.000	5 paket	122.102.000,00	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
xx	24	18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Terselenggaranya 1 kali lomba arsiparis teladan setiap tahun.	1 kali	1 kali	25.000.000	1 kali	27.500.000	1 kali	30.250.000	1 kali	33.275.000	1 kali	36.602.500	1 kali	152.627.500,00	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
xx	24	15	Program pengembangan data/informasi	Profil perpustakaan 1 paket, dokumen LAKIP, dokumen peta data perpustakaan desa/kelurahan.	13 paket	3 Paket	215.000.000	3 Paket	225.750.000	3 Paket	237.037.500	3 Paket	248.889.375	3 Paket	261.333.844	15 paket	1.188.010.718,75	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
xx	24	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jasa surat, komunikasi 3 paket, operasional rutin kantor 1 paket, ATK 1 paket, Rakor, konsultasi luar daerah 2 paket.	-	8 paket	668.000.000	8 paket	701.400.000	8 paket	736.470.000	8 paket	773.293.500	8 paket	811.958.175	40 paket	3.691.121.675,00	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
xx	24	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan gedung 1 paket, perlengkapan, peralatan gedung 2 paket.	5 paket	Pembangunan, rehabilitasi gedung 1 paket, perlengkapan, peralatan gedung 2 paket.	310.000.000	1 paket, perlengkapan, peralatan gedung 2 paket.	325.500.000	Pembangunan, rehabilitasi gedung 1 paket, perlengkapan, peralatan gedung 2 paket.	341.775.000	Pembangunan, rehabilitasi gedung 1 paket, perlengkapan, peralatan gedung 2 paket.	358.863.750	Pembangunan, rehabilitasi gedung 1 paket, perlengkapan, peralatan gedung 2 paket.	376.806.938	Pembangunan, rehabilitasi gedung 1 paket, perlengkapan, peralatan gedung 2 paket.	1.712.945.687,50	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
xx	24	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	pakaian dinas 1 paket.	1 paket	pakaian dinas 1 paket.	35.000.000	pakaian dinas 1 paket.	36.750.000	pakaian dinas 1 paket.	38.587.500	pakaian dinas 1 paket.	40.516.875	pakaian dinas 1 paket.	42.542.719	pakaian dinas 1 paket.	193.397.093,75	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
xx	24	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Biaya pemulangan 3 orang.	6 orang	Biaya pemulangan 3 orang.	75.000.000	Biaya pemulangan 3 orang.	78.750.000	Biaya pemulangan 3 orang.	82.687.500	Biaya pemulangan 3 orang.	86.821.875	Biaya pemulangan 3 orang.	91.162.969	Biaya pemulangan 15 orang.	414.422.343,75	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
xx	24	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	bimtek 30 orang, kegiatan olahraga karyawan 1 kali.	150 orang	bimtek 30 orang, kegiatan olahraga karyawan 1 kali.	100.000.000	bimtek 30 orang, kegiatan olahraga karyawan 1 kali.	105.000.000	bimtek 30 orang, kegiatan olahraga karyawan 1 kali.	110.250.000	bimtek 30 orang, kegiatan olahraga karyawan 1 kali.	115.762.500	bimtek 30 orang, kegiatan olahraga karyawan 1 kali.	121.550.625	bimtek 150 orang, kegiatan olahraga karyawan 5 kali.	552.563.125,00	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
xx	24	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen laporan capaian kinerja 5 paket, dokumen laporan keuangan 12 kali.	5 laporan	Dokumen laporan capaian kinerja 5 paket, dokumen laporan keuangan 12 kali.	65.000.000	Dokumen laporan capaian kinerja 5 paket, dokumen laporan keuangan 12 kali.	68.250.000	Dokumen laporan capaian kinerja 5 paket, dokumen laporan keuangan 12 kali.	71.662.500	Dokumen laporan capaian kinerja 5 paket, dokumen laporan keuangan 12 kali.	75.245.625	Dokumen laporan capaian kinerja 5 paket, dokumen laporan keuangan 12 kali.	79.007.906	Dokumen laporan capaian kinerja 25 paket, dokumen laporan keuangan 60 kali.	359.166.031,25	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
			Perpustakaan															
	26	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah anggota/pengunjung 319.366 orang- Jumlah perpustakaan 1.247 unit Jumlah buku 569.071 judul	124.800 pengunjung, 514 perpustakaan, 124.000 judul buku	124.900 pengunjung, 200 perpustakaan, 2.500 judul	1.276.500.000	125.800 pengunjung, 198 perpustakaan, 5000 judul	1.404.150.000	130.500 pengunjung, 198 perpustakaan, 7.500 judul	1.544.565.000	135.000 pengunjung, 198 perpustakaan, 10.000 judul	1.699.021.500	140.000 pengunjung, 198 perpustakaan, 10.500 judul	1.868.923.650	pengunjung 319.366 orang, perpustakaan 1.247 unit, buku 569.071 judul	7.793.160.150,00	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
xx	26	16	Program Pengembangan Dokumentasi	Tersedianya layanan bahan dokumentasi 12 dokumen.	-	12 dokumen	70.000.000	12 dokumen	77.000.000	12 dokumen	84.700.000	12 dokumen	93.170.000	12 dokumen	102.487.000	60 dokumen	427.357.000,00	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
xx	26	17	Program Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	Operasional perpustakaan digital e-library, layanan otomasi perpustakaan elektronik	-	2 paket	90.000.000	2 paket	99.000.000	2 paket	108.900.000	2 paket	119.790.000	2 paket	131.769.000	10 paket	549.459.000,00	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
xx	26		Program Peningkatan Kapasitas Sarana dan Fasilitas Perpustakaan	Sarana dan fasilitas Perpustakaan khusus 1 paket	5 paket	1 paket	310.000.000	1 paket	325.500.000	1 paket	341.775.000	1 paket	358.863.750	1 paket	376.806.938	5 paket	1.712.945.688,00	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
	26		Program Peningkatan Koleksi Perpustakaan	Terpenuhinya koleksi BPAD, Kabupaten/Kota 2 paket tiap tahun	30.000 eks	2 paket	-	2 paket	950.000.000	2 paket	104.500.000	2 paket	1.149.500.000	2 paket	1.250.000.000	2 paket	3.454.000.000,00	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
	26		Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan	Diklat teknis, Sosialisasi dan Penyuluhan	3 paket	3 paket	-	3 paket	250.000.000	3 paket	275.000.000	3 paket	300.000.000	3 paket	350.000.000	15 paket	1.175.000.000,00	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
	26		Program Peningkatan Budaya Gemar membaca	Baleho, Spanduk dan Stiker	-	3 paket	-	3 paket	100.000.000	3 paket	125.000.000	3 paket	150.000.000	3 paket	200.000.000	15 paket	575.000.000,00	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
26	Program Koordinasi Pengembangan Perpustakaan	koordinasi Pemerintah Pusat, Provinsi Kabupaten/Kota	15 paket	3 paket	-	3 paket	200.000.000	3 paket	250.000.000	3 paket	300.000.000	3 paket	375.000.000	15 paket	1.125.000.000,00	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
26	Program Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Perpustakaan	Monev pada 14 Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan 3 paket tiap tahun	15 paket	3 paket	-	3 paket	175.000.000	3 paket	200.000.000	3 paket	275.000.000	3 paket	250.000.000	15 paket	900.000.000,00	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
2	WAJIB															
01	Pertanian															
xx 01 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terseleenggaranya pelayanan administrasi perkantoran selama lima tahun, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi 5 paket, operasional rutin kantor 5 paket, ATK 5 paket, rapat-rapat koordinasi, konsultasi keluar daerah 5 paket	80%	80%	1.172.860.000	85%	1.231.503.000	85%	1.293.078.150	85%	1.357.732.058	90%	1.425.618.660	100%	6.480.791.867,88	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
xx 01 2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan gedung 5 paket, perlengkapan, peralatan gedung 5 paket	80%	80%	2.040.000.000	85%	2.142.000.000	85%	2.249.100.000	85%	2.361.555.000	90%	2.479.632.750	100%	11.272.287.750,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
xx 01 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 5 paket	80%	80%	190.000.000	85%	199.500.000	85%	209.475.000	85%	219.948.750	90%	230.946.188	100%	1.049.869.937,50	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
xx 01 4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Pembayaran biaya pemulangan 100 orang.	80%	80%	150.000.000	85%	157.500.000	85%	165.375.000	85%	173.643.750	90%	182.325.938	100%	828.844.687,50	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
xx 01 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelaksanaan bimtek 15 orang, kegiatan olahraga karawana 5 kali	80%	80%	200.000.000	85%	210.000.000	85%	220.500.000	85%	231.525.000	90%	243.101.250	100%	1.105.126.250,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
xx 01 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja 5 paket, dokumen laporan keuangan 5 kali.	80%	80%	350.000.000	85%	367.500.000	85%	385.875.000	85%	405.168.750	90%	425.427.188	100%	1.933.970.937,50	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
xx 01 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	• Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB • Nilai tukar petani	80%	80%	2.807.000.000	85%	2.947.350.000	85%	3.094.717.500	85%	3.868.396.875	90%	4.061.816.719	100%	16.779.281.093,75	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
xx 01 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	• Jumlah pemasaran hasil pertanian pertahun	80%	80%	443.732.300	85%	488.105.530	85%	536.916.083	85%	805.374.125	90%	885.911.537	100%	3.160.039.574,45	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
xx 01 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	• Jumlah terapan teknologi pertanian	80%	80%	1.348.289.100	85%	1.483.118.010	85%	1.631.429.811	85%	2.447.144.717	90%	2.691.859.188	100%	9.601.840.825,65	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
xx 01 19	Program peningkatan hasil produksi pertanian/perkebunan	• Jumlah Produksi pertanian	80%	80%	8.278.745.350	85%	9.106.619.885	85%	10.017.281.874	85%	15.025.922.810	90%	16.528.515.091	100%	58.957.085.010,03	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
xx 01 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Berkurangnya serangan penyakit hewan melalui pengawasan perdagangan ternak antar daerah (check point) dan peningkatan pelayanan bidang kesehatan dan penyakit hewan di 14 kab/kota, pengadaan 5 paket vaksin, obat-obatan, desinfektan, vitamin dan mineral ternak, pengadaan 5 paket peralatan medis untuk pengobatan penyakit hewan untuk 14 Kabupaten/Kota, Tersedianya data dan peta situasi penyakit hewan/ternak menular di 14 kab/kota, 5 kali Sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyakit avian influenza, Penanggulangan dan investigasi penyakit eksotik dan zoonosis serta Operasional unit pengendalian penyakit avian influenza/flu burung di 14 kab/kota, Rapat koordinasi penanggulangan dan pengendalian penyakit hewan/ternak 5 kali, Pembinaan kesehatan hewan 5 kali, Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular ternak di 14 kb/kota	80%	80%	1.523.240.150	85%	1.675.564.165	85%	1.843.120.582	85%	2.027.432.640	90%	2.230.175.904	100%	9.299.533.439,77	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
xx 01 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	• Jumlah ternak pertahun	80%	80%	4.376.402.150	85%	4.814.042.365	85%	5.295.446.602	85%	7.943.169.902	90%	8.737.486.892	100%	31.166.547.911,23	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
xx 01 23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	• Jumlah pemasaran ternak pertahun	80%	80%	477.041.950	85%	524.746.145	85%	577.220.760	85%	865.831.139	90%	952.414.253	100%	3.397.254.246,93	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab			
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
xx	01	24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	* Jumlah terapan teknologi peternakan	80%	80%	735.549.000	85%	809.103.900	85%	890.014.290	85%	1.335.021.435	90%	1.468.523.579	100%	5.238.212.203,50	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
xx	01	25	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	* Jumlah pelatihan pada penyuluh pertanian	80%	-	-	80%	650.000.000	85%	715.000.000	85%	1.072.500.000	90%	1.179.750.000	100%	3.617.250.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	01																-	DINAS PERKEBUNAN
xx	01	16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersedianya data calon lahan dan calon petani yang siap lahannya untuk disertifikasi (2.500 ha)	0	80%	75.000.000	80%	82.500.000	-	90.750.000	-	99.825.000	-	109.807.500	100%	457.882.500,00	DINAS PERKEBUNAN
xx	01	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Tersedianya bahan pangan diareal perkebunan seluas 300 ha, tersedianya peralatan pasca panen karet, tersedianya angka tetap dan angka sementara statistik perkebunan 2 paket/tahun, terampilnya petugas statistik sebanyak 150 orang.	7 Kegiatan, 25 orang	20%	312.500.000	20%	328.125.000	20%	344.531.250	20%	361.757.813	20%	379.845.703	100%	1.726.759.765,63	DINAS PERKEBUNAN
xx	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran selama satu tahun, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi 5 tahun, operasional rutin kantor 5 tahun, ATK 5 tahun, rapat-rapat koordinasi, konsultasi keluar masuk surat	2000 surat; 30 kegiatan; 2 unit	20%	711.400.000	20%	746.970.000	20%	784.318.500	20%	823.534.425	20%	864.711.146	100%	3.930.934.071,25	DINAS PERKEBUNAN
xx	01	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan gedung 7 paket, perlengkapan, peralatan gedung 5 paket	5 paket; 7 kegiatan; 41 unit	15%	1.590.470.000	20%	1.669.993.500	25%	1.753.493.175	20%	1.841.167.834	20%	1.933.226.225	100%	8.788.350.734,19	DINAS PERKEBUNAN
xx	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terselenggaranya pengadaan pakaian dinas 800 stel	160 stel	20%	59.200.000	20%	62.160.000	20%	65.268.000	20%	68.531.400	20%	71.957.970	100%	327.117.370,00	DINAS PERKEBUNAN
xx	01	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Pembayaran biaya pemulangan 30 orang.	3 orang	20%	70.000.000	20%	73.500.000	20%	77.175.000	20%	81.033.750	20%	85.085.438	100%	386.794.187,50	DINAS PERKEBUNAN
xx	01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelaksanaan bimtek 100 orang, kegiatan olahraga karyawan 80 kali	25 orang	20%	738.776.000	20%	775.714.800	20%	814.500.540	20%	855.225.567	20%	897.986.845	100%	4.082.203.752,35	DINAS PERKEBUNAN
xx	01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja 100 paket, dokumen laporan keuangan 95 kali.	3 kegiatan	20%	90.600.000	20%	95.130.000	20%	99.886.500	20%	104.880.825	20%	110.124.866	100%	500.622.191,25	DINAS PERKEBUNAN
xx	01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kehidupan Petani Menjadi Sejahtera, melalui: terlatihnya petani perkebunan sebanyak 1500 orang, terbinanya kelompok tani dan pelaku Agribisnis sebanyak 500 Kel.Tani/Asosiasi, berkembangnya perekonomian pedesaan, dan termanfaatnya lahan tidur yang produktif seluas 750 Ha	4 kegiatan; 60 orang; 420 Ha	20%	3.303.167.000	20%	3.468.325.350	20%	3.641.741.618	20%	4.652.177.022	20%	4.779.785.873	100%	19.745.196.862,34	DINAS PERKEBUNAN
xx	01	17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	* Jumlah pemasaran hasil perkebunan pertahun	6 kegiatan; 30 orang	25%	285.000.000	25%	313.500.000	15%	344.850.000	10%	517.275.000	5%	569.002.500	100%	2.029.627.500,00	DINAS PERKEBUNAN
xx	01	18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	* Jumlah terapan teknologi perkebunan	3 kegiatan	20%	1.155.575.000	20%	1.271.132.500	20%	1.398.245.750	20%	2.097.368.625	20%	2.307.105.488	100%	8.229.427.362,50	DINAS PERKEBUNAN
xx	01	19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	* Jumlah Produksi perkebunan	9 kegiatan; 2,448 Ha	20%	8.200.812.000	20%	9.020.893.200	20%	9.922.982.520	20%	14.884.473.780	20%	16.372.921.158	100%	58.402.082.658,00	DINAS PERKEBUNAN
xx	01	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Perkebunan Lapangan	* Jumlah pelatihan pada penyuluh perkebunan lapangan				80%	766.000.000	80%	842.600.000	85%	1.263.900.000	85%	1.390.290.000	100%	4.262.790.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	02																-	DINAS KEHUTANAN
xx	02	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran selama lima tahun, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi 5 paket, operasional rutin kantor 5 paket, ATK 5 paket, rapat-rapat koordinasi, konsultasi keluar masuk surat 5 paket	79,80%	80%	1.177.650.000	80%	1.236.532.500	85%	1.298.359.125	85%	1.363.277.081	85%	1.431.440.935	100%	6.507.259.641,56	DINAS KEHUTANAN
xx	02	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan gedung 5 paket, perlengkapan, peralatan gedung 5 paket	91,26%	80%	1.631.200.000	80%	1.712.760.000	85%	1.798.398.000	85%	1.888.317.900	85%	1.982.733.795	100%	9.013.409.695,00	DINAS KEHUTANAN
xx	02	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terselenggaranya pengadaan pakaian dinas 5 paket	97,25%	80%	55.000.000	80%	57.750.000	85%	60.637.500	85%	63.669.375	85%	66.852.844	100%	303.909.718,75	DINAS KEHUTANAN
xx	02	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Pembayaran biaya pemulangan 30 orang.	75,52%	80%	85.000.000	80%	89.250.000	85%	93.712.500	85%	98.398.125	85%	103.318.031	100%	469.678.656,25	DINAS KEHUTANAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
xx	02	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengiriman pegawai mengikuti bimtek 20 orang.	0%	80%	115.000.000	80%	120.750.000	85%	126.787.500	85%	133.126.875	85%	139.783.219	100%	635.447.593,75	DINAS KEHUTANAN
xx	02	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja 5 paket, dokumen laporan keuangan 25 buku.	53,09%	80%	75.000.000	80%	78.750.000	85%	82.687.500	85%	86.821.875	85%	91.162.969	100%	414.422.343,75	DINAS KEHUTANAN
xx	02	15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	• Jenis dan jumlah hasil pengelolaan sumber daya hutan • Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	77,71%	80%	1.480.000.000	80%	1.554.000.000	85%	1.631.700.000	85%	2.039.625.000	85%	2.141.606.250	100%	8.846.931.250,00	DINAS KEHUTANAN
xx	02	16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	• Berkurangnya lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai	63,95%	80%	320.000.000	80%	352.000.000	85%	387.200.000	85%	425.920.000	85%	468.512.000	100%	1.953.632.000,00	DINAS KEHUTANAN
xx	02	17	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	• Iestariunya fungsi dan memulihkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat melalui : Meningkatkan kesiapsiagaan semua elemen masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan sebanyak 4 kali apel siaga, Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan dengan kegiatan kampanye Dalkarhuta melalui penyebaran 2050 Eks Majalah, 22000 Lbr Leaflet, Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebanyak 160 orang, Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di 6 kab/kota, Pengamanan Hutan Terpadu sebanyak 9 Kali Operasi Pamhut, Kegiatan Kampanye Pencegahan Illegal Logging melalui 225 Kali Penyiaran Iklan di RRI, TVRI dan Koran 24000 Leaflet, Penanganan Pasca Operasi Pengamanan Hutan sebanyak 10 lap, Pembinaan, Pengawasan dan Tindak Lanjut Pelanggaran di Bidang Kehutanan sebanyak 60 unit.	66,03%	80%	1.020.000.000	80%	1.122.000.000	85%	1.234.200.000	85%	1.357.620.000	85%	1.493.382.000	100%	6.227.202.000,00	DINAS KEHUTANAN
xx	02	20	Program perencanaan dan pengembangan hutan	• Dokumen perencanaan dan kebijakan pengembangan hutan	68,69%	75%	770.000.000	80%	847.000.000	85%	931.700.000	85%	1.397.550.000	85%	1.537.305.000	100%	5.483.555.000,00	DINAS KEHUTANAN
xx	02	23	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan.	Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal melalui : Terlaksananya pembuatan digitasi peta dan sosialisasi serta koordinasi hasil paduserasi kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah di 14 lokasi, Tersedianya 4 dokumen NSDH, Pemantapan dan Penataan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah seluas 1.080 km, Termonitornya kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan dan move Koridor sebanyak 290 unit, tersedianya data dan informasi sumberdaya hutan berupa hasil hutan non kayu sebanyak 4 laporan di 14 lokasi.	0%	80%	-	80%	1.550.000.000	85%	1.610.000.000	85%	1.770.000.000	85%	-	100%	4.930.000.000,00	
xx	03		Energi dan Sumber Daya Mineral														-	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
xx	03	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran selama satu tahun, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi 5 paket, operasional rutin kantor 5 paket, ATK 5 paket, rapat-rapat koordinasi, konsultasi keluar daerah 5 paket.	70%	80%	1.258.771.820	85%	1.321.710.411	85%	1.387.795.932	85%	1.457.185.728	85%	1.530.045.015	100%	6.955.508.905,21	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
xx	03	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan gedung 5 paket, perlengkapan, peralatan gedung 5 paket.	70%	80%	955.000.000	85%	1.002.750.000	85%	1.052.887.500	85%	1.105.531.875	85%	1.160.808.469	100%	5.276.977.843,75	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
xx	03	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 5 paket.	90 orang	80%	45.000.000	85%	47.250.000	85%	49.612.500	85%	52.093.125	85%	54.697.781	100%	248.653.406,25	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
xx	03	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Pembayaran biaya pemulangan 3 orang.	2 orang	80%	66.000.000	85%	69.300.000	85%	72.765.000	85%	76.403.250	85%	80.223.413	100%	364.691.662,50	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
xx	03	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelaksanaan bimtek 90 orang, kegiatan pameran dagang dan promosi 5 paket, studi banding luar daerah 5 paket, studi lapangan dalam daerah 5 paket.	70%	80%	444.000.000	85%	466.200.000	85%	489.510.000	85%	513.985.500	85%	539.684.775	100%	2.453.380.275,00	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
xx	03	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 5 paket	70%	80%	50.000.000	85%	52.500.000	85%	55.125.000	85%	57.881.250	85%	60.775.313	100%	276.281.562,50	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
xx	03	17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparaturnya tentang rencana ketenagalistrikan daerah dan energi daerah, tersusunnya Perda tentang Ketenagalistrikan melalui Bimbingan Teknis Pengelolaan Listrik Desa di 10 kab, Monitoring dan Sosialisasi Pengelolaan dan pemeliharaan PLTS di 13 kab, Sosialisasi Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi di 13 kab, Monitoring Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi 150 KV di 9 kab, Sosialisasi perundangan di 12 kab, Monitoring Penentuan Lokasi Pembangunan Listrik Desa di 56 desa, Sosialisasi Perda Ketenagalistrikan dan Rencana Umum Energi Daerah 13 kab, Penyelesaian Pembuatan Perda Ketenagalistrikan	70%	80%	320.000.000	85%	352.000.000	85%	387.200.000	85%	425.920.000	85%	468.512.000	100%	1.953.632.000,00	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
xx	03	18	Program Pembinaan, Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Pengusahaan Minyak dan Gas	Tersedianya kebutuhan/ pasokan BBM dan pasokan LPG melalui Monitoring dalam rangka Pembinaan Penentuan HET BBM di 110 lembaga penyalur, Monitoring Tataniaga Gas LPG di 20 kab, Monitoring dan Pengawasan Pengendalian Distribusi dan Tataniaga BBM di 22 kab, Inventarisasi Kebutuhan BBM Subsidi dan Non Subsidi di 26 kab, Monitoring Pelaksanaan Pemanfaatan Potensi Energi Coal Bed Methane (CBM) di 4 perusahaan	70%	80%	238.319.000	85%	262.150.900	85%	288.365.990	85%	317.202.589	85%	348.922.848	100%	1.454.961.326,90	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
xx	03	19	Program peningkatan kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Mineral dan Batubara	Tersedia data Potensi bahan galian	70%	80%	90.000.000	85%	99.000.000	85%	108.900.000	85%	119.790.000	85%	131.769.000	100%	549.459.000,00	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
xx	03	20	Program Pembinaan Dan Pelayanan Perijinan Pertambangan	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan perijinan pertambangan melalui 23 lap Rekonsiliasi PNBK Bidang Pertambangan ke Kabupaten, 23 lap pembinaan perijinan usaha pertambangan, 12 lap Pembinaan Penerbitan Izin Usaha Jasa Pertambangan.	70%	80%	90.000.000	85%	99.000.000	85%	108.900.000	85%	119.790.000	85%	131.769.000	100%	549.459.000,00	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
xx	03	21	Program Penyiapan Pengembangan Wilayah Pertambangan	Tersedianya Sistem Infor-masi Geografis (SIG)	70%	80%	126.000.000	85%	138.600.000	85%	152.460.000	85%	167.706.000	85%	184.476.600	100%	769.242.600,00	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
xx	03	22	Program Pengusahaan Listrik Dan Energi	Terwujudnya pembangunan dibidang kelistrikan dan energi, tersedianya dokumen rencana umum energi daerah sebagai bahan perencanaan energi daerah melalui Pengawasan dan pengelolaan Lingkungan serta K3 pada Jaringan transmisi 150 KV di 10 kab, Monitoring dan Pengawasan Pembangunan Ketenagalistrikan di 10 kab, Pembinaan terhadap Pengguna Listrik Non PLN (Captive Power) di 13 kab, Pengawasan dan pengelolaan Lingkungan serta K3 pada Pembangkit Listrik di Kalimantan Tengah di 10 kab, Pembuatan Kajian Kelayakan Pembangunan PLTU Mulut Tambang di 4 kab, Pembuatan Rencana Umum Daerah (RUED) di 14 kab/kota.	70%	80%	315.000.000	85%	346.500.000	85%	381.150.000	85%	419.265.000	85%	461.191.500	100%	1.923.106.500,00	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
xx	03	23	Program Pengembangan Listrik Dan Pemanfaatan Energi	Meningkatnya pemanfaatan energi dan pengembangan listrik melalui Survey Potensi Energi Air di 8 kab, Pembuatan FS dan DED PLTMH di 4 kab, Pembangunan PLTMH di 4 kab, Pembangunan Pilot Project Pico Hydro di 6 kab, Survey Potensi energi Angin / Bayu di 6 kab, Pembuatan FS dan DED Pembangkit Listrik Tenaga Angin/Bayu (PLTB) di 4 kab, Pilot Projek Pembangkit Listrik Tenaga Angin/Bayu (PLTB) di 4 kab, Pembangunan Pemanfaatan Biogas sbg energi listrik dan Rumah Tangga di Kalteng di 4 kab, Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar di 13 kab, Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat 5 kw di 4 kab, Pembangunan Lampu hias Jalan umum di Kalteng di 4 kab, Pembangunan JTM & JTR di Kalteng di 4 kab, Pembuatan Perencanaan & Ground pembangunan Ground Cable di kota Palangkaraya di 1 kota	70%	80%	3.530.000.000	85%	3.883.000.000	85%	4.271.300.000	85%	4.698.430.000	85%	5.168.273.000	100%	21.551.003.000,00	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
xx	03	24	Program Pembinaan Dan Pengawasan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Lingkungan Bidang Migas	Meningkatnya pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan bidang migas terhadap lembaga penyalur BBM dan depot Pertamina melalui Pembinaan K3L terhadap 135 Lembaga Penyalur BBM, Monitoring Pelaksanaan K3L 107 Depot Pertamina	70%	80%	80.000.000	85%	88.000.000	85%	96.800.000	85%	106.480.000	85%	117.128.000	100%	488.408.000,00	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
xx	03	25	Program Peningkatan Informasi Bidang Geologi	Meningkatnya informasi tentang data geologi dan hidrogeologi melalui Survey Karakteristik Geologi Kelautan Kawasan Lepas Pantai di 8 kab, Penyelidikan Hidrogeologis pada Cekungan Air Tanah di 9 kab, Survey Dasar Geologi Rekayasa Wilayah Pesisir Pantai di 4 kab, Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Air Bawah Tanah di 12 kab, Pembahasan RAPERDA Air Bawah Tanah 1 dok, Survey Pemanfaatan Air dan Identifikasi Air Asam Tambang di 9 kab, Inventarisasi Air Bawah Tanah di 12 kab, Pengawasan Air Bawah Tanah di 9 kab, Survey Mitigasi Bencana Geologi di 4 kab, Survey Geologi Teknik untuk tempat pembuangan akhir (TPA) di 4 kab.	70%	80%	338.000.000	85%	371.800.000	85%	408.980.000	85%	449.878.000	85%	494.865.800	100%	2.063.523.800,00	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
xx	03	26	Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium	Meningkatnya kapasitas laboratorium melalui tersedianya peralatan laboratorium melalui Uji Pengolahan Bahan Galian di 6 kab, Pengadaan Peralatan Laboratorium 4 pkt, Reagen Kimia 5 pkt, Pengadaan Peralatan Ukur 5 pkt, Uji Kelayakan Alat Survey dan Pemetaan (Kalibrasi) 4 pkt, Pembuatan Briket di 7 kab	70%	80%	272.000.000	85%	299.200.000	85%	329.120.000	85%	362.032.000	85%	398.235.200	100%	1.660.587.200,00	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
xx	03	27	Monitoring Dan Evaluasi Program	Terwujudnya Rakernis Sinkronisasi Program Se-Kalteng 1 Lap, Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan 25 Lap, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK di 5Kab, sosialisasi dan bimtek pengelolaan DAK di 5 kab.	70%	80%	426.945.180	85%	469.639.698	85%	516.603.668	85%	568.264.035	85%	625.090.438		2.606.543.018,42	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
xx	03	28	Program Pengawasan dan Evaluasi Pertambangan	Meningkatnya pengawasan dan Evaluasi Usaha Pertambangan melalui 73 lap Pengawasan Usaha Pertambangan, 14 lap Pengawasan Izin Pengangkutan dan Perjualan Bahan Galian , 14 lap Koordinasi Pendataan dan Penyuluhan PETI,	70%	80%	146.804.000	85%	161.484.400	85%	177.632.840	85%	195.396.124	85%	214.935.736	100%	896.253.100,40	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
	04		Pariwisata															DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
xx	04	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah data kebudayaan yang berhasil diinventarisasi dan di dokumentasikan, Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan, Jumlah produk dan karya budaya yang memiliki nilai ilmu pengetahuan, sosial budaya dan ekonomi, Menurutnya konflik etnis dan sosial yang disebabkan oleh	3 paket dan 3 lokasi di 14 kab/kota	80%	485.000.000	80%	509.250.000	85%	534.712.500	85%	561.448.125	85%	589.520.531	100%	2.679.931.156,25	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
xx	04	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah pengunjung Museum, Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya, baik di darat maupun di bawah air serta obyek budaya yang dilestarikan	20 kegiatan	80%	2.620.000.000	80%	2.882.000.000	85%	3.170.200.000	85%	3.487.220.000	85%	3.835.942.000	100%	15.995.362.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
xx	04	15	Program pengembangan data/informasi	Persentase terbitnya dokumen yang dihasilkan dari pengolahan data di bidang kebudayaan dan pariwisata yang tepat waktu	0%	70%	40.000.000	80%	42.000.000	80%	44.100.000	85%	46.305.000	85%	48.620.250	100%	221.025.250,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
xx	04	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran seperti : Jasa menyurat, komunikasi, operasional rutin, Alat Tulis Kantor, rapat rapat koordinasi, konsultasi	12 paket/ 3 orang/ 2 tahun	80%	1.362.740.000	80%	1.430.877.000	85%	1.502.420.850	85%	1.577.541.893	85%	1.656.418.987	100%	7.529.998.729,63	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
xx	04	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan bangunan gedung/kantor, pemeliharaan peralatan/perengkapan	8 paket	80%	442.310.000	80%	464.425.500	85%	487.646.775	85%	512.029.114	85%	537.630.569	100%	2.444.041.958,19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
xx	04	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas dan pakaian kerja lapangan	5 paket	80%	34.500.000	80%	36.225.000	85%	38.036.250	85%	39.938.063	85%	41.934.966	100%	190.634.278,13	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
xx	04	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Pembayaran biaya pemulangan PNS yang memasuki masa purna tugas.	1 paket	80%	100.000.000	80%	105.000.000	85%	110.250.000	85%	115.762.500	85%	121.550.625	100%	552.563.125,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
xx	04	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelaksanaan Bimbingan Teknik 4 paket.	1 kegiatan/ 1 tahun	80%	65.000.000	80%	68.250.000	85%	71.662.500	85%	75.245.625	85%	79.007.906	100%	359.166.031,25	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
xx	04	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja 5 paket, dan dokumen Laporan Keuangan 5 paket, Openi terhadap laporan kinerja dan laporan keuangan, Jumlah informasi bidang kebudayaan dan pariwisata yang disajikan melalui media	1 paket	80%	30.000.000	80%	31.500.000	85%	33.075.000	85%	34.728.750	85%	36.465.188	100%	165.768.937,50	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
xx	04	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara, Prosentase pertumbuhan Wisatawan Mancanegara pertahun, Jumlah Wisatawan Nusantara, Prosentase pertumbuhan wisatawan Nusantara, Jumlah pengeluaran wisatawan Mancanegara, Jumlah pengeluaran wisatawan Nusantara, Kenaikan jumlah event pariwisata yang berpola kemitraan, Peningkatan Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition (MICE)	8 kegiatan/ 1 paket	80%	530.000.000	80%	556.500.000	85%	584.325.000	85%	613.541.250	85%	644.218.313	100%	2.928.584.562,50	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
xx	04	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pertambahan jumlah tempat kunjungan wisatawan Mancanegara dan wisatawan Nusantara, Jumlah organisasi/perorangan yang berusaha dibidang pariwisata, Jumlah peningkatan aksesibilitas dan fasilitas disetiap destinasi, Peningkatan jenis destinasi ekowisata, Peningkatan jenis destinasi wisata bahari	3 kegiatan	80%	485.000.000	80%	533.500.000	85%	586.850.000	85%	645.535.000	85%	710.088.500	100%	2.960.973.500,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
xx	04	17	Program pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah keluhan data kebudayaan dan pariwisata per tahun, Jumlah pengguna internet per tahun, Jumlah peneliti di bidang kebudayaan dan pariwisata	0%		80%	340.000.000	80%	374.000.000		411.400.000		452.540.000		1.577.940.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
xx	04	18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kerjasama dibidang kebudayaan	0%	-	80%	693.000.000	80%	1.039.500.000	85%	1.143.450.000	90%	1.257.795.000	95%	4.133.745.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
xx	04	19	Program Pengelolaan keragaman Budaya	Jumlah pelatihan	1 kegiatan	-	80%	740.000.000	80%	814.000.000	85%	895.400.000	90%	984.940.000	95%	3.434.340.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
xx	04	20	Program Pengelolaan kekayaan Budaya	Jumlah pelatihan	17 kegiatan, 3 organisasi	-	80%	680.000.000	80%	748.000.000	85%	822.000.000	90%	905.080.000	95%	3.155.080.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	04		Program Pengembangan Karakter dan Pekerti Bangsa	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa Indonesia.	0%	-	80%	300.000.000	85%	600.000.000	85%	660.000.000	85%	726.000.000	100%	2.286.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	04		Program Peningkatan Seni Budaya	Meningkatnya pelestarian seni budaya dikalangan masyarakat (seniman dan budayawan)	0%	-	80%	800.000.000	85%	1.200.000.000	85%	1.400.000.000	85%	1.540.000.000	100%	4.940.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	04		Program Promosi Budaya	Meningkatnya promosi kebudayaan pada event nasional maupun internasional	0%	-			80%	500.000.000	85%	500.000.000	85%	550.000.000	100%	1.550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
	05	Kelautan dan Perikanan															DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
xx	05	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terseleenggaranya pelayanan administrasi perkantoran selama lima tahun, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi 5 paket, operasional rutin kantor 5 paket, ATK 5 paket, rapat-rapat koordinasi, konsultasi keluar daerah 120 paket.	75%	80%	838.700.000	85%	880.635.000	85%	924.666.750	85%	970.900.088	85%	1.019.445.092	100%	4.634.346.929,38	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
xx	05	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan gedung 5 paket, perlengkapan, peralatan gedung 5 paket.	80%	80%	12.450.000	85%	13.072.500	85%	13.726.125	85%	14.412.431	85%	15.133.053	100%	68.794.109,06	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
xx	05	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 5 paket untuk 500 orang.	80%	80%	44.500.000	85%	46.725.000	85%	49.061.250	85%	51.514.313	85%	54.090.028	100%	245.890.590,63	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
xx	05	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Pembayaran biaya pemulangan 10 orang.	100%	80%	60.000.000	85%	63.000.000	85%	66.150.000	85%	69.457.500	85%	72.930.375	100%	331.537.875,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
xx	05	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelaksanaan bimtek 75 orang.	80%	80%	300.000.000	85%	315.000.000	85%	330.750.000	85%	347.287.500	85%	364.651.875	100%	1.657.689.375,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
xx	05	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja 5 paket, dokumen laporan keuangan 5 kali.	80%	80%	77.000.000	85%	80.850.000	85%	84.892.500	85%	89.137.125	85%	93.593.981	100%	425.473.606,25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
xx	05	20	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	* Produksi perikanan budidaya 414.009 ton	23.659 ton	80%	2.837.700.000	85%	3.121.470.000	85%	3.433.617.000	85%	5.150.425.500	85%	5.665.468.050	100%	20.208.680.550,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
xx	05	21	Program Pengembangan dan Pendendalian Perikanan Tangkap	* Produksi perikanan tangkap 533.71,94 ton	101.199,20 ton	80%	6.427.843.000	85%	7.070.627.300	85%	10.605.940.950	85%	15.908.911.425	85%	17.499.802.568	100%	57.513.125.242,50	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
xx	05	25	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	* Volume produk olahan hasil perikanan 56.408 ton	9.523 ton	80%	460.000.000	85%	506.000.000	85%	556.600.000	85%	612.260.000	85%	673.486.000	100%	2.808.346.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
xx	05	26	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir	* Tertatanya dan dimanfaatkan kawasan pesisir	0%	80%	1.003.207.000	85%	1.103.527.700	85%	1.213.880.470	85%	1.335.268.517	85%	1.468.795.369	100%	6.124.679.055,70	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
xx	05	27	Program Pengawasan dan pengendalian SDKP	Menurunnya tindakan illegal fishing 40%	5%	80%	235.000.000	85%	258.500.000	85%	284.350.000	85%	312.785.000	85%	344.063.500	100%	1.434.698.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
xx	05	33	Program Pengembangan Wirausaha	* Terbentuknya kawasan minapolitan di 13 lokasi	5 lokasi	-	-	85%	726.000.000	85%	798.600.000	85%	1.197.900.000	85%	1.317.690.000	100%	4.040.190.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	05	22	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan				370.000.000										370.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	05	28	Program Peningkatan Kompetensi Laboratorium Perikanan		1 Laboratorium		239.100.000										239.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	06	Perdagangan																DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
xx	06	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terseleenggaranya pelayanan administrasi perkantoran selama lima tahun, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi 5 paket, operasional rutin kantor 5 paket, ATK 5 paket, rapat-rapat koordinasi, konsultasi keluar daerah 5 paket.	97,33%	80%	825.000.000	85%	866.250.000	85%	909.562.500	85%	955.040.625	85%	1.002.792.656	100%	4.558.645.781,25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
xx	06	2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan gedung 5 paket, perlengkapan, peralatan gedung 5 paket.	97,35%	80%	705.000.000	85%	740.250.000	85%	777.262.500	85%	816.125.625	85%	856.931.906	100%	3.895.570.031,25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
xx	06	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 5 paket.	97,05%	80%	70.000.000	85%	73.500.000	85%	77.175.000	85%	81.033.750	85%	85.085.438	100%	386.794.187,50	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
xx	06	4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Pembayaran biaya pemulangan 39 orang.	100%	80%	60.000.000	85%	63.000.000	85%	66.150.000	85%	69.457.500	85%	72.930.375	100%	331.537.875,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
xx	06	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelaksanaan bimtek 25 orang, diklat PNS penyuluh indag 5 kali.	-	80%	100.000.000	85%	105.000.000	85%	110.250.000	85%	115.762.500	85%	121.550.625	100%	552.563.125,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
xx	06	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja 5 paket, dokumen laporan keuangan 5 kali.	99,96%	80%	95.000.000	85%	99.750.000	85%	104.737.500	85%	109.974.375	85%	115.473.094	100%	524.934.968,75	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
xx	06	15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	• Produk makanan dan minuman aman di konsumsi • Produk halal yang berlabel	92,65%	85%	1.286.924.000	85%	1.351.270.200	85%	1.418.833.710	85%	1.489.775.396	85%	1.564.264.165	100%	7.111.067.470,78	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
xx	06	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya mutu dan kualitas produk ekspor yang memiliki kualitas sesuai dengan standar yang berlaku, memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor di Kalimantan Tengah melalui Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor 30 org, Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan 1 keg, Koordinasi Penyelesaian Masalah Produksi dan Distribusi Sektor Industri 12 bln, Membangun Jejaring dengan Eksporir 1 keg, Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait/ Asosiasi/ Pengusaha 1 keg, Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor 1 keg, Pembinaan untuk Mendapatkan Sertifikasi Produk Pengguna Tanda SNI yang Diberikan di BPSMB 14 Kab/Kota 1 dok, Pengawasan dan Penilaian Kualitas Produk Ekspor di BPSMB 14 Kab/Kota, Penilaian atas Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI di BPSMB 14 Kab/Kota, Pembinaan Produk Berorientasi Ekspor di BPSMB 14 Kab/Kota 3.000 contoh/komoditi, Pelatihan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu BOKAR 30 org, Pembinaan terhadap Eksporir di 3 Kabupaten, Peningkatan Jaringan Informasi Ekspor, Sosialisasi Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Produk Hasil Pertambangan 30 org, Kajian Tata Niaga Karet terhadap pengusaha Karet di Kalteng, Koordinasi Asosiasi dan Eksporir, Kajian Tata Niaga Rotan terhadap Pengusaha Rotan di Kalteng, Parjatapda (Peningkatan Ekspor), Pelatihan Teknis Diklat Pengujian Mutu Barang 10 org, Rapat Koordinasi Sistem Jaringan Laboratorium Penguji Mutu Barang 15 org, Pelatihan Teknis Surat Keterangan Asal (SKA) / Angka Pengenal Import – Online, Rapat Koordinasi Instansi Terkait dan Pelaku Usaha Untuk Peningkatan Ekspor 40 org, Temu Wicara Petani Rotan dan Karet dengan Pelaku usaha 20 org, Sinkronisasi Pengujian Antar Laboratorium Penguji Mutu, Pengadaan Alat Uji Mutu Karet di BPSMB P.Raya, Sosialisasi Pengujian CPO terhadap Pengusaha CPO di Kalimantan Tengah 30 org, Pengadaan Bantuan Asam Semut bagi Pelaku usaha Komoditi Karet di Kalimantan Tengah, Akreditasi / Survylance oleh KAN.	98,17%	85%	532.076.000	85%	585.283.600	85%	643.811.960	85%	708.193.156	85%	779.012.472	100%	3.248.377.187,60	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
xx	06	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	• Terjalin kontak dagang produk lokal • Promosi produk unggulan daerah	-	85%	555.000.000	85%	610.500.000	85%	671.550.000	85%	738.705.000	85%	812.575.500	100%	3.388.330.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
xx	06	19	Program penumbuhan Industri agro	Jumlah industri agro pertahun	-	85%	-	85%	1.250.000.000	85%	1.375.000.000	85%	2.062.500.000	85%	2.268.750.000	100%	6.956.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
xx	06	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri • Pertumbuhan Industri • Cakupan bina kelompok pengrajin 	99,39%	85%	1.340.000.000	85%	2.010.000.000	85%	2.211.000.000	85%	3.316.500.000	85%	3.648.150.000	100%	12.525.650.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				JUMLAH			838.584.138.089		1.193.513.391.124		1.375.739.130.763		1.624.330.928.188		1.889.892.217.872		6.922.024.806.036,27	

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi gubernur terpilih dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2010-2015 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan antara lain: Indikator kemajuan otonomi daerah, kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Secara keseluruhan hasil akhir tujuan otonomi daerah menggunakan parameter "Peningkatan Kualitas Manusia" dan Indikatornya adalah nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu; aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada aspek kesejahteraan masyarakat penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah misalnya, dapat diukur dari pertumbuhan PDRB yang ditargetkan tumbuh rata-rata 7 persen per tahun sedangkan pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7,5 persen. Demikian pula dengan laju inflasi diharapkan dapat ditekan hingga mencapai 2,5 persen pada tahun 2015. Angka kemiskinan dan pengangguran ditargetkan dapat turun masing-masing menjadi 2 persen pada tahun 2015. Sedangkan ranking IPM Kalimantan Tengah diharapkan mampu menduduki ranking 5 pada tingkat nasional di tahun 2015. Penetapan indikator untuk ketiga aspek tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat .

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
I.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pertumbuhan PDRB (%)	6,47	6,7	6,9	7,1	7,3	7,5	7,5
1.2.	Laju inflasi provinsi (%)	9,51	6,0	5,0	4,0	3,0	2,5	2,5
1.3.	PDRB per kapita (Juta Rp.)	16,5***	18,5	21,0	24,0	27,5	31,0	31,0
1.4.	Angka Kemiskinan (%)	6,77	4,5	3,5	3,0	2,5	2,0	2,0
1.5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,88	3,5	3,0	2,75	2,5	2	2
1.5.	Ranking IPM Nasional	7***	7	7	6	6	5	5
II.	Kesejahteraan Sosial							
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka melek huruf (%)	98,84	99,00	99,20	99,40	99,60	99,80	99,80
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,09***	8,20	8,50	8,70	8,90	9,10	9,10
2.	Kesehatan							
2.1.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	970***	975	980	985	990	995	995
2.2.	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	71,10***	71,30	71,50	71,70	71,90	72,10	72,10
2.3.	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	16,8	16	16	16	15	15	15
3.	Ketenagakerjaan							
3.1	Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	96,12	96,50	97,00	97,25	97,50	98,00	98,00

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
III.	Seni Budaya dan Olahraga							
1.	Kebudayaan							
1.1	Jumlah grup kesenian/ sanggar seni (buah)	168	173	178	183	188	193	193
1.2	Jumlah gedung (unit)	10	16	17	17	17	17	17
2.	Pemuda dan Olahraga							
2.1	Jumlah Klub olahraga (buah)	50	56	70	84	84	84	84
2.1	Jumlah gedung olahraga (unit)	15	15	15	16	16	16	16

Keterangan:

* : Data sampai Triwulan II-2010,

** : Data sampai Juli 2010,

*** : Data Tahun 2009

**** : Data tidak tersedia

B. Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek Pelayanan Umum penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup urusan wajib dan Urusan pilihan. Penetapan indikator untuk kedua aspek tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek Pelayanan Umum.

Tabel 9.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek Pelayanan Umum

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
I.	Pelayanan Urusan Wajib							
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan dasar:							
	SD/MI							
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	98.72	98.77	98.82	98.87	98.92	98.97	99.02
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	89.05	89.55	90.05	90.55	91.05	91.55	91.55
1.1.3.	Rasio guru terhadap murid	1 : 13	1 : 15	1 : 17	1 : 19	1 : 22	1 : 24	1 : 24
1.1.4.	Prosentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%)	35.45	45.65	55.94	65.79	75.16	83.54	83.54
1.1.5.	Angka partisipasi murni dan paket A	98.72	98.82	98.86	98.89	99.01	99.04	99.04
1.1.6.	Angka partisipasi kasar	114.43	115.50	116.50	117.50	118.50	119.50	119.50
	SMP/MTs							
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	82.09	84.59	85.79	88.59	91.28	95.00	95.00
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	45.18	44.68	44.18	43.68	43.18	42.68	42.68
1.1.3.	Rasio guru terhadap murid	1 : 15	1 : 16	1 : 17	1 : 18	1 : 20	1 : 22	1 : 22
1.1.4.	Prosentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi(%)	55.00	59.16	68.79	79.53	89.46	98.45	98.45
1.1.5.	Angka partisipasi kasar dan paket B	91.22	92.42	93.62	94.42	95.62	96.82	98.02

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
1.1.6	Angka partisipasi murni	84.46	84.51	84.56	84.61	84.66	84.71	84.76
1.2.	Pendidikan menengah							
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah	62.24	63.24	64.24	65.24	66.24	67.24	67.24
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	25.25	25.00	24.75	24.50	24.25	24.00	24.00
1.2.3	Rasio guru terhadap murid	1 : 14	1 : 16	1 : 17	1 : 18	1 : 19	1 : 20	1 : 20
1.2.4	Prosentase guru SMA/SMALB/SMK berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi(%)	65.23	74.58	79.16	85.46	92.84	98.00	98.00
1.2.5	Prosentase sekolah SMA/SMALB/SMK melaksanakan <i>e-pembelajaran (e-learning)</i> - (%)	5.00	8.00	12.00	14.00	16.00	20.00	20.00
1.2.6	Prosentase APK PLB setara SMALB (%)	53.33	55.83	57.03	58.23	59.43	60.63	61.83
1.2.7	Angka partisipasi kasar	65.09	66.09	67.09	68.09	69.09	70.09	70.09
1.2.8	Angka partisipasi murni	62.24	63.24	64.24	65.24	66.24	67.24	67.24
2.	Kesehatan							
2.1	Rasio posyandu per satuan balita	10.67***	10.72	10.77	10.82	10.87	10.92	10.92
2.2	Rasio puskesmas per satuan penduduk	0.08***	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
2.3	Rasio pustu per satuan penduduk	0.43***	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
2.4	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0.08***	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
2.5	Rasio dokter per satuan penduduk	0.27***	0.37	0.47	0.57	0.67	0.77	0.77
2.6	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2.53**8	2.73	2.93	3.13	3.33	3.53	3.53
2.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	56.73***	61.73	66.73	71.73	76.73	81.73	81.73

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
2.8	Umur Harapan Hidup (UHH) – (Tahun)	71.10***	71.30	71.50	71.70	71.90	72.10	72.10
2.9	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	30***	29	28	27	26	25	23/1000
2.10	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	228***	226	200	180	150	102	102/100.000
2.11	Prevalensi Gizi Buruk pada Anak (%)	16.70***	16	16	16	15	15	15
2.12	AKABA per 1000 Balita	34***	34	34	34	33	32	32/1000
3.	Pekerjaan Umum							
3.1	Panjang jalan dalam kondisi baik (Km)	1.084,35	1.133,35	1.197,90	1.269,15	1.349,95	1.436,70	1.436,70
3.2	Rasio Jaringan Irigasi dan rawa (Ha)	224.020	32.400	33.345	33.375	34.960	31.940	390.040
3.3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1 : 196	1 : 177	1 : 158	1 : 140	1 : 121	1 : 102	1 : 102
3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	24,01	26,06	28,11	30,16	32,21	34,28	34,28
3.5	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk ****	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	1 : 1.667	1 : 1.501	1 : 1.334	1 : 1.167	1 : 1.000	1 : 834	1 : 834
3.7	Rasio rumah layak huni	1 : 4,14	1 : 4,08	1 : 4,02	1 : 3,96	1 : 3,9	1 : 3,84	1 : 3,84
3.8	Rasio permukiman layak huni (%)	95	95,40	95,80	96,20	96,60	97,00	97
3.9	Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km)	1.642,96	1.642,96	1.664,96	1.679,96	1.696,96	1.716,96	1.716,96
3.10	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) ~ (Km)	11.057	11.510	11.513	11.516	11.519	11.522	11.522

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
3.11	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam) (Km)	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500	6.500
3.12	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (Km)	100	103	105	107	110	113	113
3.13	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (Km)	5,0	4,6	4,2	3,8	3,4	3,0	3,0
3.14	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar****	-	-	-	-	-	-	-
3.15	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (m)	35.805	1.343	1.400	1.400	1.500	1.500	7.143
3.16	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota ****	-	-	-	-	-	-	-
3.17	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	35.503	56.138	65.688	87.288	109.288	135.338	453.74
3.18	Lingkungan Pemukiman (Ha)	1.607.113	1.623.184	1.639.416	1.655.810	1.672.368	1.689.092	1.689.092
4.	Perumahan							
4.1	Rumah tangga pengguna air bersih (Unit)	128.487	161.527	194.568	227.608	260.649	293.690	293.690
4.2	Rumah tangga pengguna listrik (Unit)	284.310	298.634	322.180	340.573	359.574	372.982	372.982
4.3	Rumah tangga bersanitasi (%)	24,01	26,06	28,11	30,16	32,21	34,28	34,28

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015	
			Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
4.4	Lingkungan pemukiman kumuh (%)	5	4,6	4,2	3,8	3,4	3	3	
4.5	Rumah layak huni (Unit)	544.231	553.897	563.563	573.229	582.895	592.562	592.562	
4.6	Rumah tangga pengguna air bersih (Unit)	128.487	161.527	194.568	227.608	260.649	293.690	293.690	
5.	Penataan Ruang								
5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	7	1	1	1	1	1	5	
5.2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan****	-	-	-	-	-	-	-	
5.3	Ruang publik yang berubah peruntukannya****	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Perencanaan Pembangunan								
6.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	1	-	-	-	-	-	1	
6.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	-	1	-	-	-	-	1	
6.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	5	
6.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	5	
7.	Perhubungan								

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (PnP)	119.511.749	100.000	150.000	175.000	200.000	215.000	120.351.749
7.2	Load Factor Angkutan Jalan (%)	50	60	70	70	70	70	70
7.3	Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit)	21.867	200	250	200	250	250	23017
7.4	Jumlah Angkutan Laut (Unit)	191	2	2	2	3	3	203
7.5	Jumlah Angkutan Udara (Rute Regional dan Nasional) (Armada)	11	1	2	2	2	2	20
7.6	Jumlah Angkutan Jalan (AKAP & AKDP) (Unit)	200	10	10	10	10	10	250
7.7	Jumlah Angkutan Sungai (Unit)	4781	50	50	50	50	50	5031
7.8	Jumlah Terminal Angkutan Jalan (Type A dan B) (Buah)	10	0	2	1	1	1	15
7.9	Jumlah Bandara (Buah)	9	1	1	1	1	1	14
7.10	Jumlah Dermaga Sungai (Buah)	118	6	6	6	6	6	148
7.11	Jumlah Pelabuhan Laut (Buah)	10	2	2	2	2	2	20
7.12	Kepemilikan KIR angkutan umum (Unit)	21.867	200	200	200	200	200	22.867
7.13	Lama pengurusan uji kelayakan angkutan umum (KIR) (Hari)	2	2	1	1	1	1	1
7.14	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.)	60.000	60.000	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
7.15	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (Unit)	673	300	300	300	300	300	2173
7.16	Pemasangan Rambu Sungai (Unit)	542	400	400	400	400	400	2542
7.17	Pemasangan Rambu SBNP (Unit)	70	0	10	10	15	15	120
8.	Lingkungan Hidup							
8.1	Perbaikan Peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	22	17	12	7	3	3	3
8.2	Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (Jumlah Kabupaten/Kota)	9	9	9	9	10	10	
8.3	Peningkatan kualitas akses informasi SDA, keanekaragaman hayati dan LH	7	7	7	7	7	7	
8.4	Pemantauan, pengendalian dan pendataan kawasan ekosistem pesisir dan laut (jumlah lokasi)	6	6	6	6	6	6	30
8.5	Penyelesaian perselisihan/sengketa lingkungan hidup (%)	50	80	90	100	100	100	100
8.6	Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (jumlah Kabupaten/kota)	1	3	3	3	3	2	14
9.	Pertanahan							
9.1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	6,23	6,5	6,94	7,29	7,65	7,83	7,83
9.2	Penyelesaian kasus tanah Negara (Jumlah kasus)	71	71	78	86	5	104	104
9.3	Penyelesaian izin lokasi ****	-	-	-	-	-	-	-

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
10	Kependudukan dan Catatan Sipil							
10.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	54	60	70	80	90	95	95
10.2	Rasio bayi berakte kelahiran	45	55	65	75	85	95	95
10.3	Rasio pasangan berakte nikah ****	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Kepemilikan KTP (orang)	968.345	1.075.938	1.255.262	1.434.585	1.613.908	1.703.569	1.703.569
10.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk****	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Manual	Manual	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
10.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	12 Kab/Kota	2 Kab/Kota	-	-	-	-	14 Kab/Kota
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	1,85	1,87	1,89	1,92	1,94	1,96	1,96
11.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	33,08	33,10	33,12	33,14	33,16	33,18	33,18
11.3	Rasio KDRT	0,0014	0,0012	0,0010	0,008	0,006	0,004	0,004
11.4	Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%)	0,57	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47	0,47
11.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	34,93	34,95	34,97	34,99	35,01	35,03	35,03

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
11.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	100	100	100
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	0,79	0,76	0,73	0,70	0,67	0,64	0,64
12.2	Rasio akseptor KB	22,73	22,75	22,77	22,79	22,81	22,83	22,83
12.3	Cakupan peserta KB aktif (Orang)	298.910	313.859	345.241	379.765	417.742	459.516	459.516
12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	191.474	181.901	172.805	164.165	155.956	148.158	148.158
13.	Sosial							
13.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Unit)	100	100	100	100	110	120	530
13.2	PMKS yg memperoleh bantuan social (Orang)	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	6.375
13.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (Kasus)	120	120	220	220	220	220	1.000
14	Ketenagakerjaan							
14.1	Angka partisipasi angkatan kerja	534	550	575	600	625	650	650
14.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Kasus)	140	50	50	60	100	100	360
14.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,86	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	78,00

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
14.4	Pencari kerja yang ditempatkan (Orang)	3.142	3.500	5.000	7.500	10.000	12.500	12.500
14.5	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,88	3,5	3,0	2,75	2,5	2	2
14.6	Keselamatan dan perlindungan	174.975	200	200	200	300	300	1.200
14.7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (Kasus)	-	10	20	25	25	25	105
15.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
15.1	Persentase koperasi aktif (%)	74,34	77	79	82	85	87	87
15.2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit)	41.613	41.700	41.900	42.200	42.500	42.700	42.700
15.3	Jumlah BPR/LKM (Unit)	63	70	80	90	100	110	110
15.4	Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	274.788	275.000	285.000	295.000	310.000	350.000	350.000
16.	Penanaman Modal							
16.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit)	374	387	392	407	423	438	438
16.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN dalam Milyar Rupiah /PMA dalam US \$ Ribu)	19.860/5.018	21.000/6.500	22.700/7.300	23.600/8.700	25.400/9.800	26.700/10.400	26.700/10.400
16.3	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	25,6	27	30	32	35	37	37
16.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	91,63	95	95	95	95	97	477

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
			Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	
17.	Kebudayaan							
17.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	2	1	2	1	2	1	7
17.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya ****	-	-	-	-	-	-	
17.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	490	488	487	486	485	484	484
18.	Kepemudaan dan Olahraga							
18.1	Jumlah organisasi pemuda	62	62	62	65	65	65	60
18.2	Jumlah organisasi olahraga	42	42	42	42	42	42	42
18.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	50	60	60	65	70	75	230
18.4	Jumlah kegiatan olahraga	27	30	35	40	45	50	200
18.5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (buah) <i>Keterangan : Gedung Pertemuan, Sanggar Pramuka, Kedai Pramuka, Mess Pramuka, Pondok Pemuda, Gedung KNPI, Bumi Perkemahan</i>	33	33	34	34	35	35	35
18.6	Lapangan olahraga (lapangan Volly, sepak bola, bulu tangkis, basket) (buah)	207	210	215	220	225	230	230
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
19.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Ormas/LSM)	150	150	200	200	200	200	200

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
19.2	Kegiatan pembinaan politik daerah (Papol)	38	38	38	38	38	38	38
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
20.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk ****	70	73	73	75	75	75	75
20.2	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (Orang)	30	30	30	30	30	30	30
20.3	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	10	10	10	10	10	10	10
20.4	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,48*	6,7	6,9	7,1	7,3	7,5	7,5
20.5	Kemiskinan (%)	6,77	4,5	3,5	3,0	2,5	2,0	2,0
20.6	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah****	-	-	-	-	-	-	-
20.7	Penegakan PERDA**** (buah)	-	-	50	55	60	60	60
20.8	Cakupan patroli petugas Satpol PP****	-	-	30	30	30	30	30
20.9	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten****	-	-	-	-	-	-	-

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
20.10	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (Orang)	11.621	12.783	14.061	15.467	17.013	18.714	18.714
20.11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten****	-	-	-	-	-	-	-
20.12	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ****	-	-	-	-	-	-	-
20.13	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (paket)	210	220	231	243	255	268	1217
20.14	Sistim Informasi Manajemen Pemda****	-	-	-	-	-	-	-
20.15	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakatt****	-	-	-	-	-	-	-
21.	Ketahanan Pangan							
21.1	Regulasi ketahanan pangan (Pergub)	2	2	1	1	2	1	7
21.2	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	93.330	95.740	97.180	98.640	99.630	101.120	101.120
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
22.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	2,7	3	4	5	6	8	28,7
22.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	2,8	3	3,96	4,90	5,83	6,73	27,22
22.3	Jumlah LSM (buah)	150	200	200	200	200	200	200

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
22.4	LPM Berprestasi (%)	6,73	7,40	8,14	8,95	9,85	10,83	51,9
22.5	PKK aktif (Unit)	1.470	1.480	1.494	1.508	1.522	1.536	9.010
22.6	Posyandu aktif (Unit)	110	115	121	127	133	140	636
22.7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (Paket)	562	618	680	748	823	905	4.336
22.8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (Paket)	260	273	287	301	316	332	1.509
23.	Statistik							
23.1	Buku " Kalimantan Tengah Dalam Angka"	1	1	1	1	1	1	1
23.2	Buku "PDRB Kalimantan Tengah"	1	1	1	1	1	1	1
24.	Kearsipan							
24.1	Pengelolaan arsip secara baku (Box)	4.650	5.430	6.210	6.990	7.770	85.550	116.600
24.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Orang)	72	83	94	105	116	127	597
25.	Komunikasi dan Informatika							
25.1	Jumlah jaringan komunikasi****	-	-	-	-	-	-	-
25.2	Desa dering/Telepon Pedesaan (Unit)	1131	100	82	50	50	50	1463
25.3	Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)	132	4	4	4	4	4	152
25.4	Warung masyarakat Informasi	1	0	0	0	0	0	1
25.6	Pusat Komunitas Kreatif (buah)	0	1	4	3	3	3	14

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
25.7	M-CAP (<i>Mobile Capacity Acces Point</i>)	1	0	0	0	0	0	1
25.8	M-PLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) (unit)	0	6	0	0	0	0	6
25.9	Data Center (buah)	1	0	0	0	0	0	1
25.10	Media Center (buah)	1	0	0	0	0	0	1
25.11	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0.0000653	0.0000667	0.0000690	0.0000700	0.0000718	0.0000737	0.0000737
25.12	Jumlah surat kabar nasional/lokal	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6
25.13	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	59/16	59/16	59/16	59/16	59/16	59/16	59/16
25.14	Web site milik pemerintah daerah (buah)	15	15	15	15	15	15	15
25.15	Pameran/expo****	-	-	-	-	-	-	-
26.	Perpustakaan							
26.1	Jumlah perpustakaan (Unit)	124	215	227	227	227	227	1.247
26.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	269.366	279.366	289.366	296.366	309.366	319.366	319.366
26.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Jumlah Judul)	85.521	86.650	91.650	96.750	101.650	106.850	569.071
II. Pelayanan Urusan Pilihan								
1. Pertanian dan Peternakan								
1.1.	Luas tanam tanaman pangan							
1.1.1.	Padi sawah (Ha)	139.156	140.548	141.953	143.373	144.806	146.254	146.254
1.1.2.	Padi ladang (Ha)	65.488	66.143	66.804	67.472	68.147	68.829	68.829
1.1.3.	Jagung (Ha)	4.725	4.772	4.820	4.868	4.917	4.966	4.966

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
1.1.4.	Kedelai (Ha)	3.494	3.529	3.564	3.600	3.636	3.672	3.672
1.1.5.	Kacang Tanah (Ha)	906	915	924	933	943	952	952
1.1.6.	Kacang Hijau (Ha)	11	11,11	11,22	11,33	11,45	11,56	11,56
1.1.7.	Ubi Kayu (Ha)	6.140	6.201	6.263	6.26	6.389	6.453	6.453
1.1.8.	Ubi Jalar (Ha)	1.436	1.450	1.465	1.480	1.494	1.509	1.509
1.2.	Luas Panen tanaman pangan							
1.2.1.	Padi sawah (Ha)	146.964	148.434	149.918	151.417	152.931	154.461	154.461
1.2.2.	Padi ladang (Ha)	100.100	101.101	10.112	103.133	104.164	105.206	105.206
1.2.3.	Jagung (Ha)	3.232	3.264	3.297	3.330	3.363	3.397	3.397
1.2.4.	Kedelai(Ha)	2.162	2.184.	2.205	2.228	2.250	2.272	2.272
1.2.5.	Kacang Tanah (Ha)	923	932	942	951	960	970	970
1.2.6.	Kacang Hijau (Ha)	204	206	208	210	212	214	214
1.2.7.	Ubi Kayu (Ha)	6.462	6.527	6.592	6.658	6.724	6.792	6.792
1.2.8.	Ubi Jalar (Ha)	1.377	1.391	1.405	1.419	1.433	1.447	1.447
1.3.	Produktivitas tanaman pangan							
1.3.1.	Padi sawah (Kwintal/Ha)	30,74	31,05	31,36	31,67	31,99	31,31	32,31
1.3.2.	Padi ladang (Kwintal/Ha)	19.69	19.89	20.09	20.29	20.49	20.69	20.69
1.3.3.	Jagung (Kwintal/Ha)	28.78	29.07	29.36	29.65	29.95	30.25	30.25
1.3.4.	Kedelai (Kwintal/Ha)	11.54	11.66	11.77	11.89	12.01	12.13	12.13
1.3.5.	Kacang Tanah (Kwintal/Ha)	11.17	11.28	11.39	11.51	11.62	11.74	11.74

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
			Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	
1.3.6.	Kacang Hijau (Kwintal/Ha)	8.24	8.32	8.41	8.49	8.57	8.66	8.66
1.3.7.	Ubi Kayu (Kwintal/Ha)	118.17	119.35	120.55	121.75	122.97	124.20	124.20
1.3.8.	Ubi Jalar (Kwintal/Ha)	70.99	71.70	72.42	73.14	73.87	74.61	74.61
1.4.	Produksi tanaman pangan							
1.4.1.	Padi sawah (Ton per Hektar)	451.762	456.280	480.842	465.451	470.105	474.806	474.806
1.4.2.	Padi ladang (Ton per Hektar)	197.110	199.081	201.072	203.083	205.113	207.165	207.165
1.4.3.	Jagung (Ton per Hektar)	9.303	9.396	9.490	9.585	9.691	9.778	9.778
1.4.4.	Kedelai (Ton per Hektar)	2.494	2.519	2.544	2.370	2.595	2.621	2.621
1.4.5.	Kacang Tanah (Ton per Hektar)	1.031	1.041	1.052	1.062	1.073	1.084	1.084
1.4.6.	Kacang Hijau (Ton per Hektar)	168	170	171	173	175	177	177
1.4.7.	Ubi Kayu (Ton per Hektar)	76.361	77.125	77.896	78.675	79.462	80.256	80.256
1.4.8.	Ubi Jalar (Ton per Hektar)	9.776	9.874	9.972	10.072	10.173	10.275	10.275
1.5.	Luas Panen Tanaman Hortikultura							
1.5.1.	Buah-Buahan (Ha)	10.162	10.264	10.366	10.470	10.575	10.680	10.680
1.5.2.	Sayuran (Ha)	11.822	11.940	12.060	12.180	12.302	12.425	12.425
1.5.3.	Tanaman Hias (M2)	13.048	13.179	13.310	13.444	13.578	13.714	13.714
1.5.4.	Tanaman Obat (M2)	1.096.794	1.107.762	1.118.840	1.130.028	1.141.329	1.152.742	1.152.742
1.6.	Produksi Tanaman Hortikultura							
1.6.1.	Buah-Buahan (Kg)	1.746.931	1.764.401	1.782.045	1.799.865	1.817.864	1.683.042	1.683.042
1.6.2.	Sayuran (Kg)	313.768	316.905	320.074	323.275	326.508	329.773	329.773

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
1.6.3.	Tanaman Hias (Tangkai)	55.461	56.016	56.576	57.142	57.713	58.290	58.290
1.6.4.	Tanaman Obat (Kg)	2.519.515	2.544.710	2.570.157	2.595.859	2.621.817	2.648.035	2.648.035
1.7.	Populasi Ternak							
1.7.1.	Sapi Potong (Ekor)	75.098	76.598	77.747	78.913	80.097	81.298	81.298
1.7.2.	Kerbau (Ekor)	17.055	2.594	19.113	19.304	19.497	19.692	19.692
1.7.3.	Kambing (Ekor)	48.460	51.288	51.544	51.802	52.061	52.321	52.321
1.7.4.	Domba (Ekor)	1.816	6.187	3.203	3.219	3.235	3.251	3.251
1.7.5.	Babi (Ekor)	176.659	407.169	413.277	419.476	425.768	432.154	432.154
1.7.6.	Ayam Buras (Ekor)	4.556.987	9.844.092	9.975.863	10.075.622	10.176.378	10.278.142	10.278.142
1.7.7.	Ayam Ras Petelur (Ekor)	64.786	56.693	56.976	57.261	57.548	57.383	57.383
1.7.8.	Ayam Ras Pedaging (Ekor)	4.469.198	4.617.170	4.686.428	4.756.724	4.828.075	4.900.496	4.900.496
1.7.9.	Itik (Ekor)	291.789	458.134	462.715	467.342	472.016	476.736	476.736
1.8.	Produksi Ternak							
1.8.1.	Sapi Potong (Ton)	5.244	5.294	5.373	5.454	5.536	5.619	5.619
1.8.2.	Kerbau (Ton)	713	713	720	727	735	742	742
1.8.3.	Kambing (Ton)	725	726	730	733	737	741	741
1.8.4.	Domba (Ton)	480	480	782	485	487	490	490
1.8.5.	Babi (Ton)	2.577	2.580	2.619	2.658	2.698	2.738	2.738
1.8.6.	Ayam Buras (Ton)	5.250	5.260	5.313	5.366	5.419	5.474	5.474
1.8.7.	Ayam Ras Petelur (Ton)	436	437	439	441	444	446	446

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
1.8.8.	Ayam Ras Pedaging (Ton)	4.976	4.980	5.055	5.131	5.207	5.286	5.286
1.8.9.	Itik (Ton)	797	802	810	818	826	835	835
1.9.	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	5,14***	5,5	5,6	5,8	5,9	6,0	6,0
1.10.	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	3,86***	4,0	4,2	4,5	4,7	5,0	5,0
1.11	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kalteng (%)	4,29***	rata rata 4,0 persen per tahun					
1.12	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	28,2***	27	26	25	24	24	24
1.13	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	12,21***	12,50	12,75	13,00	13,25	13,5	13,5
1.14	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB****							
1.15	Cakupan bina kelompok petani****							
2.	Perkebunan							
2.1.	Peningkatan produktifitas perkebunan dari potensi produksi di lapangan (%)	75	15	14	19	20	20	85
2.2.	Penerimaan devisa ekspor per tahun dari komoditas perkebunan (US\$ Juta)	80	100	100	100	100	100	500
2.3.	Peningkatan jumlah SDM perkebunan berkualitas (%)	15	3	4	4	4	5	20

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
2.4.	peningkatan pendapatan petani kebun (Capaian rata-rata US\$/KK/Tahun)	1,500-2,000	400-800	400-800	400-800	400-800	400-800	2000-4000
2.5.	Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)	15,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000
2.6.	Peningkatan pertumbuhan sub sektor sektor perkebunan (%)	5,49***	6	6,2	6,5	6,8	6,8	
2.7.	Penumbuhan sentra sentra komoditas wilayah pengembangan perkebunan (jumlah sentra pengembangan perkebunan)	13	2	2	3	3	2	12
2.8.	Peningkatan Pemanfaatan Lahan Terlantar (Ha/Tahun)	150	150	150	150	150	150	750
3.	Kelautan dan Perikanan							
3.1.	Peningkatan Produksi perikanan budidaya (Ton)	23,659	34,962	50,729	79,625	118,484	130,209	130,209
3.2.	Peningkatan hasil Tangkapan dalam setiap upaya penangkapan (Ton)	101,999	103,264,30	105,069,90	106,867,00	108,443,05	110,069,69	110,069,69
3.3.	Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	35,72	36,08	36,44	36,80	37,17	37,55	37,55

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
3.4.	Peningkatan volume produk olahan hasil perikanan (Ton)	9,523	9,999,	10,499	11,024	11,575	13,311,	13,311,
3.5.	peningkatan produksi benih ikan (Juta ekor)	107,667	155,992	216,585	325,532	470,290	527,059	527,059
4.	Kehutanan							
4.1.	Penataan kawasan hutan (Jumlah peta penataan kawasan hutan)	-	4	4	4	4	4	20
4.2.	Pendataan sumberdaya hutan (jumlah dokumen)	-	2	2	2	2	2	2
4.3.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan (jumlah dokumen laporan)	27	50	50	50	50	50	50
4.4.	Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan (unit)	-	40	56	56	56	56	56
4.5.	Pengendalian pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan dari hutan alam (jumlah dokumen)	1	1	1	1	1	1	5
4.6.	Pembedayaan masyarakat local di sekitar kawasan hutan (orang)	30	30	30	30	30	30	150
4.7.	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (paket kegiatan)	1	1	1	1	1	1	5

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
			Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	
4.8.	Pencegahan, pengendalian dan penindakan <i>illegal logging</i> (frekuensi pengamanan hutan)	1	1	1	1	1	1	5
4.9.	Penghijauan dan reboisasi (jumlah batang pohon bibit)	-	5,320	20,000	25,000	30,000	40.000	120.320
4.10	Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan (jumlah orang)	-	40	40	40	40	40	200
5.	Pariwisata							
5.1	Kunjungan wisata	35,401	35,475	35,600	35,800	35,950	36,100	36,100
5.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	1,32	1,32	1,40	1,50	1,55	1,60	1,60
6.	Perdagangan							
6.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	21,4	22	22	22,5	23	23	23
6.2	Ekspor Bersih Perdagangan (US \$)	148,559,164	150,679,220	155,220,149	158,801,319	160,220,429	162,879,416	162,879,416
6.3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal****	25	25	30	30	30	30	30
7.	Perindustrian							
7.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	7,62	8,5	9,5	11	13	15	15
7.2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri****	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Pertumbuhan Industri, (unit)	5,649	5,789	5,999	6,279	6,629	7,049	7,049

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
			Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	
7.4	Cakupan bina kelompok pengrajin	393	300	350	382	410	475	1917
8.	Ketrasmigrasian							
8.1	Transmigran swakarsa (KK)	50	50	50	50	50	50	250
8.2	Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB (%)	10	10	20	20	20	30	30

Keterangan:

* : Data sampai Triwulan II-2010,

** : Data sampai Juli 2010,

*** : Data Tahun 2009

**** : Data tidak tersedia

C. Aspek Daya Saing Daerah

Pada aspek daya saing daerah penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup pada kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia, Penetapan indikator untuk keempat fokus tersebut adalah sebagaimana Tabel 9,3 berikut :

Tabel 9,3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah

No,	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
		Tahun 2010	Tahun2011	Tahun2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun2015	
I.	Kemampuan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita****	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita****	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Produktivitas total daerah****	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pertanian	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Nilai tukar petani (%)	103,73	105	106	107	109	110	110
II.	Fasilitas Wilayah/Infrastuktur							
1.	Perhubungan							
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan****	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (Orang/Barang)	119.513.879/ 8.545.183	1.170/200	2.370/400	3.570/600	4.770/1.700	5.970/3.400	119.519.849/ 8.548.583
2.	Penataan Ruang							
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	83,7	85	90	95	98	99	99
2.2.	Luas wilayah produktif (Juta Ha)	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5
2.3	Luas wilayah industri (Ha)	15	20	25	30	35	40	40

No,	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
		Tahun 2010	Tahun2011	Tahun2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun2015	
2.4	Luas wilayah banjir (Ha)	1,364,523	1,364,523	1,364,523	1,364,523	1,364,523	1,364,523	1,364,523
2.5	Luas wilayah kekeringan****	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Luas wilayah perkotaan (Ha)	289,000	296,225	303,630	311,220	319,000	326,975	326,975
3.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.1	Jenis dan jumlah bank dan cabang (Unit)	155	160	170	180	190	200	200
3.2	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit)	35	35	37	38	39	40	40
3.3	Jenis, kelas, dan jumlah restoran (Buah)	243	245	250	260	270	285	300
3.4	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel (Buah)	317	320	330	340	350	360	360
4.	Komunikasi dan Informatika							
4.1	Rasio ketersediaan daya listrik (%)	106	137	125	150	150	153	153
4.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	49,8	53,3	58,5	64,5	69,5	76	76
4.2a	Rasio desa berlistrik (%)	61,6	64,4	69,2	74,9	79,5	86,4	86,4
4.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	76,07	77	78	79	80	81	81
III.	Iklm Berinvestasi							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							

No,	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015
		Tahun 2010	Tahun2011	Tahun2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun2015	
1.1	Angka kriminalitas	3,154	2,902	2,670	2,456	2,260	2,079	2,079
1.2	Jumlah demo****							
1.3	Lama proses perijinan (Ijin/Hari)	7/37	7/37	7/37	7/37	7/37	7/37	7/37
1.4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (Perda/%; Retribusi Daerah/%)	7/109,23;3/99,88	7 /110;3/100	7 /112;3 /100	7 /114;3 /100	7/117;3 /100	7 /119;3/100	7 /119;3 /100
1.5	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (Perda)	-	-	-		-	1	1
1.6	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa (%)	30,04	33,49	36,94	40,40	43,85	47,30	30,04
IV.	Sumber Daya Manusia							
1	Ketenagakerjaan							
1.1	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	317	320	325	330	335	340	340
1.2	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	11,99	12,49	12,99	13,49	13,99	14,49	14,99
1.3	Rasio ketergantungan (%)	52	51,5	51	50,5	50	49,5	49,5

Keterangan:

- * : Data sampai Triwulan II-2010,
- ** : Data sampai Juli 2010,
- *** : Data Tahun 2009
- **** : Data tidak tersedia

BAB X

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana daerah Kalimantan Tengah akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2010-2015); bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Periodisasi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah ini disesuaikan masa jabatan kepala daerah terpilih, yakni 2010-2015.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2010 (Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005), serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

Selanjutnya RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode satu tahun.

A. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2011 hingga 2015. Sedangkan perencanaan pembangunan tahun 2016 mempergunakan RPJMD Transisi Tahun 2015 sebelum RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020 disusun, yang akan memuat visi,

misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan tahun 2015. Pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2016 berpedoman pada RPJMD Transisi Tahun 2015.

Program-program transisi disusun sebagai rancangan program indikatif satu tahun ke depan (2016) setelah periode RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah berakhir tahun 2015, dengan tujuan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 telah ditetapkan agenda pembangunan prioritas yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu kepemimpinan kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

1. Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kalimantan Tengah melalui pemantapan rencana penataan ruang Provinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.
2. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata.
3. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau.
4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat.
5. Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.
6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah.
7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah

Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 ini telah dilaksanakan dengan konsisten oleh lembaga perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh *stakeholders* dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah periode berikutnya.

Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan, dan kesehatan, perekonomian rakyat yang semakin berdaya, makin berkurangnya jumlah penduduk dan keluarga miskin, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus mampu mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang memiliki kepedulian terhadap sesama, berkualitas dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, dalam periode lima tahun ke depan, diharapkan kesenjangan atau disparitas antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju dapat berkurang secara signifikan, dan berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Program transisi tahun 2016 sudah barang tentu akan dirumuskan dengan tetap berusaha menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk periode selanjutnya, program pembangunan yang dikembangkan dapat lebih banyak berorientasi pada upaya memfasilitasi dan memberi berbagai kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata, dan peluang-peluang sosial (*social opportunities*) yang adil kepada masyarakat. Kemudahan ekonomi adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat terhadap berbagai sumber-sumber produksi dan pasar. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya meningkatkan kesempatan masyarakat melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal didukung kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta makin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2010-2015 ini dengan sebaik-baiknya.
2. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja (Renja-SKPD).
3. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Renstra-SKPD Kabupaten/Kota, harus memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015.
4. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan RPJMD Kabupaten/Kota.
5. Konsepsi prioritas dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 ini baik mengenai aspek program maupun wilayah, hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-prioritas.

6. Konsepsi deskripsi program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJMD kabupaten/kota, maka Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Kabupaten/Kota.

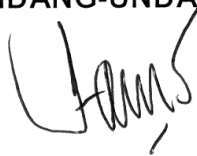
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Ub. KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**



AMIR HAMZAH, SH.